

**Model dan Desain
Negara Kesejahteraan
(*Welfare State*)**

Budi Setiyono, Ph.D

@Budi Setiyono

Hak Cipta Terlindungi

Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penulis

Perpustakaan Nasional Indonesia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Budi Setiyono

Model dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) / Budi Setiyono, ISBN: 978-979-097-548-4

1. *Welfare State* 2. *Social Insurance* 3. *Kesejahteraan Sosial* 4. *Jaminan Sosial I*.

Jenis Tipe Teks: Garamond, Size 12

Dicetak oleh: UPT Percetakan UNDIP.

Diterbitkan oleh: Undip Press

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan segala limpahan rahmatNya, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan buku ini didasarkan ada niat untuk memberikan sumbang saran kepada semua pihak dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi bangsa dan negara tercinta.

Buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan referensi bagi para pelajar dan mahasiswa dalam belajar, khususnya dalam bidang kajian kebijakan kesejahteraan sosial. Di samping itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pengambil kebijakan dan pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan penulis menyangkut ketersediaan waktu. Oleh kerena itu kami berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Pada kesempatan penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga penulis, para kolega di Universitas Diponegoro, terutama Pak Rektor Prof. Yos Johan Utama, Para Wakil Rektor: Prof. Zaenuri, Dr. Darsono, dan Prof. Ambaryanto, serta Ratih Mega Swari, Malisa dan Yolanda Febrilia yang telah banyak membantu penelitian dan penulisan buku ini.

Semarang, Desember 2018
Budi Setiyono

*Untuk Tuhanku,
Sebagai tanda bakti bagi
orang tuaku,
keluargaku,
bangsa dan negaraku tercinta...*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
1. Pendahuluan	1
Hakekat Pembentukan Negara.....	9
2. Konsep dan Definisi	18
Apakah Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)?	18
Model dan Desain.....	28
Hubungan dengan Ekonomi.....	32
Welfare dan Kemiskinan	36
Ketenagakerjaan dan Welfare State	39
Tantangan Baru Welfare State	53
3. The Nordics (Scandinavian) Model	56
Sejarah Terbentuknya Model Nordik.....	61
Aspek-aspek kebijakan kunci	66
Kebijakan Ekonomi Makro	67
Skema Perpajakan.....	70
Pengurangan Kemiskinan	74
Pasar Tenaga Kerja.....	76
Sistem Kesejahteraan.....	79
4. Model 'Bismarckian Welfare' di Jerman	92
Sejarah Perkembangan.....	94
Kebijakan Kunci.....	97
Program Kesejahteraan	100
5. Model 'Beveridge System' di Inggris	110

Sejarah dan Latarbelakang.....	112
Pajak dan Asuransi Sosial	115
Pendidikan dan Ketenagakerjaan.....	116
Kerangka Sistem Kesejahteraan.....	118
6. Sistem Welfare di Australia	122
Sejarah Perkembangan.....	127
Sistem Perpajakan.....	128
Kebijakan Tenaga Kerja	134
Kerangka Sistem Kesejahteraan.....	137
7. Sistem Welfare di Kanada.....	156
Sejarah Perkembangan.....	157
Sistem Perpajakan.....	164
Kebijakan Pendidikan dan Tenaga Kerja.....	167
Skema Kesejahteraan Sosial.....	169
8. Model <i>Social Network</i> Jepang	174
Proses Sejarah Sistem Kesejahteraan	176
Skema Pendidikan dan Ketenagakerjaan.....	178
Kerangka Perpajakan.....	184
Struktur Kerangka Kesejahteraan	187
9. Model 'Kiwi Welfare' Selandia Baru	191
Sejarah dan Perkembangan.....	193
Pendidikan dan Ketenagakerjaan.....	197
Pajak sebagai Sumber Pendanaan.....	202
Kerangka Kesejahteraan.....	204
10. Model Kesejahteraan Malaysia.....	210
Sejarah Social Welfare Malaysia.....	211

Kerangka Sistem	216
11. Liberal Welfare Amerika	221
Sejarah dan Proses Pengembangan.....	222
Pendidikan dan Ketenagakerjaan.....	228
Skema Pajak.....	233
Kerangka Kesejahteraan.....	235
12. Penutup: Prospek Indonesia	244
Jaminan Kesehatan Nasional.....	245
Jaminan Ketenagakerjaan	250
DAFTAR PUSTAKA	259
Index	270

Negara adalah sebuah keluarga besar dimana warga negara--siapapun mereka-- harus diperlakukan sebagai anak-anak bangsa secara adil. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup-mati sendiri, melainkan harus dilindungi, dijaga martabatnya, dan diberikan jaminan hidup sejahtera oleh negara.

(Penulis)

1. Pendahuluan

“Sejahtera” adalah merupakan tujuan hidup dari semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaan. Semua negara di dunia ini dibentuk dengan tujuan utama untuk meraih kesejahteraan bagi para penduduknya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, misalnya menempatkan frasa *"Life, Liberty, and the pursuit of Happiness"* sebagai tujuan didirikannya negara tersebut. Frasa ini memberikan jaminan tentang “hak yang tidak dapat dicabut lagi” (*unalienable rights*) yang dinyatakan telah diberikan kepada semua manusia oleh Pencipta mereka, dan pemerintah diciptakan untuk melindungi hak-hak tersebut. Sama halnya, dalam Pasal 2 konstitusi Perancis disebutkan bahwa “Tujuan dari setiap asosiasi politik adalah perlindungan hak-hak manusia yang alami dan tidak dapat dilanggar. Hak-hak itu adalah kebebasan, properti, keamanan dan perlawanan terhadap penindasan”. Sedangkan dalam konstitusi Inggris disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara sebagai: *"To eradicate poverty and want throughout the nation"* (menghapus kemiskinan dan kekurangan di seluruh negeri).

Begitupun, Indonesia adalah juga negara yang didirikan melalui perjuangan panjang segenap anak bangsa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Konstitusi negara Indonesia secara jelas menyatakan negara didirikan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*public prosperity, social welfare*). Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945:

...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

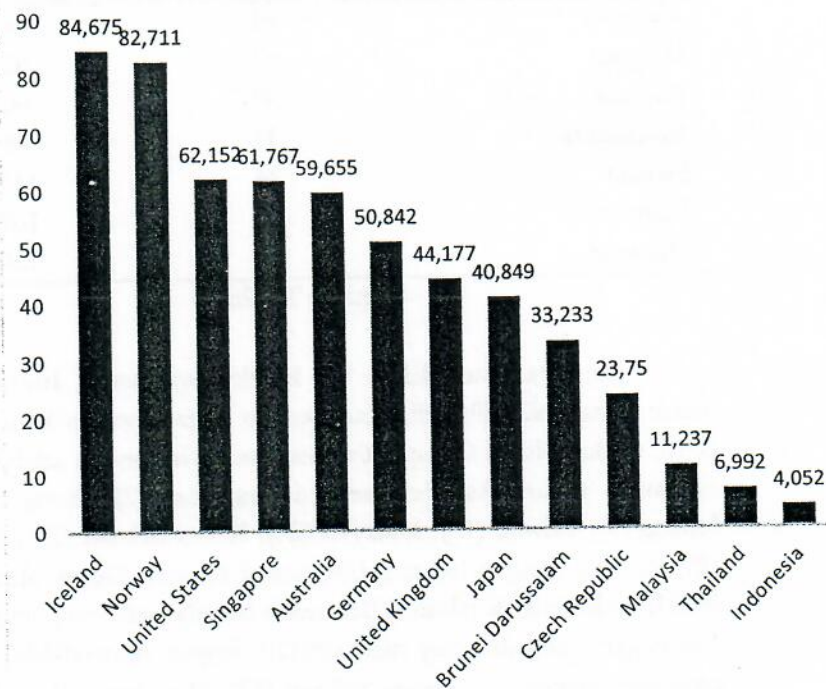
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Usaha untuk mendirikan negara Indonesia dengan mengusir penjajahan bangsa-bangsa lain pada intinya merupakan perwujudan tekad segenap bangsa Indonesia untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin, bebas dari ketertindasan bangsa lain dan juga kemiskinan yang diakibatkan oleh ketertindasan itu. Gerakan-gerakan sosial-politik yang terjadi pasca kemerdekaan (tahun 1960an, 1970an, ataupun gerakan reformasi akhir 1990an) pada hakekatnya juga lahir sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan hakiki sebagaimana dicita-citakan oleh proklamasi.

Sudahkan kita sejahtera? Sayangnya, capaian berbagai tahap perjuangan bangsa kita belum banyak menyentuh substansi keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Kita seringkali terlena dengan capaian-capaian formal yang tidak berkorelasi dengan cita-cita hakiki, serta lupa untuk mengisi era kemerdekaan, era pasca gerakan 66, maupun pasca gerakan reformasi 1998 dengan konsep, ide, gagasan, dan system, dan program pembangunan yang handal untuk meraih kesejahteraan lahir-batin. Fakta empiris menunjukkan bahwa bangsa kita masih tertinggal dari bangsa lain dalam berbagai indikator pembangunan. Walaupun kita telah 73 tahun merdeka, misalnya, angka pendapatan per kapita (GDP per capita) kita baru mencapai \$ 4,052 atau sekitar Rp. 56.728.500 per tahun, masih jauh dibawah rata-rata dunia yang sudah mencapai \$ 11,727 (IMF 2018).

Perolehan tersebut masih jauh tertinggal, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN sekalipun. Menurut data International Monetary Foundation (IMF 2018) posisi Indonesia berada dibawah Malaysia yang sudah mencapai \$ 11,237, Brunei Darussalam sebesar \$ 33,233, dan Singapura sebesar \$ 61,767. Pendapatan tersebut bahkan berada di bawah Negara yang baru merdeka seperti Bosnia Herzegovina \$ 5,806 dan Czechnya \$ 23,750.

Tabel 1.1. GDP Per Kapita di Beberapa Negara 2018



Sumber: IMF (2018)

Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan pahit bahwa negara kita masih diselimuti oleh persoalan korupsi yang tidak kunjung reda. Data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2017, data dari Transparency International (TI) juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, dengan skor 37, masih sangat terpuruk: menduduki posisi sebagai bangsa-bangsa terkorup pada ranking 96 dari 180 negara yang disurvei. Rekor ini praktis tidak banyak berubah dari masa Orde Baru yang sudah mencapai skor 2,7 (27) pada tahun 1997. Bahkan Indonesia saat ini juga menduduki peringkat terkorup diantara negara ASEAN, kecuali Filipina, Vietnam dan Myanmar.

Tabel 1.2. Skor CPI Negara-Negara ASEAN 2017

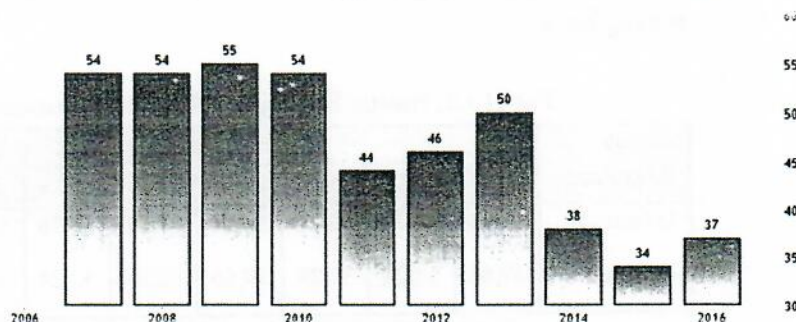
<i>Negara</i>	<i>Skor CPI</i>	<i>Peringkat</i>
<i>Singapura</i>	84	6
<i>Malaysia</i>	47	62
<i>Thailand</i>	37	96
<i>Indonesia</i>	37	96
<i>Filipina</i>	34	111
<i>Vietnam</i>	35	107
<i>Myanmar</i>	30	130

Sumber: TI (2017)

Sementara itu, dalam hal Indeks daya saing, Indonesia juga masih lemah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Di tahun 2016, angka Global Competitiveness Index Indonesia adalah 37, jauh di bawah negara Asia lain seperti Singapore (2), Hong Kong (7), Jepang (9), Taiwan (12), Malaysia (24), Korea Selatan (25), dan China (29). Segaris dengan hal tersebut, posisi Human Development Index (HDI) Indonesia di tahun 2015 masih berada pada rangking 111 dari 188 negara yang disurvei oleh UNDP dengan skor 0.0684, jauh dari rangking Jepang (10), Korea Selatan (12), Hongkong (13), Singapore (18), bahkan juga kalah dari negara berkembang lain seperti Brunei Darussalam (30), Malaysia (64), Libya (64), dan Kazakhstan (69).

Pada tataran empirik, pencapaian cita-cita kesejahteraan bagi seluruh warga negara juga masih dalam tanda tanya besar, mengingat masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan pekerja di sektor informal. Sampai dengan bulan Maret tahun 2015, data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk sangat miskin dengan penghasilan dibawah \$2 per hari mencapai angka sekitar 27,73 juta orang (11,22%) dari jumlah penduduk (BPS 2015). Bahkan jumlah penduduk miskin menurut data Penerima Bantuan Iuran (BPI) dari program BPJS 2014 jauh lebih banyak yakni sebanyak 92 juta jiwa atau lebih dari 35% dari jumlah penduduk (*Antaranews*, 6 Mei 2016).

Tabel 1.3. Global Competitiveness Index Indonesia



Sumber: Tradingnomics (2016)

Terlebih lagi, data BPS setiap tahun menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk mencari nafkah di sektor informal (lihat tabel 4), yang menandakan bahwa sebagian besar dari mereka harus menjalani kehidupan tanpa perlindungan yang memadai. Siapakah penduduk yang bekerja pada sektor informal itu? Menurut National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (2007), pekerja sektor informal adalah: *“those 'who do not have employment security, work security and social security”*. Singkatnya, mereka adalah orang yang hidupnya tidak memiliki perlindungan penuh dari negara, tidak memiliki kepastian pekerjaan, tidak memiliki kepastian kerja, dan tidak memiliki perlindungan sosial (seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, atau pensiun). Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sangat rentan karena tidak memiliki stabilitas penghasilan dan perlindungan terhadap keadaan darurat: seperti apabila sakit, mengalami kecelakaan, atau abnormalitas hidup lainnya. Kehidupan mereka akan mudah kolaps, (dan selanjutnya) tidak produktif, dan tidak mampu memenuhi hajat hidup pada level dasar sekalipun (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Tergolong dalam kelompok informal ini misalnya adalah mereka yang berprofesi sebagai: pemulung, gelandangan, tukang tambal ban, tukang becak, petani, nelayan, pedagang kaki lima (PKL), dan (dalam keadaan

tertentu) termasuk juga kaum buruh lepas seperti tukang batu dan tukang kayu.

Tabel 1.4. Status Pekerjaan Rakyat Indonesia

Status Pekerjaan	Prosentasi (%) Pekerja							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Informal	60,14	65,76	62,71	60,34	59,81	57,76	58,28	58,35
Formal	39,86	34,24	37,29	39,66	40,19	42,24	41,72	41,65

Sumber: Kompilasi data BPS (2010-2017)

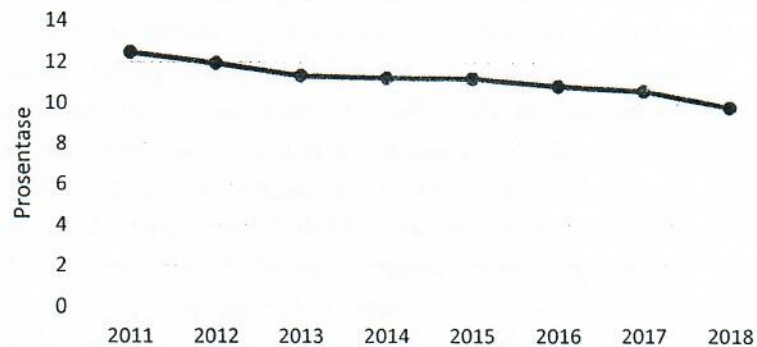
Kelompok ini harus mengatasi berbagai persoalan hidup (termasuk persoalan kebutuhan dasar) sendirian tanpa banyak campur tangan negara. Terlebih bila dikaitkan dengan fakta bahwa pelayanan publik (seperti kepolisian, keimigrasian, rumah sakit, air bersih, sekolah, kebersihan, listrik) seringkali berkorelasi dengan uang dan pungutan, maka mereka tidak mampu mengakses pelayanan publik tersebut dengan utuh.

Secara umum kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini masih didominasi oleh permasalahan “konvensional” seperti adanya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, keteringgalan, dan ketunaan sosial. Selain daripada itu, terdapat pula beberapa permasalahan tambahan yang terkait dengan kesejahteraan seperti konflik, kesenjangan sosial, dan bencana alam yang perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Masalah kemiskinan adalah penyebab dan juga pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah sebesar 25,95 juta orang (atau 9,82 persen dari jumlah penduduk) (BPS 2018). Walaupun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi, kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena

mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural.

**Grafik 1.1. Presentase Penduduk Miskin Indonesia
(per Maret tahun 2011-2018)**



Sumber: BPS (2011-2018)

Selain itu, terdapat pula sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, khususnya berkaitan dengan adanya bencana alam dan konflik sosial. Harus dicatat bahwa Indonesia secara geografis berada pada area ring of fire yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana yang berkaitan dengan aktifitas vulkanis, seperti letusan gunung api dan gempa bumi.

Data-data tersebut menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan apa sebenarnya persoalan pokok yang menyebabkan negara Indonesia tidak segera bangkit dari keterpurukan? Mengapa berbagai tahapan perjuangan bangsa ini belum berhasil mewujudkan kesejahteraan? Mengapa bangsa ini justru tertinggal dibanding bangsa-bangsa lain, bahkan di tingkat ASEAN sekalipun? Adakah suatu resep fundamental yang bisa menjadi daya dorong percepatan kesejahteraan?

Upaya membuat perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya negara. Sampai dengan akhir masa Orde Lama, usaha tersebut sayangnya hanya difokuskan untuk menyediakan bantuan dan asuransi sosial bagi sektor perburuhan dan aparatur negara. Pendekatan yang dilakukan bersifat *top-down*, untuk memperkuat birokrasi¹, serta mengakomodir aspirasi dari kelompok buruh yang saat itu memiliki pengaruh politik cukup signifikan.² Memasuki era Orde Baru, perlindungan sosial masih dikembangkan terbatas dan fragmentatif, sehingga masih berfokus pada aparatur negara dan buruh, belum menjangkau semua rakyat Indonesia.³ Pada masa pasca reformasi usaha lebih dikembangkan dalam beberapa paket kebijakan, seperti program padat karya, beras miskin, bantuan langsung tunai, dan kartu Indonesia pintar. Akan tetapi, semua program tersebut pada umumnya masih bersifat *ad-hoc* (temporer), karitatif, dan tidak memiliki keterkaitan secara mekanistik dengan keseimbangan hak dan kewajiban.

¹ Perlindungan sosial bagi aparatur negara (PNS dan militer) diatur dalam PP No. 11 tahun 1956 tentang *Pembelanjaan Pensiun*, PP No. 9 Tahun 1963 tentang *Pembelanjaan Pegawai Negeri*, dan PP No. 10 Tahun 1963 tentang *Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri (TASPEN)*.

² Perlindungan sosial bagi buruh dapat dilihat dari UU No. 33 / 1947 tentang *Keselamatan Kerja*, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 / 1952 tentang *Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh*, PMP No. 15 / 1957 tentang *Yayasan Sosial Buruh*, dan PMP No. 5 tahun 1964 tentang *Yayasan Dana Jaminan Sosial*.

³ Pada saat tersebut, sosial yang tersedia diantaranya adalah Asuransi Kesehatan (ASKES) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk militer/ABRI, Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri (TASPEN) sebagai tabungan pensiun dan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) untuk buruh yang terdaftar.

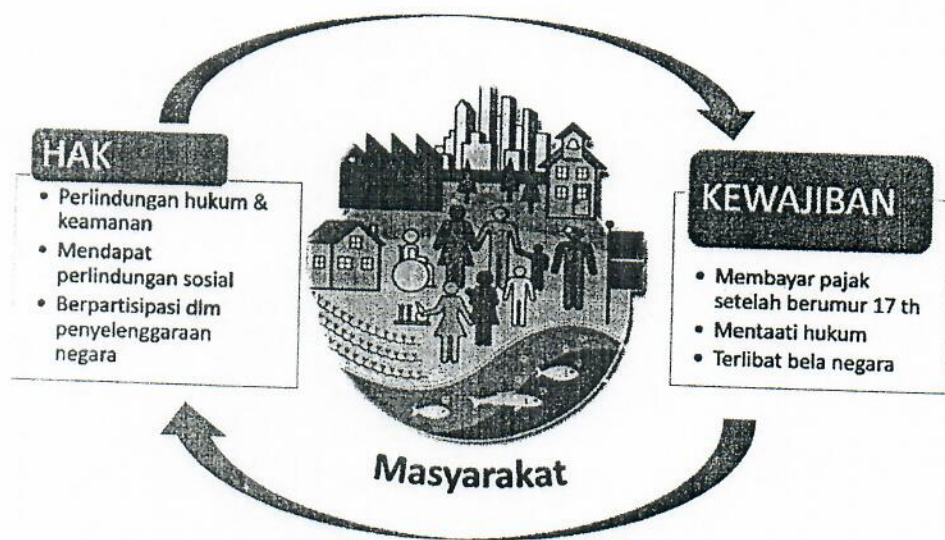
Hakekat Pembentukan Negara

Dalam perspektif teori kontrak sosial, sebuah negara pada hakekatnya didirikan untuk menjadi rumah bersama secara adil bagi segenap anggota/warganya. Menurut beberapa filosof seperti Plato, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau, suatu negara adalah hasil dari perjuangan berbagai elemen yang ada pada sebuah komunitas dan berujung pada sebuah kontrak sosial untuk hidup bersama dalam suatu sistem yang disepakati bersama. Mereka mengikatkan diri dalam “sebuah kontrak” dengan tujuan untuk menggapai cita-cita kesejahteraan bersama, dengan membagi peran diantara mereka secara adil (lihat misalnya Gauthier 1990; Nozick 1974). Negara dilihat sebagai satu kesatuan integral laksana keluarga besar (*great family*) yang terikat dalam satu kesatuan sistem gotong-royong sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang terintegrasi (*integrated society*).

Dalam kaitan ini, aturan dasar yang perlu diperhatikan adalah adanya keterkaitan yang bersifat langsung antara kewajiban (*obligations*) dan hak (*rights*) dari setiap warga negara. Kewajiban berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan oleh warga negara, yang minimal meliputi tiga hal, yakni: 1) membayar pajak, 2) melakukan bela negara, dan 3) mentaati hukum. Sedangkan hak berkaitan dengan jaminan dari negara untuk memberikan perlindungan/pelayanan kepada setiap warga negara sepanjang mereka telah melaksanakan kewajiban, yang setidaknya juga meliputi tiga hal, yakni: 1) mendapatkan jaminan/perlindungan sosial, 2) mendapatkan perlindungan hukum, dan 3) berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Kedua elemen tersebut bersifat resiprokal (timbal balik) yang kondisional, yakni: hak diberikan manakala kewajiban ditunaikan, dan hak dicabut manakala kewajiban diabaikan. Dengan demikian, rakyat memiliki kepastian dan jaminan untuk hidup layak/sejahtera dari negara ketika mereka telah menjalankan kewajiban yang ditetapkan. Sebaliknya, mekanisme ini juga mendorong kehidupan yang tertib dan adil, dan dapat

mengurangi kecenderungan orang melanggar hukum atau bertindak a-sosial.

Gambar 1.1. Konsep *Great Family (Integrated Society)*



Sumber: diolah penulis

Membayar pajak pada prinsipnya adalah kewajiban setiap warga negara yang telah dewasa (berumur 17 tahun). Hal ini merupakan perwujudan kongkrit dari konsepsi *citizenship* (kewarganegaraan). Seseorang dapat menyebut dirinya sebagai "warga negara" apabila dia ikut serta / berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dalam wujud memberikan "iuran" bagi anggaran yang dibutuhkan, bukan semata-mata karena dia lahir di negara tersebut. Tentu saja, skema perpajakan diberlakukan berbeda-beda di setiap negara, akan tetapi secara umum negara kesejahteraan menerapkan skema pajak progresif, dimana semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula prosentase pajak yang harus dibayar. Dengan

demikian, terdapat azas gotong royong dimana warga negara yang mampu bisa membantu warga yang tidak mampu.

Sama halnya dengan membayar pajak, **melakukan bela negara** adalah juga kewajiban setiap warga negara yang telah berumur 17 tahun. Pada prinsipnya, bela negara adalah sebuah konsep yang dikonstruksikan oleh perangkat perundangan dan kebijakan suatu negara tentang bentuk patriotisme individu, kelompok, atau seluruh komponen, dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dimaksudkan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak musuh yang dapat mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan penduduk. Bentuk bela negara yang bersifat wajib bisa memiliki bentuk yang berlainan. Ada negara yang mewajibkan wajib militer, kerja sosial, atau kewajiban lain yang ditetapkan undang-undang.

Kemudian, **mentaati hukum** harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa pandang umur. Bagaimanapun, suatu negara dapat hidup dalam suatu keteraturan bila diatur dalam suatu sistem hukum yang ditaati oleh setiap warganya. Ketaatan pada hukum memiliki implikasi keterikatan warga negara kepada hasil kesepakatan-kesepakatan bersama yang ditempatkan diatas subyektifitas pribadi. Artinya setiap orang tidak boleh berlaku dan bertindak sewenang-wenang atau menurut kemauan sendiri secara sembrono tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Hal ini menyangkut persoalan yang paling sederhana, seperti tidak boleh ngebut melebihi ketentuan di jalan, buang sampah sembarangan, parkir tidak pada tempatnya, berjualan di trotoar, atau mencoret-coret fasilitas publik, sampai pada hal yang lebih besar seperti tidak boleh korupsi, menyalahgunakan wewenang, menipu, menciderai atau membunuh orang lain.

Ketika seorang warga negara telah melaksanakan tiga kewajiban di atas, maka pada gilirannya negara harus memberikan hak.

Hak itu diantaranya adalah **mendapatkan jaminan/perlindungan sosial** agar mereka selalu hidup di atas garis normal (diatas batas kelayakan hidup sejahtera) dan tidak perlu takut menghadapi disrupsi dalam kehidupan. Batas kelayakan hidup sejahtera pada prinsipnya berkaitan dengan ketercukupan terhadap lima kebutuhan dasar, yakni: sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Ini artinya setiap warga negara harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mereka mendapatkan jaminan dan perlindungan ketika secara personal tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahkan dalam konsepsi Keynesian, kebutuhan dasar juga mencakup jaminan ketersediaan pekerjaan, sehingga tidak ada warga negara yang dibiarkan menganggur. Negara mengupayakan keseimbangan *demand* dan *supply* dalam pasar tenaga kerja, yakni pada sisi *demand*, pemerintah mengupayakan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pada sisi *supply* pemerintah mengupayakan agar setiap warganya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Hak yang kedua adalah **mendapatkan perlindungan hukum**. Artinya negara harus menjamin agar setiap warga negara dapat hidup bebas dan mendapatkan keadilan. Sepanjang melaksanakan kewajiban, warga negara tidak boleh dizalimi, dianiaya, dan dirampas haknya oleh siapapun sehingga negara harus hadir menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dalam konteks ini, negara memberikan tugas kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk menegakkan hukum, untuk melindungi manusia dan properti, dan untuk mencegah kejahatan dan gangguan sipil. Di negara maju, hak perlindungan hukum terhadap warga negara bahkan dilakukan sampai ke luar negeri. Negara hadir bilamana terdapat warganya yang terkena persoalan hukum di negara lain.

Ketiga adalah hak **berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara**. Hak ini berkaitan dengan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan peranan dan pelayanan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Sepanjang memenuhi ketentuan, warga negara diperkenankan menjadi pegawai

negeri, politisi, anggota komisi yang dibayar anggaran negara, atau juga ikut dalam pekerjaan-pekerjaan publik. Mereka juga berhak menyuarakan aspirasi dalam pemilu dan ikut memberi masukan masukan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang sedang disusun dalam suatu mekanisme yang transparan. Rakyat juga diperkenankan menagih / komplain manakala instansi pemerintah tidak memberikan standar pelayanan yang terbaik. Di negara maju, protes rakyat biasanya disalurkan melalui Ombudsman dan satuan pengawas internal. Bahkan bila protes itu bersifat komunal (lebih dari seorang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan UU), maka protes bisa disalurkan ke lembaga parlemen yang biasanya dapat memanggil kepala instansi untuk diklarifikasi dan diberi sanksi bila terdapat unsur kelalaian.

Konsep seperti ini sejalan dengan paham integralistik, sebagaimana diperkenalkan oleh Prof. Dr. Supomo dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 30 Mei 1945, yang menyatakan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan (Marwati dan Notosusanto 1984: 22). Pemikiran Soepomo mengisyaratkan bahwa semua warga negara memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Pemikiran yang sangat kental dengan nuansa hak asasi manusia ini, memiliki ide yang simetris dengan apa yang dituliskan dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Lebih lanjut, pola yang sejalan dengan pemikiran ini juga termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yang dibuat pada tahun 1966.

Negara menurut paham integralistik adalah merupakan susunan masyarakat yang integral, dan anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Ia adalah merupakan keluarga besar (*great family*) atau masyarakat besar (*great society*) dimana seluruh anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang saling terkoneksi satu sama lain untuk mewujudkan kesejahteraan

bersama. Dalam suatu keluarga besar, anak-anak bangsa terikat dalam suatu system gotong royong: pada satu sisi, mereka tidak boleh hidup seenaknya sendiri melainkan harus melaksanakan dan menunaikan kewajiban-kewajiban asasi terhadap negara; pada sisi lain, mereka juga harus mendapatkan hak dan perlindungan asasi dari negara.

Paham Integralistik merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong. Konstitusi kita menjelaskan bahwa tujuan negara, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, adalah:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”.

Pernyataan tersebut jelas menegaskan bahwa negara berperan sentral dalam mengatur tata kelola hidup. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak bangsanya hidup dan berjuang sendiri dalam memperjuangkan cita-cita hidup, melainkan harus dilindungi, dimajukan, dan dicerdaskan secara kolektif oleh (dengan bantuan) negara.

Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa tujuan akhir pembentukan negara Indonesia adalah memajukan/mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*), bukan kesejahteraan individual. Dengan demikian, frame spirit penyelenggaraan negara Indonesia, sesuai dengan cita-cita nasional tersebut, adalah “negara kesejahteraan” (*welfare state*).

Dalam pandangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan integralistik, negara adalah merupakan “*great family*” atau “*great society*” (keluarga/masyarakat besar) yang bagaikan satu organisme tunggal, dimana tiap warganya harus hidup saling tolong-menolong, melaksanakan kewajiban, serta menerima hak yang ditetapkan negara

secara adil (lihat Gambar 1). Konsep ini harus diimplementasikan dalam rancang bangun sistem hukum dan kebijakan negara agar supaya termanifestasikan secara riil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan kewajiban harus selalu beriringan dengan pemberian hak agar supaya warga negara tidak merasa sekedar dieksploitir oleh pemerintah. Undang-undang dan kebijakan negara harus mengatur bahwa setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban asasi dan, atas pelaksanaan kewajiban itu, negara memberikan hak yang bersifat timbal-balik (*reciprocal*) kepada warganya.

Kegagalan perwujudan *welfare state* dan paham integralistik dalam pengelolaan negara juga tercermin oleh fakta bahwa negara kita belum memiliki system keseimbangan kewajiban dan hak (*obligations and rights*) bagi warga negara yang terkelola dalam satu kesatuan yang konektif dan resiprokal. Negara belum menyediakan perangkat untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan kewajiban dengan baik, maka akan diberikan hak secara penuh. Bahkan negara belum mendefinisikan secara pasti apa saja kewajiban warga negara dan apa saja hak yang akan mereka peroleh apabila melaksanakan kewajiban.

Akibat ketiadaan system keseimbangan ini, maka setiap orang seolah dapat hidup tanpa ikatan dan batasan yang kuat sebagai warga negara. Warga negara tidak diatur dalam tata kelola yang memungkinkan adanya *incentive* dan *disincentive*, atau *reward* dan *punishment*. Walaupun mereka diwajibkan membayar pajak dan taat hukum, misalnya, tidak ada keterkaitan pelaksanaan kewajiban itu dengan hak yang akan diberikan negara secara jelas. Sebagai akibat dari permasalahan ini, muncul berbagai komplikasi sosial, termasuk diantaranya:

Pertama, lemahnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Warga negara merasakan kehadiran negara hanya sebagai beban dan ancaman, sehingga acuh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Ketaatan dan kesadaran bela negara bersifat artifisial, hanya sebatas formalitas (seperti menghadiri upacara) atau

menghindari sanksi (seperti hukuman berupa pidana, tilang, denda, dan sebagainya) —bukan atas kesadaran substantif untuk hidup dalam ketertiban.

Kedua, muara dari ketiadaan rasa memiliki ini adalah kecenderungan untuk merendahkan dan meremehkan hukum. Hal itu terlihat, misalnya, dalam bentuk kecenderungan massif warga yang membuang sampah sembarangan, PKL yang menggelar tempat usaha di tempat terlarang, pengemudi yang ugal-ugalan dan parkir di sembarang tempat, demonstrasi yang merusak fasilitas publik, pejabat yang korupsi, masyarakat yang menebang hutan secara ilegal, pengusaha yang membuang limbah ke sungai, atau nelayan yang mencari ikan dengan racun atau bom.

Ketiga, lemahnya rasa percaya diri. Karena masyarakat hidup tanpa proteksi negara yang cukup ditambah dengan lemahnya keterikatan dalam system, maka mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini tercermin misalnya dari rendahnya prosentasi jumlah wirausahawan di Indonesia. Saat ini, data dari Kementrian Koperasi dan UKM menunjukkan prosentase jumlah wirausahawan kita hanya 3,1%, kalah jauh dari Malaysia yang mencapai 4% persen, Thailand 4,1%, apalagi dengan Singapura 7% (*Pikiran Rakyat*, 11 Maret, 2017). Terlepas dari masih kurangnya modal dan keterampilan, keengganan warga Indonesia untuk terjun sebagai wirausaha menunjukkan bahwa mereka tidak yakin untuk mampu mengatasi tantangan dalam berusaha, dan lebih memilih profesi yang “aman” seperti menjadi pegawai negeri.

Oleh karenanya konsep negara kesejahteraan dan integralistik harus dilaksanakan secara konsisten. Negara harus mengatur bahwa setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban asasi dan, atas atas pelaksanaan kewajiban itu, negara memberikan hak yang bersifat timbal-balik (*reciprocal*) kepada warganya. Secara sederhana, system intergratif yang perlu dibangun untuk mewujudkan konsep negara integralistik dan negara kesejahteraan harus memungkinkan adanya

pelaksanaan kewajiban asasi yang disertai oleh pemenuhan hak asasi bagi warga negara.

Untuk tujuan itu, buku ini akan memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana kita dapat menyusun strategi menggapai kesejahteraan dengan mempelajari model dan desain negara kesejahteraan yang telah dipraktekkan di berbagai negara.

2. Konsep dan Definisi

"Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it."
— Ronald Reagan

Apakah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)?

Apakah yang dimaksud dengan welfare? Secara umum istilah ini mengacu kepada "*well being*" atau kehidupan yang baik —berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. Dalam pengertian yang sederhana, *welfare state* didefinisikan sebagai: *A system in which the government undertakes the chief responsibility for providing for the social and economic security of its population, usually through unemployment insurance, old age pensions, and other social-security measures; A social system characterized by such policies* (Sistem di mana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya) (Collins English Dictionary, 2000). Dalam definisi yang lain: *"state measures for the provision of key welfare services --often confined to health, housing, income maintenance and personal social services* (tindakan negara untuk penyediaan layanan kesejahteraan utama --sering terbatas pada kesehatan, perumahan, pemeliharaan pendapatan dan layanan sosial pribadi)." (Pierson, 1998), yakni sebuah sistem sosial dimana negara memegang tanggung jawab

utama untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, seperti dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengaman sosial lainnya. Dalam pengertian yang lebih panjang, Briggs (1961) mengemukakan:

A 'Welfare State' is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of market forces in at least three directions – first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or property; second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain social contingencies (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crises; and third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services. ('Negara Kesejahteraan' adalah sebuah negara di mana kekuasaan yang terorganisasi sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) dalam upaya untuk memodifikasi permainan kekuatan pasar dalam setidaknya tiga arah - pertama, dengan menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga terlepas dari nilai pasar dari pekerjaan atau properti mereka; kedua, dengan mempersempit tingkat ketidakamanan dengan memungkinkan individu dan keluarga untuk memenuhi kontingensi sosial tertentu (misalnya, penyakit, usia tua dan pengangguran) yang menyebabkan krisis individu dan keluarga; dan ketiga, dengan memastikan bahwa semua warga negara tanpa perbedaan status atau kelas ditawarkan standar terbaik yang tersedia dalam kaitannya dengan berbagai layanan sosial tertentu yang disepakati) (h. 222).

Dalam definisi yang terbatas, welfare merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dengan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat. Dalam konteks ini, salah satu pilar pokok yang menyokong perwujudan kesejahteraan adalah kesehatan yang baik.

Oleh karena itu, kesehatan dan kesejahteraan merupakan hal yang saling terkait erat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan” (WHO 1948). Definisi ini mengakui bahwa berada dalam 'kesehatan yang baik' terkait dengan memiliki kesejahteraan positif, dan bahwa, sebaliknya, status kesehatan terkait erat dengan status kesejahteraan individu. Baru-baru ini, WHO mendefinisikan kesehatan mental positif sebagai “keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan produktif, dan mampu membuat kontribusi kepada komunitasnya” (WHO 2001). Dengan demikian, definisi ini mengakui peran mendasar dari kontribusi dan keterlibatan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, melainkan juga berkaitan dengan adanya penghargaan, kebebasan, pengakuan, dan perlindungan dari negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib menjauhkan warganya dari kemiskinan, yakni manakala individu, keluarga dan kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat di mana mereka berasal.

Dalam kaitan ini, wujud dari sistem dalam *welfare state* terdiri dari dua jenis kebijakan pemerintah, yakni: (i) bantuan tunai kepada rumah tangga, termasuk asuransi wajib, pendapatan (*income insurance*) dan (ii) subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (*human services*), seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelayanan hari tua (*old-age care*). Dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan juga dapat mencakup intervensi pemerintah terhadap berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat, termasuk dalam hal regulasi harga (seperti kontrol sewa rumah dan dukungan harga pertanian), kebijakan

perumahan, regulasi lingkungan kerja, undang-undang pekerjaan-keamanan, dan kebijakan lingkungan (Lindbeck 2006: 2).

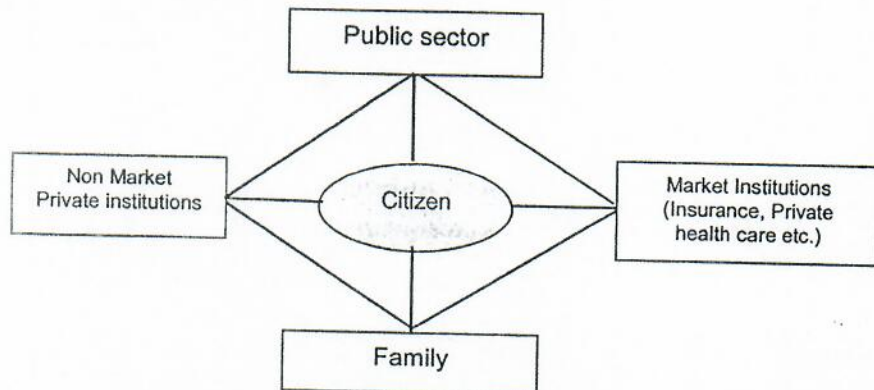
Dengan demikian, singkat kata, negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Terdapat beberapa istilah umum yang berkaitan dengan konsepsi *welfare state*. Sosiolog TH Marshall (1961) mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai kombinasi khas dari berkembangnya demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Pada saat ini boleh dikatakan semua negara maju telah mempraktekkan konsep *welfare state* ini dalam tata kelola negara. Di kebanyakan negara maju, mekanisme pelayanan kesejahteraan utamanya disediakan oleh pemerintah, dan sebagian lainnya oleh LSM, lembaga amal, kelompok informal sosial, religious groups, maupun organisasi inter-governmental.

Dalam kaitan tersebut, para ahli telah memberikan perhatian khusus pada jalan bersejarah dimana Jerman, Inggris dan negara-negara lain mengembangkan sistem negara kesejahteraan mereka secara bertahap. Sejak masa revolusi industri, dan utamanya pada awal abad 20, negara-negara Nordik, seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia pada saat ini dikenal telah mempraktekkan sistem *welfare* paling modern yang dikenal sebagai "Nordics model". Warga negara di negara-negara tersebut telah menikmati tingkat kesejahteraan hidup paling tinggi dibanding negara manapun di dunia ini.

Pada intinya, konsep negara kesejahteraan melibatkan bantuan dari negara, dengan pelayanan non-tunai yang diberikan (misalnya, di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepolisian) maupun secara tunai (*cash*) yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat (seperti bantuan melahirkan dan perawatan anak,

bantuan pengangguran, dan bantuan pembelian rumah). Kebijakan ini didanai melalui perpajakan redistribusionis yang biasanya meliputi pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai pajak progresif. Selain menjamin tingkat kesejahteraan rakyat dalam standard tertentu, konsep ini juga membantu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin.

Gambar 2.1. Welfare Diamond



Sumber: Danish Economic Council (1998: 188)

Asal dan Perkembangan Konsep Welfare

Ada tiga kelompok literatur yang menjelaskan secara berbeda tentang asal-usul konsep negara kesejahteraan. Yang pertama melihat welfare sebagai produk sampingan dari perkembangan dan modernisasi industri kapitalis. Kelompok ini melihat bahwa logika kapitalisme sebagai pendorong lahirnya negara kesejahteraan. Singkatnya, welfare dianggap sebagai anak kandung dan penyeimbang sistem kapitalisme. Ada varian optimis dan pesimis dari hipotesis ini - optimis dalam melihat ko-evolusi sisi bahagia dari kapitalisme dan kebijakan sosial.

Pendapat ini misalnya diekspresikan dalam beberapa tulisan, seperti Karl Polyani (1944), *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Dani Rodrik (2015), *From Welfare State to Innovation State*, dan Peter Katzenstein (1984), *Corporatism and change: Austria, Switzerland, and the politics of industry*, yang semuanya melihat negara kesejahteraan sebagai respon terhadap adanya resiko sosial dari pasar terbuka. Negara membuat sistem atau memberikan perlindungan dan santunan kepada rakyat sehingga mereka terselamatkan dari pengaruh buruk kapitalisme. Sedangkan versi pesimis melihat negara kesejahteraan sebagai sesuatu yang timbul dari kebutuhan untuk mengontrol tenaga kerja, sebagaimana pandangan Richard Cloward (1993), *Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare* yang memandang system kesejahteraan seperti asuransi huru-hara menggunakan rumah miskin modern. Dengan diberi layanan kesejahteraan, maka kaum pekerja dapat “dilunakkan” untuk bekerja secara produktif. Mereka tidak perlu harus sering melakukan demonstrasi yang mengganggu proses produksi.

Kelompok pemikir kedua melihat negara kesejahteraan sebagai hasil dari tekanan kekuatan kelas pekerja yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka menghadapi eksploitasi kaum kapitalis. Konsep dan gagasan negara kesejahteraan lahir karena perlawanan kaum buruh atas ketidakmanusiaan kaum kapitalis dalam memposisikan buruh, sehingga mereka bersatu untuk melindungi standar kehidupan mereka. Kaum pekerja mengorganisir diri dan menuntut pemerintah untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan mereka sehingga lahirlah berbagai layanan yang menguntungkan. Weir, Orloff dan Skocpol (1988) dalam tulisan berjudul *The Politics of Social Policy in the United States* mengajukan pertanyaan hipotesis mengapa konsep kebijakan negara kesejahteraan AS kurang berkembang dibandingkan dengan Eropa, dan berpendapat argumen 'logika industrialisme' gagal (karena tidak menjelaskan waktu / variasi di negara berbeda) seperti halnya nilai-nilai nasional (padahal orang Amerika adalah kaum liberal *laissez-faire*). Mereka berpendapat

bahwa konteks lanskap politik masing-masing negara pada tingkat nasional dengan gerakan kaum buruh adalah kunci lahirnya bentuk negara kesejahteraan- sehingga kebijakan berbasis nasional mendominasi sampai Perang Dunia II.

Kelompok ketiga melihat munculnya gagasan welfare sebagai proses alamiah fungsional tanpa pertentangan kelas. Faktanya banyak variabel berbeda ikut mempengaruhi dan membentuk desain welfare di setiap negara yang tidak berkaitan (semata-mata) dengan kapitalisme ataupun perjuangan buruh. Esping-Andersen dan Korpi (1984) dalam tulisan berjudul "*Social policy as class politics in post-war capitalism: Scandinavia, Austria, and Germany*" misalnya, berpendapat dalam perspektif fungsionalis ini – dimana welfare state dilihat sebagai proses otomatis dari semua negara yang ingin mewujudkan kehidupan yang baik bagi warganya tanpa harus dikaitkan dengan kapitalisme maupun gerakan buruh. Walaupun, menurut mereka, kelas pekerja –melalui organisasi serikat pekerja maupun afiliasi partai politiknya– tetap memiliki peran signifikan dalam menentukan model, lingkup, dan jenis layanan yang diberikan. Hal ini bisa dilihat dari variasi yang ada di antara negara Austria, Jerman dan Swedia, dimana kapasitas aliansi kaum pekerja di Austria cenderung lemah di Austria dan Jerman, menyebabkan sistem layanan kesejahtraannya lebih terbatas dibandingkan dengan Swedia yang pekerja industrinya bisa membentuk aliansi kuat dengan petani sehingga manifestasi bentuk welfare state juga lebih komprehensif. Pendapat serupa dikemukakan oleh John Saville (1957) dalam artikel berjudul *The Welfare State: An Historical Approach* yang pada intinya menyatakan bahwa konsep negara kesejahteraan merupakan produk kompromi antara kepentingan pengusaha dan buruh.

Dalam tataran praktis, adalah Jerman yang pertama kali memperkenalkan konsep negara kesejahteraan modern. Jerman menggunakan istilah "*Sozialstaat*" (*social state*/negara sosial) sejak tahun 1870 untuk menggambarkan berbagai program sosial yang dipelopori oleh para *Sozialpolitiker* (politisi sosialis) dan dilaksanakan sebagai

bagian dari reformasi konservatif Otto Van Bismarck. Kanselir Jerman tersebut termotivasi untuk memperkenalkan sistem asuransi sosial baik untuk mempromosikan kesejahteraan pekerja, untuk menjaga ekonomi agar dapat beroperasi pada efisiensi maksimum, serta untuk mencegah gerakan sosialis yang lebih radikal. Inisiatif Bismarck disebabkan karena munculnya solidaritas kaum buruh dalam menghadapi berbagai eksis industrialisasi yang mulai muncul sejak abad ke-17. Pada saat itu, kaum buruh betul-betul mengalami dampak negatif dari industrialisasi dan kapitalisme yang kejam. Mereka banyak berdatangan dari desa ke kota tanpa ada tempat tinggal layak, perlindungan dan fasilitas memadai, dan secara umum diperlakukan dengan buruk oleh industriawan. Banyak diantara mereka diupah dengan sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk membiayai hidup secara layak, dipecat semena-mena, tidak mendapat hari libur, dan tidak mendapatkan uang pensiun. Mereka juga tidak diberikan asuransi kesehatan sehingga tidak bisa berobat dan banyak diantara mereka meninggal ketika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Untuk menanggulangi hal tersebut, kaum buruh mengorganisir diri dalam organisasi persatuan (*labor union*) yang kemudian membuat gerakan solidaritas dan mendirikan skema santunan gotong-royong diantara mereka sendiri, berdasarkan iuran keanggotaan. Dalam gerakan tersebut, setiap anggota memberikan iuran rutin agar mereka dapat tolong menolong memberikan santunan ketika menghadapi musibah, seperti sakit, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia. Pada tahap awal, jenis santunan tersebut sangat terbatas, hanya mencakup pemberian bantuan kepada anggota yang sakit dan atau meninggal dunia. Lama kelamaan, jenis-jenis santunan berkembang lebih banyak, seperti santunan terhadap anggota yang mendapatkan pemberhentian kerja (PHK), bantuan melahirkan, atau juga bantuan untuk membeli rumah tinggal. Gerakan kaum buruh ini kemudian didukung secara politik oleh partai buruh sehingga dari hari ke hari jumlah pemilih partai buruh cepat berkembang dan mengancam dominasi partai konservatif. Untuk memotong dukungan terhadap

partai buruh, pada tahun 1883, pemerintah konservatif mulai mengambil alih gagasan serikat pekerja dengan membuat asuransi kesehatan (*sickness insurance*) yang diikuti oleh program kompensasi pekerja yang didirikan pada tahun 1884. Negara mengambil alih pembayaran iuran, sehingga buruh tidak lagi harus membayar iuran untuk mendapatkan manfaat santunan sebagaimana sekma yang sudah ada. Hal ini memberi Jerman sistem jaminan penghasilan yang komprehensif berdasarkan prinsip asuransi sosial yang ditanggung negara.

Istilah serupa yang setara dengan konsep “negara sosial” tidak populer di negara-negara Anglophone (Inggris, Amerika, Australia, Kanada) sampai Perang Dunia Kedua, ketika Uskup Agung Anglikan William Temple Anglikan, penulis buku *Christianity and the Social Order* (1942), mempopulerkan konsep yang menggunakan frase “*welfare state*” (negara kesejahteraan). Frase “*welfare state*” yang digunakan oleh Uskup Temple berkaitan dengan naskah noveldari Benjamin Disraeli (1845), perdana menteri Inggris 1858-59 dan 1866-68, yang berjudul *Sybil: or the Two Nations* (yakni, kaya dan miskin), yang berbicara tentang “satu-satunya tugas kekuasaan adalah mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat”. Pada saat ia menulis *Sybil*, Disraeli masih menjadi anggota Young England, sebuah kelompok konservatif Yahudi muda yang terkejut oleh apa yang mereka lihat sebagai ketidakpedulian negara terhadap kondisi menghebohkan masyarakat industri miskin. Anggota Youth England berusaha untuk menyalakan rasa tanggung jawab kalangan kelas elite terhadap orang yang kurang beruntung dan pengakuan atas martabat tenaga kerja yang menurut mereka telah dilakukan Inggris selama masa feodal di Abad Pertengahan.

Setelah Perang Dunia Pertama, skema asuransi sosial berkembang pesat di beberapa negara, dan perlindungan sosial dimasukkan dalam agenda organisasi internasional yang baru dibentuk, termasuk ILO (International Labor Organization) dan the International Conference of National Unions of Mutual Benefit

Societies and Sickness Insurance Funds yang diluncurkan di Brussels pada Oktober 1927 dan kemudian menjadi Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (International Social Security Association—ISSA). Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep negara kesejahteraan baru berkembang di Italia dan Swedia pada sekitar tahun 1936. Kata dalam bahasa Italia "*sociale stato*" (negara sosial) adalah merupakan istilah yang mereproduksi bahasa Jerman "*sozialstaat*". Sedangkan negara kesejahteraan dalam bahasa Swedia disebut dengan *Folkhemmet* – yang secara harfiah berarti "rumah rakyat", yang muncul dari kompromi antara serikat buruh Swedia dan perusahaan-perusahaan besar. Infrastruktur sistem ekonomi Swedia pada dasarnya adalah merupakan perpaduan antara serikat pekerja yang kuat, sistem jaminan sosial yang kokoh, dan penyediaan layanan kesehatan universal. Di Jerman, istilah *Wohlfahrtsstaat*, terjemahan langsung dari bahasa Inggris "*welfare state*", digunakan untuk menggambarkan pengaturan asuransi sosial model Swedia. Spanyol dan banyak bahasa lain menggunakan istilah analog: *estado del bienestar* – secara harfiah, "negara kesejahteraan". Dalam bahasa Portugis, dua frase yang sama adalah: *estado do bem-estar social*, yang berarti "negara kesejahteraan sosial", dan *estado de Providencia* – "negara pelayanan", yang menunjukkan misi negara untuk menjamin dasar kesejahteraan warga negara. Di Brazil, konsep ini disebut sebagai *previdência social*, atau "pelayanan/perindungan sosial".

Pada tahun 1941, dalam Piagam Atlantik, Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berkomitmen untuk meningkatkan standar ketenagakerjaan, kemajuan ekonomi, dan jaminan sosial bagi semua. Pada puncak Perang Dunia Kedua, pada tahun 1942, pemerintah Inggris menerbitkan Rencana Beveridge, dinamakan sesuai dengan penulis utamanya, Lord Beveridge, yang mengarah pada pembentukan sistem jaminan sosial terpadu yang pertama. Laporan Beveridge tahun 1942 menyebutkan diperlukannya sistem asuransi sosial pasca Perang Dunia II, yang mencakup setiap warga negara tanpa memandang berapapun pendapatan mereka. Konsep ini menawarkan kurang lebih status kesejahteraan sepanjang

umur (*cradle-to-grave*) system yang komprehensif. Di Prancis, Pierre Laroque memimpin upaya pemerintah untuk memperluas perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, dan sistem jaminan sosial nasional didirikan pada tahun 1946. Pada tahun 1944, dengan gelombang balik perang, Deklarasi bersejarah ILO di Philadelphia menyerukan perluasan langkah-langkah keamanan sosial, dan mengembangkan kerja sama, atas dasar internasional atau regional, yang sistematis dan langsung di antara lembaga-lembaga keamanan sosial, pertukaran reguler informasi dan studi tentang masalah umum yang berkaitan dengan administrasi jaminan sosial.

Satu tahun kemudian, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang Pasal 22 mengakui bahwa "Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial". Pada tahun 1952, ILO mengadopsi Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) (No. 102), dan pada tahun 2001 meluncurkan Kampanye Global tentang Jaminan Sosial dan Cakupan untuk semua umat manusia.

Model dan Desain

Secara umum, konsep negara kesejahteraan terbagi dalam dua sub-model, yakni: 1) model universal-dengan ketentuan yang mencakup semua orang, tidak peduli kaya maupun miskin; dan 2) model selektif-dengan ketentuan yang mencakup hanya mereka yang dianggap paling membutuhkan. Akan tetapi, dalam bukunya tahun 1999, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, sosiolog Denmark Gosta Esping-Andersen lebih lanjut mengidentifikasi tiga sub tip emodel negara kesejahteraan berdasarkan pada variasi (demodifikasi) pelayanan jaminan sosial. Meskipun banyak dikritik, klasifikasi ini masih digunakan sebagai titik awal dalam analisis negara kesejahteraan modern yang dan tetap menjadi alat acuan dasar bagi para ahli. Pendapat utama Esping-Andersen adalah bahwa klasifikasi model bukan hanya berkaitan

dengan seberapa banyak pengeluaran negara-negara kesejahteraan, tetapi bagaimana mereka membelanjakannya. Dia mengusulkan variasi lintas nasional yang mendasar tidak hanya dalam struktur pengeluaran negara kesejahteraan tetapi dalam tujuan-tujuan mendasar dari negara-negara kesejahteraan yang berbeda - dan mengembangkan tiga tipe ideal untuk menjelaskan hal ini.

Klasifikasi negara kesejahteraan Esping-Andersen ini mengacu pada peran historis dari tiga gerakan politik abad kedua puluh yang dominan di Eropa Barat dan Amerika:

- 1) *Liberalism*
- 2) *Christian Democracy (Conservatism)*, dan
- 3) *Social Democracy*,

Dia menjelaskan perbedaan dari ketiga model tersebut sebagai berikut:

The Liberal Welfare State adalah model yang didasarkan pada dominasi pasar dan penyediaan jasa swasta (*private provision*); secara prinsip dalam model ini, negara hanya campur tangan dalam perlindungan sosial yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan penyediaan kebutuhan dasar saja pada kejadian-kejadian ad-hoc. Program perlindungan sosial hanya bersifat sementara, ketika terjadi keadaan-keadaan khusus seperti bencana alam dan resesi ekonomi. Dengan demikian hanya ada sedikit sekali bantuan/layanan yang pemberiannya melalui mekanisme verifikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terutama miskin, tunjangan hak yang ketat yang sering memerlukan stigma sosial, kualitas rendah, mencakup hanya layanan dasar, dan penekanan kuat pada pasar dan desentralisasi minimal. Kelas menengah dikecualikan dari banyak layanan negara, menciptakan tingkat ketidaksetaraan dan dualisme yang tinggi antara kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, model liberal menciptakan dualisme antara kelompok masyarakat yang miskin dan yang tidak miskin. Seorang profesor ilmu politik dari Swedia Bo Rothstein (2001) menyatakan bahwa pada negara-negara yang menerapkan konsep kesejahteraan non-universal, pemerintah memiliki perhatian utama untuk mengarahkan sumber daya bagi "orang-orang

yang paling membutuhkan". Hal ini memerlukan kontrol birokrasi yang ketat untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk bantuan dan siapa yang tidak.

The Christian-Democratic Welfare State adalah model yang berdasarkan pada prinsip subsidiarity (decentralisasi) dan dominasi oleh skema asuransi-asuransi sosial, menawarkan alternatif-alternatif pilihan yang moderat dan mengizinkan adanya stratifikasi pelayanan yang luas (sebagaimana sistem asuransi pada umumnya). Tidak seperti liberal, model konservatif mengikutsertakan kelas menengah ke dalam penyediaan kesejahteraan dengan cara melestarikan status, yakni mereka masih bisa mengadakan/membayar sendiri jaminan asuransi private (sebagaimana dorongan asli di belakang pembentukan negara kesejahteraan Jerman oleh Bismarck adalah untuk mencegah kerusuhan sosial dan mengikat bersama kelas menengah dan kelas pekerja ke negara daripada melakukan solidaristis gerakan di luar negara). Esping-Andersen mencirikan rezim konservatif melalui tingginya tingkat transfer dan tingkat layanan negara yang terbatas, asuransi sosial yang berkaitan dengan penghasilan, pentingnya peran tradisional keluarga, dan layanan sipil yang kuat. Kelas menengah dan kelas pekerja diikutkan dalam program kesejahteraan sosial, tapi mereka juga dibebaskan seandainya mau mengadakan asuransi private yang terkait dengan pekerjaan.

The Social-Democratic Welfare State adalah model yang didasarkan pada prinsip-prinsip Universalisme, memberikan akses pelayanan dan bantuan setara berdasarkan kewarganegaraan (*citizenship*) tanpa melihat jumlah penghasilan. System welfare state ini menyediakan kebebasan otonom yang relative tinggi kepada warga negara, membatasi ketergantungan kepada keluarga dan pasar. Dalam konteks ini, kebijakan dipersepsikan sebagai politik anti pasar (*politics against the market*). Rejim Sosial Demokratik sebagai penyedia layanan universal optimum mengeluarkan opsi pilihan asuransi pribadi (dan keluarga), menekankan pada penyediaan pekerjaan penuh (*full employment*) bagi seluruh warga negara, dan melakukan dekomodifikasi

dan beberapa manfaat yang terkait dengan penghasilan melalui sistem perpajakan. Negara-negara kesejahteraan demokratis sosial menggabungkan kelas menengah melalui layanan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam tulisan berjudul *'Politics against Markets'* Esping-Andersen berpendapat bahwa model sosial-demokrasi ini bukanlah akomodasi untuk kapitalisme tetapi de-komodifikasi -- dengan kata lain, negara kesejahteraan benar-benar mengubah karakter kapitalisme dan menciptakan pulau-pulau sosialisme di dalam system tersebut. Berbeda dengan model Liberal, dalam model universal seperti Swedia, pemerintah mendistribusikan kesejahteraan kepada semua orang dengan cukup menetapkan kriteria (misalnya memiliki anak, menerima perawatan medis, dll) tanpa banyak campur tangan birokrasi. Hanya saja, model ini bagaimanapun membutuhkan perpajakan yang lebih tinggi karena skala layanan yang diberikan. Model ini dominan diterapkan di negara-negara Skandinavia yang dimulai dari pemerintahan Karl Kristian Steincke dan Gustav Möller pada 1930-an. Sosiolog Lane Kenworthy (1999: 1122) berpendapat bahwa pengalaman negara-negara Skandinavia (Nordic) menunjukkan bahwa model sosial demokrasi (Social Democratic Model) modern dapat "meningkatkan keamanan ekonomi, memperluas kesempatan, dan memastikan peningkatan standar hidup untuk semua... Sementara pada saat yang sama memfasilitasi kebebasan, fleksibilitas dan dinamisme pasar."

Berdasarkan pada klasifikasi tersebut, Esping-Andersen membagi 18 negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*--Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) dalam kelompok sebagai berikut:

- 1) Social Democratic (Scandinavian) model: Denmark, Finland, the Netherlands, Norweigia dan Swedia.
- 2) Christian Democratic: Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Spanyol dan Italy
- 3) Liberal: Australia, Kanada, Jepang, dan USA

- 4) Campuran (hybrid) tidak termasuk ketiga kelompok diatas: Swiss, Irlandia, New Zealand dan Inggris.

Karena kriteria dekomodifikasi tidaklah terlalu jelas, tipologi klasifikasi ini sering dikritik. Namun demikian, dari 18 negara-negara ini kita dapat menempatkan sebuah negara pada sebuah kontinum dari yang paling murni sosial-demokratis (Swedia), sampai yang paling liberal (Amerika Serikat).

Kritik juga datang dari penulis Castles dan Mitchell (1993) yang meneliti negara berbahasa Inggris (yang didefinisikan sebagai 'Liberal' oleh Esping-Andersen), dan berpendapat bahwa ada variasi signifikan dalam kelompok ini. Mereka berpendapat bahwa kita perlu memeriksa bentuk negara kesejahteraan, bukan hanya dari instrumen kebijakan (yaitu belanja), dan selanjutnya berpendapat bahwa Esping-Andersen melewati beberapa fitur penting (seperti tingkat kebutuhan dll) dalam pengkodean variabelnya. Dalam melihat hasil penelitian, mereka menemukan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru dan Kanada memiliki ketimpangan pasca-pajak yang lebih rendah dari Belanda. Untuk menjelaskan ini, mereka mengembangkan kategori keempat untuk ditambahkan ke tiga model Esping-Andersen, yang disebut 'Dunia Radikal' (Australia, NZ, UK, Finlandia) yang mencakup persamaan manfaat yang tinggi, sektor negara besar dalam pekerjaan, serikat pekerja yang kuat dan relatif catatan buruk dari inkumbensi sosial demokratis. Bonoli (1997) juga menyediakan klasifikasi baru dari negara-negara kesejahteraan, yang menggabungkan dua dimensi. Bonoli berpendapat Esping-Andersen hanya melanggar sebagian dengan tradisi kuantitatif, dan gagal menjelaskan negara-negara Eropa Selatan.

Hubungan dengan Ekonomi

Terdapat sejumlah garis pemikiran yang berbeda-beda diantara para ahli pada hubungan antara negara kesejahteraan dan ekonomi. TH

Marshall (1963) yang mengambil pendekatan sosiologis klasik, mengemukakan pendapat bahwa ide negara kesejahteraan berkorelasi dengan hak-hak sosial merupakan cerminan gagasan kewarganegaraan (*citizenship*) yang terus berubah, yang dalam tingkat tertentu menempatkan batasan bagi kebebasan pasar. Dengan demikian, walaupun pasar dalam kegiatan ekonomi perlu memiliki derajat kebebasan yang maksimal, hak warga negara untuk hidup sejahtera perlu tetap dilindungi. Esping-Andersen (1990) mengambil pendekatan yang sama, dengan alasan program-program sosial dapat 'mengurangi' beban pekerja dari gejolak pasar yang liar, memberi mereka kemampuan untuk eksis tanpa ketergantungan pada pasar seraya membantah pemikiran bahwa negara kesejahteraan adalah manifestasi prinsip-prinsip sosialis. Polyani (1944) juga membuat argumen kunci tentang hubungan antara kesejahteraan dan pasar. Dia berpendapat bahwa penciptaan pasar itu alami, tetapi peran pemerintah melalui regulasi dan intervensi adalah penting ketika kebutuhan sosial mendasar muncul. Namun, pandangan Polyani tentang negara kesejahteraan tetap kritis sehingga melihat sistem kesejahteraan Inggris awal (*Speenhamland*) sebagai insentif kerja yang mencekik dan bahkan merendahkan pekerja, walaupun pada akhirnya berpendapat bahwa pasar memerlukan regulasi dan program sosial yang justru penting bagi stabilitas kapitalisme. Rodrik (1977) membuat argumen serupa bahwa pada era modern, ekonomi terbuka (seperti Swedia) perlu memiliki konsep negara kesejahteraan yang komprehensif, sebagian karena bertujuan menanggulangi dislokasi sosial dan risiko yang terkait dengan perdagangan di pasar global.

Bertentangan dengan perspektif diatas, ada pula ahli seperti Piven dan Cloward (1971) yang mengambil pandangan skeptis. Mereka menganalisis negara kesejahteraan dari perspektif Marxis, dan melihatnya sebagai penopang sistem kapitalis dalam dua cara. Mereka berpendapat bahwa konsep welfare hanyalah cara membuat kaum buruh dikooptasi dengan berbagai bantuan yang memanjakan sehingga pada hakikatnya mereka tunduk kepada desain kapitalisme dan tidak

bisa bertindak bebas. Dengan demikian, keda penulis terbut mengasumsikan konsep welfare sebagai “asuransi kerusuhan” yang mereduksi tekanan buruh ketika terjadi pelambatan ekonomi. Logika perspektif ini, akan tetapi, mungkin cocok untuk menjelaskan kasus welfare di negara-negara kesejahteraan Anglosaxon (tipe Liberal), tetapi kurang tepat untuk menjelaskan program yang lebih murah hati dan universal di beberapa bagian Eropa, terutama negara-negara Skandinavia (Nordik).

Pernyataan klasik tentang hubungan antara ekonomi dan negara kesejahteraan disajikan oleh John Maynard Keynes (1936) dalam buku *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan menjadi aliran teori Keynesians. Desain kebijakan kesejahteraan sosial adalah justru menjadi alat keseimbangan fiskal dan stabilitas pembangunan ekonomi. Premis dasar Keynesianisme adalah bahwa kondisi ekonomi dapat terjebak pada keseimbangan yang jelek (sub-optimal, resesive), di mana investasi jelek (*under-investment*) dan ketenagakerjaan buruk (*under-employment*) berlangsung secara berdampingan. Keynes berfokus pada sisi demand dalam keseimbangan, dan melihat bagian dari masalah dalam agregat demand yang tidak mencukupi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah menjadi alat penting yang dapat ‘menggerakkan mesin’ dan mengembalikan perekonomian ke jalurnya. Negara kesejahteraan memainkan peran penting di sini karena berfungsi sebagai ‘penstabil otomatis’: bila ekonomi memburuk, pemerintah memberi subsidi dan bila ekonomi membaik, pemerintah menarik pajak tinggi. Dengan demikian, negara kesejahteraan menyediakan stimulus demand secara otomatis: dalam resesi orang mendapatkan potongan pajak dan mendapatkan lebih banyak pada manfaat bantuan (dengan demikian dapat meningkatkan pengeluaran dan mendorong konsumsi supaya roda ekonomi berputar), dan dalam masa pemulihan ekonomi berlangsung kebalikannya (mereka menerima manfaat bantuan kurang dan membayar pajak lebih banyak - menyeimbangkan anggaran).

Sejalan dengan ini, Przeworski dan Wallerstein (1982) berpendapat bahwa ide Keynes mereduksi ketegangan antara demokrasi vs pasar dengan memberikan kompromi institusional untuk kebutuhan ekonomi yang stabil (membantu kapitalis dengan permintaan konsumen dan kemampuan beli yang stabil dan membantu pekerja dengan jaminan-keamanan hidup). Dalam prakteknya, beberapa negara benar-benar menjalankan anjuran ini dengan melaksanakan anggaran berimbang.

Akan tetapi, teori Keynesian ini ditentang dengan ujian pada saat terjadi krisis. Setidaknya ada dua hal telah mengikis popularitasnya - yang pertama adalah krisis fiskal tahun 1970-an, yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran subsidi pemerintah yang besar dan pada akhirnya mengurangi kapasitas pemerintah untuk belanja investasi sehingga pertumbuhan ekonomi justru melambat. Kedua, peningkatan impor mengurangi kekuatan stimulus permintaan Keynesian. Yakni karena pemerintah menghabiskan uang subsidi (untuk meningkatkan permintaan / daya beli masyarakat), tetapi konsumen menghabiskan banyak uang itu untuk impor sehingga uang bocor keluar dari ekonomi domestik, sehingga mengurangi efek berganda pengeluaran pemerintah. Tantangan bagi akademisi berhaluan kiri dan pendukung negara kesejahteraan adalah menemukan alasan ekonomi baru bagi negara kesejahteraan.

Dalam perspektif sosialisme, akan tetapi, sistem kesejahteraan sosial juga memiliki efek redistribusi pendapatan. Skema jaminan sosial akan memastikan terjadinya transfer kekayaan antar kelompok pendapatan yang berbeda. Redistribusi terjadi di antara kelompok-kelompok yang berisiko dalam populasi yang diasuransikan. Sebagai contoh, dalam skema pensiun hari tua, misalnya, biasanya terdapat transfer dari mereka yang hidup untuk waktu yang lebih singkat kepada mereka yang hidup lebih lama dan juga transfer dari pria ke wanita. Sistem pensiun mungkin juga memerlukan distribusi ulang antar generasi. Artinya generasi yang masih bekerja, mensubsidi mereka yang sudah pensiun. Sistem pensiun dapat dianggap sebagai

kontrak asuransi antara individu dan masyarakat secara kolektif yang dicakup oleh sistem. Populasi yang diasuransikan dapat terdiri dari semua orang dari kelompok usia tertentu yang tinggal atau bekerja di negara tersebut atau setiap orang yang bekerja di bidang perjanjian tertentu. Sistem pensiun hari tua dan skema pelengkap untuk pensiun dini harus menyediakan keamanan finansial bagi orang tua yang telah berhenti bekerja. Waktu pensiun dapat menjadi pilihan pribadi atau disebabkan oleh kesehatan yang gagal atau kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Pensiun hari tua rata-rata merupakan sarana pendukung utama selama kurun waktu bayar 15-20 tahun.

Welfare dan Kemiskinan

Isu kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan. Terminologi 'sejahtera' sendiri adalah merupakan antitesa yang secara diametris langsung berhadapan dengan terminologi 'miskin'. 'Kesejahteraan' memiliki konotasi keadaan tercukupinya terpenuhinya kebutuhan seseorang secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan mereka secara wajar. Sedangkan 'kemiskinan' berkonotasi kepada kekurangan-ketiadaan kebutuhan seseorang untuk menjalani hidup secara wajar. Kemiskinan pada garis besarnya terdiri dari dua: kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Seseorang yang ada dalam kemiskinan absolut menderita kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka kekurangan paling tidak terhadap lima kebutuhan pokok:

- Sandang (yakni pakaian yang layak),
- Pangan (yakni makanan/bahan pangan)
- Papan (perumahan/tempat tinggal yang layak),

- Kesehatan (hidup dalam kondisi prima dan mendapat perawatan bilamana sakit), dan
- Pendidikan (memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan, setidaknya pendidikan dasar).

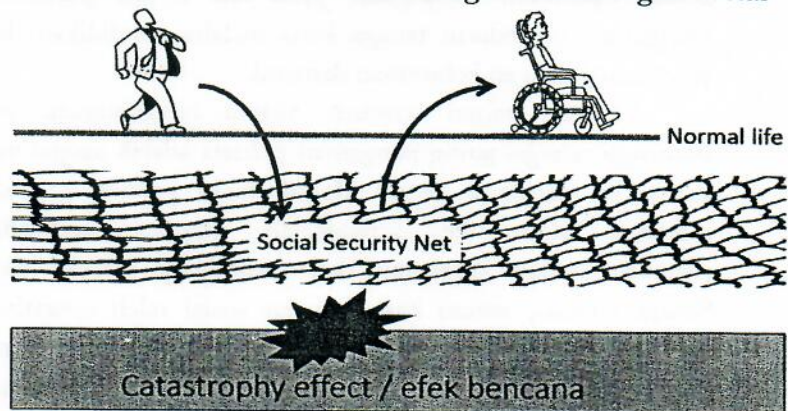
Konsep 'welfare' pada masa awalnya ditujukan untuk menanggulangi jenis kemiskinan ini. Pada generasi pertama sistem welfare, kemiskinan absolut secara tradisional ditanggulangi dengan cara residual remedies (yakni dengan program yang cenderung karitatif / derma). Undang-undang dan kebijakan welfare pada awalnya hanya membidik orang yang miskin dengan mensyaratkan 'kondisi kekurangan tertentu' untuk mendapatkan bantuan, sehingga tidak bersifat universal. Walaupun persyaratan tersebut makin hari semakin lunak (artinya kriteria kemiskinan semakin membaik), akan tetapi sampai tahun 70-80an, program welfare di dunia masih mengacu pada kriteria kemiskinan absolut ini. Pada masa tersebut, banyak negara maju membentuk lembaga dan program untuk mengatasi kemiskinan absolut.

Di Amerika Serikat, pada 8 Januari tahun 1964, Presiden Lyndon Johnson meluncurkan program 'Great Society' untuk 'memerangi kemiskinan' (*war on poverty*) yang sudah mencapai sekitar 19 %. Australia mengikuti jejak serupa dengan membentuk Komisi Penyelidikan Kemiskinan pada tahun 1971. Inggris juga menggencarkan program anti kemiskinan pada tahun 1979, ketika ilmuwan Peter Townsend yang ditugasi parlemen untuk meneliti kemiskinan mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul '*Poverty in the United Kingdom*'. Dia menemukan bahwa ada sekelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan, konsumsi, dan tingkat partisipasi sosial jauh di bawah dari apa yang mungkin dilihat sebagai normal atau dapat diterima dalam masyarakat kapitalis industri yang semakin makmur. Rekomendasi yang dibuat kemudian menjadi dasar pengembangan sistem welfare yang menyeluruh, tidak hanya di Inggris, tetapi mempengaruhi juga negara-negara persemakmuran.

Perkembangan konsepsi sistem welfare juga dipengaruhi perdebatan Townsend tentang definisi kemiskinan absolut. Jika semula definisi berfokus pada masalah angka, maka pada perkembangan berikutnya mengikutsertakan analisis kualitatif. Kemiskinan didefinisikan kembali tidak hanya berkaitan dengan kekurangan sumber daya kebutuhan hidup, tetapi juga dalam bentuk ketidakadilan terhadap akses kekuasaan dan status sosial. Dia menyatakan bahwa kemiskinan sebagai: "*the lack of resources necessary to permit participation in the activities, customs and diets commonly approved by society*" (1979: 47). Definisi Townsend inilah yang melahirkan konsep 'kemiskinan relatif' (*relative poverty*). Kemiskinan relatif mengacu pada standar yang didefinisikan dalam istilah masyarakat di mana seorang individu tinggal di dalamnya, dan oleh karenanya berbeda antar negara dan dari waktu ke waktu. Contoh: orang disebut miskin apabila pendapatannya kurang dari X% dari pendapatan rata-rata di negaranya. Sehingga, bisa jadi orang dengan pendapatan \$ 8.000 per tahun disebut miskin di Inggris, tetapi dianggap kaya di Indonesia; atau dia dianggap kaya di tahun 1970, tetapi dianggap miskin di tahun 2020.

Definisi ini menyebabkan perubahan model sistem welfare di Inggris. Jika semula program bantuan kemiskinan terbatas pada pemberian subsidi agar orang miskin dapat bertahan pada garis kehidupan normal, maka selanjutnya program didesain untuk menjangkau penyediaan sumberdaya untuk menolong mereka yang mengalami '*positive discrimination*', yakni mereka yang teralienasi dari proses-proses sosial karena berbagai sebab. Dalam kerangka inilah, maka sistem welfare tidak hanya meliputi bantuan penyediaan kebutuhan pokok, melainkan juga menjangkau program-program seperti penyediaan pelatihan kerja, asistensi pencarian kerja, subsidi pendirian usaha baru, dan sebagainya.

Gambar 2.2. Sistem Welfare sebagai Perlindungan Sosial



Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber

Pengaruh lainnya adalah berkaitan dengan cakupan program welfare, yang semula cenderung hanya untuk orang miskin, menjadi mencakup semua warga negara (universal). Artinya siapapun mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesejahteraan, tidak peduli bagaimana status kehidupan sosial mereka.

Ketenagakerjaan dan Welfare State

Tenaga kerja (*man power*) adalah unsur yang sangat penting dalam skema negara kesejahteraan. Tidak hanya mereka adalah subyek penggerak ekonomi negara melalui kontribusi pembayaran pajak dan perputaran kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai obyek yang menjadi tujuan untuk disejahterakan. Negara harus mengatur tata kelola ketenagakerjaan yang integratif, dengan mengidentifikasi kebutuhan sisi permintaan (*demand*) yakni industri yang membutuhkan tenaga kerja, dan sisi ketersediaan (*supply*) tenaga kerja yakni. Pada sisi *demand*, pemerintah perlu mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menopang kebutuhan industri

secara optimum. Sedangkan pada sisi *supply*, pemerintah perlu mengatur ketersediaan tenaga kerja melalui pendidikan dan training yang sesuai dengan kebutuhan demand.

Dalam kaitan tersebut, sistem kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman pekerja adalah sangat vital. Ketika sistem ini berfungsi secara efektif, maka pekerja dan keluarganya memiliki akses ke serangkaian layanan berkualitas yang mempromosikan kesehatan dan melindungi mereka dari bahaya. Secara historis, sistem kesejahteraan sosial telah memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi pekerja, mulai dari penyediaan layanan langsung, proteksi kesehatan, sumbangan pengangguran, asuransi kesehatan dan sebagainya.

Sayangnya, bagi banyak negara di dunia, sistem kesejahteraan sosial (dan tenaga kerja) dilemahkan oleh alokasi dana yang minim, kebijakan yang tidak sempurna, wewenang dan tanggung jawab yang buruk, serta lemahnya distribusi kewenangan di antara berbagai kementerian. Sering kali, hasil akhirnya merugikan kesejahteraan dan keselamatan keseluruhan rakyat yang kurang terlayani, khususnya mereka yang miskin dan tidak menerima pelayanan yang ramah, layanan dukungan dan perawatan yang menyelamatkan jiwa, dan kemudian dipinggirkan secara sosial. Perlakuan yang lebih buruk harus diterima oleh para pekerja pada sektor informal, karena tidak ada sistem yang dapat mereka akses untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan ketengakerjaan dalam konteks negara kesejahteraan berkorelasi dengan konsepsi tentang *full employment* (pekerjaan penuh). Konsep ini, dalam makroekonomi, memiliki pengertian bahwa negara harus memiliki tingkat lapangan kerja di mana tidak ada pengangguran siklis atau kekurangan permintaan lowongan kerja, kecuali pengangguran yang alamiah (O'Sullivan and Sheffrin, 2003: 335). Pengangguran alamiah ini didefinisikan oleh mayoritas ekonom mainstream sebagai tingkat prosentase pengangguran yang dapat diterima/ditolerir di suatu

tempat di atas 0 per cent. Perbedaan tentang berapa angka dari 0 per cent muncul karena perbedaan definisi tentang tipe pengangguran non-siklis, seperti pengangguran friksional (dimana akan selalu ada orang yang telah berhenti atau kehilangan pekerjaan musiman dan sedang dalam proses mendapatkan pekerjaan baru), pengangguran struktural (ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan persyaratan kerja), maupun pengangguran disabilitas (karena sakit, cacat, atau tua). Oleh karena itu, dalam konsep *full employment*, tingkat pengangguran yang dapat diterima harus selalu di bawah angka yang ditentukan. Jika, misalnya, sebuah negara menetapkan lapangan kerja penuh dengan tingkat pengangguran 5 per cent, tingkat pengangguran di bawah 5 per cent dianggap dapat diterima. Di Inggris misalnya, Beveridge berpikir bahwa Inggris dapat mencapai tujuan ini dengan tingkat pengangguran 3 per cent (1944: 128).

Toleransi terhadap angka pengangguran di atas 0 per cent dipandang perlu untuk mengendalikan inflasi di ekonomi kapitalis, untuk menjaga agar inflasi tidak meningkat, yaitu meningkat dari tahun ke tahun. Pandangan ini didasarkan pada teori yang berpusat pada konsep Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU). Di era sekarang, mayoritas ekonom mainstream merujuk pada NAIRU saat berbicara tentang "pekerjaan penuh". NAIRU juga telah dijelaskan oleh Milton Friedman (1969), antara lain, sebagai tingkat pengangguran "alami".

Meskipun di dalam konteks ini, banyak konsep pembangunan dan pengelolaan ketenagakerjaan yang sampai sekarang penuh tumpang tindih, terdapat dua fokus pendekatan yang utama, yakni: 1) kesejahteraan manusia / hak asasi manusia yang menyarankan *full employment* secara mutlak atau, pada alternatif lain, 2) tingkat pengangguran minimum - biasanya diyakini kompatibel dengan stabilitas harga. Pengikut konsep tradisi hak asasi manusia pada umumnya menyatakan bahwa tingkat pengangguran dalam suatu negara harus tidak ada, atau dengan kata lain berarti bahwa pekerjaan harus tersedia bagi semua orang yang menginginkannya. Sedangkan

bagi mereka yang menganut tingkat pengangguran minimum, menyatakan bahwa jumlah prosentase pengangguran bisa ditolerir sesuai dengan stabilitas harga atau dapat ditoleransi secara politis – yakni apakah pekerjaan akan tersedia dapat memuaskan bagi pemilih. Untuk mempelajari definisi ketenagakerjaan dan pengangguran ini kita dapat melihat makalah ekonom Miren Etxezarreta, "About the Concept of Full Employment: A limited 'Survey'" (1999).

Mazhab hak asasi manusia, yang berkembang pada era pasca-Perang Dunia II dan mencerminkan pengalaman depresi pada pasca Perang Dunia I dan II, didefinisikan dalam dokumen seperti UU Hak Ekonomi Presiden Franklin D. Roosevelt (1944), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945, Pasal 55 & 56) dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (United Nations, 1948, Article 23). Dalam tradisi ini, William Beveridge (1944: 18) mendefinisikan *full employment* sebagai "*having always more vacant jobs than unemployed men [sic], not slightly fewer jobs*" (selalu tersedia lowongan pekerjaan daripada laki-laki yang menganggur [sic], bukan sedikit pekerjaan". Pekerjaan ini, menurut Beveridge, harus membayar upah yang adil dan berada di tempat dimana pengangguran diperkirakan akan bisa mendapatkannya. Menurutny akan tetapi, pada *full employment*, tingkat pengangguran minimum akan ada tapi hanya bersifat sementara, karena penganggur harus dapat menemukan "pekerjaan baru dalam kapasitas mereka tanpa penundaan" (1944: 18). Akan tetapi, fokus definisinya jelas mengenai persyaratan bahwa semua individu pengangguran memiliki akses langsung ke pekerjaan dengan bayaran yang baik daripada untuk mencapai tingkat pengangguran tertentu. Penekanan pada kesejahteraan pekerja merupakan ciri khas tradisi hak asasi manusia. Bahwa pengangguran, karena berbagai hal, bagaimanapun tentu tetap ada. Hanya saja, Beveridge juga merasa bahwa pengangguran jangka pendek tidak boleh dianggap enteng karena mereka yang mengalaminya tidak tahu bahwa mereka menganggur sementara sampai mereka menemukan pekerjaan lagi-atau untuk pertama kalinya.

Oleh karena itu, dalam membahas dua pendekatan tersebut, peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz (2001), menyarankan agar pemerintah berfokus pada tujuan akhir kesejahteraan rakyat, bukan sekedar memilih salah satu pendekatan. Dia membuat perbedaan penting antara cara dan tujuan: "Dalam membingkai kebijakan makro-ekonomi, kita harus tetap memperhatikan tujuan akhir (yakni kesejahteraan rakyat), dan bukan pada variabel menengah - seperti pekerjaan, pertumbuhan, standar hidup, bukan suku bunga, tingkat inflasi, atau nilai tukar, variabel yang penting hanya sejauh efeknya mempengaruhi variabel yang sangat penting" (Stiglitz, 2001: 9).

Dalam kaitan tersebut, kebijakan perlindungan sosial merupakan alat penting untuk mengatasi kemiskinan dan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengejar kesejahteraan warga. Sistem perlindungan sosial modern dapat melacak akar mereka setidaknya sampai akhir abad ke-19, ketika sistem kesejahteraan sosial Bismarckian diperkenalkan di Jerman. Kebijakan tersebut memerlukan seperangkat perencanaan tenaga kerja, bantuan sosial, asuransi sosial, tata kelola pasar tenaga kerja yang holistik, dan program perawatan bagi warga negara. Kebijakan semacam itu dapat berfungsi untuk mencegah orang-orang biasa dan keluarga mereka terhadap memburuknya kemiskinan, mendorong akses terhadap layanan dasar, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga memperkuat hubungan sosial (Tessier et al., 2013).

Prinsip Kesetaraan dalam Ketenagakerjaan

Secara naluriah, manusia cenderung membedakan berbagai kelompok masyarakat dengan mengistimewakan kelompok di mana ia menjadi anggotanya serta membangun prasangka terhadap orang-orang yang "berbeda" dan menjadi anggota kelompok lain. Fenomena ini, dikenal sebagai bias atau prasangka, yang secara alamiah membentuk kesenjangan informasi dan pendidikan dalam pikiran manusia dan seringkali tertanam pada cara masyarakat mengatur kehidupan sosial.

Bias dapat menghambat kemampuan orang untuk mengambil keputusan yang imparial, obyektif dan adil. Begitu bias mulai mempengaruhi keputusan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan orang banyak – misalnya mempengaruhi kemungkinan seseorang mendapat pekerjaan meskipun telah memenuhi persyaratan – maka hal ini membawa efek negatif yang bergaung jauh melebihi kehidupan seseorang.

Bias menjadi diskriminasi di tempat kerja ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan publik ataupun pribadi yang mempengaruhi pekerjaan, jabatan atau kehidupan orang lain di atas dasar-dasar yang tidak lagi murni persyaratan kerja. Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa, “semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan material maupun pengembangan spiritual secara bebas dan bermartabat, dengan jaminan ekonomi serta kesempatan yang sama.” (ILO 2012: 4). Prinsip-prinsip ini diartikulasikan sebagai hak-hak dasar setiap manusia. Apa yang benar bagi seorang individu manusia adalah benar pula bagi masyarakat, dan juga baik bagi ekonomi maupun bangsa.

Setiap orang berhak mendapatkan persamaan kesempatan memperoleh pekerjaan dan persamaan perlakuan dalam pekerjaan, tanpa diskriminasi. Pekerja serta pelamar kerja tidak boleh dikenakan perlakuan diskriminatif. Diskriminasi termasuk pembedaan berdasar pada ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, aliran politik, disabilitas atau HIV/AIDS dan sebagainya yang mengakibatkan perlakuan yang tidak sama.

Terdapat diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung timbul ketika suatu dasar diskriminasi yang dilarang secara terang-terangan digunakan untuk suatu perbedaan perlakuan terkait pekerjaan dalam UU, peraturan atau praktik. Misalnya, suatu UU ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja migran dari etnis tertentu akan menerima bayaran kurang dari pekerja yang merupakan etnis lain untuk jenis pekerjaan yang sama merupakan

tindak diskriminasi langsung. Atau, penciptaan kesempatan kerja yang berbeda bagi laki-laki atau perempuan saja, atau bagi orang yang menganut aliran politik tertentu saja, merupakan diskriminasi langsung.

Diskriminasi langsung terus menjadi hal yang umum dalam praktik ketenagakerjaan yang sesungguhnya. Diskriminasi yang tidak tersamar, eksplisit atau langsung “berdasarkan subyektifitas/keinginan” biasanya timbul ketika misalnya pengusaha memilih satu jenis kelamin saja dalam bidang di mana mereka dianggap memiliki keuntungan kompetitif, misalnya, perempuan dalam pekerjaan bidang jasa karena para pelanggan lebih memilih perempuan, atau laki-laki sebagai manajer karena mereka dianggap lebih mampu untuk menjadi pembuat keputusan.

Diskriminasi tak langsung merujuk pada peraturan dan praktik-praktik yang terlihat netral tetapi pada praktiknya berujung pada kondisi tidak menguntungkan terutama dialami oleh orang-orang dari satu kelompok jenis kelamin, ras, warna kulit atau karakteristik lainnya, dan tidak dapat dibenarkan oleh persyaratan inheren dari suatu pekerjaan. Diskriminasi tak langsung dapat melibatkan persyaratan tertentu (misalnya, tinggi badan atau cara berpakaian), kondisi (misalnya jam kerja) atau praktik (misalnya, menyalahkan orang untuk kejadian biasa) yang memiliki dampak negatif yang tidak proporsional terhadap anggota kelompok tertentu, seperti perempuan, kelompok etnis atau agama.

Diskriminasi tak langsung seringkali tersembunyi dan tidak langsung terlihat. Hal ini mungkin merupakan hal yang tidak disengaja dan berkembang dari praktik yang tidak disadari dan diterima secara kultural. Dalam banyak contoh diskriminasi tidak langsung dapat dianggap sebagai “bisnis seperti biasanya” atau prosedur operasi “normal” yang sejalan dengan tradisi yang telah lama berjalan dan diterima. Untuk memahami diskriminasi tak langsung seseorang harus sering menantang asumsi yang sudah terbentuk dan mencatat dampak dan hasil negatifnya dalam bursa tenaga kerja dengan cara yang

meyakinkan. Orang tidak boleh mempertanyakan motif dari orang-orang yang terlibat, melainkan apa hasil dari tindakan mereka.

Kesetaraan adalah HAM yang harus dinikmati semua orang dalam pekerjaan maupun bidang kehidupan lainnya. Prinsip ini pertama kali dikenal dalam dokumen Konstitusi ILO pada tahun 1919 dan 1944, dan kemudian dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Setelahnya, prinsip non diskriminasi telah dikukuhkan dalam berbagai standar perburuhan dan perjanjian HAM internasional. Instrumen mendasar utama yang diakui dunia yang mengukuhkan prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan di tempat kerja adalah Konvensi ILO tentang Upah yang Setara, 1951 (C100) dan Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (C111).

Promosi kesetaraan dan perjuangan melawan diskriminasi telah menjadi prinsip yang menjadi pedoman ILO sejak dibentuk pada tahun 1919. Perjanjian Damai Versailles tahun 1919 yang mulanya menyebutkan sembilan tujuan bagi ILO memasukkan prinsip kesetaraan upah bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang setara nilainya dan menghimbau perlakuan ekonomi yang sejajar bagi semua pekerja yang menjadi warga negara yang sah di negara manapun. (Bagian XIII, Pasal 427). Deklarasi Philadelphia (1944) yang dijadikan lampiran Konstitusi ILO pada tahun 1944 merumuskan ulang dan mengokohkan prinsip kesetaraan di tempat kerja. Deklarasi tersebut mengokohkan: "semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan ataupun jenis kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan material maupun pengembangan spiritual dalam kondisi kebebasan dan martabat, jaminan ekonomi dan kesempatan yang setara."

Dalam kaitan ini, standar-standar ketenagakerjaan adalah instrumen kunci yang digunakan ILO dalam mencoba mewujudkan tujuan konstitusionalnya, yakni kesetaraan kesempatan dan perlakuan di tempat kerja. Standar tersebut dapat berupa konvensi dan rekomendasi. Konvensi dan rekomendasi menetapkan standar yang

memandu hukum dan praktik nasional serta menjadi tolok ukur pencapaian:

- Konvensi menciptakan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional setelah diratifikasi oleh negara anggota ILO. Konvensi yang belum diratifikasi mempengaruhi hukum dan kebijakan nasional.
- Rekomendasi menyediakan pedoman otoritatif yang sama dengan konvensi, namun tidak terbuka untuk ratifikasi. Biasanya rekomendasi berisi panduan bagi standar-standar yang lebih tinggi.

Konvensi Upah yang Setara (No. 100), yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada tahun 1951, mempromosikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini adalah instrumen ketenagakerjaan internasional yang pertama yang diadopsi untuk menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan, khususnya menanggapi diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (No. 111), diadopsi oleh sesi ke-42 dari Konferensi Perburuhan Internasional pada 4 Juni 1958, menetapkan standar komprehensif untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam dunia kerja, antara lain:

- Tujuan dari Konvensi No. 111 adalah untuk melindungi semua orang dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau asal-usul sosial dalam pekerjaan dan jabatan;
- Konvensi ini melindungi tak hanya mereka yang bekerja atau terikat dalam pekerjaan, tetapi juga mereka yang mempersiapkan diri untuk bekerja, mencari pekerjaan atau terancam kehilangan pekerjaan;
- Konvensi ini berlaku pada semua sektor kegiatan dan mencakup semua jabatan dan pekerjaan baik dalam sektor

publik maupun swasta, dan juga sektor informal. Konvensi ini mencakup tak hanya pekerjaan bergaji, tetapi juga pekerjaan mandiri.

Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dengan pandangan untuk menghapuskan diskriminasi dalam semua aspek pekerjaan dan jabatan bagi semua pekerja. Konvensi ini oleh karenanya tidak hanya peduli tentang penghapusan diskriminasi – atau ketiadaan ketidaksetaraan – tetapi selangkah lebih maju dan memerlukan pendekatan proaktif dan positif menuju promosi kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan:

- Kesempatan kerja yang setara berarti bahwa seseorang harus memiliki peluang untuk mendapat pelatihan, penempatan atau pekerjaan yang tidak lebih kecil dibandingkan dengan peluang orang lain dalam situasi yang sama atau sebanding.
- Perlakuan yang setara dalam pekerjaan berarti bahwa seorang pemberi kerja harus memperlakukan seorang karyawan dengan tidak lebih rendah daripada karyawan lainnya yang berada dalam situasi yang sama atau sebanding.

Selain itu, deklarasi ILO tahun 1998 tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja serta Deklarasi ILO tahun 2008 tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil menegaskan kembali pentingnya nondiskriminasi sebagai prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Kedua Konvensi ini dimasukkan dalam prinsip penting Global Compact PBB yang diluncurkan tahun 2000 sebagai inisiatif kebijakan strategis untuk usaha yang dilakukan guna menggabungkan kegiatan mereka dengan 10 prinsip yang diterima secara universal di bidang HAM, lingkungan kerja dan anti-korupsi.

Tabel 2.1. Standar Ketenagakerjaan Internasional Sebagai Tolok Ukur Non-diskriminasi

No	Jenis Konvensi
1.	Konvensi Upah yang Setara, 1951 (No. 100)
2.	Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
3.	Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No. 156)
4.	Konvensi Perlindungan Wanita Hamil, 2000 (No. 183)
5.	Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Revisi), 1949 (No. 97)
6.	Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1973 (No. 143)
7.	Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No. 169)
8.	Konvensi Rehabilitasi Keterampilan & Kesemp. Kerja (Penyandang disabilitas), 1983 (No. 159)
9.	Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964 (No. 122)
10.	Konvensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975 (No. 142)
11.	Konvensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta, 1997 (No.181)
12.	Konvensi tentang Pekerjaan Paruh Waktu, 1994 (No. 175)
13.	Konvensi tentang Pekerjaan di Rumah, 1996 (No. 177)
14.	Konvensi tentang Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189)
15.	Rekomendasi Pekerja Usia Lanjut, 1980 (No. 162)
16.	Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (No. 200)

Sumber: Panduan Kesetaraan dan non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (2012)

Selanjutnya, perlindungan dari diskriminasi juga merupakan hak mendasar manusia. Ketentuan dan instrumen yang menghimbau negara-negara untuk melawan diskriminasi merupakan pendukung utama dari hukum internasional dan dimasukkan dalam sejumlah instrumen PBB.

Prinsip umum dari kesetaraan dan diskriminasi diadopsi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 adalah bahwa hak asasi manusia seharusnya dinikmati tanpa adanya

pembedaan apapun. DUHAM menetapkan daftar yang masih dapat ditambah mengenai dasar-dasar diskriminasi yang dilarang:

- Ras atau warna kulit
- Jenis kelamin
- Bahasa
- Agama
- Pandangan politik atau lainnya
- Asal-usul bangsa atau sosial
- Harta benda, kelahiran atau status lain.

Sembilan perjanjian inti HAM ini merefleksikan prinsip umum kesetaraan dan non diskriminasi dalam pemenuhan HAM, sebagaimana diadopsi dalam DUHAM. Daftar dasar-dasar diskriminasi yang dilarang tersebut juga dimasukkan dalam Perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Perjanjian-perjanjian berikutnya telah memperpanjang daftar tersebut di atas. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara khusus ditujukan pada penghapusan diskriminasi rasial dan diskriminasi terhadap perempuan.

Perlindungan sosial tenaga kerja di negara berkembang

Sayangnya, terlepas dari sejarah sistem perlindungan sosial yang panjang di dunia modern, sampai sekarang hanya sekitar 27 per cent populasi di seluruh dunia dapat memperoleh skema perlindungan sosial yang memadai (ILO, 2014). Sementara itu, sisa populasi, terutama pekerja sektor informal di sebagian besar negara berkembang yang berpendapatan rendah, tetap ditemukan (Holmes dan Scott 2016: iv).

Pekerja informal biasanya memiliki penghasilan lebih rendah daripada pekerja formal, sehingga tidak dapat membeli asuransi swasta

dan pensiun dan juga tidak membayar pajak untuk mengakses kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, mereka biasanya memiliki sedikit atau tidak adanya perlindungan oleh standar ketenagakerjaan (seperti upah minimum) dan hak (seperti cuti sakit, asuransi kesehatan atau asuransi pengangguran), mereka juga memiliki kekurangan organisasi dan perwakilan (Razavi et al., 2012; Tessier et al., 2013). Mereka biasanya dikecualikan dari perlindungan sosial terhadap risiko atau ketidakpastian kerja (seperti keterlambatan pembayaran, keselamatan kerja, dll.) Dan juga tidak memiliki pengaturan untuk mengatasi kontinjensi umum tentang penyakit, kecacatan, kehilangan harta benda dan kematian, sedangkan jenis pekerjaan di sektor informal seringkali berisiko tinggi terhadap lingkungan yang berbahaya, genting dan rentan (Chen, 2012).

Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan sosial di negara-negara berkembang umumnya berfokus pada pengembangan perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja. Brazil, misalnya, membuat amandemen konstitusi pada tahun 2013 untuk menjamin hak buruh bagi semua pekerja. Dengan undang-undang, pekerja rumah tangga sekarang memiliki hak yang sama dengan pekerja lain. Undang-undang ini menetapkan ketentuan dimana pengusaha diharuskan membayar setara dengan 8 per cent dari gaji bulanan mereka menjadi dana yang akan digunakan untuk redundansi wajib, kematian dan kontinjensi lainnya untuk pekerja mereka (ILO 2013). Demikian pula, negara-negara lain seperti Indonesia, Namibia, Cile, Afrika Selatan, China Rwanda, dan Vietnam, telah memperluas skema asuransi sosial kepada pekerja sektor informal, yang sekarang memberikan mereka asuransi pengangguran dan penyediaan maternitas (Cuevas, et al., 2009; Holmes dan Scott 2016: 1-2).

Subsidi Pengangguran (*unemployment subsidy*)

Semua negara yang menerapkan konsep welfare state, memiliki kebijakan subsidi bagi pengangguran. Skema tunjangan pengangguran pertama kali diperkenalkan di Inggris dengan Undang-undang

Asuransi Nasional 1911 di bawah pemerintahan Partai Liberal H. H. Asquith. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi meningkatnya pengaruh Partai Buruh terhadap penduduk kelas pekerja di negara itu. Undang-undang itu membuat sistem kontribusi asuransi untuk pekerja terhadap penyakit dan pengangguran. Skema tersebut hanya berlaku untuk penerima upah, sedangkan keluarga mereka dan orang yang tidak punya upah harus bergantung pada sumber dukungan lain. Pada saat awal pelaksanaannya, skema ini dikritik oleh kelompok komunis, yang menganggap asuransi semacam itu akan mencegah para pekerja memulai sebuah revolusi, sementara para pengusaha dan perusahaan memandangnya sebagai sesuatu yang jelek tapi diperlukan (*"necessary evil"*).

Skema ini didasarkan pada prinsip-prinsip aktuarial dan didanai oleh jumlah tetap masing-masing dari pekerja, pengusaha, dan pembayar pajak. Pada awalnya, skema dibatasi untuk industri tertentu, terutama yang lebih stabil seperti pembuatan kapal, dan tidak membuat ketentuan untuk anggota keluarga. Setelah satu minggu menganggur, pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan 12 pence / minggu hingga 15 minggu dalam setahun. Pada tahun 1913, sebanyak 2,3 juta jiwa diasuransikan di bawah skema tunjangan pengangguran ini. Selanjutnya, skema dikembangkan melalui Undang-undang Asuransi Pengangguran tahun 1920 yang menciptakan sistem pembayaran bagi para pekerja yang menganggur. Sistem baru ini memberikan 39 minggu tunjangan pengangguran (dari yang tadinya hanya 15 minggu) kepada lebih dari 11 juta pekerja — sehingga praktis seluruh penduduk sipil yang bekerja (kecuali pekerja rumah tangga, buruh tani, pekerja kereta api, dan pegawai negeri, yang diatur secara berbeda).

Tunjangan pengangguran mulai diperkenalkan di Jerman pada 1927, dan di sebagian besar negara Eropa pada periode setelah Perang Dunia Kedua dengan perluasan kebijakan negara kesejahteraan. Asuransi pengangguran di Amerika Serikat berasal dari inisiatif Wisconsin pada tahun 1932. Melalui Undang-Undang Jaminan Sosial

tahun 1935, pemerintah federal Amerika Serikat secara efektif mendorong masing-masing negara bagian untuk mengadopsi rencana asuransi pengangguran.

Tantangan Baru Welfare State

Singkat kata, negara kesejahteraan menghadapi sejumlah masalah – mulai anggaran yang lebih ketat, skema keynesian tentang *full-employment* sulit diwujudkan, adanya risiko baru tentang kemiskinan, dan dunia yang menjadi lebih 'global'. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep negara kesejahteraan kedepan? Selama 20 tahun terakhir banyak negara, khususnya di Benua Eropa, telah mengalami pertumbuhan yang lambat, pengangguran massal yang tinggi, pengeluaran pemerintah yang tampaknya tidak terkendali. Ini juga telah menimbulkan masalah yang signifikan bagi negara kesejahteraan. Pertanyaannya adalah - apa sumber masalah ini? Beberapa argumen ekonomi sering disebut sebagai masalah krusial yang dihadapi negara kesejahteraan: globalisasi, penuaan penduduk, dan perubahan dalam struktur ekonomi (dari tingkat primer / sekunder ke tingkat tersier). Yang lain melihat struktur kelembagaan yang memediasi masalah ekonomi ini dengan cara yang sangat berbeda, dan menekankan bagaimana struktur negara kesejahteraan itu sendiri menawarkan kunci untuk memahami masalah ekonomi dan solusi mereka. Pendapat juga dikaitkan dengan semakin meningkatnya tuntutan hidup masyarakat Eropa: semakin lama semakin manja dan konsumtif sehingga proteksi dan bantuan pemerintah tidak mencukupi untuk menjadi stimulus ekonomi (domestik).

Merespon keadaan ini, hipotesis konvergensi kaum neo-liberal menyajikan gagasan bahwa negara kesejahteraan yang besar dan negara intervensionis adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Sejak tahun 1970an, The Thatcher / Reagan – TINA initiatives telah mengeluarkan kebijakan pengurangan besar-besaran program subsidi

dan perlindungan pemerintah dikaitkan dengan globalisasi, demografi dan perkembangan sektor jasa. Sehubungan dengan Eropa, konsep 'Eurosclerosis' sering digunakan (Lindbeck dan Snower), untuk menggambarkan dengan analogi medis bahwa arteri ekonomi Eropa tersumbat, dan urat nadi ekonomi ekonomi tidak dapat mengalir dengan mudah. Berbagai aturan pasar tenaga kerja, upah minimum yang tinggi, pembatasan pemecatan pekerja dll – telah menyumbat arteri ekonomi Eropa sehingga kelesuan ekonomi terjadi. Solusinya – membuka blokade arteri – dengan liberalisasi ekonomi, deregulasi keuangan, industri, menyingkirkan upah minimum dan belanja sosial yang berat. Dengan kata lain, argumen ini melihat negara kesejahteraan sebagai variabel independen utama - yang menjelaskan masalah ekonomi Eropa.

Argumen kedua menyalahkan kebijakan model Keynesianisme, yang dinilai bekerja buruk dalam lingkungan perdagangan tinggi, karena kecenderungan marginal untuk mengimpor telah memotong nilai stimulus permintaan. Contoh ini terjadi pada tahun 1981 di bawah Presiden Mitterand di Perancis. Pemerintah Perancis berusaha untuk menggunakan stimulus permintaan Keynesian, dan mengalami masalah a) masalah inflasi tetap disepertikan 14% b) Bisnis Perancis tidak merespon perluasan permintaan dengan meningkatkan output, lemah pada sisi pasokan, sehingga daya beli ekstra tidak menghasilkan investasi ekstra oleh perusahaan-perusahaan Prancis. c) Perdagangan ekonomi Perancis lebih banyak dengan negara-negara lain dan uang bocor ke luar negeri. Argumen ini menganggap belanja pemerintah lebih umum sebagai variabel dependen, dan melihatnya kurang efektif di dunia pasca-Keynesian. Pada masa globalisasi sekarang, akan sangat sulit menjamin agar bantuan pemerintah sepenuhnya bermanfaat dalam batas teritori domestik. Uang dari jaminan sosial juga sangat mungkin menjadi stimulus ekonomi negara asing, bila orientasi import produk murah dibiarkan dalam skema ekonomi liberal.

Dalam kaitan ini, Rodrik (1997) menganalisis bahwa meskipun tenaga kerja di negara barat tidak akan tersaingi oleh tenaga kerja dari

negara berkembang mengingat pendidikan dan skill yang lebih prima, akan tetapi terjadi berkurangnya elastisitas demand terhadap tenaga kerja, karena konsumen dan pengusaha dapat mengganti kebutuhan tenaga kerja dengan memindah produksi ke negara asing yang ongkos tenaganya lebih rendah. Hal sama juga dilakukan dalam pembelian produk asing. Sebagai konsekwensinya, subsidi yang diberikan untuk maksud meningkatkan demand/kemampuan beli/konsumsi menjadi mahal dan sia-sia. Oleh karena itu, dia meragukan jika model 'embedded liberalism' dari Keynes in bisa dipertahankan.

Tantangan lain untuk negara kesejahteraan adalah perubahan realitas kemiskinan dan cara kita melihat kemiskinan. Kemiskinan adalah hal yang sulit untuk diukur (apakah kita melihat kemiskinan relatif, atau kemiskinan absolut). Tetapi satu hal yang jelas adalah jenis orang yang miskin dan berisiko miskin telah berubah sejak saat negara kesejahteraan didirikan. Di masa lalu, kelompok manula adalah kelompok yang berisiko utama, sehingga negara kesejahteraan mencerminkan hal ini (banyak uang yang dihabiskan untuk pensiun). Saat ini, justru ada peningkatan jumlah anak-anak dalam kemiskinan (Cantillon 1997). Dengan demikian, resiko kemiskinan telah bergeser dari bagian pasif dari siklus hidup ke bagian aktif (yaitu orang muda miskin -- ini terkait dengan pasar tenaga kerja dan ketidakstabilan keluarga). Hal ini membuat semakin banyak orang yang tidak berkontribusi atau memperoleh manfaat dari system (karena mereka belum bekerja atau membayar iuran asuransi sosial atau iuran pensiun). Dengan demikian, perubahan pola kemiskinan menambah tekanan lain pada negara kesejahteraan, karena ini menunjukkan tidak hanya bahwa negara kesejahteraan mengalami kesulitan menyediakan program tradisionalnya, tetapi ada kebutuhan baru yang tidak bisa diatasi.

3. The Nordics (Scandinavian) Model

Nordik (Skandinavia) adalah istilah yang mengacu pada sejumlah negara yang berada pada daratan Eropa sebelah utara, yakni Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Menurut klasifikasi Esping-Anderson, Jerman termasuk dalam kluster model *Social-Democratic Welfare State*. Negara-negara ini sering menjadi pelopor --sehingga menjadi rujukan negara lain-- dalam mendesain sistem layanan kesejahteraan rakyat secara maju. Mereka memiliki sistem jaminan-proteksi asuransi sosial, kesehatan dan pelayanan lain seperti pendidikan dan perumahan yang tertata dengan baik dan tersusun dengan integratif, sehingga kawasan Nordik mampu menawarkan solusi kesejahteraan yang komprehensif.

Sistem tersebut dirancang dengan inovatif, untuk memastikan semua warga negara dapat hidup diatas garis wajar yang kriterianya setiap tahun selalu dibuat lebih baik. Baik. Implementasinya dijalankan dengan detail dan ketat, tetapi ramah oleh di rumah sakit, fasilitas perawatan, sekolah/universitas, instansi sosial, lembaga ketenagakerjaan, dan industri. Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan juga selalu diupayakan menggunakan solusi teknologi mutakhir seperti sistem digital - untuk melayani masyarakat sehingga tercapai standar kepuasan masyarakat yang tinggi. Banyak dari aplikasi teknologi ini juga dikaitkan dengan usaha untuk mempromosikan kelestarian lingkungan, kesetaraan gender, keadilan ekonomi dan sosial. Sistem welfare unik yang dikembangkan oleh mereka kemudian dikenal dengan "The Nordics Model".

Gambar. 3.1. Wilayah Nordics (Scandinavia)



Sumber: Peter Fitzgerald, Stefan Ertmann, Júlio Reis,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24485850>

Model ini mengacu pada kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan baik (*well being*) warga negara yang (oleh karenanya) juga terpadu dengan kebijakan pasar tenaga kerja. Model Nordik dibedakan dari jenis negara kesejahteraan lainnya karena penekanan pada memaksimalkan partisipasi angkatan kerja, mempromosikan kesetaraan gender, tingkat manfaat yang merata dan luas, besarnya redistribusi pendapatan dan liberalisme kebijakan fiskal ekspansif. Mereka juga memiliki suatu mekanisme sistem *social safety net* (jaring pengaman sosial), perencanaan pensiun bagi semua warga negara, yang dilengkapi dengan pelayanan publik seperti *free education* (pendidikan bebas biaya) dan universal *healthcare* (perlindungan

kesehatan menyeluruh). Anggaran publik untuk kesehatan dan pendidikan di negara Nordik secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata OECD.

Meskipun ada beberapa perbedaan di antara negara-negara Nordik dalam mengatur skema program kesejahteraan, mereka semua berbagi beberapa kesamaan umum. Hal ini termasuk: 1) kesepakatan untuk menerapkan bentuk negara kesejahteraan "universalis" --berlaku bagi semua orang tanpa klasifikasi tertentu-- yang ditujukan untuk meningkatkan otonomi individu dan mempromosikan mobilitas sosial; 2) sistem korporatis yang melibatkan pengaturan tripartit di mana perwakilan pekerja dan pengusaha menegosiasikan upah dan kebijakan pasar tenaga kerja yang dimediasi oleh pemerintah; dan 3) komitmen untuk memperluas kepemilikan pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Negara-negara Nordik menjamin adanya **otonomi individu**. Mereka telah lama menerapkan konsensus sosial demokrasi dan mempresentasikan ide-ide baru dari seluruh spektrum politik. Pada satu sisi mereka menerapkan kebebasan dan liberalisme, akan tetapi, pada sisi lain juga terus berinvestasi dalam modal manusia dan melindungi rakyat dari akibat-akibat negatif sistem kapitalistik.

Menurut sosiolog Finlandia Erik Allardt (1984), ciri sistem kesejahteraan Nordik adalah universalitas dan komprehensifitas jenis layanan. Tidak seperti sistem kesejahteraan di Amerika Serikat atau sebagian besar negara-negara Eropa Barat, target sasaran negara-negara Nordik mencakup seluruh populasi, tidak terbatas pada kelompok-kelompok yang tidak dapat mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri. Contoh universalitas cakupan ini adalah kesetaraan pensiun secara nasional yang tersedia bagi semua orang setelah mereka mencapai usia tertentu, terlepas dari apa yang telah mereka bayarkan ke dalam rencana, dan rencana kesehatan nasional berdasarkan kebutuhan medis daripada pada sarana keuangan. Selain itu, warga negara memiliki hak hukum atas manfaat yang diberikan oleh sistem kesejahteraan, suatu ketentuan yang dirancang untuk memenuhi apa yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan

setiap orang memiliki standar kehidupan yang layak. Dengan demikian, terdapat kesamaan yang luas terhadap pola kohesi sosial, sifat universal dalam penyediaan kesejahteraan untuk menjaga individualisme dengan memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok yang rentan dalam masyarakat, dan memaksimalkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan sosial. Sistem juga ditandai oleh fleksibilitas dan keterbukaan terhadap inovasi dalam penyediaan kesejahteraan.

Kesamaan yang lain adalah, semua negara Nordik menggunakan perangkat perpajakan untuk mendanai pelayanan program-program kesejahteraan. Sistem pajak dibuat dengan model progresive, sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, prosentase pajak yang dikenakan semakin tinggi. Tidak heran kiranya, beban pajak keseluruhan (sebagai persentase dari GDP) termasuk yang tertinggi di dunia — Swedia (51,1%), Denmark (46% pada tahun 2011) dan Finlandia (43%). Negara-negara Nordik memiliki tarif pajak yang relatif datar, yang berarti bahwa bahkan mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah dikenakan pajak pada tingkat yang relatif tinggi.

Terlepas dari kesamaan prinsip umum, tiap negara Nordik mengambil pendekatan yang berbeda pada administrasi praktis dari konsep negara kesejahteraan. Sebagai contoh, Denmark mendorong tingkat partisipasi sektor swasta yang tinggi pada penyediaan layanan publik dan kesejahteraan, di samping kebijakan asimilasi imigrasi. Sementara itu, model kesejahteraan Islandia didasarkan pada model “kesejahteraan-untuk-kerja” yang banyak memberikan proteksi bagi tenaga kerja mereka. Sedangkan negara kesejahteraan Finlandia memainkan peran penting keluarga dalam memberikan perawatan bagi orang tua, tidak seperti Norwegia yang sangat bergantung pada penyediaan institusi publik.

Majunya sistem kesejahteraan kemudian menghantarkan rakyat mencapai derajat kebahagiaan hidup yang tinggi. Laporan Survey tentang Kebahagiaan Dunia (*World Happiness Survey*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa negara-negara paling bahagia terkonsentrasi di wilayah Nordik. Mereka

menduduki peringkat tertinggi dalam metrik GDP riil per kapita, harapan hidup sehat, rasa memiliki terhadap seseorang untuk diandalkan, rasa percaya diri, kebebasan yang dirasakan untuk membuat pilihan hidup, kemurahan hati dan kebebasan dari korupsi. Negara-negara Nordik masuk dalam 10 besar Laporan Kebahagiaan Dunia secara konsisten dalam dua puluh tahun terakhir, dengan Norwegia dan Denmark mengambil posisi teratas. Mereka juga berhasil menekan korupsi sehingga angka index korupsi mereka rendah. Dalam survey Indeks Persepsi Korupsi 2018 Transparency International, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Norwegia berada di peringkat 10 teratas yang paling tidak korup di antara 167 negara yang dievaluasi.

Nordik dipuji banyak pihak sebagai negara-negara yang memberikan kebebasan rakyat mereka dari liberalisme pasar dengan menggunakan kapitalisme sebagai alat untuk menguntungkan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Atau dalam bahasa wartawan terkenal Ann Jones: "*capitalism serves the people*." Dia membandingkan kehidupan di Skandinavia dan Amerika: Di Amerika Serikat, pekerja bergaji penuh waktu bekerja 40 jam seminggu (walau bahkan sebenarnya rata-rata 49 jam), dan bahkan hampir 20 persennya mencatat lebih dari 60 jam. Sedangkan orang-orang di Skandinavia, di sisi lain, bekerja hanya sekitar 37 jam seminggu, bahkan ketika mereka tidak sedang pergi berlibur panjang.

Pada akhir hari kerja, sekitar jam empat sore (malah mungkin jam tiga selama musim panas), mereka punya waktu untuk menikmati hobi naik gunung atau hutan, berolahraga, mengunjungi museum atau perpustakaan, berenang bersama anak-anak, atau minum kopi dengan teman-teman mereka —yang membantu menjelaskan mengapa mereka senang dengan pekerjaan mereka, tidak seperti itu banyak orang Amerika yang benci pekerjaan mereka sendiri (Jones, 2016). Setiap tahun pekerja juga dapat berlibur dalam beberapa hari yang panjang tapi tetap dibayar gajinya. Sementara para pensiunan juga menerima santunan yang layak di hari tua. Tidak heran, ekonom terkemuka

Jeffrey Sachs (2015) memuji model Nordik, dengan menyebutnya sebagai “bukti bahwa kapitalisme modern dapat dikombinasikan dengan kesusilaan, keadilan, kepercayaan, kejujuran, dan kelestarian lingkungan.”

Sejarah Terbentuknya Model Nordik

Walaupun banyak variabel ikut berpengaruh terhadap terbentuknya model sistem kesejahteraan di negara-negara Nordik, akan tetapi agama dipandang sebagai variabel yang terpenting. Negara-negara Skandinavia menganut Lutheranisme sebagai agama utama mereka. Lutheranisme menyebar ke seluruh Skandinavia selama abad ke-16, karena pada saat itu, kerajaan Denmark-Norwegia (juga memerintah Islandia dan Kepulauan Faroe) serta raja Swedia (juga memerintah Finlandia) mengadopsi Lutheranisme. Pada abad ke 19, hampir seluruh konstitusi negara Nordik telah menetapkan Lutheran sebagai agama resmi negara. Nelson (2017) dan Schroder (2012) berpendapat bahwa Lutheranisme secara signifikan mempromosikan ide dari solidaritas sosial dan komunalitas yang saling percaya dan mempromosikan keterlibatan negara (Nordik) dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Adalah organisasi gereja resmi negara, Lutheran Church, yang pada awalnya mengorganisir pelayanan sosial seperti rumah jompo, rumah yatim piatu, sekolah, santunan kematian, santunan pelayanan kesehatan dan penyandang cacat, serta donasi bagi kaum miskin, yang berbasis *charity* (derma, pajak gereja). Gereja Lutheran wilayah Skandinavia awalnya berpusat di Copenhagen, yang memiliki cabang, atau berkoordinasi dengan gereja di negara Nordik lain seperti Swedia, Finlandia dan Islandia. Hal ini memungkinkan solidaritas kesejahteraan nasional dan koordinasi-koherensitas ekonomi yang mirip diantara negara-negara Nordik. Inisiatif-inisiatif gereja tersebut dikemudian hari, setelah Perang Dunia II, diformalkan dan diambil alih oleh negara melalui pembuatan berbagai undang-undang. Walaupun saat ini,

sejumlah besar orang Skandinavia telah digambarkan sebagai sekuler -- tidak lagi memeluk agama-- akan tetapi tradisi Lutheranisme tetap menjadi fondasi pelaksanaan sistem kesejahteraan yang melembaga.

Di Swedia, sistem kesejahteraan modern dimulai oleh program bantuan untuk kaum miskin yang diselenggarakan oleh Gereja Lutheran Swedia sejak abad ke 16. Program ini pada awalnya bersifat sukarela, kemudian menjadi wajib yang diatur dalam Hukum Perdata tahun 1734 ketika setiap paroki diminta untuk memiliki rumah singgah (*almsbouse*). Selama abad ke-19, komunitas peduli kesehatan swasta (semacam iuran asuransi kesehatan) mulai tumbuh, dan pada tahun 1891 ini menjadi diatur dan disubsidi pemerintah. Kemudian Pemerintah Partai Liberal mengesahkan Undang-undang Pensiun Nasional pada tahun 1913 untuk memberikan jaminan sosial bagi warga yang berusia lanjut. Pada tahun 1934, komunitas perlindungan pengangguran (semacam iuran perlindungan terhadap pengangguran yang dikelola serikat pekerja) mulai terbentuk dan pada akhirnya diatur dan disubsidi pemerintah dengan cara yang mirip dengan komunitas peduli kesehatan.

Pada tahun 1961, seluruh organisasi asuransi swasta digantikan dengan lembaga asuransi publik di tingkat pemerintah daerah (yang juga menangani pensiun). Demikian juga organisasi asuransi pengangguran, diambil alih kelola oleh serikat pekerja telah lebih diatur secara lebih terpusat dan diberi subsidi oleh pemerintah. Pada saat ini, tiga kementrian dibantu sejumlah lembaga diberi tanggung jawab untuk mengelola urusan kebijakan kesejahteraan. Kementerian Kesehatan dan Sosial (The Ministry of Health and Social Affairs) bertanggung jawab untuk menangani berbagai program kesejahteraan inti. Hal ini termasuk program perlindungan finansial terhadap sakit, bantuan bagi usia tua dan keluarga; layanan sosial; perawatan kesehatan; promosi hak-hak kesehatan dan anak-anak; bantuan individu untuk penyandang cacat dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan terhadap penyandang cacat nasional. Bidang pendidikan diurus oleh Kementerian Pendidikan dan Riset (The Ministry of

Education and Research). Sedangkan pengelolaan kebijakan tenaga kerja dilaksanakan oleh Kementrian Tenaga Kerja (Ministry of Employment).

Sementara itu, Norwegia juga membangun sistem kesejahteraan sosial dengan semangat Lutheranisme. Sistem kesejahteraan Norwegia telah dibangun sejak beberapa tahun yang lalu, utamanya pada periode 1880-1935 yang meletakkan berbagai fondasi untuk mewujudkan pendirian negara kesejahteraan, negara pelayanan sosial. Pada tahun 1952 untuk mewujudkan inisiatif penyempurnaan sistem kesejahteraan, dibentuklah Rencana Norwegia Utara sebagai wilayah percobaan. Bank pembangunan di utara Norwegia diciptakan. Investasi perusahaan di area tersebut dapat dikurangkan dari pajak. Ada beberapa peningkatan sarana prasarana, perluasan pasokan listrik dan pengembangan pelatihan kejuruan. Hasilnya, bagian wilayah ini berperan terhadap peningkatan produk nasional. Banyak pekerjaan baru di industri dan layanan diciptakan. Keberhasilan uji coba ini menjadi tonggak bagi kelanjutan kebijakan secara nasional pada permulaan untuk tahun 1960-an. Pemerataan di tingkat nasional dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemerataan pajak (Denters, Bas dan Lawrence E. Rose: 1995)

Karena cakupan fungsional negara kesejahteraan telah meningkat, penyediaan layanan kesejahteraan telah terhubung dengan proses desentralisasi dari tingkat pusat ke tingkat lokal pemerintah. Desentralisasi adalah metode untuk persamaan sosial dan distribusi biaya dan manfaat yang adil. Norwegia adalah negara yang besar dan jarang penduduknya. Model pemerintahan lokal Norwegia mewakili dua dimensi yang sama pentingnya: Pemerintah Daerah sebagai penyedia layanan vital kesejahteraan dan lembaga demokrasi lokal yang penting. Kesejahteraan kota setempat telah menjadi elemen sentral dalam negara kesejahteraan Norwegia seperti manfaat sosial, dimana hampir semua manfaat sosial telah disediakan oleh otoritas publik setelah Perang Dunia II. Sistem ini berangsur-angsur diperluas dengan satu demi satu manfaat. Saat ini, sebagian besar pelayanan

kesejahteraan Norwegia dilaksanakan oleh Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV, "Nye arbeids- og velferdsetaten"). NAV didirikan sebagai hasil dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Norwegia tahun 2006. Agen yang baru didirikan ini merupakan gabungan antara Kementrian Tenaga Kerja dan Layanan Kesejahteraan Norwegia (Norwegia: *Arbeids-og velferdsetaten*) dan bagian-bagian tertentu dari layanan sosial pemerintah daerah. Norwegia telah mengalami surplus ekonomi sejak pengembangan sumber daya hidrokarbon pada tahun 70-an. Kenyataan ini, ditambah dengan keinginan untuk mengurangi volatilitas yang berasal dari fluktuasi harga minyak, mendorong terciptanya Dana Minyak Norwegia, sekarang Dana Pensiun Pemerintah-Global (GPF-G) yang terintegrasi pengelolaannya dengan NAV.

Di Denmark, konsep negara kesejahteraan telah dikembangkan sejak 1870-an. Masyarakat Denmark pada waktu itu sangat homogen. Setelah perang melawan Jerman pada tahun 1864, mereka kehilangan semua bagian wilayah berbahasa Jerman dari monarki Denmark, dan setelah itu, negara hanya mencakup wilayah orang-orang berbahasa Denmark yang telah menjadi satu kerajaan sebelum tahun 1000; sehingga ada budaya yang sangat homogen dengan sejarah panjang di negara ini. Semua warganya adalah Lutheran dan hanya ada sedikit etnis minoritas yang tidak signifikan di negara itu. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat tinggi modal sosial dan koherensi dalam masyarakat Denmark. Konflik politik tidak pernah meluas ke konflik bersenjata dan kelas menengah yang kuat, termasuk petani dan pekerja, mendominasi Parlemen. Negara kesejahteraan dikembangkan lebih lanjut selama seluruh periode dari 1870-an hingga 1970-an. Pada tahun 1873 undang-undang untuk melindungi anak-anak dan anak-anak muda terhadap pekerjaan industri dibuat (pekerjaan dilarang untuk anak-anak kurang dari 10 tahun, dan anak-anak antara 10 dan 14 hanya diperbolehkan bekerja 6 jam per hari). Pada tahun 1891, dibuat undang-undang yang mengatur bantuan pensiun hari tua bagi lansia yang miskin dan pada saat yang sama menyediakan bantuan bagi

orang-orang yang kehilangan penghasilan mereka. Sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkumpulan asuransi kesehatan--sick-benefit ("*sygekasser*") dikonfirmasi pada tahun 1892 dan pada saat yang sama masyarakat membayar setengah dari biaya di rumah sakit untuk anggota perkumpulan ini. Pada tahun 1907 diatur perkumpulan asuransi pengangguran.

Perkembangan sistem meningkat setelah Perang Dunia Kedua dengan tingkat manfaat sosial yang tumbuh cepat, dengan jam kerja yang lebih pendek, liburan yang lebih panjang, dengan pendidikan gratis dan dengan sejumlah reformasi, misalnya reformasi pensiun hari tua umum pada tahun 1956 yang menetapkan pensiun umum untuk semua warga negara yang terlepas dari penghasilan mereka. Ketika krisis pengangguran terjadi, yang disebabkan oleh krisis minyak pertama, mencapai Denmark pada tahun 1974, sistem kesejahteraan telah sepenuhnya terbentuk. Sejumlah inisiatif dilakukan untuk mengurangi pasokan tenaga kerja; membantu orang tua yang memiliki anak kecil, menggratiskan biaya pendidikan, dan bantuan pensiun dini bagi orang yang ingin meninggalkan pasar tenaga kerja. Saat ini, di dalam sistem kesejahteraan Denmark, sejumlah layanan tersedia bagi warga negara, secara gratis. Ini berarti bahwa misalnya, sistem kesehatan dan pendidikan Denmark gratis. Model kesejahteraan Denmark disubsidi oleh negara melalui pajak, sehingga Denmark menjadi salah satu negara dengan tingkat perpajakan tertinggi di dunia.

Finlandia telah menyusun strategi membangun skema kesejahteraan sejak abad ke-19. Strategi tersebut secara khusus ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan mengurangi friksi antar kelas. Pada tahap awal, peraturan dan kebijakan sosial dibuat hanya untuk kelompok spesifik (seperti petani dan buruh) daripada bersifat umum. Setelah terjadi perang sipil di Finlandia tahun 1918, dibentuk undang-undang "Tenant farmer law" (*Torpparilaki, Torparlagen*), yang memungkinkan petani penggarap untuk membeli tanah yang mereka pakai dan karenanya memungkinkan mereka memiliki kepastian pendapatan dan jaminan hidup. Kemudian, peraturan tentang rencana

pensiun dibuat tahun 1937, walaupun pada awalnya hanya terbatas untuk membantu ibu yang membutuhkan. Baru setelah Perang Dunia II, kebijakan sosial dibuat secara lebih komprehensif dan universal sebagaimana negara Nordik yang lain.

Sistem kesejahteraan Finlandia pada awalnya agak berbeda dari negara-negara Nordik lainnya terutama karena pemberian subsidi yang lebih rendah dalam beberapa kategori, seperti pembayaran sakit dan pengangguran. Pengeluaran sosial Finlandia hanya mencapai sekitar 7 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu pada 1950, kira-kira sama dengan apa yang dibelanjakan Swedia, Denmark, dan Norwegia. Pada pertengahan 1980-an, pengeluaran sosial Finlandia telah meningkat menjadi sekitar 24 persen dari PDB, dibandingkan dengan masing-masing negara 35, 30, dan 22 persen. Kurang dari 10 persen dari pengeluaran ini dibayar oleh penerima upah Finlandia; sisanya dibayar kurang lebih sama dari negara dan dari perusahaan majikan. Sampai paruh kedua tahun 1970-an, pengusaha Finlandia membayar porsi pengeluaran sosial yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di negara-negara Nordik lainnya. Akan tetapi, sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi dunia setelah 1973, ada beberapa pergeseran beban sosial kepada negara, yang membuat perusahaan Finlandia lebih kompetitif di luar negeri.

Aspek-aspek kebijakan kunci

Tingginya tingkat kesejahteraan yang diterima warga di negara-negara Nordik tidak terlepas dari konstruksi kebijakan-kebijakan kunci yang khas dan sinergis satu sama lain. Kebijakan itu lebih cenderung bersifat pragmatis, daripada ideologis. Pemerintah negara-negara Nordik nampaknya tidak terlalu risau berkait dengan kriteria ideologi mana mereka mendasarkan kebijakannya. Selama layanan publik berfungsi dengan baik, mereka tidak mempermasalahkan siapa yang menyediakannya: kadang pemerintah kadang swasta. Denmark dan

Norwegia, misalnya, memungkinkan perusahaan swasta untuk ikut menjalankan rumah sakit umum. Swedia memiliki sistem universal voucher sekolah, dimana sekolah swasta nirlaba dapat bersaing dengan sekolah negeri untuk mendapatkan murid yang memiliki voucher. Denmark juga memiliki voucher — tetapi yang bisa di-top up oleh penggunanya untuk membayar sekolah yang biayanya lebih tinggi dari standar dana bantuan pemerintah. Beberapa kebijakan kunci tersebut diantaranya adalah:

Kebijakan Ekonomi Makro

Negara-negara Nordik pada umumnya mengelola sistem kesejahteraan berdasarkan pada kebijakan ekonomi liberal yang terintegrasi dengan pengelolaan labor market, sebagai bagian dari suatu model ekonomi korporat (*corporatist economic model*) yang dimaksudkan untuk mereduksi konflik antara kepentingan pekerja (buruh) dan kapital (pengusaha). Sesuai dengan prinsip kapitalisme, negara-negara Nordik menempati peringkat sangat tinggi dalam kebebasan pasar produk sesuai dengan peringkat OECD. Mereka juga menekankan hak kepemilikan yang kuat, penegakan kontrak, dan kemudahan melakukan bisnis secara keseluruhan. Singkat kata, ekonomi dikelola dengan model pasar bebas (*free market capitalist economic system*) yang ditandai dengan tingkat kepemilikan swasta (*private ownership*), terkecuali Norwegia yang memiliki sejumlah besar Badan Usaha Milik Negara (*State-Owned Enterprises*) dan juga kepemilikan di perusahaan-perusahaan yang telah go-public.

Akan tetapi, pada sisi lain, terdapat derajat intervensi negara yang signifikan dalam pengaturan hubungan industrial dan penyediaan perlindungan sosial bagi warga negara. Model ini diterapkan secara optimum, utamanya di Swedia dan Norwegia, dimana organisasi federasi dan representasi buruh diperkenankan melakukan perundingan di tingkat nasional dengan mediasi dari pemerintah. Intervensi pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin penyediaan pekerjaan, pemerataan, perlindungan kecelakaan kerja, skema pensiun,

dan relokasi tenaga kerja, sehingga setiap warga negara memiliki akses pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Pasar tenaga kerja di negara-negara Nordik pada umumnya flexible, dimana hukum memungkinkan kemudahan bagi pengusaha untuk merekrut dan memberhentikan pegawai atau mengadopsi teknologi pengganti tenaga kerja (*labor-saving technology*). Untuk memitigasi efek negatif kebijakan ini terhadap pekerja, pemerintah menyediakan program social welfare yang ekstensif, serta perlindungan hak-hak pekerja. Misalnya, pemerintah Denmark mengatur banyak waktu cuti berbayar (libur tapi diberikan gaji) bagi karyawan, yang merupakan salah satu keuntungan utama menjadi seorang karyawan di sektor manapun. Pegawai/buruh biasanya bisa mendapatkan hingga lima minggu cuti ditambah sekitar sembilan hari libur umum (bahkan plus kemungkinan tambahan hari libur berbayar lain dari perusahaan). Ketentuan ini berlaku bagi sebagian besar karyawan yang digaji, tetapi tidak termasuk bagi konsultan independen, pekerja lepas, atau karyawan paruh waktu.

Persentase keikutsertaan pekerja yang tinggi dalam serikat pekerja. Pada tahun 2017, kepadatan keikutsertaan dalam serikat pekerja adalah 86% di Islandia, 69% di Finlandia, 68% di Swedia, 67% di Denmark dan 52% di Norwegia. Sebagai perbandingan, kepadatan keanggotaan serikat pekerja adalah 14% di Meksiko dan 11% di Amerika Serikat. Keanggotaan serikat pekerja yang lebih rendah di Norwegia terutama diakibatkan oleh tidak adanya sistem Ghent (dana subsidi pengangguran) sejak tahun 1938. Sebaliknya, Denmark, Finlandia dan Swedia semuanya memiliki dana pengangguran yang dikelola serikat pekerja.

Pemerintah mengatur pola kemitraan tripartit: yakni antara pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah, di mana mitra sosial ini menegosiasikan ketentuan untuk mengatur tempat kerja di antara mereka sendiri, daripada dipaksakan oleh hukum. Dalam pelaksanaannya, akan tetapi, Swedia banyak mendesentralisasikan koordinaasi upah, sedangkan Finlandia cenderung lebih tersentralisir.

Kebijakan model ini nampak menguntungkan karena telah mengurangi pengangguran dan ketidakpuasan buruh sehingga negara-negara Nordik memiliki tingkat intensitas gejolak demonstrasi buruh yang lebih rendah dibandingkan negara lain di dunia. Dalam kaitan ini, dunia merekognisi bahwa negara-negara Nordik menduduki peringkat tertinggi dalam melindungi hak-hak pekerja dalam the International Trade Union Confederation's 2014 Global Rights Index, dengan Denmark menjadi satu-satunya negara yang menerima skor sempurna.

Karena alasan-alasan tersebut, ekonomi model Nordik juga dideskripsikan sebagai sistem kapitalisme kompetitif (*competitive capitalism*) yang dikombinasikan dengan tingginya prosentase populasi yang bekerja di sektor publik (sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja). Tahun 2013, majalah *The Economist* mendiskripsikan negara Nordik sebagai model/sistem keseimbangan "*stout free-traders who resist the temptation to intervene even to protect iconic companies*" yang memitigasi efek-efek negatif kapitalisme dan menyatakan bahwa sistem tersebut "*are probably the best-governed in the world*".

Berbagai tokoh ekonomi menyebut ekonomi Nordik sebagai "*cuddly capitalism*", dengan level yang rendah dalam ketidakadilan (*low level inequality*), banyak bantuan dan proteksi sosial, dan pemerataan pendapatan lewat pajak progresif, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan di kalangan elit. Hal ini tentu berbeda dengan kapitalisme garis keras model Amerika Serikat yang mengakibatkan konsentrasi kekayaan di tangan lingkaran elite. Dalam kaitan tersebut, perdagangan bebas dikombinasikan dengan penanggulangan resiko bersama (*collective risk sharing*) melalui program sosial dan lembaga pasar tenaga kerja yang memberikan perlindungan terhadap resiko yang diakibatkan dari ekonomi terbuka.

Negara-negara Nordik pada umumnya memberikan alokasi biaya publik yang tinggi. Swedia mencapai 56.6% dari PDB, sementara Denmark 51.7% dan Finland 48.6%. Salah satu alasan utama dalam hal ini adalah besarnya jumlah pegawai negeri untuk melayani kesejahteraan warga. Mereka bekerja pada berbagai bidang, termasuk

pendidikan, *healthcare*, tenaga kerja, perpustakaan dan sebagainya. Jumlah mereka menduduki sepertiga dari jumlah keseluruhan pekerja (bahkan lebih dari 38% di Denmark). Biaya anggaran publik juga tinggi untuk bantuan sosial seperti subsidi pengangguran dan pensiun dini (*early-retirement programmes*). Sejak tahun 2001, besarnya tunjangan pengangguran berbasis upah adalah sekitar 90% dari upah minimum di Denmark dan 80% di Swedia, dibandingkan dengan 75% di Belanda dan 60% di Jerman.

Skema Perpajakan

Sebagaimana dikemukakan di atas, sistem kesejahteraan negara-negara Nordik, ditopang oleh sistem perpajakan yang progresif. Tarif pajak mereka termasuk yang tertinggi di dunia. Hal ini disamping berguna untuk membiayai berbagai jenis pelayanan yang reliabel, juga dimaksudkan sebagai upaya pemerataan (*distribution of wealth*). Dengan demikian, kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan juga dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut, diantaranya meliputi pajak penghasilan badan (perusahaan), pajak penghasilan individu, dan pajak pertambahan nilai (*value added tax*, atau juga kadang disebut *Goods and Services Tax / GST*). Perpajakan di Nordik dipungut/berkontribusi ke tiga tingkat pemerintahan yang berbeda: desa/kelurahan (*municipality*), daerah (*county*), dan pemerintah pusat.

Pajak penghasilan dipungut dengan dikurangkan dari sumbernya, yang disebut *pay-as-you-earn* (PAYE). Ini berarti setiap instansi/perusahaan yang membayar upah pegawai harus memungut pajak penghasilan dengan cara memotong gaji/honor secara langsung dan membayarkannya ke kantor pajak. Jumlah prosentasi pajak minimum dan maksimum per negara berbeda-beda. Denmark, misalnya, memberlakukan tarif pajak minimum paling tinggi diantara negara Nordik, yaitu sebesar 29.68% (bagi mereka yang pendapatan tahunannya diatas \$7,760). Sedangkan bagi mereka yang dianggap

miskin (pendapatan kurang dari \$7,760) maka negara akan mengembalikan pajak yang sudah dibayar. Sementara itu, Finlandia memberlakukan pajak minimum sebesar 7,71% bagi penduduk berpendapatan diatas € 2,930, dan bagi penduduk yang berpendapatan lebih rendah dari angka tersebut tidak dikenakan pajak (pajak yang sudah dibayar akan dikembalikan pada akhir tahun). Seluruh negara Nordik memiliki sistem perpajakan untuk penghasilan dari pekerjaan yang menggabungkan pajak penghasilan (dibayar oleh karyawan) dengan kontribusi jaminan sosial (kontribusi pengusaha) yang dibayar oleh majikan. Jadi, total biaya gaji (yang ditanggung majikan) adalah gaji kotor ditambah kontribusi jaminan sosial.

Tabel. 3.1. Perbandingan Tarif Pajak di Nordik dan Beberapa Negara Lain Tahun 2018

Negara	Pajak Perusahaan	Pajak Individu (minimum)	Pajak Individu (maksimum)	VAT GST /PPN*
Denmark	22%	29.68% (bagi yang pendapatan diatas \$7,760)	60.02%	25%
Finlandia	20%	7.71% (bagi yang pendapatan diatas € 2,930)	67%	24% 14% (makanan) 10% (obat, transport)
Islandia	20%	0%	46%	24% or 11%
Norwegia	23%	0%	23% + 8.2% + top tax (1.4% sd 15.4%)	25% atau 15% (makanan minuman) 10% (transportasi, cinema, hotel)
Swedia	22%	29.19% (bagi yang pendapatan diatas \$2,690 per tahun)	60.15% lokal 25% nasional	25% atau 12% atau 6%
Australia	28.5%-	0%	49%	0% (essential

	30%			items) 10% (others)
Amerika Serikat	21% + 0-12% State/Local	0% (federal) + 0% (state) + 0%-3% (local)	54.4% State (37% federal)	0%-11.725% (state dan local)
Indonesia	25%	5%	30%	10%

*VAT: Value Added Tax; GST: Goods and Services Tax; PPN: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: diolah penulis dari beberapa referensi

Setiap negara Nordik menerapkan model pajak progresif, artinya semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin besar pula prosentase pemotongan pajaknya. Besaran potongan pajak berbeda-beda di setiap negara. Swedia, misalnya, memberlakukan tarif pajak untuk tahun 2017 sebagai berikut (berdasarkan pendapatan tahunan):

- Tarif 0% bagi penduduk yang berpenghasilan dibawah 18,800 krona (kr)
- Tarif 31% (7% kabupaten dan 24% pajak kota): bagi yang berpendapatan mulai 18.800 sd. 438.900 kr
- Tarif 31% + 20% pajak pusat: bagi yang berpendapatan 438,901 sd. 638,500 kr, dan
- Tarif 31% + 25% pajak pusat: bagi yang berpendapatan di atas 638.500 kr.

Perhitungan yang berbeda dan lebih sederhana diberlakukan oleh Finlandia, yang memiliki tarif pajak progresif sebagai berikut:

- Tarif 25% bagi yang berpendapatan diatas €13,000
- Tarif 57% bagi yang berpendapatan diatas €33,000
- Tarif 60% bagi yang berpendapatan diatas €47,000
- Tarif 67% bagi yang berpendapatan diatas €83,000
- Tarif 66% bagi yang berpendapatan diatas €94,000, dan
- Tarif 65% bagi yang berpendapatan diatas €127,000

Pajak perusahaan, juga disebut *capital tax*, *corporate tax* atau *company tax*, adalah pajak langsung yang dikenakan oleh pemerintah

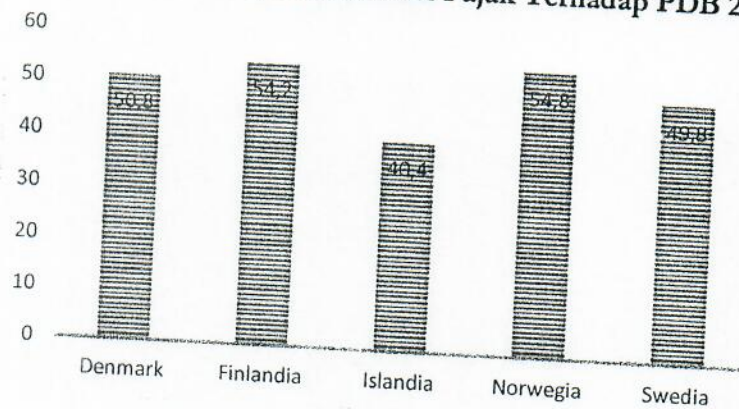
atas pendapatan atau modal perusahaan atau lembaga serupa. Kebanyakan negara Nordik memungut pajak semacam itu di tingkat nasional, walaupun ada pajak yang serupa dikenakan pada tingkat pemerintah daerah atau lokal. Prosentase tarif pajak perusahaan berbeda-beda di tiap negara. Pada tahun 2018, tarif di Swedia adalah 22%, Finlandia 20% (walaupun tahun sebelumnya pernah sampai 60% 26%, dan 24%), Islandia 20% (sebelumnya pernah 18% dan 15%), Denmark 22% (sebelumnya pernah 25%), dan Norwegia 24% (sebelumnya pernah 28%, 27% dan 25%). Berubahnya besaran tarif biasanya berkaitan dengan, atau dipengaruhi oleh, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin bagus iklim investasi dan tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula prosentase pajak perusahaan.

Sementara itu, pajak penjualan (atau VAT--*value added tax*, GST--*goods and service tax*) yakni pajak yang dibayarkan kepada badan pengelola untuk penjualan barang dan jasa tertentu juga diberlakukan berbeda-beda di Nordik. Biasanya undang-undang mengizinkan (atau mengharuskan) penjual untuk mengumpulkan dana untuk pajak dari konsumen pada titik pembelian. Dalam jenis pajak ini, negara-negara Nordik juga cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dalam sepuluh tahun terakhir, mereka rata-rata menerapkan tarif sebesar 20-25%, bandingkan dengan Australia yang menerapkan GST hanya sebanyak 10%, serta Amerika Serikat disekitaran angka 11%.

Sepanjang sepuluh tahun terakhir, portofolio prosentasi kontribusi pendapatan pajak (secara akumulatif) terhadap PDB di negara-negara Nordik berkisar antara 40-56% (lihat tabel 2.2). Ini artinya APBN negara-negara Nordics sangat mengandalkan pemasukan/pendapatan dari sektor pajak. Angka ini termasuk tertinggi di dunia, mengingat negara-negara lain biasanya hanya sekitar dibawah 30%. Pada tahun 2017, misalnya, prosentase pajak Indonesia hanya 12%, India 17,7%, Australia 34,3%, China 20,1%, Jepang 35,9%, Korea Selatan 33, 6%, Malaysia 15,5%, Singapura 14,2%, Inggris 34,4% dan Amerika Serikat 26%. Penggunaan uang pajak sebagian

besar adalah untuk membiayai sistem jaminan sosial. Di Swedia, misalnya, 42% uang pajak dialokasikan untuk jaminan sosial, 27% untuk pendidikan dan kesehatan, sedangkan 5% untuk ke polisi dan militer.

Tabel 3.2. Prosentase Kontribusi Pajak Terhadap PDB 2017



Sumber: Heritage Foundation (2017)

Pengurangan Kemiskinan

Negara Nordik pada umumnya sukses secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2011, angka kemiskinan diluar perhitungan pajak dan bantuan sosial, mencapai 24.7% di Denmark, 31.9% di Finlandia, 21.6% di Islandia, 25.6% di Norwegia dan 26.5% di Swedia. Setelah memperhitungkan pajak dan bantuan sosial, di tahun yang sama, angkanya berturut-turut menjadi 6%, 7.5%, 5.7%, 7.7% dan 9.7%, dengan rata-rata reduksi pengurangan 18.7%. Angka ini jauh lebih baik dari Amerika Serikat, yang memiliki angka kemiskinan sebelum pajak sebesar 28.3% dan setelah pajak sebesar 17.4% dengan reduksi pengurangan sebesar 10.9%. Akan tetapi, angka Nordik lebih buruk bila dibandingkan dengan Perancis (27% reduksi pengurangan) dan Jerman (24.2%). Standar kemiskinan juga berubah seiring waktu ketika negara-negara

Nordik menjadi lebih kaya, sehingga batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak juga semakin tinggi dari waktu ke waktu. Orang miskin mendapatkan berbagai macam tunjangan dari negara, mulai dari pembebasan pajak, bebas biaya pendidikan (bagi semua orang), sumbangan perbaikan penghasilan, sumbangan perumahan, dan -- dalam kasus tertentu-- sumbangan pengangguran.

Kebijakan pengurangan kemiskinan ini didasari oleh beberapa sebab. Pertama adalah karena **tingkat pengangguran yang rendah**. Dalam sepuluh tahun terakhir, negara-negara Nordik berhasil menekan angka pengangguran absolut (termasuk orang tua, cacat dan sakit) rata-rata di bawah angka 5%. Mereka menerapkan konsep *full employment*, artinya hampir semua orang yang mampu dan mau bekerja dijamin memiliki pekerjaan dengan upah yang layak dan wajar. Untuk memperoleh kondisi ini, pemerintah melakukan upaya pengelolaan tenaga kerja --dalam konteks pendidikan dan karir-- secara terpadu dalam suatu perencanaan (*man power planning*). Pemerintah mengatur keseimbangan supply dan demand dalam pasar tenaga kerja dengan memperhitungkan angka pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan produktifitas-reliabilitas lembaga pendidikan. Pemerintah mengatur dan mendorong investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa mencukupi bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan.

Kemiskinan juga dapat dikurangi karena penerapan **transparansi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. Korupsi tidak menjadi hambatan untuk perdagangan atau investasi, dan mal-administratif ataupun penyuapan (pungutan liar) hampir tidak ada. KUHP negara-negara Nordik semuanya mengkriminalisasi tindakan suap aktif dan pasif, penyalahgunaan jabatan (*trading in influence*), penipuan, pemerasan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang. Ini berlaku untuk siapa saja yang terdaftar di sana dan dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara, bahkan jika tindakan itu dilakukan di luar negeri. Sebuah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran korupsi

yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas namanya. Pembayaran fasilitasi dilarang, dan hadiah dan keramah-tamahan dapat dianggap ilegal tergantung pada nilainya, maksud dan manfaat yang diperoleh. Praktek-praktek ini, sangat jarang terjadi. Kegiatan penegakan hukum dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi adalah kuat, dan undang-undang antikorupsi diberlakukan. Tidak ada laporan tentang impunitas resmi yang diberikan kepada pelaku korupsi. Transparansi juga ditunjukkan dengan keterbukaan dalam sistem pajak. Di Norwegia, tidak ada yang dapat menyembunyikan angka penghasilan mereka, karena informasi pajak setiap warga negara tersedia untuk semua orang untuk diperiksa. Pekerja dapat melihat apa yang dapat diperoleh rekan mereka dan tetangga dapat mengintai berapa banyak yang dibuat orang di sebelah - semua secara legal dan online. Pada tanggal satu setiap tahun pada bulan Oktober, tepat setelah tengah malam, pajak tahunan warga Norwegia diposkan secara online - dan surat kabar Norwegia negara itu biasa mempublikasikan sepuluh orang dalam daftar teratas yang memperoleh penghasilan tertinggi di negara itu, juga biasanya mengulas pendapatan dan pajak yang dibayarkan oleh elit politik, pengusaha, selebritis dan olahragawan. Rakyat negara-negara Nordik, seperti Swedia pada umumnya bangga atas kejujuran dan transparansi pemerintah mereka. Di Swedia, semua orang memiliki akses ke semua catatan dan dokumen resmi pemerintah. Kepercayaan Swedia untuk institusi publik adalah 55 persen dibandingkan dengan 25 persen Rusia, menurut *The Economist* (2013).

Pasar Tenaga Kerja

Negara-negara Nordik sering disebut sebagai model untuk kebijakan ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja yang berhasil. Tenaga kerja diperlakukan dengan sangat terhormat di negara-negara tersebut. Pertama, aturan-aturan umum mengenai tenaga kerja menekankan adanya perjanjian didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, yang biasanya juga dipatuhi dalam kaitannya dengan kondisi yang berlaku

untuk penghentian kontrak. Jika tidak ada kesepakatan yang telah disepakati, aturan utamanya adalah bahwa masing-masing pihak dapat mengakhiri kontrak dengan durasi yang tidak ditentukan kepadanya, kecuali ada periode pemberitahuan yang berlaku harus ditetapkan. Akan tetapi, hak pengusaha untuk mengakhiri kontrak dibatasi dengan ketentuan hukum atau syarat dan ketentuan perjanjian bersama supaya tidak ada kesewenang-wenangan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-undang Nordik pada umumnya menetapkan agar seorang pekerja dipekerjakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, yang berarti pekerjaan tetap bukan temporer. PHK hanya dilakukan bila kinerja pekerja tidak memenuhi kesepakatan dan atau perusahaan jatuh bangkrut. Kompensasi untuk kerugian non-material yang disebabkan oleh pemecatan yang tidak sesuai ketentuan (dikenal dengan istilah kerusakan umum / *general damages*), dinilai berdasarkan kasus per kasus, tapi jumlah minimal adalah sekitar 6,000 euro di tahun 2017. Jumlah maksimum jam kerja seorang karyawan adalah 40 per minggu, dan lembur tidak boleh melebihi dua jam per hari.

Kedua, hampir seluruh pekerja di negara-negara Nordik sangat terorganisir ke dalam serikat pekerja dan perjanjian kerja sektoral. Hal ini penting, tidak hanya untuk memastikan hak-hak pekerja diberikan secara fair, melainkan juga memastikan representasi serikat pekerja untuk turut menentukan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Sistem pasar kerja diatur dengan kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan dengan undang-undang dimana pemerintah memainkan peran utama. Walaupun ada persepsi umum bahwa peraturan pasar tenaga kerja di negara-negara Nordik mengurangi fleksibilitas dan pertumbuhan ekonomi (lihat, misalnya, Annekov dan Madaschi 2005), akan tetapi terdapat fakta mengejutkan bahwa tren produktivitas telah positif di negara-negara Nordik sejak awal 1990-an dan setara dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya.

Ketiga, dibandingkan dengan negara OECD lainnya, negara Nordik sejak lama telah memberlakukan masa cuti melahirkan dan

masa bantuan penitipan anak pra-sekolah (*child care*) yang relatif panjang. Lama cuti melahirkan bervariasi mulai 10 sampai 16 bulan, sedangkan subsidi penitipan anak juga bervariasi antara dua sampai enam tahun. Selain skema hak cuti dan penitipan anak, masih ada skema lain yang memungkinkan cuti berbayar untuk mengurus anak-anak yang sakit dan hari perawatan lainnya. Ada banyak persamaan tetapi juga perbedaan penting antara lima negara Nordik terkait dengan desain kebijakan ramah keluarga ini. Di beberapa negara Nordik, terutama Finlandia, kebijakan utamanya adalah mengizinkan pekerja wanita memperoleh periode cuti yang panjang (untuk merawat anak bersubsidi di rumah), sehingga masa penitipan anak / *child care* yang disediakan untuk umum (dengan biaya subsidi pemerintah) menjadi rendah. Di ujung lain spektrum adalah Denmark, di mana masa *child care* bersubsidi tinggi selama beberapa dekade terakhir, sementara periode cuti yang dibayar, sampai saat ini, lebih singkat dibandingkan dengan negara-negara Nordik lainnya. Sementara itu, pekerja pria memperoleh hak cuti mendampingi istrinya melahirkan (sering disebut sebagai "*daddy days*"), dengan lama bervariasi mulai dari dua minggu sampai tiga bulan. Jumlah bantuan yang diberikan selama masa cuti melahirkan juga bervariasi: Denmark mencapai 90% dari gaji terakhir, Swedia, Norwegia dan Islandia memberikan 80% gaji, sedangkan Finlandia sebanyak 70%. Besaran kompensasi *Daddy days* jumlahnya rata-rata mencapai 66% dari gaji, dan penitipan anak rata-rata dibayar penuh oleh pemerintah.

Keempat, semua pekerja memiliki akses kepada pelayanan program kesejahteraan yang diatur secara ketat oleh pemerintah, mulai dari skema pensiun, asuransi kecelakaan kerja, manfaat bantuan pengangguran, dan juga asuransi kesehatan. Sebagian dari program tersebut juga diberikan anggota kepada keluarga pekerja.

Sistem Kesejahteraan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Negara-negara Nordik memiliki sistem kesejahteraan yang integral dan paling komprehensif di dunia, baik dari segi jenis maupun jumlah bantuan dari program yang diberikan. Berikut adalah beberapa skema sistem kesejahteraan yang ada:

Skema Pensiun

Sistem pensiun di negara-negara Nordik semuanya memiliki cakupan jaminan finansial pokok secara universal bagi seluruh penduduk. Artinya, tersedia jaminan pokok yang mencakup hak atas jumlah pensiun tertentu yang dibayarkan terlepas dari penghasilan atau kontribusi sebelumnya yang telah dibayarkan. Ini dimaksudkan untuk menjamin agar semua pensiunan dapat memperoleh standar hidup minimum. Keamanan finansial ini tidak hanya berarti perlindungan dasar, melainkan juga termasuk jaminan untuk dapat mempertahankan standar hidup dalam derajat level tertentu. Selain itu, semua negara juga memberlakukan kebijakan pensiun bagi penyandang cacat, yang diberikan kepada siapa saja yang --karena kecacatannya-- telah mengurangi kapasitas kerja. Rincian dari perlindungan pensiun ini diatur dengan cara yang berbeda di negara-negara Nordik. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem hukum masing-masing negara, apakah menggunakan sistem pensiun yang disetujui bersama atau sistem pilihan individu yang dapat secara bebas memilih asuransi pribadi atau tabungan dengan cara lain seperti dalam sistem asuransi premium.

Usia pensiun resmi di negara-negara Nordik adalah 65 tahun (di Denmark, Finlandia dan Swedia), dan 67 tahun (di Kepulauan Faeroe, Islandia dan Norwegia). Akan tetapi, dimungkinkan juga untuk menarik pensiun hari tua pada usia yang lebih dini. Di Finlandia, pensiun dasar dan pensiun yang terkait dengan penghasilan dapat ditarik dari usia 62 tahun. Jaminan pensiun Swedia tidak dapat ditarik lebih awal, tetapi pensiun terkait pendapatan dapat diambil dari usia 61

tahun. Pensiun terkait penghasilan Islandia biasanya dapat diambil dari usia 65 tahun. Di Norwegia dan Denmark, pensiun hari tua tidak dapat ditarik sebelum usia pensiun normal. Di Norwegia, akan tetapi, warga dapat mengusulkan usia pensiun fleksibel dari usia 62 sejak tahun 2011 melalui ketentuan khusus berdasarkan perjanjian antara mitra sosial dengan para pemohon yang disetujui secara kolektif. Sementara itu, Denmark memiliki skema pembayaran pensiun dini (*efterløn*), yang memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi anggota dana asuransi pengangguran dan telah membayar kontribusi kepada skema asuransi selama 30 tahun untuk menarik diri dari pekerjaan pada usia 60 tahun. Di Finlandia rute umum untuk keluar dari pekerjaan adalah pensiun pengangguran (*unemployment pension*), yang dapat diberikan kepada orang yang menganggur dari usia 60. Namun, pensiun pengangguran dihapuskan bagi mereka yang lahir pada atau setelah tahun 1950 pada saat reformasi pensiun tahun 2005.

Pengelola atau operator dana pensiun memiliki bentuk berlainan di setiap negara. Di Norwegia, misalnya, dana dan distribusi pensiun dikelola melalui Lembaga Dana Pensiun Pemerintah Norwegia yang didirikan pada tahun 1967 sebagai jenis dana asuransi nasional. Dana ini dikelola dengan melakukan investasi pada usaha domestik dan wilayah Skandinavia, dan karenanya lembaga tersebut menjadi pemegang saham utama di banyak perusahaan besar Norwegia, terutama melalui Bursa Efek Oslo. Selanjutnya, pada tahun 1990, pemerintah Norwegia, mengoperasikan skema pensiun melalui the Government Pension Fund of Norway (juga dikenal sebagai Dana Minyak), yang ditugasi untuk mengelola dana Nobel peace prize mempersiapkan masa depan kesejahteraan rakyat pasca berakhirnya produksi minyak dengan cara menginvestasikan surplus pendapatan sektor perminyakan Norwegia. Lembaga ini memiliki lebih dari US \$ 1 triliun aset, termasuk 1,3% dari saham saham global, menjadikannya sebagai dana kekayaan berdaulat terbesar di dunia. Pada bulan September 2017, nilai aset itu bernilai \$ 192,307 per warga negara

Norwegia. Lembaga ini juga memegang portofolio real estat dan investasi pendapatan tetap di wilayah Skandinavia.

Pelayanan Kesehatan (*Health Care*)

Sistem kesehatan Nordik memiliki warisan panjang dan sudah sangat mapan berkaitan dengan perawatan kesehatan primer dan pencegahan penyakit. Semua negara Nordik juga memiliki layanan rumah sakit yang terintegrasi dengan sistem tersebut. Sistem kesehatan Nordik adalah berbasis perpajakan, dan secara lokal diadministrasikan dengan setiap warga negara yang memiliki akses yang sama ke layanan. Namun, semua negara memberlakukan tanggungan pembayaran (*co-payment*) oleh pasien untuk perawatan di rumah sakit dan obat-obatan. Secara umum, kesetaraan dan kesamaan pasien merupakan prioritas penting. Terlepas dari tingkat kesamaan yang umumnya tinggi, ada beberapa perbedaan penting di kawasan Nordik berkaitan dengan perawatan kesehatan. Hal ini diakibatkan dari cara tiap negara berusaha untuk beradaptasi dengan tekanan anggaran dan populasi yang menua. Langkah-langkah eksplisit untuk mengurangi waktu tunggu rawat inap dan meningkatkan produktivitas rumah sakit telah dilakukan di Denmark dan Finlandia. Sementara itu, variabel biaya pengguna untuk rawat inap makin dibebankan di Finlandia dan Swedia. Berikut adalah contoh sistem kesehatan yang diterapkan di Swedia dan Denmark.

Swedia

Seluruh rakyat di Swedia memiliki akses setara terhadap pelayanan jasa kesehatan. Sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan didanai oleh pemerintah yang dioperasikan oleh pemerintah daerah (*county council*). Sistem tersebut terkoneksi dengan sistem perpajakan daerah. Lembaga penyedia jasa kesehatan pada umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah, walaupun operasionalisasi rumah sakit dan klinik kadang dilakukan oleh perusahaan swasta setelah melalui proses tender. Selama sepuluh tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah memulai

sistem yang membayar untuk pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan nama "*VårdVal*". Pada pelayanan kesehatan gigi, pemerintah tidak memberikan subsidi sebagaimana pelayanan lain, dan dokter gigi menentukan sendiri tarif jasa mereka. Sistem perawatan kesehatan Swedia diatur dalam tujuh bagian: perawatan di dekat atau di dekat rumah (ini mencakup klinik untuk perawatan primer, perawatan bersalin, perawatan kesehatan rawat jalan, dll.), Layanan darurat, perawatan elektif, rawat inap, perawatan rawat jalan, perawatan spesialis dan perawatan gigi.

Sistem perawatan kesehatan dikelola oleh 21 *councils*, yang 18 di antaranya berada di tingkat *county* (kabupaten) dan tiga di regional (provinsi). Populasi di 21 wilayah ini berkisar antara 60.000 hingga 1,900,000. *Councils* memiliki kebebasan yang cukup besar dalam perencanaan untuk pengiriman perawatan sehingga terdapat variasi antar daerah yang signifikan. Peran pemerintah pusat adalah menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman untuk perawatan dan menetapkan agenda politik melalui hukum dan peraturan. Ini juga dicapai melalui perjanjian dengan Asosiasi Pemerintah Dewan dan Otoritas Lokal Swedia. Di tingkat nasional, beberapa badan ahli memainkan peran dalam perencanaan perawatan kesehatan. *Social Styrelsen* (Dewan Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional) adalah otoritas pengawas utama pemerintah pusat. Yang lain adalah *Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd* (Dewan Pertanggungjawaban Medis), *Statens beredning för medicinsk utvärdering* (Swedish Council on Technology Assessment di Healthcare), *Läkemedelsförmånsnämnden* (Dewan Manfaat Farmasi), *Läkemedelsverket* (Badan Produk Medis) dan badan apotik milik negara --Apoteket AB chain of pharmacies.

Rumah sakit dijalankan oleh pemerintah *county* dan regional. Yang pertama termasuk rumah sakit khusus yang mencakup seluruh daerah dan rumah sakit umum yang mencakup sebagian wilayah. Perawatan medis disediakan di kedua rumah sakit dan klinik rawat jalan. Perawatan khusus disediakan oleh layanan rumah sakit regional. Ada sedikit layanan kesehatan swasta (tetapi didanai pemerintah) di

Swedia, bersama dengan kontroversi politik. Sekitar sepertiga dari konsultasi medis adalah dengan praktisi medis swasta.

Peraturan tentang waktu menunggu dan biaya pasien bervariasi di berbagai *Councils*. Jaminan perawatan nasional menyatakan bahwa seorang pasien harus bisa mendapatkan janji dengan dokter perawatan primer dalam waktu lima hari setelah menghubungi klinik. Jika dirujuk ke spesialis oleh dokter umum, mereka harus mendapatkan janji dalam 30 hari, dan jika perawatan dianggap perlu oleh spesialis, itu harus diberikan dalam 90 hari. Namun, kasus-kasus mendesak selalu harus diprioritaskan dan kasus-kasus yang muncul segera ditangani. Swedia memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi dalam pemberian layanan perawatan kesehatannya daripada sebagian besar anggota Uni Eropa. Negara ini memiliki tingkat dokter per kapita tertinggi di Uni Eropa, yaitu 3,3 per 1.000; meskipun ini sedikit tertinggal di belakang negara Norwegia. Rasio seperti ini memungkinkan pasien memiliki akses yang cepat dan mudah ke perawatan kesehatan profesional.

Swedia mengalami tantangan layanan kesehatan harus berubah untuk memenuhi permintaan yang meningkat, terutama karena orang mulai hidup lebih lama. Karena perawatan rumah sakit cenderung mahal dibandingkan dengan dokter umum atau pasien rawat jalan / masyarakat, maka hal ini mendorong lebih banyak pasien untuk dirawat di perawatan primer. Selama dekade terakhir, kunjungan ke dokter umum terus bertumbuh sementara intervensi spesialis menurun. Dalam konteks ini, Swedia berusaha mendorong pasien lebih cepat melalui sistem rumah sakit, agar lebih sedikit orang yang dirawat di rumah sakit, untuk waktu yang lebih singkat. Secara keseluruhan, Swedia membiayai sebagian besar biaya perawatan kesehatan (sekitar 95%), dengan pasien membayar kontribusi biaya nominal kecil untuk pemeriksaan. Biaya rumah sakit untuk pasien dibatasi hingga 80 Krona (sekitar Rp. 130.000) per hari.

Denmark

Seperti pembagian tingkat wilayah negara, sektor kesehatan Denmark memiliki tiga tingkat pengelolaan administrasi: pusat, daerah dan kotamadya (*municipalities*). Layanan kesehatan diatur sedemikian rupa sehingga tanggung jawab atas layanan yang disediakan oleh layanan kesehatan terletak pada tingkat administratif terendah. Layanan diupayakan disediakan sedekat mungkin dengan pengguna. Kementerian Kesehatan dan Pencegahan didirikan pada 23 November 2007 ketika Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan dipisahkan menjadi dua institusi. Kementerian Kesehatan dan Pencegahan bertanggung jawab atas fungsi administratif yang terkait dengan organisasi dan pembiayaan sistem perawatan kesehatan, psikiatri dan kesehatan, asuransi serta persetujuan obat-obatan.

Secara keseluruhan, dalam sistem yang terdesentralisasi, Negara bertanggung jawab untuk pembuatan undang-undang dan pengawasan, sementara daerah dan kota dibebankan dengan layanan kesehatan operasional (daerah untuk layanan rumah sakit dan asuransi kesehatan, sedangkan kotamadya untuk bidang kesehatan lainnya, serta keperawatan dan kesehatan anak / sekolah). Sebagian besar rumah sakit dimiliki oleh kotamadya. Beberapa rumah sakit swasta memiliki kontrak dengan daerah mereka, sementara beberapa rumah sakit swasta kecil beroperasi di luar sistem rumah sakit umum. Rumah sakit spesialis dan Puskesmas berrawat inap tidak diatur secara terpisah. Dokter adalah titik kontak utama untuk pasien kecuali dalam keadaan darurat, ketika mereka boleh langsung menggunakan layanan rumah sakit. Dokter spesialis bekerja berdasarkan kesepakatan dengan skema asuransi kesehatan, dan kebanyakan pasien dirujuk oleh praktisi umum.

Untuk mengurangi waktu tunggu, Pemerintah Denmark membuat alokasi tambahan untuk layanan kesehatan sejak dekade ini. Mekanisme ini dikombinasikan dengan membuka kemungkinan bagi pasien untuk menerima perawatan di rumah sakit swasta atau rumah sakit terakreditasi tertentu di luar negeri. Reformasi telah memiliki

dampak yang signifikan. Waktu tunggu untuk 18 prosedur bedah utama turun dari 27 minggu pada awal tahun 2000an menjadi hanya 20 minggu pada tahun 2015, dan diperkirakan satu dari delapan pasien non-akut sekarang dirawat di luar Denmark. Sejak tahun 2004, sebuah langkah telah dilakukan untuk memperluas pengelolaan dana sendiri oleh rumah sakit, dengan target akhir sebesar 50% dari alokasi rumah sakit secara keseluruhan. Meskipun ini telah menyebabkan ketidakpastian tentang anggaran rumah sakit, itu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu.

Hibah blok grant dari negara federal masih merupakan unsur pembiayaan paling signifikan - sekitar 75%. Untuk memberi daerah kesempatan yang sama untuk memberikan layanan kesehatan, subsidi ditentukan oleh sejumlah kriteria seperti demografi, dan struktur sosial setiap daerah (persentase pekerja, orang tua, dll.) Mengikuti reformasi pemerintah lokal pada Januari 2007, satu hal baru adalah bahwa kotamadya berkontribusi dalam pembiayaan perawatan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mendorong mereka untuk memulai langkah-langkah pencegahan yang efisien bagi warganya sehubungan dengan masalah kesehatan. Pendanaan lokal terdiri dari kontribusi dasar dan kontribusi terkait aktivitas. Bersama-sama mereka merupakan sekitar 20 persen dari total pembiayaan perawatan kesehatan di daerah. Besaran retribusi dasar tetap ditentukan oleh daerah. Batas maksimum ditetapkan oleh undang-undang adalah 1.500 Krone per penduduk (sekitar Rp. 3,350,000) pada tingkat harga dan upah tahun 2017). Kontribusi terkait kegiatan tergantung pada seberapa banyak warga menggunakan layanan kesehatan daerah (rawat inap dan perawatan rawat jalan di rumah sakit, serta jumlah layanan dari dokter umum). Dengan cara ini kotamadya yang berhasil mengurangi kebutuhan untuk rawat inap, dll. Melalui langkah-langkah yang efisien dalam perawatan pencegahan dan perawatan akan dihargai.

Pelayanan Lansia (Jompo)

Negara-negara Nordik seluruhnya memberlakukan penduduk usia lanjut dengan tingkat perhatian tinggi dengan memberikan hak dan tanggung jawab yang jelas melalui layanan perawatan rumah yang diberikan kepada kaum lansia. Penghargaan pada para senior dilakukan karena mereka telah berkontribusi pada komunitas mereka sepanjang hidup. Mereka telah bekerja, membesarkan keluarga, dan membayar pajak, oleh karena itu negara menjaga kepedulian bagi warga negara yang dianggap berjasa tersebut. Mereka layak menerima perawatan berkualitas tinggi yang sama dengan warga negara lain.

Di Swedia, pelayanan terhadap orang lanjut usia dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka mengelola rumah jompo (*retirement homes*) dan juga layanan rumah lansia (*home care*) dengan anggaran yang selalu naik tiap tahun. Akan tetapi, 94% dari lansia yang berusia di atas 65 tahun tinggal di rumah dan diberi kesempatan untuk hidup mandiri. Jika orang yang lebih tua membutuhkan bantuan dari petugas kesehatan, dia dapat mengajukan permohonan untuk bantuan ini. Selain itu, sebagian besar daerah menyiapkan makanan siap saji yang bahkan dikirimkan ke rumah orang tua yang meminta layanan tersebut. Pendekatan Swedia dalam merawat lansia di rumah mereka sendiri adalah cara unik dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemandirian mereka. Selain itu, keluarga mereka merasa nyaman mengetahui bahwa orang yang mereka cintai berada dalam perawatan yang baik. Selain perawatan yang diterima lansia, petugas kesehatan dibutuhkan dan dihargai.

Sama halnya, di Denmark, perawatan lansia dirancang secara jangka panjang untuk membuat perawatan tidak terlalu formal. "Akomodasi dekat-perawatan" dirancang untuk memiliki suasana seperti rumah dan rumah yang berbaur dengan lingkungan setempat. Bagi mereka yang ingin tetap tinggal di rumah, perawatan di rumah hingga 24 jam tersedia secara gratis untuk orang yang berusia 67 tahun atau lebih. Untuk mereka yang berusia 75 tahun atau lebih, mereka akan menerima 2 kunjungan perawat setahun. Model ini dipilih untuk

memastikan orang yang lebih tua lebih bahagia dan lebih sehat di tahap selanjutnya dari kehidupan mereka. Pengembangan fasilitas canggih di Aalborg, Denmark mengadopsi pemanfaatan teknologi dan ruang publik untuk merevolusi konsep fasilitas perawatan lansia. Ini termasuk robot untuk rehabilitasi fisik dan sistem pemantauan mobilitas, yang bertujuan untuk mencegah penduduk mendapatkan masalah dalam mobilitas sehari-hari.

Subsidi Pengangguran

Walaupun memiliki skema yang berlainan, akan tetapi semua negara Nordik memiliki kebijakan subsidi bagi pengangguran (*unemployment benefit/subsidy*). Tunjangan pengangguran dimaksudkan untuk mengganti sebagian kerugian bagi warga negara ketika mereka menganggur (sedang mencari, atau tidak mendapatkan pendapatan dari, pekerjaan). Agar memenuhi syarat untuk tunjangan pengangguran, rakyat biasanya harus terlebih dahulu mendaftar sebagai pencari kerja di Kementerian Tenaga Kerja. Tunjangan pengangguran dibayarkan melalui dua sistem yang berbeda. Jika seseorang bukan anggota dana tunjangan pengangguran, mereka dapat menerima tunjangan pengangguran dasar dari pemerintah. Sementara itu, jika seseorang adalah anggota dana tunjangan pengangguran (*unemployment benefit fund*), yang biasanya disediakan perusahaan asuransi swasta, mereka akan menerima tunjangan terkait pendapatan dari dana tersebut. Untuk menerima tunjangan terkait penghasilan seseorang biasanya harus menjadi anggota dana tunjangan pengangguran setidaknya selama 26 minggu terakhir (sekitar 6 bulan). Atas hal tersebut, bantuan akan diberikan selama kurun waktu tertentu. Di Swedia, misalnya, skema "*Arbetslöshet ersättning*" (subsidi untuk pengangguran) diberikan kompensasi untuk 300 hari, lima hari seminggu, atau dengan kata lain 60 minggu.

Di Finlandia, jika seseorang memenuhi kriteria sebagai pengangguran, mereka dapat menerima tunjangan pengangguran dengan jumlah penuh (EUR 32,40 per hari di tahun 2018). Kegiatan

ini dipantau dalam periode 65 hari pembayaran. Kriteria untuk kegiatan tersebut terpenuhi jika mereka, selama periode pembayaran tunggal, telah bekerja di gaji setidaknya 18 jam, atau telah mendapatkan penghasilan setidaknya EUR 241 dari wirausaha mandiri, atau jika mereka telah berpartisipasi dalam lima hari layanan promosi pekerjaan atau kegiatan promosi pekerjaan lainnya yang diatur oleh kementerian tenaga kerja (misal adalah program magang atau pembinaan usaha). Jika seseorang tidak memenuhi kriteria, jumlah manfaat sebesar EUR 32,40 per hari akan berkurang sebesar 4,65% untuk periode pembayaran 65 hari berikutnya. Ini sesuai dengan sekitar satu hari tunjangan pengangguran selama periode pembayaran, misalnya 4 minggu. Tunjangan pengangguran kembali dibayarkan pada jumlah awalnya dari awal periode referensi berikut, jika kriteria untuk kegiatan terpenuhi. Pengurangan ini dilakukan dari jumlah penuh tunjangan pengangguran, yang juga termasuk setiap kenaikan anak dan jumlah tambahan yang diberikan. Akan tetapi jika seseorang adalah pengasuh informal atau pengasuh keluarga, pensiunan karena cacat, penerima manfaat atas dasar ketidakmampuan untuk bekerja, atau jika diberhentikan sementara untuk waktu yang singkat, diberlakukan skema khusus yang berbeda.

Di Denmark, program dana asuransi pengangguran memberikan bantuan jangka pendek kepada para pekerja ketika mereka menjadi pengangguran. Semua pekerja dianjurkan menjadi anggota dana asuransi pengangguran (*A-Kasse*) untuk memastikan bahwa jika mereka kehilangan pekerjaan, akan dapat mengklaim tunjangan pengangguran. Jika seseorang tidak menjadi anggota dan benar-benar kehilangan pekerjaan, maka mereka tidak akan dapat mengklaim subsidi pengangguran dan berisiko tidak memiliki penghasilan. Seseorang berhak mengajukan keanggotaan ke dana asuransi pengangguran selama berusia antara 18 dan 63 tahun dan tinggal di Denmark (atau negara EU / EEA lain dan bekerja di Denmark).

Mereka dapat mengajukan permohonan untuk diasuransikan atas dasar waktu penuh atau paruh waktu. Selain itu, mereka harus berada dalam salah satu keadaan: 1) bekerja yang bergaji dalam profesi yang diakui oleh dana asuransi pengangguran; atau 2) menjadi pemilik bisnis atau membantu menjalankan bisnis pasangan; serta 3) memiliki sertifikat/ijazah atau menyelesaikan kursus pendidikan yang terkait dengan pekerjaan/profesi dengan durasi minimum 18 bulan. Mereka harus mengajukan permohonan keanggotaan tidak lebih dari 2 minggu setelah menyelesaikan kursus tersebut. Manfaat subsidi yang diterima dapat mencapai hingga maksimum 90% dari penghasilan pekerja dari pekerjaan sebelumnya, dan dibayarkan sekitar setiap tiga atau empat minggu. Untuk anggota tertanggung penuh waktu, tarif maksimum yang dapat diterima adalah 18.403 kroner (sekitar Rp. 41.195.526) per bulan di tahun 2018. Semua anggota berhak, pada 2018, untuk menerima tunjangan pengangguran selama maksimal tiga tahun, dan keanggotaan otomatis berakhir dua tahun sebelum mereka berhak atas pensiun.

Pendidikan

Secara garis besar, negara-negara Nordik (dengan sedikit pengecualian Denmark, yang mewajibkan orang tua membayar kontribusi 25%) menggratiskan biaya pendidikan bagi penduduknya di semua tingkatan mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mereka membelanjakan lebih banyak prosentase anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Mereka bahkan menggratiskan biaya untuk pelajar dari negara lain. Tidak heran, angka melek huruf (*literacy rate*) rata-rata diatas 95%, bahkan di Denmark mencapai 99%, dari populasi. Angka Education Index negara-negara Nordik juga termasuk tertinggi di dunia: Denmark 0.923, Norwegia 0.916, Finlandia 0.847, Islandia 0.906, dan Swedia 0.855. Bandingkan dengan negara kita yang berada di angka 0.622.

Dalam hal nilai-nilai, mereka berkomitmen pada ide/semangat "*bildung*" (sebuah kosa kata Jerman) yang sering diartikan sebagai "pembentukan seorang anak dalam lingkungan pendidikan yang bercita-cita untuk kebebasan dan martabat manusia serta kecakapan akademis". Semua negara Nordik --dengan pengecualian Islandia-- memiliki catatan tingkat waktu tempuh sekolah yang lebih tinggi dari 16 tahun --tingkat yang setara dengan pendidikan tinggi-- dan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dalam pembelajaran seumur hidup daripada rata-rata negara maju lain.

Bantuan biaya pendidikan pada umumnya diberikan dengan sistem *voucher* (kartu). Ini artinya siswa/orang tua dapat memilih sekolah dan membayar biaya sekolah dengan voucher yang diberikan pemerintah. Sekolah yang menerima voucher harus menerima siswa tanpa kecuali, dengan tidak memperhitungkan kemampuan atau latar belakang akademik, dan tidak boleh membebani biaya sekolah/kuliah melebihi nilai voucher (kecuali di Denmark, dimana voucher membayar 75% biaya sehingga sisanya dibebankan kepada orang tua). Selain biaya pendidikan yang gratis, pelajar/mahasiswa yang membutuhkan juga dapat mengajukan fasilitas kredit untuk biaya hidup. Biasanya mereka dapat meminta bantuan dari lembaga (misalnya seperti *Centrala Studiestödsnämnden*, atau CSN di Swedia), yang disponsori negara untuk mendistribusikan bantuan siswa dalam bentuk hibah dan pinjaman. Pinjaman tersebut dikembalikan dengan tambahan pemotongan pajak setelah mereka memperoleh pekerjaan.

Pengaman Sosial (*Social Security*) lainnya

Setiap negara Nordik memiliki skema tambahan pengaman sosial yang berbeda-beda. Tambahan program tersebut memiliki proses sejarah yang dipengaruhi dinamika sosial politik internal dari masing-masing negara. Di Swedia, misalnya, program pengaman sosial yang dikelola oleh the Swedish Social Insurance Agency meliputi beberapa program, diantaranya:

- "*Barnbidrag*": bantuan keuangan untuk anak sampai umur 16 tahun (bantuan juga masih dilanjutkan bila anak tersebut masih berstatus pelajar sekolah).
- "*Föräldrapenning*": bantuan penghasilan yang diberikan kepada orang/pekerja yang libur bekerja karena harus mengasuh anak, sampai dengan 480 hari per anak. Hal ini ditambah juga bantuan khusus untuk pengasuhan anak sakit dan cacat.
- "*Bostadsbidrag*": subsidi perumahan untuk semua orang yang tidak bisa membeli tempat tinggal.
- "*Sjukpenning*", "*Sjukersättning*", "*Aktivitetsersättning*" dan "*Handikappersättning*": bantuan yang diberikan kepada mereka yang sakit, cacat, dan penyebab lain yang menghalangi kemampuan kerja.
- "*Alderspension*", "*Garantipension*": bantuan untuk mereka yang telah pensiun.
- "*Försörjningsstöd*": bantuan untuk siapapun (dan anak mereka) yang tidak bisa membiayai standar hidup yang wajar. Skema ini dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Model 'Bismarckian Welfare' di Jerman

Sebagaimana sudah dibahas di depan, Jerman adalah pelopor pertama yang memperkenalkan sistem kesejahteraan sosial komprehensif di dunia yang dikenal dengan sistem atau model 'Bismarckian'. Menurut klasifikasi Esping-Anderson, Jerman termasuk dalam kluster model *Christian-Democratic Welfare State*. Dalam standar internasional, sistem kesejahteraan Jerman bersifat menyeluruh dan murah hati, walaupun -- berbeda dengan Nordik-- tidak bersifat universal karena orang mendapat manfaat berbeda. Sistem kesejahteraan sosial telah memiliki sejarah tradisi yang panjang di Jerman sejak revolusi industri. Pembentukan sistem ini disebabkan karena tekanan gerakan buruh pada akhir abad ke-19, sehingga kanselir Reichskanzler Otto von Bismarck memperkenalkan skema asuransi sosial negara pertama yang belum sempurna. Inisiatif tersebut dikembangkan lebih lanjut di bawah Adolf Hitler, dimana Program Sosialis Nasional menyatakan "Kami menuntut perluasan pada skala besar kesejahteraan hari tua". Sampai pertengahan 1990-an, jaring pengaman masih belum memadai untuk strata pekerja berpenghasilan rendah dan pengangguran. Anggaran pada saat itu tidak cukup bagi orang-orang yang membutuhkan "bantuan sosial," yaitu bantuan di saat-saat sulit. Pada tahun 1994, misalnya, 4,6 juta orang membutuhkan bantuan sosial, meningkat 100 persen sejak tahun 1980-an. Hal ini terjadi karena bertambahnya warga Jerman akibat bergabungnya bekas Republik Demokratik Jerman (GDR, atau Jerman Timur), dengan Republik Federal Jerman (FRG, atau Jerman Barat) pada tahun 1990. Akibatnya

dana bantuan sosial tidak mampu membiayai mereka yang membutuhkan.

Akan tetapi, saat ini perlindungan sosial dapat meliputi semua warga negara dan dianggap sebagai pilar utama kebijakan nasional Jerman. Saat ini 27,6 % dari PDB Jerman disalurkan ke dalam sistem asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan, perawatan jangka panjang dan asuransi pengangguran, dibandingkan dengan 16,2 persen di AS. Selain itu, terdapat layanan yang dibiayai pajak seperti tunjangan anak (*Kindergeld*, mulai dari € 192 per bulan untuk anak pertama dan kedua, € 198 untuk ketiga dan € 223 untuk setiap anak sesudahnya, sampai mereka mencapai 25 tahun atau menerima kualifikasi profesional pertama), dan ketentuan dasar bagi mereka yang tidak dapat bekerja atau siapa pun dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sejak tahun 2005, pengangguran mendapat bantuan sekitar 60-67% dari gaji bersih pekerjaan terakhir yang dibayar hingga 12 bulan (dan 18 bulan bagi mereka yang berusia di atas 55 tahun). Bantuan ini diikuti oleh skema *Arbeitslosengeld II (ALG II)* atau *Sozialhilfe*, yang jumlahnya tidak berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya. Di bawah ALG II, satu orang menerima bantuan sebesar € 391 per bulan ditambah biaya perumahan dan asuransi kesehatan yang 'memadai'. Skema ALG II juga dapat membayar sebagian untuk menambah penghasilan kerja yang rendah.

Pengembangan sistem *social welfare* di Jerman sendiri telah memiliki jalur sejarah yang unik. Selama proses panjang pertumbuhan dan eksperimentasi sosial, Jerman menggabungkan ekonomi kapitalis yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan sistem kesejahteraan sosial yang, dengan beberapa pengecualian, telah memberikan keamanan hidup bagi warganya. Manfaat sistem ini sangat luas sehingga pada tahun 1990-an pengeluaran total tahunan oleh negara, pengusaha, dan rumah tangga swasta dalam perawatan kesehatan, pensiun, dan aspek lain dari apa yang disebut Jerman jaring pengaman sosial berjumlah lebih dari DM 1 triliun dan menempati sekitar sepertiga dari produk nasional bruto (GNP—Gross National Product) negara tersebut. Tidak seperti banyak negara maju di dunia, Jerman tidak memberikan

warga negaranya perawatan kesehatan, pensiun, dan tunjangan kesejahteraan sosial lainnya melalui sistem negara yang dikelola secara terpusat. Sebaliknya, ia memberikan manfaat melalui jaringan kompleks lembaga nasional dan sejumlah besar entitas regional dan lokal yang independen - beberapa lembaga pemerintah, beberapa kuasi-pemerintah, dan banyak swasta dan organisasi non-profit. Banyak dari struktur ini berasal dari tradisi abad kesembilan belas, dan beberapa dari jauh lebih awal.

Sistem Jerman, akan tetapi, dikritik karena menempatkan kaum perempuan lebih dirugikan daripada kelompok sosial lainnya. Fakta ini berasal dari bias program asuransi sosial Jerman yang mendukung model pencari nafkah laki-laki; sedangkan kebanyakan wanita menerima perlindungan sosial dan kesehatan berdasarkan status ketergantungan mereka sebagai pasangan. Oleh karena itu, terlepas dari adanya jaring sosial yang saling terkait, perempuan menghadapi ketidaksetaraan dalam memperoleh manfaat dalam hak mereka sendiri karena periode menghabiskan membesarkan anak-anak atau merawat orangtua lansia. Para wanita yang bercerai juga mendapatkan harga yang buruk karena ketentuan sistem kesejahteraan, seperti halnya para janda, yang pensiunnya lebih rendah.

Sejarah Perkembangan

Jerman mulai membentuk sistem jaminan sosial sebagai bagian integral dari program industrialisasi akhir abad 19. Pada saat itu Jerman berambisi menjadi negara industri yang berbasis pada pembuatan mesin mutakhir, seperti di bidang kereta api, kapal laut, tekstil, pesawat terbang, dan kemudian elektronika. Untuk mewujudkan ambisi ini, pemerintah membuat pusat-pusat area industri baru yang menarik warga desa bermigrasi ke kota untuk menjadi pekerja di kawasan industri tersebut. Untuk memastikan efisiensi dan produktifitas pekerja, maka pemerintah kemudian terlibat dalam penyediaan fasilitas

perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, dan tentu saja sistem jaminan sosial yang terintegrasi.

Undang-undang yang menetapkan dasar sistem social welfare berasal dari inisiatif awal paket kebijakan industrialisasi tahun 1880-an dan disahkan oleh parlemen kekaisaran Jerman, *Reichstag*, dengan tujuan ganda: membantu pekerja Jerman memenuhi perubahan hidup dari pola agrikultur perdesaan ke industri perkotaan, dan pada sisi lain membuat mereka kurang rentan terhadap pengaruh komunisme. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip utama yang telah memandu pengembangan kebijakan sosial di Jerman hingga hari ini: keanggotaan pekerja (warga negara) dalam program asuransi dimandatkan oleh hukum; administrasi program-program ini didelegasikan kepada badan-badan non-negara dengan pengelola yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengusaha; hak atas manfaat dikaitkan dengan kontribusi pembayaran iuran daripada kebutuhan; manfaat dan kontribusi terkait dengan besar penghasilan; dan pembiayaan dijamin melalui pajak upah yang dipungut pada majikan dan karyawan dan, tergantung pada program, kadang-kadang melalui subsidi tambahan pembiayaan dari negara.

Program asuransi ini dikembangkan secara *bottom up* (dari bawah ke atas). Mereka pertama kali mencakup unsur-unsur kelas pekerja dan kemudian memperluas cakupan ke segmen populasi yang lebih luas dan memasukkan berbagai klasifikasi risiko tambahan. Seiring waktu, program-program ini disusun untuk memberikan jatah yang luas bagi seluruh warga negara yang bekerja dalam skema yang diatur oleh pemerintah.

Sejak inisiatif pertama dimulai, wakil-wakil partai politik Jerman, bisnis, serikat pekerja, dan agen-agen layanan sosial sukarela terus melakukan perdebatan yang gencar tentang penyusunan desain kebijakan sosial ini. Yang menjadi pokok perdebatan adalah berkaitan dengan bagaimana peran yang harus dimainkan oleh negara dan / atau lembaga amal sukarela non-pemerintah, gereja, dan penyedia layanan sosial lainnya dan bagaimana menemukan perpaduan lembaga publik

dan swasta yang dapat diterima secara politik. Sejak abad kesembilan belas, terutama selama periode krisis ekonomi dan sosial, ada permintaan berulang untuk beralih dari program-program berbasis asuransi ke program universal tarif dan dibiayai pajak untuk menjamin pendapatan minimum bagi semua. Namun, tidak pernah ada dukungan politik yang cukup untuk menghapus program-program berbasis asuransi. Pada periode pascaperang, kelompok-kelompok bisnis dan Persatuan Demokrasi Kristen (*Christlich Demo-kratische Union* - CDU), dengan pengecualian sayap kiri dalam CDU, cenderung mendukung segmentasi terus-menerus angkatan kerja ke dalam program-program berbasis asuransi yang terpisah untuk berbagai kelompok pekerjaan. Mereka menginginkan pengurangan berbagai program kesejahteraan. Sebaliknya, serikat pekerja dan Partai Sosial Demokrat Jerman (*Sozialdemo-kratische Partei Deutschlands* - SPD) cenderung mendukung program-program kesatuan untuk seluruh angkatan kerja.

Program kesejahteraan dan kesehatan sosial Jerman mengalami sedikit gangguan dengan penyatuan mantan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990. Hal ini karena adanya gap, dimana pendekatan Jerman Barat memiliki skema berbeda dengan Jerman Timur dalam hal asuransi sosial, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran (yang tidak ada dalam mantan Jerman Timur), asuransi kecelakaan, dan bantuan sosial dan bantuan lain. Fakta ini berarti bahwa harus ada pengaturan organisasi dan keuangan yang rumit dan heterogen yang ada di bekas Jerman Barat untuk memberikan layanan kesehatan dan sosial harus dibangun di bekas Jerman Timur, dan kadang harus sepenuhnya dari awal. Kebutuhan untuk perluasan program-program kesejahteraan sosial ini mengikuti secara logis dari transisi Jerman Timur yang sebelumnya berdasar ideologi komunis menuju ekonomi pasar bebas, di mana pekerjaan, perawatan kesehatan, dan manfaat asuransi sosial selalu sangat bergantung satu sama lain. Dengan tidak adanya tradisi demokrasi Jerman Timur, ketiadaan lembaga yang mendukung, serta ketiadaan sumber daya pribadi yang memadai dan terampil, upaya Jerman untuk

mengintegrasikan dua sistem perlindungan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan menyebabkan masalah selama bertahun-tahun.

Kebijakan Kunci

Secara umum, terutama sejak selesainya Perang Dunia II, perekonomian Jerman dikembangkan berdasarkan prinsip sistem ekonomi pasar sosial yang lebih progresif dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa. Ini artinya, negara memiliki peran yang besar dalam pengendalian ekonomi, dan menentukan upaya intervensi dalam proses redistribusi kekayaan nasional secara merata kepada seluruh penduduk. Negara juga berupaya hadir secara langsung dalam memberikan perlindungan sosial dan menjalankan berbagai program untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera dalam berbagai macam aspek, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, dan ketenagakerjaan. Implementasi sistem ekonomi pasar sosial dicirikan oleh upaya negara dalam mewujudkan tenaga kerja yang sangat berkualitas, infrastruktur yang dimodernisasikan, persediaan modal yang besar, tingkat korupsi yang rendah, dan tingkat inovasi yang tinggi. Upaya ini telah mengantarkan Jerman menjadi negara termakmur di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar € 39,454 pada tahun 2017. Jerman memiliki size ekonomi nasional terbesar di Eropa, terbesar keempat dengan PDB nominal di dunia, dan peringkat kelima berdasarkan PDB (PPP) pada tahun 2015. Sektor jasa menyumbang sekitar 70% dari total PDB, industri 29,1%, sedangkan pertanian hanya 0,9%.

Berkaitan dengan hal tersebut, antara 1881 dan 1889, Kanselir Otto von Bismarck mempromosikan hukum yang memberikan jaminan sosial dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dia melembagakan konsep negara kesejahteraan pertama di dunia. Jerman adalah negara yang pertama memperkenalkan program asuransi sosial termasuk perawatan

kesehatan universal, pendidikan wajib, asuransi penyakit, asuransi kecelakaan, asuransi cacat, dan pensiun pensiun. Selain itu, kebijakan pendidikan universal pemerintah membuahkan hasil sehingga saat ini Jerman memiliki tingkat melek huruf tertinggi di dunia - 99% - tingkat pendidikan yang memberikan bangsa ini dengan lebih banyak orang pandai dalam menangani angka, lebih banyak insinyur, ahli kimia, optik, pekerja terampil untuk pabrik, manajer yang kompeten, petani berpengetahuan dan personel militer yang terampil.

Keajaiban ekonomi Jerman didorong oleh proses industrialisasi, khususnya penciptaan mesin, yang dikelola secara terintegrasi oleh negara, mulai dari penyiapan SDM, investasi, prioritas sektor unggulan, dan penyiapan infrastruktur. Kemajuan ekonomi juga diintensifkan oleh pertumbuhan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 35 juta pada tahun 1850 menjadi 67 juta pada tahun 1913. Dari tahun 1895 hingga 1907, jumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan mesin industri meningkat dua kali lipat dari setengah juta menjadi lebih dari satu juta. Pada awal abad ke 20, industrialisasi menyebabkan hanya 40 persen orang Jerman tinggal di daerah pedesaan pada tahun 1910, turun dari 67% pada abad sebelumnya (Lee 1996: 43). Industri menyumbang 60 persen dari produk nasional bruto pada tahun 1913. Industri kimia Jerman menjadi yang paling maju di dunia, dan pada tahun 1914 negara itu memproduksi setengah peralatan listrik dunia (Lee, op cit).

Kemajuan pesat menuju kematangan industri membawa perubahan drastis dalam situasi ekonomi Jerman, dari ekonomi pedesaan menjadi pengeksportir utama barang jadi berteknologi tinggi. Rasio produk jadi terhadap total ekspor melonjak dari 38% pada tahun 1872 menjadi 63% pada tahun 1912. Pada tahun 1913, Jerman mendominasi semua pasar Eropa. Pada 1914, Jerman telah menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia (Tilly 1967: 151-182). Capaian tersebut disokong oleh perusahaan pemegang merek global seperti Mercedes-Benz, BMW, SAP, Siemens, Volkswagen, Adidas, Audi, Allianz, Porsche, Bayer, BASF, Bosch, dan Nivea. Selain perusahaan-

perusahaan terkenal tersebut, Jerman juga diakui memiliki kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengahnya yang khusus, yang dikenal sebagai “model Mittelstand”. Secara spesifik Jerman memang mendesain perekonomiannya berpusat pada *mittelstand*. Dengan menyerap ~80% jumlah tenaga kerja, *mittelstand* merupakan tulang punggung perekonomian Jerman. Saat ini terdapat lebih dari 1.000 dari perusahaan-perusahaan Jerman yang menjadi pemimpin pasar global di segmen mereka masing-masing. Jumlah tersebut didukung oleh sekurangnya tiga setengah juta *mittelstand* yang pada umumnya masing-masing memiliki spesialisasi di satu jenis produk tertentu (Garsid 2014). *Mittelstand* tersebut biasanya merupakan bisnis keluarga yang pengelolaannya dilakukan secara turun-temurun antar generasi.

Pembangunan ekonomi Jerman mengalami tantangan berat manakala terjadi proses reunifikasi Jerman Barat dengan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Sejak saat itu, Jerman memulai menyatukan sistem ekonomi dari dua bekas republik. Perencanaan ekonomi intervensionis memastikan pembangunan bertahap di Jerman timur hingga ke level yang setara dengan bekas Jerman Barat, tetapi standar hidup dan pendapatan tahunan tetap jauh lebih tinggi di negara-negara bagian Jerman Barat. Modernisasi dan integrasi ekonomi Jerman Timur terus menjadi proses jangka panjang yang dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2019, dengan transfer tahunan dari barat ke timur sebesar kira-kira \$ 80 miliar (*Germany News.Net*. 14 July 2014). Tingkat pengangguran secara keseluruhan telah turun secara konsisten sejak tahun 2005 dan mencapai titik terendah dalam 20 tahun pada 2012. Negara ini pada bulan Juli 2014 memulai undang-undang untuk memperkenalkan upah minimum universal yang diwajibkan pemerintah federal yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2015.

Program Kesejahteraan

Sistem jaminan sosial di Jerman dikodifikasi pada *Sozialgesetzbuch* (SG), atau “Kode Sosial”, berisi 12 bagian utama, termasuk program berikut:

- Subsidi (asuransi) pengangguran dan pekerjaan publik (SGB II dan III)
- Asuransi kesehatan (SGB V)
- Asuransi pensiun hari tua (SGB VI)
- Asuransi tidak valid (SGB VII dan IX)
- Dukungan anak (SGB VIII)
- Perawatan sosial (SGB XI)

Subsidi Pengangguran

Tunjangan pengangguran di Jerman juga dikenal sebagai asuransi pengangguran. Asuransi ini dikelola oleh lembaga tenaga kerja federal dan didanai oleh kontribusi karyawan dan majikan. Ini sangat kontras dengan FUTA di AS dan sistem lainnya; di mana hanya majikan yang memberikan kontribusi. Partisipasi (dan dengan demikian kontribusi) umumnya wajib bagi karyawan dan majikan. Semua pekerja dengan kontrak kerja reguler, kecuali pekerja lepas dan pegawai negeri tertentu, berkontribusi pada sistem. Sejak tahun 2006, pekerja tertentu yang sebelumnya tidak diikutsertakan telah dapat ikut serta dalam sistem secara sukarela.

Karyawan membayar 1,5% dari gaji kotor mereka di bawah ambang jaminan sosial dan pengusaha membayar kontribusi 1,5% di atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Sebelum tahun 2006, tingkat kontribusi bahkan mencapai 3,25% untuk karyawan dan pengusaha. Kontribusi dibayar hanya untuk pekerja di atas penghasilan minimum (yakni € 5.600/tahun di tahun 2017). Sistem ini sebagian besar dibiayai iuran anggota, akan tetapi juga menerima subsidi dari negara untuk menjalankan pusat-pusat informasi kerja. Melalui sistem ini, pekerja menganggur berhak untuk mendapatkan:

- Tunjangan hidup yang dikenal sebagai tunjangan pengangguran;
- Bantuan dalam mencari pekerjaan;
- Pelatihan.

Bantuan tunjangan hidup dibayarkan kepada pekerja yang telah berkontribusi setidaknya selama 12 bulan sebelum kehilangan pekerjaan mereka. Uang saku dibayarkan selama maksimal 12 bulan. Peserta akan mendapatkan 60% dari gaji bersih mereka sebelumnya, atau 67% untuk peserta yang memiliki anak. Manfaat maksimum, akan tetapi dibatasi pada angka € 2,964 euro (pada tahun 2017).

Jika seorang pekerja tidak memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan pengangguran penuh atau setelah menerima tunjangan pengangguran penuh untuk maksimum 12 bulan, ia dapat mengajukan manfaat dari apa yang disebut program Hartz IV, program kesejahteraan berkelanjutan (*open ended*). Seseorang yang menerima tunjangan Hartz IV mendapat bayaran sebanyak € 409 EUR (2017) per bulan untuk biaya hidup ditambah biaya perumahan yang layak dan perawatan kesehatan. Sebagai catatan, upah minimum di Jerman adalah € 8,84 per jam per Januari 2017, atau sekitar € 1,532 per bulan. Peserta yang berumah tangga dapat menerima tambahan manfaat untuk setiap pasangan termasuk anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak bisa mendapatkan "manfaat untuk pendidikan dan partisipasi".

Jaminan Kesehatan (*Health Insurance*)

Asuransi kesehatan adalah hal yang wajib bagi seluruh penduduk di Jerman. Jerman memiliki sistem perawatan kesehatan multi-pembayar universal dengan dua jenis utama asuransi kesehatan: "Asuransi Kesehatan Wajib" ("*Statutory Health Insurance*" atau disebut juga *Gesetzliche Krankenversicherung*) yang dikenal sebagai dana penyakit (*Krankenkasse*) dan "Asuransi Kesehatan Pribadi" (*Private Krankenversicherung*).

Pekerja dan karyawan yang digaji di bawah ambang batas penghasilan € 50.000 euro per tahun, harus bergabung dengan

"Asuransi Kesehatan Wajib" (*Gesetzliche Krankenversicherung*) . Mereka secara otomatis terdaftar ke dalam salah satu dari sekitar 130 lembaga "dana penyakit (*sickness fund*)" nirlaba dengan tarif sama untuk semua anggota, dan dibayar dengan iuran gabungan karyawan dan majikan. Besaran pembayaran iuran dinegosiasikan dalam tawar-menawar sosial korporat yang kompleks di antara badan-badan tertentu yang diatur sendiri (misalnya asosiasi dokter) di tingkat negara federal (*Länder*). Lembaga dana penyakit diberi mandat untuk memberikan paket manfaat yang unik dan luas dan tidak boleh menolak keanggotaan atau mendiskriminasi secara aktuarial. Bagi rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari € 5.600 per tahun (yang biasanya menjadi penerima manfaat kesejahteraan sosial), pembayaran asuransi dilakukan oleh lembaga kesehatan pemerintah, dimana kotamadya membayar sumbangan atas nama mereka.

Sementara itu, bagi penduduk dengan pendapatan tahunan di atas € 50.000, mahasiswa dan pegawai negeri (sekitar 11 % dari populasi) dapat melengkapi asuransi wajib mereka dengan memilih "Asuransi Kesehatan Pribadi" (*Private Krankenversicherung*). Sebagian besar pegawai negeri mendapatkan tunjangan pegawai pemerintah yang didanai pajak untuk membayar asuransi ini. Perusahaan asuransi swasta biasanya menyediakan berbagai jenis layanan tambahan sebagai tambahan paket manfaat Asuransi Kesehatan Wajib (misalnya untuk membeli kacamata, perawatan kesehatan di luar negeri serta perawatan gigi tambahan atau gigi palsu yang lebih canggih).

Skema Pensiun

Pada prinsipnya, semua warga negara Jerman mendapatkan perlindungan pensiun di hari tua. Pensiun di Jerman memiliki tiga sistem pilar, yakni:

- Pilar pertama: asuransi pensiun negara wajib (*Gesetzliche Rentenversicherung*). Skema ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dasar.

- Pilar kedua: asuransi pensiun kerja sukarela (*Betriebliche Altersvorsorge*), yang disediakan bagi mereka yang mau membayar tambahan biasanya bagi pekerja yang berpenghasilan tinggi.
- Pilar ketiga: asuransi swasta.

Skema **asuransi pensiun wajib** berlaku bagi semua pekerja dan didasarkan pada model *pay-as-you-go* (atau *redistributive*). Semua karyawan dan pengusaha wajib membayar persentase gaji ke dalam sistem ini. Dana yang dibayarkan oleh kontributor (karyawan dan pengusaha) tidak disimpan (atau diinvestasikan) tetapi digunakan untuk membayar kewajiban bagi pegawai yang pensiun saat ini. Khusus bagi pegawai negeri, kontribusi mereka dibayar pemerintah karena gaji mereka pada umumnya lebih rendah daripada di sektor swasta. Pegawai memasuki usia pensiun pada umur 66 tahun, dimana pada 2023 usia pensiun akan meningkat dua bulan setiap tahun, sampai 2029, ketika usia pensiun wajib mencapai 67. Perlu dicatat bahwa seseorang dapat mengambil pensiun dini di Jerman jika mereka memenuhi syarat perjanjian tertentu.

Skema pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji yang dikenal sebagai “kontribusi jaminan sosial”. Jumlahnya pada tahun 2017 adalah 19,6% bagi gaji yang mencapai € 67,200 (bagi penduduk bekas Jerman Barat--Western Bundesländer) dan € 57,600 (bagi penduduk bekas Jerman Timur--Bundesländer Timur). Jumlahnya dibayar bersama, masing-masing setengah oleh majikan dan karyawan. Prosentasi lebih besar dikenakan bagi merke yang mendapatkan gaji diatas angka tersebut. Jumlah yang dibayarkan kepada pensiunan didasarkan pada rata-rata pendapatan dari peserta. Lembaga asuransi pensiun Jerman setiap tahun menerbitkan daftar index pensiun (*remuneration point*). Ini kemudian dikalikan jumlah tahun yang dikontribusikan dan persentase gaji rata-rata yang diperoleh selama masa hidup seseorang. Jumlah pensiun rata-rata yang dibayar, akan tetapi, dapat naik turun sesuai dengan kemampuan anggaran yang

terkumpul. Pada tahun 2017 jumlah yang dibayar adalah € 1,263.15 per bulan.

Skema **asuransi pensiun sukarela** (*Betriebliche Altersvorsorge*) diciptakan di bawah Undang-undang Pensiun Perusahaan (*Betriebsrentengesetz*) pada tahun 1974 dan merupakan skema manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sampai tahun 2017, sekitar 50% pekerja di Jerman mengikuti skema ini.

Skema sukarela bisa masuk dalam kategori berbeda:

- Manfaat yang telah ditentukan (*Leistungszusage*)
- Kontribusi yang ditetapkan (*Beitragsorientierte Leistungszusage*)
- Kontribusi dengan manfaat minimum

Skema **asuransi pensiun swasta** di Jerman adalah pensiun yang didanai secara pribadi. Dana dilindungi oleh hukum dan tidak dapat disita oleh kreditur atau negara. Mereka juga tidak bisa diwariskan. Iuran ke dalam dana ini diberi insentif dari kredit pajak yang disponsori pemerintah sebesar € 154 per tahun per orang dewasa dan hingga tambahan € 300 jika penerima dana memiliki anak. Bentuk pensiun swasta yang paling populer adalah apa yang disebut “Riester Pension”. Skema ini dirancang untuk mengisi “kesenjangan pensiun” yang muncul yang dihasilkan oleh kemerosotan secara bertahap dari kemampuan pembayaran asuransi wajib karena turunnya jumlah kontribusi anggota karena penuaan populasi. Skema alternatif lain untuk pensiun swasta yang disponsori pemerintah adalah Rürup Pension, yang khusus, meskipun tidak secara eksklusif, dirancang untuk orang yang bekerja sendiri (wiraswasta mandiri), yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk Pensiun Riester.

Bantuan Penyandang Cacat

Undang-undang sosial Jerman mendefinisikan tingkat kecacatan sebagai “berkurangnya kemampuan fisik atau psikologis non-temporer yang disebabkan oleh keadaan yang tidak teratur, bukan disebabkan

oleh usia atau penyakit sementara". Pada prinsipnya setiap Kantor Distrik (*Bezirksamt*) memiliki unit yang menangani masalah-masalah kecacatan (*Behindertenbeauftragter*), yang dapat memberi nasihat tentang berbagai dukungan keuangan, pendidikan dan profesional yang tersedia bagi orang-orang cacat di distrik mereka. Orang dengan tingkat kecacatan yang tinggi, yaitu, lebih dari 50 persen (*Schwerbehinderte*), akan diberi kartu kecacatan (*Schwerbebehindertenausweis*) yang mencantumkan tingkat dan sifat kecacatan mereka. Kartu ini berlaku di seluruh Jerman untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan pelayanan.

Orang-orang yang memiliki cacat yang serius berhak atas berbagai tunjangan dan kondisi kerja khusus, yakni:

- Tunjangan pajak, termasuk pengurangan pajak mobil, tergantung pada tingkat kecacatan.
- Perlindungan khusus terhadap pemecatan: setiap pemberitahuan yang diberikan harus memiliki persetujuan sebelumnya oleh Kantor untuk Integrasi (*Integrationsamt*). Jika majikan gagal untuk melakukan ini, ia harus menarik kembali pemecatan jika karyawan penyandang cacat mengajukan keluhan di pengadilan Buruh (*Arbeitsgericht*) dalam waktu tiga minggu. Perlindungan ini juga berlaku jika kecacatan tidak diketahui oleh pemberi kerja atau hanya dinilai secara retrospektif.
- Lima hari tambahan untuk cuti tahunan dibanding orang biasa.
- Hak untuk bekerja: semua organisasi dengan dua puluh atau lebih karyawan harus mengisi setidaknya lima persen dari pos yang tersedia untuk penyandang cacat.
- Lencana parkir cacat (*Behinderteparkausweis*) untuk mendapatkan tempat parkir khusus yang diistimewakan dibanding masyarakat umum.

- Bantuan akomodasi (*Wohngeld*), yang jumlahnya tergantung pada tingkat kecacatan, jumlah anggota keluarga dan pembayaran sewa bulanan.
- Orang buta, orang dengan gangguan penglihatan sangat tinggi dan tuna rungu juga berhak atas tunjangan pemeliharaan negara (*Landespflegegeld*) yang mengalokasikan lump sum sebagai kompensasi untuk biaya tambahan yang timbul karena kecacatan. Jumlahnya tergantung pada tingkat kecacatan.
- Penyandang cacat yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan tugas sehari-hari (seperti pekerjaan rumah tangga, mobilitas dan kebersihan pribadi) juga berhak atas pembayaran asuransi perawatan (*Pflegeversicherung*), seperti halnya pengasuh mereka.
- Penyandang cacat juga berhak atas pensiun berdasarkan pengurangan kapasitas penghasilan (*Erwerbsminderungsrente*)
- Orang yang tidak dapat bekerja selama lebih dari tiga jam seminggu berdasarkan kondisi kerja normal dan yang cacatnya tidak mungkin berubah di masa depan, berhak mendapatkan pensiun penuh. Jumlah pensiun ini dibagi dua jika jam kerja diperpanjang antara tiga dan enam jam per minggu.

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan atau kondisi kerja khusus, orang-orang cacat harus mendaftar ke Kantor Pensiun dan Subsidi setempat (*Versorgungsamt*) agar diberikan penilaian cacat. Kantor Pensiun dan Subsidi di tempat tinggal penyandang cacat akan menilai tingkat kecacatan (dari 20 hingga 100), berdasarkan dokumen yang ada atau pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter pemohon.

Tunjangan Pengasuhan Anak

Sistem penitipan anak di Jerman bersifat universal dalam cakupan, meskipun peraturan dapat bervariasi dari distrik ke distrik, dan antara (bekas) Jerman Barat dan Jerman Timur. Hal ini ditentukan oleh berbagai peran masyarakat: orang tua, pemerintah daerah dan lokal, organisasi nirlaba (biasanya gereja) dan sebagainya. Kebijakan perawatan anak di Jerman lebih fokus pada perkembangan anak-anak dan keberhasilan belajar mereka setelah taman kanak-kanak daripada berfokus pada membantu menyelesaikan kompatibilitas pekerjaan dan keluarga untuk orang tua. Hal ini menjelaskan fakta bahwa Jerman bertujuan untuk menyediakan pendidikan awal berkualitas tinggi untuk anak-anak, bukan sekedar membantu supaya orang tuanya dapat bekerja. Jerman menawarkan berbagai program pengasuhan anak, seperti:

- Pusat penitipan anak (*Krippe*) untuk anak-anak hingga usia 3 tahun,
- Program prasekolah (TK) untuk anak-anak mulai usia 3 hingga 6 tahun,
- Sekolah Dasar (*Hort*) untuk anak usia sekolah.

Sekitar 80% dari tempat perawatan anak di Jerman adalah lembaga non-profit yang didanai oleh pemerintah. Sekitar 90% dari biaya penitipan disubsidi oleh pemerintah negara bagian, regional dan lokal melalui pajak publik sementara sisanya biaya dibayar oleh orang tua.

Peraturan penitipan anak diberlakukan oleh kantor pemuda negara (*Landesjugendamt*) di masing-masing distrik, yang mendistribusikan dana ke pusat-pusat penitipan anak sesuai dengan jumlah tertentu. Meskipun penegakannya dalam bentuk yang relatif terdesentralisasi, masih ada kesesuaian yang tinggi pada persyaratan peraturan pusat penitipan anak di antara distrik yang berbeda. Misalnya, rasio anak/staf bervariasi dari 17/1 hingga 25/1; ukuran kelompok 25 di taman kanak-kanak; dan persyaratan pelatihan dan sertifikasi untuk guru. Sistem penitipan anak Jerman sangat menghargai kualitas staf pengajar. Di setiap distrik Jerman, seorang

guru harus menyelesaikan empat sampai lima tahun persyaratan pelatihan, yang biasanya terdiri dari dua tahun kuliah, satu hingga dua tahun praktikum, dan satu tahun praktikum tambahan (*berufspraktikum*). Peraturan yang lebih ketat tentang persyaratan pelatihan guru menjamin kualitas layanan pengasuhan anak sampai batas yang dianggap profesional. Hampir tidak ada pelaku swasta untuk penitipan anak di Jerman Hal ini disebabkan penyedia penitipan anak swasta tidak dapat mempertahankan profitabilitas ketika menghadapi persaingan dari penyedia layanan publik yang didanai oleh pemerintah.

Meskipun kondisi umum sistem penitipan anak dapat diterapkan untuk sebagian besar kasus dan wilayah di Jerman, ada perbedaan regional yang sangat besar, antara Jerman Barat dan Timur. Hal ini disebabkan variasi regional dalam penyediaan perawatan dengan peraturan yang dibuat di tingkat komunitas lokal. Menurut survei Roszbach & Roitsch (1994), ada variasi dalam penyediaan layanan penitipan anak antara daerah pedesaan dan perkotaan, dengan daerah pedesaan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di Jerman Timur, ada lebih banyak jumlah tempat penitipan anak daripada di Jerman Barat dan tingkat penyediaan perawatan anak yang lebih tinggi, sebagai warisan dari Republik Demokratik Jerman sosialis sebelumnya. Jam buka pusat penitipan anak juga bervariasi. Di Jerman Barat jam buka lebih pendek, hanya untuk setengah hari; sementara di Jerman timur, 97% taman kanak-kanak menawarkan perawatan sepanjang hari termasuk makan siang.

Pemerintah mengatur masa cuti ibu melahirkan selama 3 tahun, dengan tunjangan tunai yang rendah dibayarkan berdasarkan ketentuan asuransi kesehatan. Perempuan cenderung tinggal sebagai ibu rumah tangga ketika anak-anak masih muda dan kembali bekerja paruh waktu setelah anak-anak mereka bertambah tua. Untuk ibu yang bekerja, ada beberapa pengaturan pengasuhan anak informal yang bisa mereka miliki. Biasanya mereka memiliki anak-anak mereka untuk diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat dekat lainnya. Yang lain mengirim anak-anak mereka ke pusat penitipan anak. 60% anak

Jerman di bawah usia 3 tahun dirawat oleh pusat penitipan anak dan lebih dari 90% anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun mengikuti program prasekolah penuh-hari.

5. Model 'Beveridge System' di Inggris

Inggris adalah salah satu negara yang paling makmur di dunia dengan pendapatan per kapita \$ 42.514,49 US dollars (pada tahun 2017) serta merupakan salah satu negara pertama yang mengimplementasikan sistem welfare state. Negara kesejahteraan modern Inggris Raya saat ini didasarkan pada sistem yang dikembangkan pada masa pasca Perang Dunia Kedua dengan menggunakan basis Laporan Beveridge, sebagai cetak biru yang terinci untuk melakukan reformasi sosial. Laporan tersebut ditulis oleh seorang peneliti bernama Sir William Beveridge yang menganalisis apa dan bagaimana kemiskinan terjadi. Dorongan umum dari pemikiran Beveridge adalah bahwa untuk memastikan kemakmuran umum, maka setiap minggu setiap orang yang bekerja harus menyumbang kontribusi sebagai asuransi nasional (dan bila terdapat kekurangan maka lembaga "Exchequer" akan menyediakan kekurangannya). Atas penarikan dana tersebut, satu set manfaat bantuan akan dibayarkan kepada orang-orang yang menganggur, sakit, pensiun duda atau janda, untuk memastikan standar hidup minimum yang layak bagi semua orang. Dia berpendapat bahwa mengambil beban biaya perawatan kesehatan dan pensiun dari perusahaan dan individu dan memberikannya kepada pemerintah akan meningkatkan daya saing industri Inggris sambil menghasilkan pekerja yang lebih sehat, lebih kaya, lebih termotivasi dan lebih produktif yang tertarik untuk membeli barang-barang Inggris.

Laporan Beveridge membentuk dasar untuk beberapa bagian legislasi pasca-perang dan, di bawah pemerintahan Buruh, konsep Negara Kesejahteraan Inggris muncul dengan bentuk yang berbeda dari saingan perangnya, Jerman, pada saat itu. Kebijakan welfare berikutnya dikembangkan dengan tetap mengacu pada tulisan-tulisan Beveridge seperti *Full Employment in a Free Society* (1944); *Pillars of Security* (1948); *Power and Influence* (1953); and *A Defence of Free Learning* (1959). Beveridge mengusulkan bahwa pemerintah harus mencari cara untuk melawan apa yang disebutnya, lima kejahatan: **Want/keinginan**, (dengan menyediakan bantuan kemiskinan); **Disease/Penyakit** (dengan menyediakan layanan kesehatan); **Ignorance/Ketidaktahuan** (dengan menyelenggarakan pendidikan); **Squalor/gelandangan** (dengan menyediakan fasilitas perumahan); dan **Idleness/pengangguran** (dengan menyediakan pekerjaan). Dengan menambahkan tunjangan dasar keluarga sebesar delapan pondsterling per anak (pada saat itu), pada dasarnya, dapat memberikan bantuan dari lahir sampai mati, atau, seperti yang disebut Beveridge, "*from cradle to grave from cradle to grave*".

Beveridge membuktikan bahwa idenya benar. Pertumbuhan ekonomi Inggris terjadi pasca-Perang Dunia Kedua yang berkesinambungan dan ketersediaan pekerjaan penuh berlangsung hingga akhir tahun 70-an mengakibatkan penurunan kemiskinan, hilangnya permukiman kumuh, pendirian layanan kesehatan gratis dan sistem pendidikan bersamaan dengan meningkatnya pendapatan riil dan menurunnya ketidaksetaraan. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dan membantu Inggris melunasi utang perangnya. Pada tahun 1950, Seebohm Rowntree - yang telah melakukan survei kemiskinan di York pada tahun 1899 dan 1936 - menyimpulkan bahwa masalah kemiskinan di Inggris sebagian besar telah terhapus.

Untuk membiayai skema kesejahteraan, pemerintah Inggris mewajibkan setiap warga negara untuk membayar iuran asuransi nasional yang jumlahnya disesuaikan dengan penghasilan. Iuran

tersebut dibayar di luar skema pajak. Dalam kaitan ini, setiap orang harus memiliki NIN (National Insurance Number) yang dipakai untuk membayar dan klaim manfaat asuransi. Manakala seseorang membayar asuransi, maka mereka akan dapat mengakses berbagai macam bantuan, yang disesuaikan dengan kelas pembayaran (lihat tabel 5.1.)

Tabel 5.1. Manfaat Asuransi Nasional Inggris

Benefits	Class 1: employees	Class 2: self-employed	Class 3: voluntary contributions
Basic State Pension	Yes	Yes	Yes
Additional State Pension	Yes	No	No
New State Pension	Yes	Yes	Yes
Contribution-based Jobseeker's Allowance	Yes	No	No
Contribution-based Employment and Support Allowance	Yes	Yes	No
Maternity Allowance	Yes	Yes	No
Bereavement Support Payment	Yes	Yes	No

Sumber: <https://www.gov.uk/national-insurance/what-national-insurance-is-for>

Sejarah dan Latarbelakang

Inggris menerapkan konsep Negara kesejahteraan dalam pengertian modern sejak dibentuknya *the Royal Commission into the Operation of the Poor Laws* (Komisi Kerajaan untuk Pengoperasian Hukum Miskin) tahun 1832. Sebelumnya, Inggris memiliki program karitatif untuk mengatasi kemiskinan, tetapi justru menjadi sebab penyalahgunaan luas dan dianggap mempromosikan kemelaratan, kemalasan dan kriminalitas pada penerimanya. Perhatian untuk membuat kebijakan kesejahteraan yang komprehensif juga berasal dari laporan yang dibuat oleh peneliti seperti Seebohm Rowntree (1899) dan Charles Booth (1889) tentang tingkat kemiskinan di Inggris. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa di kota-kota industri besar Inggris, sekitar

seperempat dan sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 1903, Winston Churchill muda telah membaca buku Seebohm Rowntree (1899) berjudul *Poverty: A Study of Town Life (set in York)* yang sangat mempengaruhi idealismenya. Sejak hari itu dan seterusnya, ia bekerja untuk program-program reformasi sosial dan pengentasan miskin. Pada tahun 1906, Churchill berjalan di jalanan Manchester saat berkampanye untuk pemilihan kembali dan melihat jenis kemiskinan itu untuk dirinya sendiri. Pada 1908, ia berkenalan dengan William Beveridge, dimana kedua lelaki itu memiliki gagasan serupa sehingga Churchill mengundang William Beveridge untuk bergabung dengan Dewan Perdagangan yang diketuainya. Mereka berdua mengatur pelaksanaan sistem nasional awal Asuransi Nasional, dan Bursa Tenaga Kerja diperkenalkan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun yang sama Beveridge menulis buku, *Unemployment: A Problem of Industry*, dan membantu Beatrice Webb menyusun laporan 1909 Poor Laws.

Atas dasar buku tersebut, aturan tentang upah minimum diperkenalkan di Inggris Raya pada tahun 1909 untuk industri dengan upah rendah tertentu dan diperluas ke berbagai bidang industri, termasuk buruh tani, pada tahun 1920. Namun, pada tahun 1920-an, perspektif baru ditawarkan oleh para reformis untuk menekankan kegunaan tunjangan keluarga yang ditargetkan. di keluarga berpenghasilan rendah adalah alternatif untuk mengurangi kemiskinan tanpa mengganggu pasar tenaga kerja. Serikat buruh dan Partai Buruh mengadopsi pandangan ini.

Selama Perang Dunia Pertama, Beveridge terlibat dengan mobilisasi tenaga kerja untuk keperluan perang. Pada tahun 1941, pada saat perang, pemerintah Churchill mulai merencanakan sistem kesejahteraan untuk Inggris pasca perang, dan meminta Beveridge untuk membuat rencana yang diperbarui sepanjang garis yang sama dari rencana 1909 mereka. Pada tanggal 1 Desember 1942, Beveridge menghasilkan fondasi gagasan untuk Negara Kesejahteraan Inggris,

yang diratifikasi pemerintah, tetapi disimpan sampai setelah perang. Sementara itu, Beveridge menerbitkan laporan 300 halamannya, "*Social Insurance and Allied Services*" (Asuransi Sosial dan Layanan Sekutu), lebih dikenal sebagai yang dikenal sebagai "Laporan Beveridge".

Selesainya Perang Dunia Pertama mendorong tuntutan untuk reformasi sosial, dan menyebabkan peningkatan yang permanen dalam peran negara dalam mengatasi kemiskinan masyarakat Inggris. Berakhirnya perang juga membawa kemerosotan, terutama di kota-kota industri utara, yang kemudian mempengaruhi terjadinya Depresi Besar pada 1930-an. Selama masa perang, pemerintah menjadi jauh lebih terlibat dalam kehidupan rakyat melalui organisasi pemerintah dalam penjatahan bahan makanan, pakaian dan bahan bakar serta tambahan susu dan makanan yang diberikan kepada ibu dan anak yang hamil. Untuk memperoleh dukungan publik dan memudahkan mobilisasi rakyat, pemerintah koalisi pada masa perang juga berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan penuh (*full employment*) melalui kebijakan model Keynesian, pendidikan menengah universal gratis, dan pengenalan tunjangan keluarga. Banyak orang yang dengan senang menyambut intervensi pemerintah ini dan menginginkannya untuk melangkah lebih jauh.

Selain Beveridge, dalam kebijakan welfare, Inggris juga kerap mengacu pada pendapat pemikir perubahan sosial Seebohm Rowntree dan vilantrop Joseph Rowntree yang mendefinisikan kemiskinan sebagai "keadaan ketika sumber daya seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka". Pada bulan Mei 1916, Inggris menambahkan kriteria baru terhadap kartu skor pengukur kemiskinan: *destitution* (kemelaratan) - suatu istilah yang diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang menghadapi dua atau lebih dari yang berikut dalam sebulan: tidur tidak nyenyak, tidak mampu makan sekali sehari selama dua hari atau lebih, tidak dapat memanaskan atau menerangi rumah selama lima hari atau lebih, pergi tanpa pakaian yang sesuai dengan cuaca atau tanpa perlengkapan mandi dasar. Mereka

yang memiliki keadaan dengan kriteria tersebut, maka dia akan mendapatkan bantuan dari negara.

Pajak dan Asuransi Sosial

Sumber pembiayaan sistem kesejahteraan Inggris bertumpu pada dua sumber: Pajak dan Kontribusi Asuransi nasional. Pada tahun fiskal 2016–17, total pendapatan pemerintah diperkirakan 37,7 % dari PDB, dan kontribusi Asuransi Nasional (sebagai komponen penopang sistem welfare) lebih dari £ 610 miliar.

Perpajakan di Inggris meliputi pembayaran pada tiga tingkat pemerintahan yang berbeda, yakni: pemerintah pusat (Badan Pendapatan dan Bea Cukai Kerajaan), pemerintah wilayah dan pemerintah lokal. Pendapatan pemerintah pusat terutama berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak perusahaan dan bea bahan bakar. Pendapatan pemerintah lokal terutama berasal dari hibah dari dana pemerintah pusat, Pajak Lokal dan biaya seperti untuk parkir di jalan.

Selain pajak, rakyat juga dikenakan kontribusi Asuransi Nasional. Rakyat diberi nomor Asuransi Nasional sebelum mulai membayar iuran. Asuransi Nasional ini pertama kali diperkenalkan oleh Undang-undang Asuransi Nasional 1911 dan diperluas oleh pemerintah Buruh pada tahun 1948. Sistem ini mengalami banyak perubahan di tahun-tahun berikutnya. Awalnya, skema ini adalah bentuk kontribusi asuransi terhadap pengobatan penyakit dan pengangguran, dan akhirnya memberikan pembayaran pensiun dan manfaat lainnya. Warga negara diwajibkan membayar Asuransi Nasional jika mereka telah berumur 16 tahun atau lebih, dan menjadi karyawan yang berpenghasilan di atas £ 162 seminggu atau wiraswasta mandiri yang berpenghasilan laba sebesar £ 6,205 atau lebih dalam setahun. Dengan demikian, jumlah kontribusi pembayaran oleh peserta disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh.

Karyawan dan majikan membayar kontribusi Asuransi Nasional atas tunjangan tertentu yang diberikan kepada karyawan. Karyawan wiraswasta berkontribusi sebagian melalui pembayaran mingguan atau bulanan tetap, dan sebagian pada persentase dari laba bersih di atas batas tertentu. Individu juga dapat membuat kontribusi sukarela untuk mengisi celah dalam catatan kontribusi mereka yang dapat melindungi hak mereka atas tunjangan. Kontribusi dari karyawan dikumpulkan oleh HM Revenue and Customs (HMRC) melalui sistem pajak (PAYE--Pay as You Earn Tax), bersama dengan setoran Pajak Penghasilan, atau pembayaran kembali Pinjaman Mahasiswa atau pembayaran Retribusi Magang yang mana atasan akan bertanggung jawab untuk membayar. Pengusaha memasukkan PAYE dalam daftar gaji mereka. ini mengacu pada sistem "HM Revenue and Customs" (HMRC) untuk pengumpulan Pajak Penghasilan dan Asuransi Nasional dari pekerjaan

Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Sistem pendidikan di Inggris diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan peserta didik memiliki kemampuan sebagai warga negara yang dapat berperan sosial dan bekerja sesuai dengan market industri dan sistem pemerintahan yang ada. Sampai tahun 1870, semua sekolah di Inggris diselenggarakan oleh swasta atau lembaga amal (*charity*). Pada 1870 dibuat UU Elementary Education Act yang membolehkan pemerintah lokal ikut serta menyelenggarakan pendidikan dasar. Lalu pada 1902, pemerintah juga membolehkan pemerintah lokal untuk menyelenggarakan pendidikan menengah.

Pendidikan yang didanai negara dibagi dalam beberapa tahap berdasarkan usia: Tahapan Dasar Awal Tahun (usia 3-5); pendidikan dasar (usia 5 hingga 11 tahun), dibagi lagi menjadi Tahap Kunci 1 / *Key Stage 1* (KS1) Bayi (usia 5 hingga 7) dan Tahap *Key Stage 2* (KS2) Juniors (usia 7 hingga 11); Pendidikan menengah (usia 11 sampai 16),

dibagi lagi menjadi KS3 (usia 11 hingga 14) dan KS4 (usia 14 hingga 16); Tahap Utama 5 adalah pendidikan pasca 16 (usia 16 hingga 18); dan pendidikan tinggi (untuk usia 18+).

Pendidikan adalah wajib bagi seluruh warga negara sampai tahap utama 5 (16-18 tahun) dan digratiskan oleh negara. Semua anak di Inggris harus menjalani pendidikan yang efektif (di sekolah) sejak “hari yang ditentukan pertama”, yang jatuh pada atau setelah ulang tahun kelima, sampai mereka berulang tahun ke 18. Pada usia 16 siswa biasanya mengambil ujian untuk Sertifikat Umum Pendidikan Sekunder (GCSE) atau kualifikasi Tingkat 1/2 lainnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, mereka yang ingin menempuh pendidikan pasca-16 tahun dapat mengambil sejumlah bentuk, mungkin bersifat akademik (universitas) atau kejuruan (vokasi). Tahap ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dikenal sebagai “bentuk keenam” atau “perguruan tinggi”, yang memberikan sertifikat kualifikasi Level-A (mirip dengan ijazah kursus di beberapa negara lain), atau sejumlah alternatif kualifikasi Level-3 yang biasanya mencakup magang berbasis kerja, atau menjadi sukarelawan. Pada tahap ini, *National Apprenticeship Service* (Layanan Pemagangan Nasional) membantu orang-orang berusia 16 tahun atau lebih memasuki program magang untuk mempelajari skill keterampilan yang dibutuhkan pasar. *Traineeship* juga diawasi oleh National Apprenticeship Service, dan merupakan pendidikan dan program pelatihan yang dikombinasikan dengan pengalaman kerja untuk memberikan keterampilan yang diperlukan kepada para peserta pelatihan untuk mendapatkan magang.

Pendidikan tinggi sering dimulai dengan tingkat sarjana yang ditempuh selama tiga tahun. Selanjutnya tingkat pascasarjana mencakup gelar master, baik yang berdasarkan terapan maupun penelitian selama satu sampai dua tahun, dan gelar penelitian tingkat doktoral yang biasanya memakan waktu setidaknya tiga tahun. Pada tahun 2018, biaya kuliah rata-rata untuk gelar sarjana di universitas negeri mencapai £ 9.250 per tahun akademik. Pendidikan tinggi di

Inggris disediakan oleh college, universitas negeri, dan perguruan tinggi swasta. Siswa biasanya memasuki pendidikan tinggi sebagai mahasiswa dari usia 18 dan seterusnya, dan dapat belajar untuk berbagai macam kualifikasi kejuruan dan akademik, termasuk sertifikat pendidikan tinggi dan sertifikat nasional yang lebih tinggi di tingkat 4, diploma pendidikan tinggi, gelar sarjana (biasanya dengan honours) di level 6, dan gelar master yang terintegrasi dan gelar dalam kedokteran, kedokteran gigi, dan ilmu kedokteran hewan di level 7.

Setiap tahun, pemerintah membuat ketentuan upah minimum pekerja yang biasanya dibuat dalam hitungan jam (lihat Tabel 5.1). Walau demikian, pasar tenaga kerja dapat memberikan apresiasi upah yang berbeda dengan ketentuan pemerintah. Misalnya, gaji untuk freshgraduate di Inggris pada tahun 2018 rata-rata berkisar antara £19,000 - £30,000 per tahun, jauh lebih tinggi dari ketentuan upah minimum.

Tabel 5.2. Upah Minimum di Inggris Tahun 2018 (per Jam)

Tahun	Umur Pekerja				
	Lebih dari 25	21 sd 24	18 sd 20	Dibawah 18	Magang
April 2018	£7.83	£7.38	£5.90	£4.20	£3.70

Sumber: <https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates>

Kerangka Sistem Kesejahteraan

Sistem kesejahteraan Inggris sering diklasifikasikan sebagai sistem negara kesejahteraan liberal. Negara Inggris adalah merupakan salah satu populasi terbesar di dunia, ketiga di Uni Eropa setelah Jerman dan Perancis. Sebagaimana saran Beveridge, konsep negara kesejahteraan Inggris dimaksudkan untuk mengatasi lima persoalan pokok yang berkaitan dengan kemiskinan, penyakit, kebodohan, gelandangan, dan

pengangguran. Selain itu, negara kesejahteraan juga termasuk gagasan untuk peningkatan perpajakan redistributif, peningkatan regulasi industri, makanan, dan perumahan (dalam konteks peraturan keselamatan yang lebih baik, kualitas dan tindakan kontrol untuk penataan harmonisasi lingkungan). Anggaran yang disediakan cukup besar: pada Pengeluaran di 2015–16 pemerintah membelanjakan anggaran sebesar £ 57.000.000.000, yang termasuk: £ 2.300.000.000 dibayarkan kepada orang yang menganggur dan £ 27.100.000.000 untuk orang-orang dengan pendapatan rendah, dan £ 27.600.000.000 untuk kredit pajak pribadi. Adapun jenis-jenis program kesejahteraan yang tersedia meliputi:

Universal Credit

Kredit Universal adalah skema pembayaran untuk membantu biaya hidup rakyat. Bantuan ini dibayarkan setiap bulan, atau dua kali sebulan untuk rakyat di wilayah Skotlandia. Semua orang bisa memperoleh bantuan ini bila pendapatannya dikategorikan miskin dan atau tidak punya pendapatan (misal karena sakit sehingga tidak bekerja). Bantuan ini dapat meliputi jenis Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, income-based Jobseeker's Allowance (JSA), income-related Employment and Support Allowance (ESA), dan Working Tax Credit.

Child Tax Credit

Kredit (bantuan) Pajak Anak ini disediakan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah atau sampai umur 20 tahun yang menempuh pendidikan atau pelatihan yang memenuhi syarat. Bantuan ini tidak mempersyaratkan seseorang harus bekerja, tetapi langsung diberikan pada setiap satu rumah tangga yang memiliki anak. Jumlah bantuan yang didapat tergantung pada berapa banyak anak yang dimiliki.

Housing Benefit

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah untuk membayar sewa rumah. Bantuan tersebut dapat membayar sebagian atau seluruh uang sewa. Jumlah banyaknya bantuan yang diterima tergantung pada penghasilan dan keadaan penerima (seperti apakah mereka berkeluarga, jumlah anak, dan kepemilikan harta kekayaan).

Tabel. 5.3. Jumlah Bantuan Perumahan

Property	Bantuan Per Minggu
1 bedroom (or shared accommodation)	$\leq \text{£ } 268.46$
2 bedrooms	$\leq \text{£ } 311.40$
3 bedrooms	$\leq \text{£ } 365.09$
4 bedrooms	$\leq \text{£ } 429.53$

Rakyat dapat mengajukan permohonan Tunjangan Perumahan bila penghasilan mereka dibawah ketentuan upah minimum, tidak bekerja atau menganggur. Bantuan ini biasanya sangat berguna khususnya untuk anak-anak muda yang belum bekerja, sementara mereka harus tinggal terpisah dari orang tuanya. Rakyat Inggris, rata-rata 'mengusir' anaknya untuk tinggal terpisah dari orang tua ketika berumur 16 tahun. Mereka dapat menggunakan bantuan perumahan untuk menyewa rumah di apartemen milik pemerintah (lokal), maupun rumah pribadi milik swasta.

Income Support

Bantuan ini diberikan tiap dua minggu kepada warga miskin berusia 16-64 tahun yang penghasilannya dibawah upah minimum (dan memiliki tabungan dibawah £ 16.000). Jumlah pasti yang diperoleh tergantung pada keadaan penerima, tetapi bila seseorang memenuhi syarat dan tidak memiliki penghasilan, dia akan mendapatkan minimal setidaknya £ 57,90 (sekitar Rp. 780.000) dan maksimum £114.85

(sekitar Rp. 1.600.000) per minggu (dibayar tiap dua minggu, pada tahun 2018).

Income-based Jobseeker's Allowance (JSA)

Bantuan ini diberikan kepada anak muda dan orang pada usia produktif yang masih mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 16 jam per minggu. Mereka harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan manfaat bantuan sebesar £57.90 – £ 114,85 (tahun 2018) yang dibayarkan setiap dua minggu sekali.

Income-related Employment and Support Allowance (ESA)

Tunjangan ini adalah bantuan uang untuk orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas untuk bekerja karena penyakit atau cacat mereka tetapi tidak mendapatkan. Sejak 2016, tunjangan ini digantikan oleh Universal Credit untuk orang yang membuat klaim baru di area layanan digital. Penerima harus berusia 16 tahun ke atas dan di bawah usia pensiun. Untuk mendapatkan ESA, seseorang harus memiliki penghasilan rendah, tabungan Anda di bawah £ 16.000, dan memiliki kemampuan terbatas untuk bekerja karena kondisi tertentu seperti sakit dan cacat. Seseorang hanya bisa mendapatkan ESA saat mereka bekerja, jika pekerjaan mereka memiliki "izin bekerja (permitted work)".

Working Tax Credit

Kredit ini dirancang untuk menambah penghasilan jika seseorang bekerja dan mereka berpenghasilan rendah. Jika memenuhi syarat, seseorang bisa mendapatkannya jika mereka bekerja pada perusahaan atau bekerja sendiri. Penerima mendapatkan elemen dasar sebesar £ 1,960 setahun ditambah elemen tambahan ekstra, tergantung pada keadaan mereka, seperti memiliki cacat, atau membayar untuk perawatan anak.

6. Sistem Welfare di Australia

Australia adalah negara yang memiliki lebih dari 24,8 juta orang penduduk yang memiliki latar belakang budaya, sosial dan ekonomi yang beragam, dan hidup di berbagai komunitas (ABS 2017). Setiap orang memiliki kemampuan, sumber daya, pengalaman, dan kebutuhan kesejahteraan yang berbeda. Oleh karena itu, dukungan bantuan kesejahteraan yang disediakan atau didanai oleh pemerintah sangat kompleks dan luas, semuanya berbasis pajak yang dibayarkan oleh penduduk. Jadi, seseorang dapat mengakses layanan sosial bila dia termasuk orang yang taat membayar pajak. Walaupun demikian, kebijakan dan program untuk kesejahteraan jauh melampaui skema ini. Misalnya, pemerintah juga menggunakan dana non-pajak untuk menyediakan layanan universal bidang pendidikan dan kesehatan — dan dukungan yang ditargetkan untuk perumahan, pekerjaan, kecacatan, penuaan dan perawatan usia (antara lain) — yang sangat penting bagi kesejahteraan individu dan keluarga mereka.

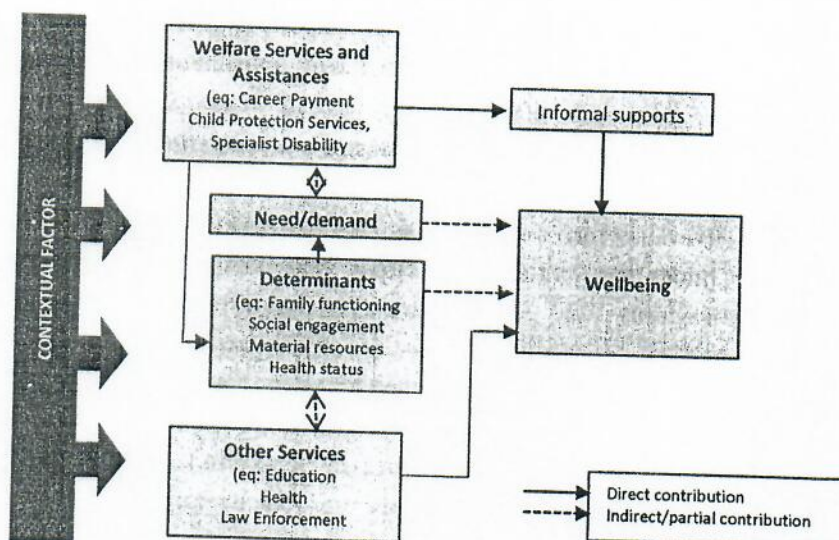
Jaminan sosial, di Australia, adalah sistem yang mengacu pada sistem pembayaran kesejahteraan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Persemakmuran (Federal) Australia. Pembayaran ini dikelola oleh Centrelink, cabang dari Departemen Layanan Kemanusiaan (Department of Human Services). Menurut klasifikasi Esping-Anderson, Australia termasuk dalam kluster model *Liberal Welfare State* sehingga sebagian besar bantuan manfaat tidak bersifat universal dan berarti ada seleksi klasifikasi terlebih dahulu terhadap calon penerima manfaat. Sistem welfare Australia memiliki prinsip

bahwa pada dasarnya orang tidak memerlukan dukungan, atau, kebutuhan mereka akan dukungan dapat bervariasi sesuai dengan keadaan dan perubahan tahap kehidupan mereka, sehingga bantuan tidak bisa disamaratakan. Jika dukungan diperlukan, dapat berasal dari berbagai sumber — keluarga, teman dan komunitas, atau melalui dukungan keuangan atau layanan formal. Layanan juga dapat disediakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah di berbagai bidang. (lihat Gambar 5.1).

Di Australia, pembayaran bantuan pendapatan dilakukan dengan penentuan segmentasi target penerima dan mereka yang menerima harus lulus uji persyaratan yang ditentukan. Proses uji persyaratan ini menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan manfaat, dan memastikan bahwa sumber daya terfokus untuk mendukung target dengan pendapatan yang relatif lebih rendah dan aset yang lebih sedikit. Dengan ini berarti pengujian memainkan peran yang lebih menonjol di Australia daripada di negara lain. Faktanya, Australia adalah negara tertinggi dalam negara-negara serupa dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sekitar 80% dari pengeluaran Australia untuk tunjangan tunai (misalnya, pensiun usia dan tunjangan pengangguran) ditentukan dengan cara uji persyaratan. Australia memfokuskan pengeluaran bantuan manfaat sosial bagi mereka yang paling membutuhkan (bukan kepada masyarakat umum). Pada tahun 2011, sekitar 42% belanja sosial untuk tunjangan tunai jatuh ke kelompok berpenghasilan terendah (atau paling tidak beruntung); hanya 3,8% yang mencapai 20% kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi di Australia.

Pada 2017, diperkirakan sebanyak 478.000 orang bekerja yang menerima bantuan manfaat dalam skema kesejahteraan — meningkat 84% sejak 2005. Mereka dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori layanan utama: layanan perawatan anak dan pendidikan prasekolah, layanan perawatan perumahan, dan layanan bantuan sosial lainnya.

Gambar 6.1. Kerangka kesejahteraan Australia



Sumber: AIHW (2017: 2)

Setiap tahun, pemerintah mengidentifikasi kemampuan pendapatan penduduk dalam tiga kategori: *low income*, *middle income*, dan *high income*. Pada indikator tahun 2013–14, secara riil, pendapatan rumah tangga (setelah disesuaikan dengan jumlah orang dalam rumah tangga) adalah sekitar \$ 998 (sekitar Rp. 9 juta) per minggu. Rumah tangga yang dianggap berpenghasilan rendah memiliki pendapatan \$ 407 per minggu, rumah tangga berpenghasilan menengah \$ 843 per minggu dan rumah tangga berpenghasilan tinggi \$ 2.037 per minggu (ABS 2015).

Karena sepenuhnya bertulang belakang pembayaran pajak (khususnya pajak penghasilan), sistem kesejahteraan Australia pada saat ini mengalami tantangan berkaitan dengan proses penuaan populasinya. Artinya generasi muda yang bekerja harus menanggung

beban senior mereka yang pensiun. Jumlah penduduk Australia yang berusia lanjut dan proporsi penduduk Australia yang berusia 65 tahun ke atas terus bertambah. Proyeksi Biro Statistik Australia (ABS 2017) bahwa untuk 2017 menunjukkan bahwa 3,8 juta orang di Australia berusia 65 dan lebih dari 15% dari total populasi. Pada tahun 2057, jumlah orang yang berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan lebih dari dua kali lipat menjadi 8,8 juta, yang merupakan 22% dari total populasi 40,1 juta. Pada tahun 2017, ada sekitar setengah juta orang yang sangat tua (berusia 85 dan lebih) dari Australia, yang merupakan 2,0% dari populasi. Proporsi ini diproyeksikan meningkat menjadi 4,4% pada tahun 2057.

Penentuan pemberian bantuan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan adil. Setiap keputusan yang dibuat untuk pemberian hak kesejahteraan sosial kepada warga negara, berdasarkan hukum jaminan sosial, harus bersifat tertulis dan diberi pemberitahuan yang cukup, biasanya dalam sebuah surat. Bila tidak puas, seorang pemohon dapat meminta peninjauan keputusan tersebut dapat diajukan kapan saja, tetapi tergantung pada keputusan tindakan perbaikan hanya dapat diambil jika peninjauan diterima dalam 13 minggu setelah menerima pemberitahuan, untuk keputusan berkaitan Jaminan Sosial, atau 52 minggu untuk keputusan dibuat di bawah hukum bantuan Keluarga. Di bagian bawah setiap surat yang memberi tahu pelanggan tentang keputusan Centrelink, terdapat kotak "hak Anda" untuk memberi tahu penerima tentang kemungkinan jalan untuk ditinjau ketika mereka membutuhkan asistensi atau melakukan komplain, termasuk alamat atau nomor kontak yang dapat dihubungi.

Review terhadap pengajuan klaim bantuan dilakukan oleh Centrelink Customer Service Advisers (CSAs) yang terdiri dari dua tahap. Pada tahap awal dilakukan oleh tim bernama Original Decision Maker (ODM) yang bertugas menganalisis bantuan yang tepat sesuai ketentuan hukum. Bila konsumen tidak puas dengan keputusan ODM, misalnya keberatan terhadap jumlah bantuan yang ditetapkan, mereka

dapat mengajukan keberatan ke Authorised Review Officer (ARO) yang dapat merubah keputusan ODM bila dipandang perlu.

Pelanggan yang tidak puas atas keputusan ARO dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Banding Jaminan Sosial (Social Security Appeals Tribunal--SSAT) untuk meninjau keputusan yang ditegaskan, divariasikan atau disisihkan oleh peninjauan internal. SSAT dapat menegaskan, mengubah, menyisihkan dan mengganti keputusan, atau mengembalikan masalah tersebut ke Centrelink dengan rekomendasi. Dengar pendapat SSAT umumnya bersifat informal, rahasia dan tidak terikat oleh Hukum Bukti. Kelompok-kelompok advokasi (LSM) kesejahteraan seperti the Welfare Rights Centre sering dilibatkan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu-individu yang tidak puas dengan keputusan-keputusan Centrelink. Sejak 1 Juli 2015, SSAT telah digabung dengan Pengadilan Banding Administratif (Administrative Appeals Tribunal--AAT).

Dalam kasus yang khusus (tapi sangat jarang), ketidakpuasan bisa disampaikan ke Ombudsman. Akan tetapi, Ombudsman tidak melakukan tinjauan kelayakan pengajuan (seperti ARO, SSAT, atau AAT), tetapi mempertimbangkan proses pengambilan keputusan administratif yang digunakan oleh Centrelink untuk mencapai keputusan atau melakukan tindakan yang dikeluhkan. Ketika Ombudsman menyimpulkan bahwa ada kekurangtepatan dalam tindakan Centrelink, Ombudsman dapat membuat rekomendasi kepada Centrelink untuk melakukan tindakan perbaikan. Ini dapat menyebabkan Centrelink mengubah keputusan mereka, atau memberikan penjelasan yang lebih baik tentang keputusan mereka. Investigasi oleh Ombudsman biasanya hasil dari keluhan tentang keputusan atau tindakan Centrelink, dan dalam proses penyelidikan, Ombudsman berhak melihat catatan Centrelink dan mengajukan pertanyaan kepada staf Centrelink. Meskipun Ombudsman tidak memiliki kekuatan koersif untuk membuat Centrelink mengubah

keputusan atau bertindak dengan cara tertentu, rekomendasi yang dibuat oleh Ombudsman jarang ditolak.

Sejarah Perkembangan

Sebelum tahun 1900 di Australia, welfare di Australia bergantung pada bantuan amal dari masyarakat yang baik hati, kadang-kadang dengan kontribusi keuangan dari pihak berwenang, yang memberikan sarana bantuan utama bagi orang miskin yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Depresi ekonomi tahun 1890-an dan bangkitnya serikat pekerja dan partai Buruh selama periode ini menyebabkan gerakan untuk reformasi kesejahteraan menguat. Pada tahun 1900, negara bagian New South Wales dan Victoria memberlakukan undang-undang yang memperkenalkan pensiun non-kontribusi bagi mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas. Kemudian, Queensland membuat undang-undang sistem serupa pada tahun 1907 sebelum pemerintah partai buruh Australia yang dipimpin oleh Andrew Fisher memperkenalkan pensiun usia nasional di bawah the Invalid and Old-Aged Pensions Act 1908 (Undang-Undang Pensiun penyandang cacat dan orang tua 1908). Pensiun penyandang cacat nasional mulai diberlakukan pada tahun 1910, dan tunjangan bagi wanita melahirkan diperkenalkan pada tahun 1912,

Selama Perang Dunia Kedua, Australia di bawah pemerintahan partai buruh menciptakan sistem negara kesejahteraan yang lebih komprehensif dengan memberlakukan skema nasional untuk: tunjangan anak pada tahun 1941 (menggantikan skema New South Wales tahun 1927); pensiun janda pada tahun 1942 (menggantikan skema New South Wales 1926); tunjangan istri pada tahun 1943; tambahan tunjangan untuk anak-anak pensiunan pada tahun 1943; dan tunjangan bagi pengangguran, penyakit, dan manfaat khusus pada tahun 1945 (menggantikan skema Queensland 1923).

Sejak saat itu, skema kesejahteraan sosial semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terakhir, Amandemen Undang-Undang Pelayanan Sosial (Reformasi Kesejahteraan) 2017 telah mengubah beberapa aspek jaminan sosial di Australia, dan telah diberikan persetujuan pada tanggal 11 April 2018.

Pada saat tahun 2017, pemerintah Australia dan pemerintah negara bagian dan teritori menghabiskan sekitar \$ 157 miliar untuk dana kesejahteraan (pembayaran tunai dan layanan kesejahteraan saja). Angka tersebut merepresentasikan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,4%. Belanja kesejahteraan juga sekarang menyumbang proporsi yang lebih besar dari GDP daripada sebelumnya: 9,5% pada 2015-16 dibandingkan dengan 8,6% pada periode 2006-07 (AIHW 2017).

Adapun perincian dari keseluruhan dana \$ 157 miliar yang dihabiskan untuk kesejahteraan adalah:

- 67% (\$ 105 miliar) adalah pembayaran tunai untuk populasi tertentu (tidak termasuk tunjangan pengangguran)
- 27% (\$ 42 miliar) adalah untuk layanan kesejahteraan, dan
- 6,3% (\$ 10 miliar) adalah pembayaran tunai untuk tunjangan pengangguran.

Pengeluaran pajak atau konsesi oleh Pemerintah Australia untuk kesejahteraan sebesar \$ 47 miliar pada 2015-16 (di atas \$ 157 miliar dalam pembelanjaan). Sebagian besar (75%) adalah untuk konsesi untuk dana pensiun untuk membantu orang mendanai pensiun mereka. Sekitar \$ 4 miliar (9%) adalah untuk konsesi bagi keluarga dan anak-anak.

Sistem Perpajakan

Untuk menjamin kesejahteraan warganya, pemerintah Australia mengandalkan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung

utama pembiayaan. Untuk itu, ada banyak bentuk perpajakan di Australia. Individu dan perusahaan di Australia mungkin diminta untuk membayar pajak atau biaya pada semua tingkat pemerintahan: pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Pajak dikumpulkan untuk membayar layanan publik dan pembayaran transfer kesejahteraan sosial (redistribusi kekayaan ekonomi). Pajak penghasilan adalah bentuk perpajakan yang paling signifikan di Australia, dan dikumpulkan oleh pemerintah federal melalui Australian Taxation Office (ATO). Pendapatan dari pajak pertambahan nilai (GST) Australia dikumpulkan oleh pemerintah Federal, dan kemudian dibagikan ke negara bagian di bawah formula distribusi yang ditentukan oleh Komisi Hibah Persemakmuran. Walau demikian, Australia mempertahankan beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan kaya lainnya, sebesar 27,8% dari GDP pada 2018.⁴ Total pendapatan perpajakan yang dikumpulkan di Australia pada tahun 2017 adalah sebesar \$ 488,5 miliar. Pajak atas pendapatan mencapai 57,6% dari total pendapatan perpajakan untuk semua tingkat pemerintah, dan pajak atas penyediaan barang dan jasa, termasuk GST, mencapai 23,2%.

Tabel 6.1. Jumlah Penerimaan Pajak Australia 2017

Taxes	Revenue (\$ million)	%
Taxes on income	281.141	57,6
Employers' payroll taxes	23.003	4,6
Taxes on property	52.533	10,8
Taxes on provision of goods and services	113.155	23,2
Taxes on use of goods and performance of activities	18.666	3,8
Total taxation revenue	488.499	100

Sumber: ABS (2018)

⁴ Lihat <https://www.heritage.org/index/country/australia>

Personal income taxes (pajak penghasilan)

Pajak penghasilan pada individu dikenakan di tingkat pusat (federal). Pemerintah negara bagian tidak menerapkan pajak penghasilan sejak Perang Dunia II. Ini adalah sumber pendapatan paling signifikan di Australia, dimana persentasenya mencapai 57,6 % dari keseluruhan penerimaan pajak. Pajak penghasilan pribadi di Australia dikenakan pada pendapatan pribadi setiap orang secara progresif, dengan tingkat persentase yang lebih tinggi untuk tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Tidak seperti beberapa negara lain, pajak penghasilan pribadi di Australia dikenakan pada individu dan bukan pada unit keluarga. Individu juga dikenakan pajak atas bagian mereka dari setiap kemitraan atau keuntungan tabungan/investasi yang menjadi hak mereka untuk tiap tahun keuangan.

Capital Gains Tax (Pajak Penjualan)

Capital Gains Tax (CGT) dalam konteks sistem perpajakan Australia dikenakan bagi tiap keuntungan atas modal yang dibuat untuk pelepasan aset apa pun (seperti saham dan properti), kecuali untuk pengecualian khusus. Pengecualian yang paling signifikan adalah penjualan rumah keluarga (yang tidak dikenai pajak). CGT dikenakan pada keuntungan bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak dalam tahun pajak, ketika suatu aset dijual atau dilepaskan. Jika suatu aset diadakan setidaknya selama 1 tahun, maka setiap keuntungan didiskontokan pertama sebesar 50% untuk pembayar pajak perorangan, atau sebesar 33 1/3% untuk dana pensiun. Rugi modal bersih dalam satu tahun pajak dapat diteruskan dan dikompensasi untuk membayar perolehan CGT di masa depan. Namun, kerugian modal tidak dapat dikompensasi dengan pendapatan.

Corporate Taxes (Pajak Perusahaan)

Pajak perusahaan dibayarkan oleh perusahaan dan perusahaan atas keuntungan mereka. Tidak seperti pajak penghasilan pribadi yang menggunakan skala progresif, pajak perusahaan dihitung dengan tarif

tetap 30% (25% untuk usaha kecil, yang didefinisikan sebagai perusahaan dengan pendapatan kurang dari \$ 2 juta per tahun). Pajak dibayarkan pada pendapatan perusahaan di tingkat perusahaan sebelum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Kredit pajak (disebut *franking credit*) diberikan bagi pemegang saham yang menerima dividen untuk mencerminkan pajak yang sudah dibayarkan pada tingkat perusahaan (proses yang dikenal sebagai *dividend imputation*).

Trustee liability taxes (Pajak Perwalian Amanat)

Pajak yang dibebankan kepada pemegang pengelola / wali aset dari kepercayaan yang dinilai pada bagian itu atas nama penerima. Dalam kasus ini, penerima manfaat harus menyatakan bahwa bagian dari laba bersih atas pajak penghasilan individu mereka, dan juga mengklaim kredit untuk jumlah pajak yang dibayarkan oleh wali amanat atas nama mereka.

Good and Services Tax (GST--Pajak Barang dan Jasa)

Pajak barang dan jasa (GST) adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pemerintah federal sebesar 10% pada suplai sebagian besar barang dan jasa oleh entitas yang terdaftar untuk pajak. GST diperkenalkan di Australia pada 1 Juli 2000 oleh pemerintahan Liberal John Howard. Sejumlah barang/jasa dikecualikan dari GST (misalnya, bahan makanan dasar, layanan medis, pendidikan, dan ekspor), sejumlah pajak pendapatan (akomodasi tempat tinggal, layanan keuangan, dll.), juga dibebaskan atau di luar lingkup GST. Pendapatan dari pajak ini didistribusikan ke negara bagian. Pemerintah negara bagian tidak memungut pajak penjualan apa pun meskipun mereka menerapkan bea meterai pada berbagai transaksi.

Property taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dikenakan pada properti perumahan, industri dan komersial. Selain itu, beberapa

pemerintah negara bagian memungut pajak atas nilai tanah untuk investor dan tempat tinggal utama bernilai tinggi. Pemerintah negara bagian juga membebankan bea materai pada transfer tanah dan transaksi serupa lainnya. Retribusi Jasa Pemadam Kebakaran juga biasa diterapkan pada asuransi rumah tangga dan kontrak asuransi bisnis. Retribusi ini diperlukan di bawah hukum pemerintah negara bagian untuk membantu dalam pendanaan layanan api di masing-masing negara.

Departure tax (Pajak Kerangkatan)

Passenger Movement Charge (PMC) adalah pajak cukai yang dipungut oleh pemerintah Australia atas semua penumpang yang berangkat dengan penerbangan internasional atau transportasi laut. PMC menggantikan pajak keberangkatan pada tahun 1995 dan pada awalnya digambarkan sebagai biaya untuk mengimbangi sebagian biaya kepada pemerintah untuk penyediaan fasilitas penumpang di bandara, terutama bea cukai, imigrasi dan fungsi karantina. Ini diklasifikasikan oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional sebagai pajak keberangkatan, bukan biaya bandara, karena pendapatannya tidak secara langsung berkontribusi pada pemrosesan penumpang di bandara atau pelabuhan laut.

Excise taxes (Pajak Cukai)

Pemerintah Federal mengenakan pajak cukai untuk barang-barang seperti rokok, bahan bakar, dan alkohol. Tarif yang dikenakan dapat berubah pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun sebagai penyesuaian terhadap perubahan indeks harga konsumen.

Luxury Car Tax (Pajak Mobil Mewah)

Pajak Mobil Mewah dikenakan kepada bisnis yang menjual atau mengimpor mobil mewah, di mana nilai mobil di atas \$ 57.466, atau \$ 75.375 untuk mobil hemat bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar kurang dari 7 Liter per 100 km.

Customs duties (Bea cukai)

Bea cukai dikenakan pada banyak barang yang diimpor, seperti alkohol, produk tembakau, parfum, dan barang-barang lainnya. Beberapa barang-barang ini dapat dibeli bebas bea (duty free) di toko-toko bebas bea.

Payroll taxes (Pajak Penggajian)

Pajak penggajian di Australia dipungut oleh pemerintah negara bagian atas majikan berdasarkan upah yang dibayarkan oleh mereka. Pajak penggajian di Australia berbeda di setiap negara bagian. Biasanya pajak berlaku untuk semua upah di atas ambang batas tertentu. Suatu kelompok (grup) perusahaan dapat dikenai pajak sebagai satu kesatuan secara terintegrasi atau terkait secara signifikan.

Tabel. 6.2. Daftar tarif pajak penggajian

Negara Bagian	Total Pembayaran Gaji Minimal (\$)	Tax rate
New South Wales	750.000	5.45%
Queensland	1.100.000	4.75%
South Australia	600.000	4.95%
Australian Capital Territory	1.750.000	6.85%
Victoria	575.000	4.85%
Western Australia	750.000	5.50%
Tasmania	1.010.023	6.10%
Northern Territory	1.500.000	5.50%
New South Wales	750.000	5.45%

Sumber: ABS (2018)

Fringe Benefits Tax

Fringe Benefits Tax adalah pajak yang diterapkan oleh Kantor Pajak Australia untuk sebagian besar, meskipun tidak semua, tunjangan tambahan bagi karyawan, yang pada umumnya merupakan manfaat non-tunai (seperti tunjangan rumah, transportasi, klub hobby, dll).

Sebagian besar tunjangan juga dilaporkan pada ringkasan pembayaran karyawan untuk dimasukkan pada pengembalian pajak penghasilan pribadi yang harus diajukan setiap tahun.

Kebijakan Tenaga Kerja

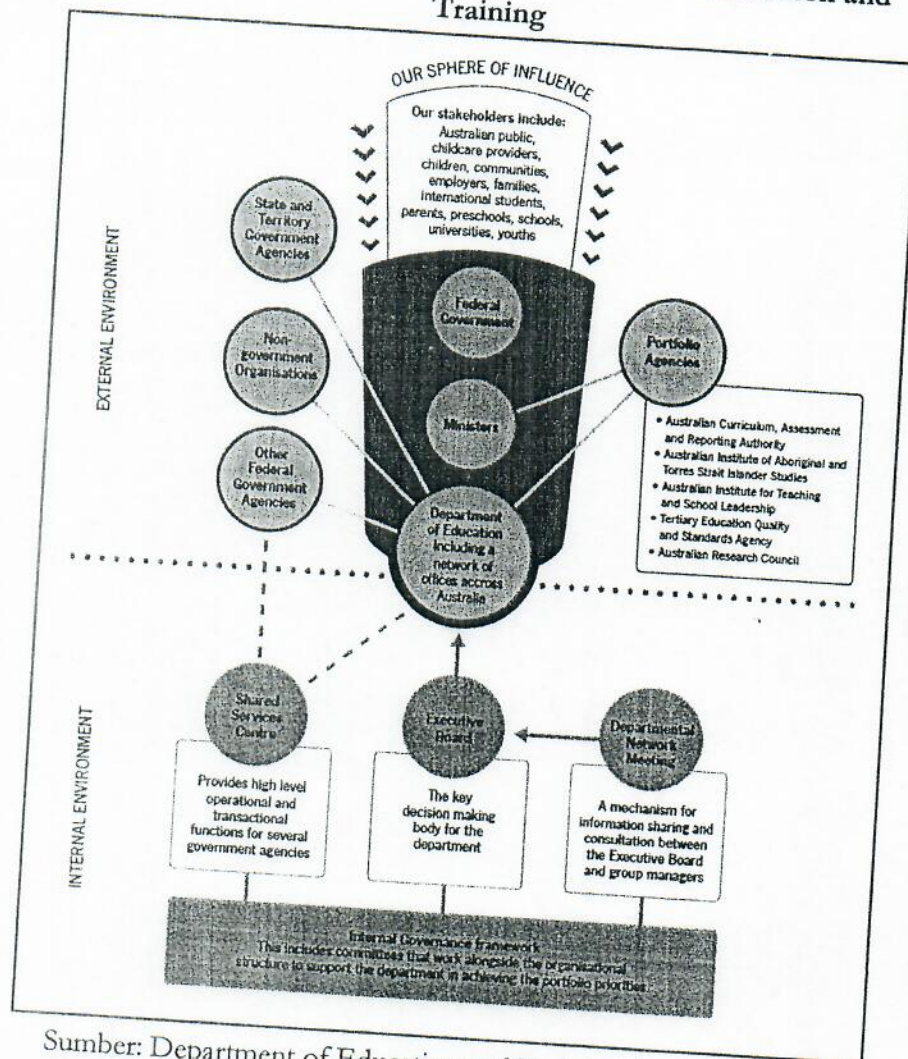
Australia mengelola tenaga kerja secara terpadu dengan sistem pendidikan, industri, perpajakan, dan jaminan sosial. Sistem tersebut dibuat untuk memastikan tiap warga negara memiliki sertifikat kompetensi yang diperlukan pasar industri, sehingga sekolah, lembaga latihan kerja, dan universitas dibangun untuk memfasilitasi warga negara mendapatkan sertifikasi yang diakui industri. Mereka yang memiliki sertifikat kompetensi kemudian diarahkan dan dibimbing untuk mendapat pekerjaan dan berkontribusi membangun negara dengan membayar pajak. Bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dan sedang mencari kerja (belum mendapat pekerjaan tetap), maka pemerintah memberikan bantuan dengan skema Newstart Allowance yang berisi pemberian tunjangan pembayaran tiap dua minggu, pelatihan keterampilan tambahan, pencarian kerja, sampai pemagangan sedemikian rupa sehingga semua orang dapat dipastikan bisa memperoleh pekerjaan. Lalu, sebagai imbal baliknya, ketika para pekerja membayar pajak, pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan sosial agar rakyat dapat hidup sejahtera.

Sebelum 18 September 2013, urusan pendidikan, training dan tenaga kerja dikelola secara terpadu dalam satu kementerian bernama Departments of Education, Science and Training, and Employment and Workplace Relations (DEEWR). Kementerian ini bertanggungjawab untuk mengatur tata kelola pendidikan dan pelatihan yang desain kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri. Karena kebutuhan pengembangan yang kompleks, kementerian ini kemudian dipecah menjadi dua: Department of Education and Training dan Department of Employment. Secara umum, tugas kedua

kementerian tersebut meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengelola:

- Kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah.
- Program kesadaran sains di sekolah.
- Kebijakan dan program bantuan pembiayaan untuk siswa dan peserta magang.
- Kebijakan ketenagakerjaan, termasuk layanan pekerjaan.
- Layanan penyediaan lapangan pekerjaan.
- Kebijakan dan program dukungan pasar tenaga kerja dan pendapatan bagi orang-orang usia kerja.
- Pengembangan kebijakan hubungan kerja, advokasi dan implementasinya.
- Peningkatan kebijakan dan praktik hubungan industrial yang fleksibel.
- Koordinasi riset pasar tenaga kerja.
- Kebijakan hubungan kerja di tempat kerja, termasuk administrasi kerangka kerja untuk pembuatan perjanjian dan penggajian dan kondisi kerja.
- Kesehatan dan keselamatan kerja, rehabilitasi dan kompensasi.
- Perwujudan kesempatan kerja yang setara.
- Program dukungan pekerja dan keluarga.
- Layanan untuk membantu penyandang cacat mendapatkan pekerjaan, selain dari pekerjaan yang disediakan pemerintah.
- Urusan dan program pemuda.
- Program dan kebijakan anak usia dini dan pengasuhan-perawatan anak

Gambar 6.2. Lingkungan Kerja Department of Education and Training



Sumber: Department of Education and Training Australia (2014)

Pada April 2017, sebanyak 77% orang Australia yang berusia 15–64 tahun berpartisipasi dalam angkatan kerja (orang yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan). Hampir 1 dari 3 (31%) orang yang

dipekerjakan dalam kelompok usia ini bekerja paruh waktu. Tingkat pengangguran adalah 5,7% —atau rata-rata 730.000 pengangguran Australia dalam kelompok usia kerja (AIHW 2017: 3). Pada tahun 2016, sekitar 3,3 juta (31%) dari 10,5 juta orang Australia berusia 15-74 tahun dengan kualifikasi non-sekolah memiliki Sertifikat III / IV dan 4,6 juta (44%) memiliki gelar Sarjana atau lebih tinggi. Proporsi total penduduk berusia 15-74 tahun yang memegang gelar Sarjana atau lebih memiliki tiga kali lipat dalam 30 tahun terakhir, dari 7,2% pada tahun 1986 menjadi 26% pada tahun 2016 (ABS 2016).

Kerangka Sistem Kesejahteraan

Australia memiliki skema tunjangan penghasilan bagi golongan masyarakat tertentu, seperti golongan kurang mampu, orang tua dan penyandang cacat. Pembayaran bantuan penghasilan ini dibiayai sepenuhnya dari pendapatan pemerintah, tanpa kontribusi iuran sosial yang terpisah. Hal ini berbeda dari apa yang terjadi di banyak negara OECD lainnya, di mana majikan pemberi kerja dan karyawan membiayai sebagian sistem, dan beberapa bantuan terkait dengan penghasilan di masa lalu; misalnya, di beberapa bagian Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, orang-orang yang mendapatkan pendapatan yang relatif lebih tinggi akan menerima lebih banyak pada saat mereka perlu mengakses bantuan (Whiteford 2015).

Sistem tunjangan penghasilan ini mendistribusikan kembali pendapatan melalui sistem pajak (dari orang-orang kaya ke orang-orang yang paling kurang beruntung), dan bertindak sebagai 'jaring pengaman' untuk orang yang tidak mampu menghidupi diri sendiri (DSS 2017b). Di Australia, penerima manfaat bantuan ini diseleksi terlebih dahulu dengan pengujian, proses yang digunakan untuk menentukan kelayakan untuk manfaat. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya terfokus untuk mendukung orang dengan pendapatan yang relatif lebih rendah dan kepemilikan aset

yang lebih sedikit. Prosedur ini memainkan peran yang lebih menonjol di Australia daripada di negara lain, terutama di Eropa kontinental. Faktanya, Australia adalah negara sistem seleksi tertinggi di OECD, dengan sekitar 80% pengeluaran untuk tunjangan tunai (misalnya, pensiun usia dan pembayaran veteran).

Karena pembayaran tunjangan tunai di Australia memiliki tarif tetap (tidak didasarkan pada penghasilan sebelumnya) dan dilakukan dengan proses seleksi, pengeluaran Australia untuk manfaat ini relatif rendah dibandingkan dengan pengeluaran di negara-negara OECD lainnya. Pengeluaran Australia adalah terendah ke-6 pada tahun 2014, sebesar 8,6% dari Produk Domestik Bruto, atau PDB (Whiteford 2015). Selain itu, berbeda dengan negara OECD lain yang meng-universal-kan penerima, tunjangan sosial di Australia sekitar 42% nya masuk ke kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah (atau paling tidak beruntung) dan hanya 3,8% yang masuk ke 20% rumah tangga tertinggi di Australia (IAHW 2017: 7).

Semua pembayaran tunjangan pendapatan dilakukan oleh lembaga bernama Centrelink, dan dibayarkan setiap dua minggu, biasanya dengan setoran langsung yang diperlukan ke rekening bank penerima. Mereka melakukan evaluasi dengan menghitung pendapatan dan aset penerima (dan pasangan/suami-istri mereka) setiap dua minggu untuk menentukan tingkat pembayaran mereka yang sesuai. Dengan demikian, orang-orang yang berpenghasilan rendah mungkin berhak untuk mendapat bantuan penuh atau sebagian dari tunjangan mereka (tergantung pada persyaratan kualifikasi lainnya). Cara penilaian pendapatan dan aset sangat bervariasi di antara skema pembayaran jaminan sosial yang berbeda dan pengaruh berbeda pula pada setiap jenis pembayaran karena mereka memiliki limit batasan pendapatan yang berbeda pula. Centrelink memiliki keleluasaan untuk menambah, menolak, atau mengurangi durasi periode tunjangan jika dipastikan ada keadaan khusus yang membuat kasus seorang individu menjadi berubah: misalnya, mengalami kesulitan keuangan yang

ekstrem, mendapat penghasilan tambahan, menikah/bercerai, atau memiliki anak.

Pembayaran jaminan sosial dan manfaat lainnya saat ini diatur melalui undang-undang berikut:

- Social Security Act 1991
- A New Tax System (Family Assistance) Act 1999
- Student Assistance Act 1973
- Paid Parental Leave Act 2010

Undang-undang tersebut mengatur berbagai macam bentuk tunjangan sosial di Australia dengan berbagai macam bentuk dan target penerima. Diantaranya adalah:

- **ABSTUDY** – menawarkan berbagai tunjangan khusus untuk membantu siswa dan pegawai magang baru pribumi (Aborigin).
- **Age Pension** – tunjangan untuk mereka yang merencanakan pensiun dini atau sudah pensiun berumur 60 tahun ke atas.
- **Assistance for Isolated Children** – tunjangan untuk keluarga yang memiliki anak yang tidak dapat bersekolah secara lokal karena jarak atau kebutuhan khusus.
- **Austudy Payment** – bantuan untuk siswa penuh waktu dan pemegang baru yang berusia 25 tahun atau lebih.
- **Carer Allowance** – tunjangan untuk orang-orang yang merawat anak di bawah 16-17 dan orang dewasa cacat di atas 18 tahun.
- **Carer Allowance (Child)** – tunjangan untuk orang yang merawat anak di bawah 16 tahun yang memiliki cacat.
- **Carer Payment** – tunjangan untuk orang-orang yang memberikan perawatan penuh waktu bagi seorang penyandang cacat.
- **Disability Support Pension** – tunjangan bagi orang yang tidak dapat bekerja selama 2 tahun karena sakit, cedera atau cacat.

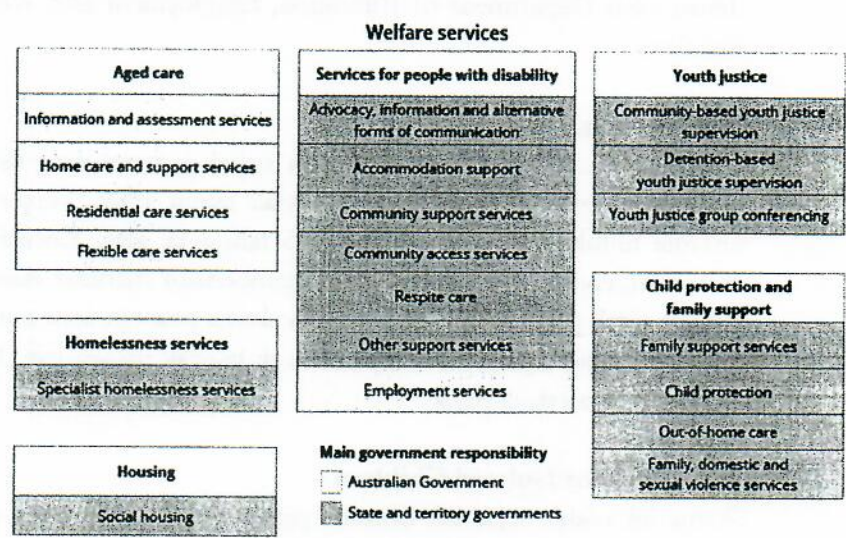
- **Double Orphan Pension** – tunjangan untuk orang-orang yang membesarkan anak-anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya.
- **Maternity Payment** – bantuan untuk orang tua setelah melahirkan bayi baru.
- **Newstart Allowance** – bantuan untuk orang yang sedang mencari kerja.
- **Parenting Payment** – bantuan untuk membantu orang tua atau pengasuh yang mengasuh anak dibawah 6 tahun bagi yang berpasangan, dan 8 tahun bagi orang tua tunggal.
- **Pensioner Education Supplement** – bantuan untuk pensiunan yang masih ingin mengikuti pendidikan.
- **Special Benefit (Crisis Payment)** – bantuan untuk orang-orang yang dalam kesulitan keuangan, tidak memiliki cara untuk mendukung diri mereka sendiri dan tidak berhak atas pembayaran lain (biasanya karena persyaratan tempat tinggal).
- **Youth Allowance** – bantuan untuk siswa penuh waktu atau pemegang yang berusia 15 (dalam keadaan tertentu 16) hingga 24 dan orang yang berusia di bawah 21 tahun yang melakukan pencarian kerja atau kombinasi dari aktivitas yang disetujui.

Jenis pembayaran tunjangan pendapatan yang paling sering diakses adalah Age Pension, Newstart Allowance dan Youth Allowance. Age Pension (dikenal juga dengan skema superannuation) adalah pembayaran tunjangan pendapatan terbesar, dengan penerima paling banyak (di tahun 2017 terdapat 2,6 juta penduduk senior Australia yang memenuhi syarat) (DSS 2017). Namun, 2 dari 5 (42%) orang yang menerima Pensiun Usia tersebut hanya memperoleh tarif sebagian. Ini berarti, karena seleksi persyaratan, mereka hanya menerima sebagian dari pembayaran. Proporsi penduduk yang

menerima tingkat tunjangan telah meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini sebagian besar karena pensiunan baru yang mencapai usia pensiun memiliki tingkat pendapatan dan aset yang lebih tinggi daripada pensiunan sebelum mereka, yang pada gilirannya, sebagian besar dapat dikaitkan dengan desain sistem pensiun wajib Australia (DSS 2016).

Selain dari skema pokok tersebut, pemerintah Australia juga memiliki beberapa skema pelengkap tambahan, diantaranya adalah: Rent Assistance, Pharmaceutical Allowance, Telephone Allowance, Pensioner Education Supplement, Family Assistance, Family Tax benefit, Maternity Immunisation Allowance, Child Care Benefit, Schoolkids Bonus, Paid Parental Leave Scheme, Concession cards, dan Prisons and psychiatric hospitals.

Gambar 6.3. Skema pelayanan kesejahteraan Australia



Sumber: AIHW (2017) <https://www.aihw.gov.au/reports/australias-welfare/australias-welfare-2017-in-brief/contents/welfare-in-australia>

ABSTUDY

ABSTUDY (*The Aboriginal dan Torres Strait Islander Study Assistance Scheme*) adalah pembayaran tunjangan kesejahteraan bagi Penduduk Asli Australia untuk menjalani beberapa bentuk studi. Ini mencakup semua siswa pribumi di sekolah menengah atau perguruan tinggi, serta mereka yang belajar melalui korespondensi, dan siswa sekolah dasar yang berusia 14 tahun sebelum 1 Januari tahun belajar mereka saat itu. Untuk memenuhi syarat sebagai "Penduduk Asli", seorang siswa harus berasal dari keturunan Aborigin atau Torres Strait Islander menurut standar Centrelink dan menjadi warga negara Australia saat ini. ABSTUDY dirancang sesuai dengan seleksi pendapatan, dan status pernikahan, wali, dan jumlah anak-anak tanggungan. Teknis pembayaran subsidi ini dilakukan melalui Centrelink, yang melaksanakan pembayaran berdasarkan Kebijakan ABSTUDY yang dibuat oleh Department of Education, Employment and Workplace Relations.

Age Pension

Age Pension adalah skema tunjangan sosial pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Federal Australia, sejak tahun 1909. Tunjangan ini tersedia untuk orang yang berusia 65 tahun ke atas. Kecuali untuk skema superannuation wajib (yang memberikan manfaat tambahan), pekerja tidak perlu berkontribusi pada skema pensiun atau asuransi di Australia, tidak seperti skema pensiun di banyak negara lain. Pensiun dibiayai dengan dana pajak.

Assistance for Isolated Children

Skema ini adalah sejumlah bantuan pembayaran untuk orang tua dan pengasuh anak-anak yang tidak dapat pergi ke sekolah pemerintah setempat karena isolasi geografis, kecacatan atau kebutuhan khusus. Dasar-dasar persyaratan untuk mendapatkannya adalah:

- anak memenuhi persyaratan usia yang ditentukan, sedang menempuh pendidikan, dan secara geografis terisolasi, atau

- memiliki kecacatan atau kebutuhan pendidikan khusus, atau
- tidak memiliki akses yang memadai ke sekolah negeri

Jumlah bantuan yang diberikan tergantung pada pengaturan kehidupan siswa selama tahun sekolah dan jumlah anak yang memenuhi syarat dalam satu keluarga. Tunjangan tambahan bisa diberikan tergantung pada pendapatan orang tua dan biaya asrama yang mereka bayarkan untuk anak. Jumlahnya mungkin juga terpengaruh jika orang tua atau pasangannya mendapatkan jenis tunjangan lain.

Austudy Payment

Austudy Payment awalnya dikenal sebagai Skema AUSTUDY, suatu tunjangan studi bagi semua usia, tetapi sejak diperkenalkannya Youth Allowance, skema ini disediakan untuk mereka yang berumur diatas 25 tahun. Untuk memenuhi syarat, seseorang harus menjadi penduduk Australia, lebih dari 25 tahun, dan belajar penuh waktu di lembaga pendidikan yang disetujui. Namun, bagi siswa yang sebelum berusia 25 tahun menerima Youth Allowance dan masih melanjutkan program studi yang sama, dapat terus menerima skema Youth Allowance sampai mereka menyelesaikan (atau menghentikan) kursus/pendidikan mereka.

Tidak seperti Youth Allowance, penerima Austudy dianggap independen dan tidak dipengaruhi status orang tua. Namun, seperti sebagian besar tunjangan dari Centrelink, Austudy Payments dikenakan review berdasarkan pendapatan dan aset pribadi dan / atau pasangan.

Carer Allowance

Skema pembayaran dua minggu tambahan bagi seseorang yang membcirikan perawatan sehari-hari kepada seseorang yang memiliki kecacatan, penyakit serius, atau berusia lanjut yang membutuhkan pertolongan terus menerus untuk masa paling sedikit 12 bulan, atau selamanya. Tidak ada review terhadap pendapatan atau aset untuk mendapatkan Carer Allowance. Centerlink membayar siapapun yang

memenuhi syarat tanpa dikaitkan dengan tunjangan lain dan jumlah penghasilan yang dimiliki.

Disability Support Pension

Skema ini adalah jaminan sosial yang ditawarkan melalui Department of Human Services, pemerintah Australia. Bantuan ini dirancang untuk menawarkan dukungan keuangan bagi orang-orang yang menderita kondisi fisik, intelektual atau kejiwaan yang menghalangi mereka untuk bekerja. Skema ini juga menawarkan dukungan kepada orang-orang yang buta permanen. Penting untuk diperhatikan bahwa seseorang harus memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah untuk menerima bantuan ini, yakni karena kecacatannya orang tersebut tidak dapat bekerja hingga 15 jam atau lebih per minggu atau tidak mampu memperoleh pendapatan di atas upah minimum dalam 24 bulan ke depan.

Department of Human Services biasanya akan meminta laporan dari dokter atau spesialis untuk memverifikasi sifat dan keparahan gangguan calon penerima manfaat. Penilaian Kapasitas Pekerjaan juga mungkin dilakukan untuk menentukan apakah mereka dapat kembali bekerja, berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka lakukan dan apakah mereka perlu bantuan untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan. Pada tahun 2017, jumlah bantuan per individu berkisar antara \$ 661.20 (menikah) sd. \$ 877.10 (single).

Double Orphan Pension

Merupakan tunjangan pembayaran rutin bagi mereka yang merawat seorang anak yatim yang kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu merawat mereka. Persyaratan untuk menerima tunjangan ini adalah:

- penerima manfaat diwajibkan melaksanakan perawatan anak setidaknya 35% dari waktu mereka, dan
- kedua orang tua anak yatim tersebut meninggal, atau

- satu orang tua telah meninggal dan yang lainnya berada di sebuah institusi psikiatri atau panti jompo untuk waktu yang tidak terbatas, atau
- orang tuanya di penjara setidaknya selama 10 tahun, atau
- orang tuanya keberadaan mereka tidak diketahui, atau
- anak tersebut adalah pengungsi dan kedua orangtua tinggal di luar Australia atau keberadaan mereka tidak diketahui.

Maternity Payment

Skema ini diberikan untuk orang tua bekerja yang melahirkan atau mengadopsi bayi pada atau setelah 1 Januari 2011. Dibayar hingga 18 minggu sesuai Upah Minimum Nasional – yakni sekitar \$ 571,90 per minggu sebelum pajak (di tahun 2017). Pemohon harus penduduk Australia dengan penghasilan di bawah \$ 150.000 per tahun. Pemohon harus telah bekerja setidaknya 10 dari 13 bulan sebelum kelahiran anak. Selain itu, pemerintah Australia sejak jaman perdana menteri Andrew Fisher memperkenalkan “baby bonus” untuk membantu orang tua yang melahirkan sebesar £ 5 per anak pada akhir tahun 1912. Saat ini (2017) bantuan diberikan sebesar \$ 5.000 (sekitar Rp. 50 juta). Bantuan tersebut diberikan kepada semua orang yang melahirkan tanpa melihat latar belakang kemampuan ekonomi.

Newstart Allowance

Newstart Allowance adalah tunjangan pengangguran yang dibayarkan kepada para penganggur yang berusia 22 hingga 64 tahun. Agar memenuhi syarat, seseorang harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan manfaat dan secara aktif mencari kerja. Program ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 1991, untuk menggantikan skema Unemployment Benefit (UB) yang tidak berubah sejak 1945. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi pemerintah yang disebut Newstart - Strategi Ketenagakerjaan Aktif.

Tunjangan ini dibayarkan berdasarkan 'kesepakatan bersama' (biasanya dalam masa 6 bulan, dan dapat diulang kembali) antara penerima dan Centrelink, di mana Centrelink akan terus membayar tiap dua minggu selama penerima berusaha mencari pekerjaan dan memenuhi kewajiban kewajiban bersama. (Tunjangan pengangguran Australia tidak memiliki batas waktu: secara teoritis, tunjangan pengangguran bisa diberikan untuk seluruh masa umur kerja seseorang). Kesepakatan bersama ini dinegosiasikan antara Centrelink, pencari kerja, dan penyedia Job Services Australia atau Disability Employment Services, dan dicatat ke dalam Rencana Jalur Pekerjaan atau Employment Pathway Plan (EPP). Kegiatan yang mungkin harus disetujui oleh pencari kerja, untuk terus menerima Tunjangan Newstart, termasuk melamar pekerjaan dalam jumlah tertentu (biasanya sepuluh) per dua minggu dan mencatat aplikasi ini dalam buku harian Centrelink yang dikeluarkan, melakukan pendidikan kejuruan atau pelatihan, pengalaman kerja berbayar, berpartisipasi dalam program pasar tenaga kerja atau proyek Work for the Dole (pelatihan kerja), dan kegiatan lain, seperti kerja sukarela jika dianggap sesuai oleh Centrelink. Bagi mereka yang mendekati lansia, sehingga mungkin menghadapi kesulitan besar memasuki pasar tenaga kerja, EPP yang dibuat diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan sukarela saja. Klien tidak harus terlibat dalam kegiatan yang lebih intensif segera setelah penerimaan mereka dimulai. Akan tetapi terdapat sejumlah aktivitas yang diperlukan atas nama klien agar dapat terus menerima manfaat, seperti:

- Biasanya, selama tiga bulan pertama pengangguran, pencari kerja hanya berkewajiban untuk mengajukan Formulir Aplikasi Untuk Pembayaran dua minggu di kantor Centerlink setempat. Formulir ini berisi sejumlah pertanyaan tentang keadaannya dan untuk rincian dasar dari empat posisi yang digunakan pencari kerja dalam dua minggu terakhir. Pelanggan juga mungkin diminta untuk membuat hingga 10 'Kontak Pencarian Pekerjaan' setiap

dua minggu (tergantung pada pasar tenaga kerja setempat dan keadaan pribadi mereka) dan mencatat rincian pekerjaan ini dalam Job Seeker Diary yang dikeluarkan secara khusus untuk jangka waktu tertentu. Pencari kerja kemudian mengambil Formulir Aplikasi Untuk Pembayaran secara pribadi ke Kantor Centrelink setempat. Dia kemudian akan menghadiri wawancara singkat dengan seorang petugas Centrelink. Wawancara biasanya untuk tujuan memeriksa bahwa formulir aplikasi dan bahwa pemohon menyadari setiap janji yang mungkin perlu dihadiri, dan kewajiban yang mungkin perlu dipenuhi. Klien pada tahap ini juga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan petugas Centrelink tentang masalah apa pun yang mungkin dihadapi klien tanpa harus membuat janji sebelumnya terlebih dahulu.

- Jika setelah tiga bulan pertama pengangguran, klien tetap menganggur; klien akan diminta untuk menghadiri janji temu konsultasi dengan penyedia Jasa Pekerjaan Australia yang bertanggung jawab untuk membantu klien untuk dapat memasuki kembali pasar tenaga kerja. Pencari kerja juga harus menghadiri kursus pelatihan dua minggu yang berfokus pada keterampilan mencari pekerjaan seperti menulis resume dan menghadiri wawancara.
- Jika klien tetap menganggur selama dua belas bulan, mereka kemudian tunduk pada ketentuan 'Fase Pengalaman Kerja' dari EPP mereka, yang terdiri dari bantuan yang lebih intensif yang melibatkan kegiatan yang tercantum di atas, seperti, Work for the Dole (pelatihan kerja), studi terakreditasi, kerja paruh waktu, kerja sukarela atau kombinasi dari ini. Penyedia Layanan Pekerjaan Australia mungkin mewajibkan penerima Newstart untuk melakukan pekerjaan sukarela (hingga 15 jam seminggu), di mana klien menerima suplemen untuk keuntungan

mereka sebesar \$ 20,80 per dua minggu. Suplemen ini juga dibayarkan untuk pelatihan kerja. Mereka juga harus terus melamar kerja untuk 4 posisi lowongan atau lebih pada waktu yang sama untuk memenuhi kewajiban bersama mereka.

- Jika klien menjadi penganggur jangka panjang (24 bulan atau lebih), persyaratan aktivitas klien biasanya akan mengulangi aktivitas seperti 'Fase Pengalaman Kerja' di bidang lain selama enam bulan dalam periode dua belas bulan. Tunjangan dapat diulang/diberikan tanpa batasan waktu.

Tarif tunjangan Newstart disesuaikan tiap tanggal 20 Maret dan 20 September setiap tahun. Pada September 2017, tarif Newstart dasar untuk satu orang yang menganggur tanpa anak adalah \$ 501 (sekitar Rp. 5 juta) per dua minggu. Namun, tarif dasar ini tidak termasuk pembayaran suplemen yang dapat mencakup bantuan sewa rumah hingga \$ 121,00 per dua minggu, dan suplemen lainnya, seperti Tunjangan Farmasi, Tunjangan Telepon, Tunjangan Daerah Terpencil, Suplemen Pelatihan dan Suplemen Pelatihan Kerja Dole; yang dibayar tergantung pada keadaan dan aktivitas pribadi. Tarif akan berbeda untuk pasangan yang sudah menikah, hubungan terdaftar atau pasangan de facto (termasuk pasangan jenis kelamin atau lawan jenis) dan orang yang memiliki anak-anak.

Parenting Payment

Bantuan ini diberikan untuk membantu orang tua atau pengasuh yang mengasuh anak dibawah 6 tahun bagi yang berpasangan (menikah), dan 8 tahun bagi orang tua tunggal. Jumlah bantuan yang diberikan (tahun 2017) adalah sebesar \$/62.40 per dua minggu bagi single parent, dan \$492.80 bagi orang tua yang berpasangan. Penerima dipersyaratkan memiliki pendapatan dan aset dibawah jumlah tertentu yang nilainya disesuaikan setiap tahun. Pada tahu 2017, penerima manfaat penuh adalah mereka yang pendapatannya per dua minggu

kurang dari \$188.60 (bagi yang punya 1 anak), \$213.20 (2 anak), \$237.80 (3 anak), dan \$237.80 (4 anak atau lebih). Sedangkan penerima manfaat parsial adalah mereka yang pendapatannya dibawah \$2,124.60 per dua minggu.

Pensioner Education Supplement

Bantuan ini disediakan untuk pensiunan yang masih ingin mengikuti pendidikan. Jumlah bantuan yang diberikan adalah \$62.40 per dua minggu (tahun 2017). Persyaratan yang diharuskan untuk mendapat bantuan ini adalah: 1) sedang belajar pada jenis kursus yang disetujui; 2) menjadi pelajar penuh waktu, atau pelajar paruh waktu jika saat itu menjadi orang tua tunggal yang mendapat bantuan sosial, atau memiliki cacat, penyakit, atau cedera.

Special Benefit

Skema bantuan ini disediakan untuk orang-orang yang dalam kesulitan keuangan, tidak memiliki cara untuk mendukung diri mereka sendiri dan tidak berhak atas pembayaran lain (biasanya karena persyaratan tempat tinggal). Jumlah bantuan disesuaikan dengan keadaan kedaruratan yang ada, dan setiap tahun pemerintah membuat index bantuan yang berubah-ubah sesuai anggaran pemerintah.

Youth Allowance

Bantuan ini disediakan untuk siswa penuh waktu atau pemegang yang berusia 15 (dalam keadaan tertentu 16) hingga 24 dan orang yang berusia di bawah 21 tahun yang melakukan pencarian kerja atau kombinasi dari aktivitas yang disetujui. Penerimaan tunjangan ini bisa termasuk mereka yang bergantung pada pengasuh atau independen. Filosofi yang mendasari tunjangan ini adalah bahwa wali hukum bertanggung jawab untuk mendukung anak-anak mereka di mana mereka memiliki sarana jika anak muda itu tidak hidup mandiri dari mereka. Youth Allowance diperkenalkan mulai Juli 1998 dan

menggantikan Tunjangan Pelatihan Pemuda dan Tunjangan Newstart untuk pencari kerja di bawah 21 tahun dan AUSTUDY untuk siswa di bawah 25 tahun. Youth Allowance memiliki tingkat pembayaran lebih rendah untuk penerima yang tinggal dengan orang tua atau wali dibandingkan dengan mereka yang tinggal jauh dari rumah. Penerima yang tinggal 'terpisah/jauh dari rumah' juga berhak mendapatkan tambahan bantuan sewa rumah.

Sickness Allowance

Tunjangan Sakit dibayarkan untuk mereka yang saat ini menderita penyakit, cedera, atau cacat (jangka pendek yaitu kurang dari dua tahun), bekerja tapi tidak memiliki akses untuk meninggalkan kerja atau telah menggunakan semua cuti mereka. Dibayar di bawah sistem Newstart tanpa persyaratan uji aktivitas. Jumlah pembayaran adalah berkisar mulai dari \$492.80 (2017) sd. \$545.80 per dua minggu, tergantung beberapa kondisi penerima.

Rent Assistance

Skema ini diberikan kepada penerima bantuan sosial yang digolongkan sebagai non-pemilik rumah dan membayar sewa untuk akomodasi melebihi jumlah tertentu. Pembayaran ini dibayarkan sebagai bagian dari pembayaran dukungan pendapatan. Verifikasi detail sewa diperlukan, baik kontrak sewa atau dengan membuat Sertifikat Sewa setiap enam bulan. Jumlah bantuan sewa penerima memenuhi syarat untuk tergantung pada jumlah sewa yang dibayar seseorang. Rent Assistance mulai dibayar ketika sewa per dua minggu seorang penyewa lebih dari A \$ 99,40. Untuk setiap dolar yang melebihi jumlah ini, Rent Assistance membayar A \$ 0,75, hingga maksimum A \$ 111,80 per dua minggu. Jumlah maksimum yang harus dibayar lebih rendah untuk mereka yang berbagi akomodasi, dalam hal ini adalah A \$ 74,53. Tingkat yang berbeda berlaku untuk pasangan, pasangan yang dipisahkan oleh penyakit, pasangan sementara dipisahkan dan orang yang memiliki tanggungan anak-anak.

Pharmaceutical Allowance

Bantuan Farmasi diberikan sekitar \$ 6,20 per dua minggu bagi penerima bantuan sosial Centrelink, untuk membantu menutupi biaya obat-obatan resep. Jumlahnya mencakup biaya satu resep per dua minggu untuk pemegang kartu konsesi yang memenuhi syarat untuk tingkat konsesi obat-obatan yang tercakup dalam Skema Manfaat Farmasi, yang mencakup sebagian besar obat resep yang tersedia di apotik.

Telephone Allowance

Skema ini diterbitkan setiap tiga bulan kepada pelanggan yang memenuhi syarat yang menerima pembayaran pensiun, untuk membantu menutupi biaya tagihan telepon. Pelanggan yang memenuhi syarat harus memiliki layanan telepon berlangganan atas nama mereka agar memenuhi syarat untuk Tunjangan Telepon. Ada dua tarif yang harus dibayar: tingkat dasar A \$ 23,40 dan tingkat A \$ 35,20 yang lebih tinggi.

Family Tax benefit

Family Tax benefit (Tunjangan Pajak Keluarga) (sebelum 2011 tunjangan ini disebut Child Care Benefit) adalah pembayaran untuk membantu keluarga yang punya anak yang dilakukan melalui Departemen Human Services. Tunjangan ini diberikan dengan terlebih dahulu mereview penghasilan kena pajak keluarga yang disesuaikan pada tahun keuangan yang diberikan. Penerima kartu jaminan sosial dibebaskan dari review ini dan bahkan berhak atas tingkat pembayaran maksimum. Pembayaran dibayar tiap dua minggu atau diberikan sekaligus di akhir tahun. Untuk yang dibayar per dua minggu, dengan jumlah yang diberikan disesuaikan dengan taksiran penghasilan kena pajak yang direkonsiliasi setelah penerima mengajukan pengembalian pajak. Proses rekonsiliasi membandingkan estimasi pendapatan dengan pendapatan aktual. Manakala penerima mendapatkan penghasilan lebih

dari statemen mereka, maka akan dikenakan pengembalian pembayaran oleh Centerlink. Tunjangan ini terdiri dari dua bagian:

- Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A membayar maksimal \$ 182,84 per dua minggu untuk anak-anak hingga 12 tahun, dan \$ 237,86 per dua minggu untuk anak-anak 12 hingga 19 tahun, jika mereka memenuhi syarat. Tunjangan ini diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan setidaknya 35 % penghasilan mereka dihabiskan untuk biaya pengasuhan seorang anak. Pembayaran dilakukan kepada orang tua, wali, atau organisasi perawatan yang disetujui. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A juga dapat mencakup suplemen pada akhir tahun keuangan setelah Centrelink menyeimbangkan pembayaran bantuan keluarga dengan penghasilan total akhir tahun. Keluarga yang memiliki pendapatan gabungan sebesar \$ 80.000 setahun atau kurang, mereka mungkin menerima tambahan suplemen sebesar \$ 737,30 per anak per tahun setelah mengajukan pengembalian pajak.
- Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B memberikan bantuan tambahan kepada keluarga dengan orang tua tunggal, pengasuh non-orang tua dan beberapa keluarga yang hanya memiliki satu penghasilan utama. Artinya, dalam banyak kasus, dalam satu keluarga ada salah satu pasangan yang tidak dapat bekerja karena harus mengasuh anak. Tunjangan Bagian B membayar maksimal \$ 155,54 per dua minggu untuk anak-anak di bawah 5 tahun, dan \$ 108,64 per dua minggu untuk anak-anak berusia 5–18 tahun (anak harus menjadi siswa menengah penuh waktu jika mereka berusia 16–18 tahun). Pembayaran dilakukan setiap dua minggu atau sebagai jumlah sekaligus pada akhir tahun keuangan. Tunjangan Bagian B termasuk suplemen \$

357,70 per keluarga yang dibayarkan setelah mengajukan pengembalian pajak penghasilan pada akhir tahun keuangan.

Maternity Immunisation Allowance

Santunan Imunisasi Maternal diberikan kepada orang tua yang anaknya telah menerima semua imunisasi yang ditentukan oleh jadwal imunisasi nasional pada saat mereka berusia 2 tahun. Sebagai alternatif, jika orang tua keberatan dengan imunisasi dengan alasan apa pun dan memberi tahu Centrelink tentang hal ini, mereka juga dapat menerima tunjangan ini.

Schoolkids Bonus

Pada Mei 2012, Pemerintah Australia menghapuskan Pajak Pengembalian Pajak Pendidikan (ETR) yang memungkinkan keluarga untuk mengklaim pengembalian dana pajak untuk biaya pendidikan melalui Kantor Pajak Australia (Australia Taxation Office--ATO). Bonus Schoolkids menggantikan ETR mulai 1 Januari 2013. Bonus Schoolkids bertujuan untuk membantu keluarga dan siswa dengan biaya pendidikan untuk anak-anak di sekolah dasar dan menengah. Bonus Anak-anak Sekolah dibayarkan dalam 2 angsuran yang sama setiap tahun pada bulan Januari dan Juli. Pada tahun 2018, skema pembayaran adalah sejumlah \$ 410 per tahun (diberikan dalam dua angsuran) untuk anak sekolah dasar, atau \$ 820 per tahun (juga dalam dua angsuran) untuk anak sekolah menengah.

Paid Parental Leave Leave

Skema Paid Parental Leave (disebut juga dengan "Dad and Partner Pay") memberikan dukungan finansial kepada orang tua yang cuti bekerja hingga 18 minggu (4,5 bulan) karena memiliki anak-anak yang baru lahir atau yang baru diadopsi. Di bawah skema tersebut, pemerintah mendanai majikan pemberi kerja untuk memberikan Parental Leave Pay kepada karyawan mereka yang memenuhi syarat.

Pembayaran Parental Cuti dibayarkan kepada pengasuh utama anak dan orang tua yang memenuhi syarat untuk membayar sesuai dengan tingkat Upah Minimum Nasional. Dad dan Partner Pay adalah untuk ayah atau mitra kerja yang memenuhi syarat (termasuk mengadopsi orang tua dan pasangan sesama jenis) untuk membayar hingga dua minggu berdasarkan tingkat Upah Minimum Nasional.

Concession cards

Centrelink memberikan kartu diskon (konsesi) untuk berbagai macam keperluan. Pada tahun 2018, terdapat tiga jenis kartu konsesi, yakni:

- Health Care Card (HCC) atau Kartu Perawatan Kesehatan - diberikan untuk membeli obat-obatan dengan harga khusus dibawah harga umum. Sebagian besar penerima kartu ini adalah mereka yang berhak menerima tingkat maksimum Tunjangan Pajak Keluarga bagian A. Kartu ini memiliki manfaat sekunder, termasuk transportasi umum yang lebih murah di beberapa negara bagian.
- Commonwealth Seniors Card atau Kartu Kesehatan Persemakmuran Lansia - adalah sejenis kartu HCC yang khusus dikeluarkan untuk warga senior (pensiunan).
- Pensioner Concession Card atau Kartu Konsesi Pensiunan - diberikan untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi Pensiunan, termasuk biaya transportasi (di beberapa negara bagian), dan menggratiskan tiket perjalanan kereta api dalam negara bagian.

Prisons and psychiatric hospitals allowance

Bantuan ini diberikan bagi orang yang selesai (pasca) menjalani hukuman penjara (minimal 14 hari) atau dirawat di institusi psikiatrik (juga diberikan bagi pasien psikiatri yang digolongkan sebagai sedang menjalani rehabilitasi). Bantuan ini diberikan untuk membantu penyesuaian para mantan narapidana untuk hidup secara wajar dalam masyarakat. Pada prinsipnya, orang yang dibebaskan dari penjara

memiliki persyaratan yang sama untuk mendapatkan pembayaran uang muka pensiun jaminan sosial atau bantuan dalam kasus kesulitan keuangan yang parah seperti orang lain. Jumlah bantuan adalah sama dengan index yang ada dalam skema Crisis Payment, tapi maksimum adalah sekitar \$1,110.69 (sekitar Rp. 11,5 juta) yang diberikan hanya satu kali pembayaran (tahun 2017).

Seseorang di penjara atau kurungan psikiatri dapat mengajukan klaim untuk mendapat bantuan jaminan sosial pensiun atau tunjangan jaminan sosial hingga 3 minggu sebelum tanggal dibebaskan. Di mana seseorang dibebaskan dari penjara di luar jam kerja biasa, atau di lokasi terpencil, ini akan memungkinkan klaim mereka diproses, diberikan dan hak mereka dibayarkan kepada mereka pada saat masih di penjara untuk mengantisipasi kualifikasi mereka pada pembebasan dari penjara. Hari pertama untuk pembayaran adalah dihitung hari pembebasan dari penjara. Jika seseorang telah menerima pembayaran mereka untuk mengantisipasi pembebasan mereka dan tidak dibebaskan pada hari yang diharapkan, atau karena alasan lain sehingga pembayaran tidak dibayarkan pada hari pembebasan mereka, maka pembayaran menjadi utang yang dapat dipulihkan kemudian hari.

7. Sistem Welfare di Kanada

Kanada memiliki sistem negara kesejahteraan dalam tradisi Eropa; Namun, ini tidak disebut sebagai “kesejahteraan”, tetapi lebih sebagai “program sosial” (Prancis: *programmes sociaux*). Hal ini disebabkan karena di Kanada, kata “kesejahteraan” biasanya merujuk secara khusus untuk pembayaran langsung kepada individu miskin (dianggap seperti sedekah, seperti dalam konsep di Amerika) sehingga berkonotasi negatif dan tidak untuk belanja kesehatan dan pendidikan (seperti dalam penggunaan Eropa), sehingga mereka lebih menyukai istilah “program sosial”. Program tersebut tidak bersifat universal, melainkan ditujukan kelompok-kelompok tertentu yang secara spesifik dianggap memenuhi syarat. Mereka harus memenuhi berbagai kriteria untuk dapat memperoleh setiap jenis bantuan pemerintah.

Jaring pengaman sosial Kanada mencakup spektrum program yang luas, dan karena Kanada adalah federasi, banyak yang dijalankan oleh pemerintah provinsi/negara bagian dan pemerintah kota. Kanada memiliki berbagai pembayaran transfer pemerintah kepada individu, yang berjumlah lebih dari \$ 200 miliar pada tahun 2016. Anggaran tersebut tidak termasuk program seperti medicare (bantuan kesehatan) dan pendidikan publik yang berada diluar skema program sosial. Program sosial utama adalah termasuk Bantuan Sosial, Tunjangan Anak, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pendapatan, Asuransi Pekerja, Rencana Pensiun, Kompensasi Pekerja, pendidikan publik, perawatan medis, perumahan sosial dan layanan sosial lainnya. Kebanyakan orang tua Kanada diberikan Jaminan Hari Tua, pembayaran jaminan sosial

bulanan tidak kena pajak. Selain itu, sebagian besar mantan pekerja dapat menerima Rencana Pensiun Kanada (atau juga tunjangan Pensiun Quebec) berdasarkan kontribusi mereka selama karier mereka. Begitu juga banyak orang yang memiliki pensiun swasta melalui majikan/perusahaan mereka, meskipun itu optional, dan banyak orang mengambil keuntungan dari perlindungan pajak pemerintah untuk investasi yang disebut Rencana Pensiun Pensiun Terdaftar untuk dapat menghemat uang secara pribadi.

Semua provinsi mempertahankan program semacam ini yang dikenal dengan nama-nama berbeda seperti "bantuan sosial", "dukungan pendapatan", "bantuan pendapatan" dan "bantuan kesejahteraan". Tujuan program-program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dengan memberikan pembayaran bulanan kepada orang-orang yang berpenghasilan sedikit atau tidak ada penghasilan sama sekali. Aturan untuk kelayakan dan jumlah yang diberikan sangat bervariasi antarprovinsi.

Sejarah Perkembangan

Secara umum, sebelum masa Great Depression, sebagian besar layanan sosial di Kanada disediakan oleh badan amal keagamaan dan kelompok swasta lainnya. Keadaan ini berubah dengan kebijakan pemerintah antara 1930-an dan 1960-an yang memunculkan sistem negara kesejahteraan, mirip dengan banyak negara Eropa Barat. Sebagian besar program dari era itu saat ini masih digunakan, meskipun banyak yang dikurangi selama tahun 1990an ketika prioritas pemerintah bergeser ke arah pengurangan utang dan defisit.

Sistem kerangka kesejahteraan sosial di Kanada telah melewati sekitar empat fase pembangunan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik dan domestik negara itu.

Periode Awal dimulai tahun 1840–1890. Fase awal ini tumbuh seiring dengan perkembangan praktek kapitalisme, dimana

kebijakan sosial dibuat sebagai respons negara terhadap kemiskinan dan penyakit. Kesejahteraan sosial, yang dianggap sebagai urusan lokal dan pribadi, terdiri dari kewajiban perawatan anak-anak yang sakit jiwa dan cacat dan terabaikan, dan ancaman pemenjaraan bagi pelanggar hukum. Setelah Konfederasi terbentuk tahun 1867, penyediaan kesejahteraan sosial masih tidak teratur dan sedikit demi sedikit, muncul perhatian filantropis kelas atas - khususnya para wanita yang memandang kegiatan amal sebagai perpanjangan peran keibuan mereka dan sebagai usaha yang dapat diterima dalam masyarakat. Perdebatan ekstensif pertama tentang kesejahteraan anak dipimpin oleh J.J. Kelso di Toronto pada 1880-an yang mengarah pada pembentukan Lembaga Bantuan Anak Toronto pada tahun 1891 dan undang-undang kesejahteraan anak provinsi Toronto yang komprehensif di tahun 1893. Ini adalah awal dari gerakan yang menyelamatkan anak di Kanada. Pendekatan serupa kemudian diikuti oleh provinsi/negara bagian lain.

Perkembangan sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa keluarga adalah basis dari keamanan ekonomi. Institusionalisasi keluarga dan reproduksi sosial tenaga kerja dimulai dengan hukum untuk menegakkan tunjangan, untuk mengatur properti perkawinan dan pernikahan, dan untuk membatasi perceraian dan kontrasepsi. Kebijakan ini diperluas dengan batasan jam kerja untuk wanita dan anak-anak. Peraturan wajib pendidikan dan kesehatan masyarakat dikembangkan terutama sebagai tanggapan terhadap penyebaran penyakit dan kekhawatiran kerusuhan sosial menjelang meletusnya Perang Dunia I. Pemerintah provinsi mulai mendukung lembaga-lembaga amal dengan hibah reguler. Di Ontario, dukungan permanen pertama adalah dalam bentuk Undang-Undang Bantuan Amal tahun 1874 yang juga menyerukan pengaturan amal. Di Québec, adalah Gereja Katolik yang memelopori amal kesejahteraan sosial, dan kemudian Pemerintah Québec mulai memberikan hibah pendukung kepada badan amal tersebut setelah Perang Dunia Pertama.

Periode kedua adalah Fase Transisi tahun 1891–1940.

Meskipun perhatian utama negara Kanada tetap mempromosikan pembangunan ekonomi swasta yang menguntungkan, negara juga mulai mengusahakan penyediaan pasokan tenaga kerja terampil melalui pengaturan modal dan tenaga kerja, pemeliharaan keluarga, dan rekrutmen lebih banyak imigran. Ini sebagian besar dicapai dengan menggunakan mekanisme dan perangkat negara untuk menjaga stabilitas dalam ekonomi dan keluarga, dan juga melalui penandatanganan perjanjian dengan orang-orang Aborigin untuk lebih banyak membebaskan tanah untuk pemukiman Eropa. Selama periode yang sama, organisasi serikat pekerja dan organisasi amal mulai mengkonsolidasikan dan berjuang secara ideologis, walaupun umumnya belum berhasil karena ditentang Partai Konservatif, untuk mewujudkan skema kesejahteraan sosial.

Hasil dari perjuangan tersebut, misalnya, pada masa Perang Dunia I, muncul undang-undang yang mewajibkan anak-anak untuk bersekolah dan memberi wewenang kepada otoritas publik untuk membuat keputusan bagi anak-anak yang “terlantar”. Undang-undang hubungan industrial pertama, Undang-Undang Penyelidikan Sengketa Industri, disahkan pada 1907, yang memungkinkan negara untuk campur tangan dalam hubungan antara buruh dan pemilik modal. Undang-undang asuransi sosial wajib pertama di Kanada, Undang-Undang Kompensasi Pekerja, disahkan di Ontario pada tahun 1914. Selama Perang Dunia Pertama, dua kekuatan penting mempercepat pengembangan intervensi negara dalam kesejahteraan: tuntutan untuk dukungan bagi tentara yang terluka dan untuk dukungan dari keluarga yang ditinggalkan. Keduanya mengarah pada skema pensiun dan rehabilitasi sosial di provinsi Dominion (dan di Manitoba, dengan undang-undang tunjangan ibu pertama) pada tahun 1916. Beberapa provinsi membuat legislasi tunjangan ibu sendiri, untuk memberikan dukungan minimal kepada wanita yang ditinggalkan perang dan duda. Perlu dicatat, pada saat Perang Dunia I berakhir, setelah pengerahan ribuan pekerja perempuan ke dalam angkatan kerja masa perang,

mereka didorong untuk menyingkir untuk memberikan pekerjaan bagi laki-laki.

Era pascaperang muncul skema inisiatif pemerintah Federal pertama untuk mendorong pembangunan perumahan, tetapi hanya berlangsung singkat dari 1919 hingga 1924. Meskipun sempat muncul perdebatan besar selama tahun 1920 tentang apakah akan menetapkan skema pengangguran, pertolongan dan pensiun permanen, akan tetapi hasilnya hanya terbentuknya undang-undang pensiun hari tua 1927, dan ini sebagian hasil dari upaya JS Woodsworth dan sekelompok kecil anggota Parlemen dari Partai Buruh. Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah federal membagi biaya pensiun yang dikelola secara provinsi dan pensiun yang diujikan bagi orang miskin di atas usia 70 tahun. Itu adalah permulaan yang sederhana. Undang-undang tersebut, akan tetapi, secara eksplisit masih mengecualikan orang-orang Indian-Aborigin.

Pada masa terjadinya Depresi Besar (*Great Depression* tahun 1930an), negara terpaksa melakukan perubahan dalam filsafat sosial dan mulai intervensi dalam penanganan masalah sosial. Pada tahun 1930, dikerenakan ratusan ribu warga Kanada menganggur, pemerintah Konservatif yang baru terpilih di bawah R.B. Bennett mengesahkan undang-undang Bantuan Pengangguran Dominion, yang menjadi dasar pemerintah provinsi membuat skema hibah untuk membantu para pengangguran. Pemerintah kemudian membuka kamp-kamp bantuan pengangguran yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Nasional, sering di daerah-daerah terpencil, untuk memberikan pekerjaan dengan upah minimal kepada orang-orang yang tidak bekerja, dan menjauhkan mereka dari daerah perkotaan.

Pada tahun 1935, penentangan Partai Konservatif terhadap ide reformasi sosial melunak ketika menghadapi bencana ekonomi, dengan seperempat tenaga kerja yang diyakini menganggur. Tekanan yang terus berlanjut dari serikat pekerja, dan dari para pekerja kamp pengungsi dan dari para reformis sosial, yang meminta upah yang lebih baik dan asuransi pengangguran, membuat Bennett meninggalkan ide

natural kapitalisme yang biasanya membatasi peran negara dan mendukung reformasi sosial yang disebut "Bennett's New Deal". Kebijakan ini diperkenalkan dalam serangkaian pembicaraan radio pada bulan Januari 1935. Belakangan di tahun yang sama, Undang-Undang Perumahan Pendudukan menjadi hukum permanen pertama untuk bantuan perumahan. Kebijakan Bennett dalam kesejahteraan sosial, akan tetapi, tidak mencegah kekalahan elektoral pada musim gugur 1935. Pemerintahannya digantikan oleh rezim Liberal di bawah William Lyon Mackenzie King.

Undang-Undang Asuransi Pengangguran federal disahkan pada 1940, melalui kesepakatan dengan provinsi. Amandemen konstitusi terhadap Undang-Undang Amerika Utara Britania kemudian dilakukan untuk memberikan otoritas pemerintah federal untuk asuransi pengangguran. Perjanjian Penyewaan Pajak, diimplementasikan di tingkat provinsi setelah negosiasi yang berlarut-larut pada awal perang, memberi hak kepada pemerintah federal untuk mengumpulkan pajak penghasilan dan perusahaan selama perang, dan dipertahankan hingga saat ini.

Periode ketiga adalah Fase Intervensi tahun 1941–1974. Pada saat Perang Dunia II, sistem negara kesejahteraan telah sepenuhnya terbentuk. Pada awal Perang Dunia Kedua, pelajaran ekonomi dan politik dari Depresi telah dipelajari dengan baik. Kanada semakin menerima peran negara yang diperluas dalam kehidupan ekonomi dan sosial selama perang, dan rakyat mengharapkan ini berlanjut setelah perang. Untuk memfasilitasi keterlibatan pemerintah dalam perang, Ottawa menciptakan berbagai tindakan termasuk pembangunan perumahan, kontrol sewa, harga, upah dan bahan, pengaturan hubungan industri, pensiun veteran, penyelesaian lahan, rehabilitasi dan pendidikan, pembibitan sehari dan perekrutan perempuan ke dalam tenaga kerja yang dibayar dalam jumlah besar. Laporan William Beveridge di Inggris, yang dirilis pada bulan Desember 1942, diadopsi oleh pemerintah federal dan menugaskan sebuah laporan yang membuat program sosial serupa untuk Kanada.

Pemerintah Mackenzie King memutuskan untuk membuat penciptaan tunjangan keluarga pada tahun 1944 - untuk melemahkan lonjakan tekanan oposisi.

Setelah terpilih kembali pada 1945, pemerintahan Mackenzie King bergerak untuk merevisi model intervensi negara yang dibangun selama perang. Buku Putih tentang Ketenagakerjaan, yang muncul pada tahun yang sama, menyatakan keyakinan pemerintah dalam pendekatan manajemen ekonomi yang mengikuti dari karya ekonom J.M. Keynes. Perekonomian akan dikelola untuk menghasilkan pekerjaan penuh dengan memberikan bantuan kepada perusahaan swasta daripada dengan terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi - atau dengan menyediakan langkah-langkah kesejahteraan sosial lebih lanjut. Pemerintah King kemudian membuat Buku Hijau, yang memasukkan bantuan sosial dan langkah-langkah asuransi rumah sakit, untuk mendapatkan konsesi dari provinsi pada pendapatan dan pajak perusahaan. Provinsi-provinsi tidak setuju, dan proposal-proposal itu tidak dihidupkan kembali sampai lebih dari 10 tahun kemudian.

Tekanan untuk reformasi sosial terus berlanjut. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Louis St. Laurent, skema perumahan umum, hibah rumah sakit federal dan program bantuan untuk orang-orang cacat dan buta dimulai. Kampanye serikat pekerja untuk perubahan dalam pensiun menyebabkan penciptaan pensiun hari tua universal bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, dan keamanan usia tua yang telah teruji untuk mereka yang berusia antara 65 dan 70 pada tahun 1951-1952. Untuk pertama kalinya, tunjangan tunai diberikan untuk orang-orang Aborigin.

Pada tahun 1957, pemerintah Liberal dikalahkan oleh partai Konservatif Progresif di bawah Perdana Menteri John Diefenbaker. Selama periode ini, program permanen untuk pendanaan rawat inap, pendidikan tinggi dan rehabilitasi kejuruan diperkenalkan atau diperpanjang. Pemerintah Diefenbaker juga memperkenalkan legislasi hak asasi manusia federal pertama Kanada pada tahun 1960, dan

diperpanjang hak suara untuk orang-orang Aborigin yang hidup di fasilitas pemerintah.

Partai Liberal kembali berkuasa sebagai pemerintahan yang berorientasi pada reformasi di bawah Perdana Menteri Lester Pearson pada tahun 1963, pada kebangkitan ekonomi yang siklikal. Dipengaruhi oleh "perang terhadap kemiskinan" oleh Amerika, oleh kebutuhan untuk mempertahankan dukungan politik dari Partai Demokrat Baru (NDP) yang baru dibentuk, dan oleh inisiatif reformasi provinsi, Pearson memimpin pengenalan tiga bagian utama dari undang-undang sosial yang merupakan blok bangunan terakhir dari negara kesejahteraan Kanada: Rencana Pensiun Kanada (dan Québec), (1965) - yang menetapkan rencana pensiun wajib nasional; Rencana Bantuan Kanada, (1966) - yang mengkonsolidasikan Undang-undang Bantuan Pengangguran federal, dan program bantuan untuk orang-orang yang cacat fisik, bersama dengan program provinsi untuk orang tua tunggal dan orang-orang yang menganggur. Ini juga membuat pembagian biaya federal tersedia untuk berbagai layanan sosial termasuk penitipan anak; dan Medicare - yang membentuk sistem asuransi kesehatan pribadi nasional yang dikelola oleh provinsi.

Periode selanjutnya adalah Fase Keempat: Perluasan Sistem tahun 1975–2015. Pada tahun 1970-an, belanja sosial mulai meningkat sebagai akibat dari perluasan jangkauan dan jumlah program sosial antara 1964 dan 1973. Peningkatan pendanaan memungkinkan untuk meningkatkan keamanan pendapatan, terutama bagi para lansia sebagai akibat dari Jaminan Hari Tua dan Tambahan Penghasilan Yang Dijamin, untuk para penyandang cacat, untuk orang tua tunggal, dan untuk para penganggur. Orangtua menerima dukungan penghasilan yang lebih besar untuk anak-anak mereka dengan dana tambahan untuk Tunjangan Keluarga federal. Layanan sosial provinsi, terutama kesejahteraan anak dan pengasuhan anak, meningkat dalam kuantitas dan kualitas sebagai hasil dari pendanaan Rencana Bantuan Kanada. Pendidikan pasca sekolah menengah diperluas untuk mencakup bagian populasi yang lebih luas. Dan

perawatan kesehatan yang dikelola secara provinsi menjadi tersedia untuk pertama kalinya ketika provinsi mulai menerapkan layanan Medicare. Di Québec, Laporan Castonguay-Nepveu, 1971, mengarah pada pembentukan sistem pusat kesehatan dan sosial masyarakat yang dijalankan pada level provinsi. Ketika pengangguran meningkat, program seperti asuransi pengangguran dan bantuan sosial secara otomatis diperluas, memompa lebih banyak pendapatan ke tangan orang-orang yang tidak dapat sementara waktu untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Sistem Perpajakan

Perpajakan di Kanada adalah hak prerogatif yang diatur kewenangannya antara pemerintah federal, provinsi, dan teritorial. Pajak federal dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency--CRA). Dalam pelaksanaannya, berdasarkan perjanjian pengumpulan pajak, CRA mengumpulkan dan mengirimkan ke hampir semua provinsi:

- pajak penghasilan pribadi ke semua provinsi kecuali Quebec, melalui sistem pengembalian pajak terpadu,
- pajak perusahaan atas nama semua provinsi kecuali Quebec dan Alberta.
- bagian dari Pajak Penjualan (GST) tertentu ke provinsi yang telah menerapkannya. (Kecuali Québec, dimana Agence du Revenu du Québec mengumpulkan semua jenis GST di Quebec atas nama pemerintah federal, dan mengirimkannya ke Ottawa).

Pajak penghasilan pribadi

Pemerintah federal dan provinsi telah memberlakukan pajak penghasilan bagi individu, dan ini adalah sumber pendapatan paling

signifikan dengan prosentase lebih dari 45% pendapatan pajak. Pajak penghasilan di seluruh Kanada bersifat progresif dengan penduduk berpenghasilan tinggi membayar persentase lebih tinggi daripada pendapatan rendah. Akan tetapi, manakala pendapatan diperoleh dalam bentuk keuntungan modal (investasi), hanya setengah dari keuntungan yang termasuk dalam pendapatan untuk keperluan pajak; setengah lainnya tidak dikenai pajak. Pembayaran pajak penghasilan pribadi terintegrasi dalam Rencana Tabungan Pensiun Terdaftar (Registered Retirement Savings Plan--RRSP) (yang mungkin termasuk reksa dana dan instrumen keuangan lainnya). Hal ini dimaksudkan untuk membantu individu menabung untuk masa pensiun mereka. Setelah pensiun, warga dapat memegang Rekening Tabungan Bebas Pajak memungkinkan orang untuk memegang instrumen keuangan tanpa pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Pajak perusahaan

Perusahaan membayar pajak atas pendapatan laba dan modal. Pajak pendapatan laba dikenakan pada pendapatan perusahaan di tingkat perusahaan sebelum dibagikan kepada pemegang saham individu sebagai dividen. Kredit pajak diberikan kepada individu yang menerima dividen untuk mencerminkan pajak yang dibayarkan di tingkat perusahaan. Pendapatan diperoleh dalam bentuk keuntungan modal, hanya setengah dari keuntungan dimasukkan dalam pendapatan untuk keperluan pajak; setengah lainnya tidak dikenai pajak. Pajak modal adalah pajak yang dikenakan pada modal kena pajak suatu perusahaan. Modal kena pajak adalah jumlah yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Kanada) ditambah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Pada tanggal 1 Januari 2006, pajak modal dihapuskan di tingkat federal, dan sejak 1 Juli 2012 dihapus di seluruh provinsi.

Perpajakan internasional

Pajak dikenakan kepada bukan penduduk Kanada yang memiliki penghasilan kena pajak di Kanada (misalnya pendapatan sewa dan pendapatan properti). Sewa yang dibayarkan kepada non-penduduk dikenakan pajak pemotongan 25% pada “sewa kotor”, yang harus dipotong dan dikirim ke Badan Pendapatan Kanada (CRA) oleh pembayar (yaitu agen Kanada dari non-penduduk). residen, atau jika tidak ada agen, penyewa properti) setiap kali penerimaan sewa dibayarkan atau dikreditkan ke akun non-residen oleh pembayar. Jika pembayar tidak mengirimkan pajak pemotongan yang diminta sebelum hari ke-15 setelah bulan pembayaran kepada non-residen, pembayar akan dikenakan hukuman dan bunga atas jumlah yang belum dibayar.

Pajak gaji (Payroll Tax)

Pengusaha diminta untuk mengirimkan jenis pajak gaji ke berbagai yurisdiksi tempat mereka beroperasi dengan ketentuan berbeda-beda di setiap provinsi.

Pajak Penjualan

Pemerintah federal mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5%, yang disebut Pajak Barang dan Jasa (GST), dan, di lima provinsi, Pajak Penjualan yang Diharmonisasikan (Harmonized Sales Tax--HST) dengan jumlah bervariasi 5-15%. Provinsi British Columbia, Saskatchewan, dan Manitoba memungut pajak penjualan ritel, dan Quebec mengenakan pajak pertambahan nilai sendiri, yang disebut Pajak Penjualan Quebec. Provinsi Alberta dan wilayah Nunavut, Yukon, dan Wilayah Barat Laut tidak memungut pajak penjualan di wilayah mereka sendiri.

Pajak cukai

Baik pemerintah federal dan provinsi mengenakan pajak cukai pada barang-barang yang tidak elastis seperti rokok, bensin, alkohol, dan AC kendaraan. Kanada memiliki beberapa tarif pajak tertinggi untuk

rokok dan alkohol di dunia, yang merupakan bagian penting dari harga total eceran rokok dan alkohol yang dibayar oleh konsumen. Ini kadang-kadang disebut sebagai 'pajak dosa'. Secara umum diterima bahwa harga yang lebih tinggi menghalangi konsumsi barang-barang ini yang telah dianggap meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang berasal dari orang-orang yang menggunakannya.]Pajak AC kendaraan saat ini ditetapkan sebesar \$ 100 per unit AC.

Pajak properti

Pemerintah kota menarik pajak properti pada properti perumahan, industri dan komersial. Pajak ini menyumbang sekitar sepuluh persen dari total perpajakan di Kanada. Ada dua tipe dalam pajak ini. Yang pertama adalah pajak tahunan yang dikenakan pada nilai properti (tanah ditambah bangunan). Yang kedua adalah pajak transfer tanah yang dikenakan atas harga jual properti di mana pun kecuali Alberta, Saskatchewan, dan pedesaan Nova Scotia.

Kebijakan Pendidikan dan Tenaga Kerja

Sebagaimana halnya negara maju lainnya, Kanada mengelola sektor pendidikan dan ketenagakerjaan secara terpadu dengan sistem kesejahteraan sosial. Di Kanada, provinsi dan wilayah bertanggung jawab untuk sekolah dasar dan menengah mereka. Pendidikan adalah wajib sampai usia 16 tahun di sebagian besar negara bagian, 17 dan 18 tahun di beberapa negara bagian lain. Pendidikan dasar dan menengah disediakan dengan biaya dari pemerintah. Pendidikan swasta tersedia, tetapi biaya yang relatif tinggi dan kualitas yang relatif tidak lebih baik dari hasil pendidikan publik, menyebabkan sekolah swasta menjadi kurang populer dibanding di Amerika Serikat atau Inggris. Pendidikan pasca sekolah menengah tidak gratis, tetapi disubsidi oleh pemerintah federal dan provinsi. Bantuan keuangan tersedia melalui pinjaman mahasiswa dan beasiswa.

Untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang legal, pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar, diharuskan memiliki pendidikan tambahan berupa kursus, pendidikan vokasi, atau keserjanaan di universitas. Khusus bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan di Kanada, maka sebelum melamar pekerjaan, orang tersebut harus memiliki Educational Credential Assessments (ECAs) untuk menentukan standar gaji dan hak-hak lain pada pekerjaan yang dilamar. Pelaksanaan ECA dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah Kanada memberlakukan perlindungan yang ketat kepada warga negara dalam hubungan industrial ketenagakerjaan. Misalnya, dengan pengecualian kerja di bidang seni/artistik, pemuda di bawah usia 13 tahun pada umumnya tidak akan diizinkan untuk bekerja sebagai karyawan. Hal ini dikarenakan mereka wajib menyelesaikan wajib belajar di sekolah. Pemuda di bawah usia 13 tahun akan diizinkan untuk dipekerjakan dalam usaha artistik seperti produksi teater dengan izin khusus. Kemudian, pemuda berusia 13-16 tahun hanya akan diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan di daftar 'pekerjaan ringan'. Kementerian Tenaga Kerja biasanya berkonsultasi dengan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan daftar pekerjaan 'pekerjaan ringan' yang diijinkan tersebut untuk memasukkan, misalnya, tugas akomodasi dan pelayan makanan di restoran/kafe, golf caddy, atau bekerja di toko dan memberikan les, dll. Daftar ini ditinjau dan diperbarui setiap 3 tahun. Pemuda berusia 16 tahun ke bawah tidak akan diizinkan bekerja dari jam 12:01 hingga 6.00 pagi, juga dilarang dari pekerjaan yang dianggap termasuk pekerjaan berbahaya. Anak-anak berusia 16 dan 17 tahun akan diizinkan untuk melakukan pekerjaan berbahaya hanya dengan izin, dan dengan pelatihan dan pengawasan yang tepat. Mempekerjakan pemuda di bawah 16 tahun yang tidak dalam daftar pekerjaan memerlukan izin terlebih dahulu dari Kementerian Tenaga Kerja.

Pemerintah Federal mengkoordinir tata kelola secara nasional, akan tetapi tiap provinsi menetapkan sendiri Kode Standar

Ketenagakerjaan (Employment Standards Code--ESC) yang memberikan petunjuk standar kerja minimum yang berlaku bagi sebagian besar pengusaha dan karyawan di provinsi tersebut, dengan pengecualian mereka yang bekerja di industri yang diatur secara federal. Pengecualian tersebut mengatur untuk sekitar 15% dari semua hubungan kerja di Kanada. Kode ESC tersebut mengatur berbagai macam hal, termasuk misalnya ketentuan tentang cuti tahunan, cuti melahirkan berbayar, asuransi karyawan, waktu istirahat dalam hari kerja, upah minimum, lembur, hari libur, pemecatan atau pemberhentian kerja, pesangon, dan skema pensiun.

Skema Kesejahteraan Sosial

Kanada memiliki berbagai skema bantuan dan perlindungan sosial bagi seluruh warganya secara universal. Pemerintah di tingkat federal, provinsi, dan kota menyediakan skema bantuan bagi orang-orang yang tidak mampu menyediakan kebutuhan hidup bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain itu juga ada program khusus untuk membantu orang dalam situasi krisis, seperti: membesarkan anak-anak (Child Tax Benefits), pensiun (Pensiun Kanada / Pensiun Quebec, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Penambahan Uang Jaminan), cedera terkait pekerjaan (Kompensasi Pekerja), hilangnya pekerjaan (Asuransi Ketenagakerjaan), dan pengangguran jangka panjang (Bantuan Sosial).

Sebagian besar penerima manfaatnya adalah untuk orang-orang dalam keadaan tertentu. Mereka harus memenuhi syarat untuk setiap jenis bantuan pemerintah. Untuk beberapa manfaat, mereka harus membuat rencana agar memenuhi syarat untuk menerimanya. Kadang-kadang, seseorang atau keluarga dapat memenuhi syarat untuk lebih dari satu jenis jaminan penghasilan, tetapi masing-masing memiliki aplikasi atau prosedur dan aturan terpisah untuk memastikan bahwa manfaat hanya diberikan kepada mereka yang

membutuhkannya. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat apa pun, warga negara harus memiliki Nomor Asuransi Sosial (Social Insurance Number--SIN).

Nomor Asuransi Sosial (SIN) adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap orang untuk tujuan identifikasi pajak penghasilan, Asuransi Kerja, pensiun hari tua, dll. Sebagian besar pendatang baru menerima formulir aplikasi untuk Nomor Asuransi Sosial (SIN) ketika mereka pertama kali tiba di Kanada. Untuk mendapatkannya, warga dapat mendaftar di Pusat Sumber Daya Manusia Kanada (Human Resource Centre of Canada--HRCC).

Child Tax Benefit

Pemerintah federal memberikan pembayaran bulanan kepada semua orang tua atau wali yang memiliki anak-anak di bawah usia 18 tahun, melalui program yang disebut Child Tax Benefit. Biasanya dibayarkan kepada ibu dari anak jika anak tinggal bersamanya. Jumlahnya berbeda menurut pendapatan keluarga, jumlah anak dan usia mereka. Untuk menerima Tunjangan Pajak Anak ini, seseorang harus menjadi orang tua atau wali dari anak yang tinggal bersama mereka. Selain itu, orang tersebut atau pasangannya harus berkedudukan sebagai warga negara Kanada, atau pemegang visa tertentu yang telah tinggal setidaknya 18 bulan terus menerus di Kanada.

The Old Age Security (OAS)

Jaminan Keamanan Hari Tua (OAS) diberikan kepada orang-orang berusia 65 tahun ke atas yang memenuhi persyaratan tempat tinggal. Selain itu, mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada pendapatan lain mungkin memenuhi syarat untuk Tambahan Pendapatan Dijamin (Guaranteed Income Supplement--GIS). Pasangan penerima OAS (berusia 60 dan 64) juga dapat menerima Tunjangan Pasangan (Spouse's Allowance--SPA). Penerima manfaat ini adalah warga negara Kanada atau penduduk tetap yang telah tinggal di Kanada selama 40 tahun setelah usia 18 tahun. Orang yang telah tinggal di Kanada selama

kurang dari 40 tahun mungkin mendapatkan pensiun tapi dengan jumlah tunjangan yang berkurang.

Canada and Quebec Pension Plans

Rencana Pensiun Kanada dan Quebec adalah suatu bentuk asuransi yang mana orang harus berkontribusi selama masa kerja mereka, untuk menerima pembayaran bulanan dimulai pada usia 65. Pensiun dapat diminta pada usia kurang dari 60 tahun dengan jumlah penerimaan yang lebih rendah. Rencana ini juga termasuk pasangan pensiun untuk pensiunan yang meninggal, pensiun cacat dan tunjangan anak-anak dan kematian. Tunjangan ini ditujukan untuk warga negara Kanada, penduduk tetap, pengunjung dan pemegang Izin Menteri yang telah secara sah diterima di Kanada selama satu tahun, yang penghasilannya tahun itu dikenakan pajak penghasilan Kanada dan yang berkontribusi pada rencana tersebut. Jumlah yang dibayarkan akan tergantung pada jumlah total kontribusi yang telah diberikan.

Employment Insurance

Tunjangan ini diberikan kepada mereka yang mengikuti Asuransi Ketenagakerjaan (Employment Insurance--EI) dalam kurun waktu tertentu, dan kehilangan pekerjaan (menanggur) bukan karena kesalahan sendiri. Mereka juga berhak mendapatkan tunjangan ini jika menempuh kelahiran atau adopsi anak, pendaftaran dalam program pelatihan nasional, pembagian kerja atau pelatihan kerja. Untuk mendapat pembayaran, seseorang harus mendaftar ke kantor Human Resource Centre of Canada (HRCC).

Social Assistance

Skema Bantuan Sosial ini dimaksudkan untuk membantu orang yang membutuhkan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jenas bantuan manfaat lain. Pembayaran tunjangan membantu membayar makanan, tempat tinggal, bahan bakar, pakaian, obat resep, dan layanan kesehatan lainnya. Aturan kelayakan dan ukuran pembayaran

berbeda dari wilayah ke wilayah. Dalam beberapa kasus, warga negara dapat mengikuti program pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Bantuan Sosial biasanya diberikan melalui kantor-kantor dinas pelayanan sosial provinsi atau kotamadya setempat. Kompensasi Pekerja bagi orang-orang yang terluka saat bekerja mungkin juga diberikan dalam bentuk tunjangan keuangan, layanan medis dan rehabilitasi. Kantor Badan Kompensasi Pekerja provinsi memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat untuk kompensasi, berdasarkan laporan medis dan bukti bahwa cedera mereka terkait dengan pekerjaan.

Healthcare (Jaminan Kesehatan)

Semua provinsi di Kanada menyediakan layanan kesehatan universal, didanai publik untuk warga negara, penduduk tetap dan penduduk sementara tertentu, dengan biaya mereka dan sebagian disubsidi oleh pemerintah federal. Sekitar 70% dari pengeluaran untuk perawatan kesehatan di Kanada berasal dari sumber-sumber publik, dengan sisanya dibayar secara pribadi (baik melalui asuransi swasta, dan melalui pembayaran lain). Tingkat pembiayaan publik sangat bervariasi di semua layanan. Misalnya, sekitar 99% dari layanan dokter, dan 90% perawatan di rumah sakit, dibayar oleh sumber yang didanai publik, sedangkan hampir semua perawatan gigi dan sebagian besar biaya obat yang diresepkan dibayar secara pribadi. Sebagian besar dokter adalah wiraswastawan swasta yang menikmati cakupan di bawah rencana kesehatan masing-masing provinsi.

Dibandingkan dengan sistem kesehatan pembayar tunggal lainnya di dunia, Kanada tidak lazim karena melarang pembelian asuransi pribadi atau perawatan untuk layanan apa pun yang terdaftar. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah apa yang digambarkan sebagai "perawatan kesehatan dua tingkat", yang akan memungkinkan orang kaya untuk "melompat antrean". Namun, pada tahun 2005, Mahkamah Agung Kanada memutuskan di *Chaoulli v. Quebec* (Jaksa Agung) menyatakan bahwa larangan perawatan swasta bisa menjadi

inkonstitusional jika menyebabkan penundaan yang tidak masuk akal bagi pasien.

Social Housing

Kebijakan perumahan sosial di Kanada meliputi kontrol sewa (supaya harga tetap terjangkau bagi kebanyakan orang), serta suku bunga dan hibah bersubsidi bagi orang yang akan membangun/membeli rumah. Kebijakan perumahan publik awal di Kanada terdiri dari skema pinjaman publik-swasta yang berfokus pada perluasan kepemilikan rumah di kalangan kelas menengah. Inisiatif perumahan besar pertama di Kanada adalah Undang-undang Pendirian Rumah tahun 1935, yang meningkatkan jumlah kredit yang tersedia untuk pinjaman pembangunan rumah.

Disability Support

Tiap provinsi memiliki kebijakan bantuan bagi penyandang cacat dengan variasi yang berbeda-beda berkaitan dengan persyaratan dan jumlah bantuan yang diberikan. Provinsi Alberta, misalnya, memiliki program bernama 'Assured Income for the Severely Handicapped' (bantuan pendapatan untuk penyandang cacat parah. Provinsi Ontario memiliki 'Ontario Disability Support Program' yang menyediakan bantuan pendapatan dan pekerjaan untuk penyandang cacat, 'Assistive Devices Program' untuk menyediakan bantuan pembelian peralatan yang dibutuhkan bagi penyandang cacat tetap.

8. Model *Social Network* Jepang

Skema kesejahteraan sosial, bantuan untuk yang sakit, cacat dan untuk yang manula, telah lama disediakan di Jepang oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Tradisi masa kuno Jepang sendiri telah memiliki konsep gotong royong di dalam keluarga dan masyarakat setempat. Usaha pembuatan skema modern, dimulai tahun 1920-an, ketika pemerintah mengesahkan serangkaian kebijakan dan program kesejahteraan, yang sebagian besar diadopsi dari model Eropa, untuk memberikan perawatan medis dan dukungan keuangan untuk rakyat. Selama periode pasca Perang Dunia II, sistem jaminan sosial yang komprehensif mulai terbentuk secara bertahap. Pengeluaran pemerintah untuk semua bentuk kesejahteraan sosial meningkat dari 6% pendapatan nasional pada awal tahun 1970, menjadi 18% pada tahun 1989. Campuran pendanaan publik dan swasta telah menciptakan sistem pensiun dan asuransi yang kompleks.

Negara kesejahteraan Jepang memiliki desain konservatif yang mirip dengan negara-negara konservatif lainnya, yakni penerapan sistem asuransi sosial yang tersegmentasi secara okupasional berdasarkan pekerjaan dan tingkat kemampuan bayar. Pada saat menjelang Perang Dunia II, Jepang pernah mengadopsi kebijakan sosial bergaya Prusia-Jerman, khususnya untuk skema pensiun dan kesehatan. Pada saat yang sama, skema kesejahteraan Jepang juga mewujudkan *keluargaisme* (*familiaism*). Akibatnya, ketidakadilan gender terjadi sangat parah di Jepang. *Familiaism* juga mengakibatkan kurangnya kebijakan sosial pengasuhan anak oleh negara. Di Jepang,

65% lansia tinggal bersama anak-anak mereka dan setiap rumah tangga biasanya terdiri dari 3 generasi.

Perbedaan antara negara kesejahteraan Jepang dan sistem konservatif tradisional lain adalah belanja sosial yang sangat rendah: pada tahun 1995, Jepang hanya mengalokasikan 13,99% dari GDP yang digunakan untuk pengeluaran sosial, lebih rendah dari 15,4% di AS, 20,4% di Inggris, 19,8% di Italia, 26,6% di Jerman, 28,3% di Prancis, dan 32,5% di Swedia (Miura 2012: 32). Saat ini di tahun 2018, hanya 0,7 persen dari populasi yang menerima manfaat - dibandingkan dengan 4,8 persen orang Amerika yang mendapatkan hibah dari Bantuan untuk Keluarga Dengan Anak atau 9,7 persen yang menerima kupon makanan.

Karena Jepang mengaitkan skema kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan setelah masa perang, Jepang dianggap berbeda dari model Eropa dan Amerika Utara. Perbedaan ini menyebabkan Jepang memiliki model yang disebut sebagai "Rejim Kemakmuran Produktif" (*Productivist Welfare Regime*) (Holliday 2016). Model ini berpendapat bahwa kebijakan ekonomi pusat yang dilakukan oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang konservatif pada tahun 1955-1993 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di era pascaperang. Karena rezim kesejahteraan Produktif hanya memberikan kesejahteraan sosial yang lebih luas kepada mereka yang terkait dengan sektor-sektor produktif dalam masyarakat dengan tujuan mendorong produksi ekonomi, sehingga pada akhirnya hal tersebut memberikan keuntungan ekonomi.

Model tersebut juga menjelaskan bahwa *familialisme* Jepang atas sistem perawatan sosialnya yang berakar pada tradisi Konfusianisme telah menghilangkan tekanan biaya kesejahteraan sosial dari pemerintah, walaupun berakibat pada kesetaraan jender di Jepang. Namun, model "Rejim Kemakmuran Produktif" yang dipraktekkan pada 1960-an dan 1970-an dikritik hanya sebagai kompensasi untuk kebijakan industri dan ekonomi namun gagal mensejahterkan secara sungguh-sungguh, terutama bagi kelompok non-produktif seperti

manula dan penyandang cacat. Setiap orang di Jepang diwajibkan untuk mendapatkan bantuan pertama dari keluarga mereka, dan orang miskin yang secara fisik dapat bekerja bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan - apakah orang tersebut benar-benar memiliki pekerjaan atau tidak. Baru pada 1980-an dan 1990-an, kebijakan sosial menjadi platform strategi kampanye pemilu, manakala LDP kehilangan dominasinya di parlemen pada tahun 1993. Juga, program-program kesejahteraan sosial diperluas ke wilayah yang tidak produktif (non-economic zone) dan kelompok orang-orang seperti orang tua atau cacat yang tidak produktif. Akhirnya pada awal 2000an, pemerintah Jepang menyediakan program kepedulian sosial kepada orang tua dan anak-anak, bersama dengan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan umum. Perubahan ini tentu menjadikan model "Rezim Kesejahteraan Produktif" tidak lagi relevan untuk menggambarkan sistem kesejahteraan Jepang saat ini.

Masa depan sistem kesehatan dan kesejahteraan di Jepang saat ini sedang dipengaruhi oleh penuaan penduduk yang cepat. Asuransi kesehatan, perawatan kesehatan untuk lansia, dan biaya kesehatan masyarakat mencapai sekitar 60% dari total biaya kesejahteraan sosial dan jaminan sosial pada tahun 1975, sementara pensiun pemerintah mencapai 20%. Pada awal 1980-an, pensiun berkontribusi hampir 50% dari kesejahteraan sosial dan pengeluaran jaminan sosial karena orang-orang hidup lebih lama setelah pensiun.

Proses Sejarah Sistem Kesejahteraan

Gagasan paling awal tentang kesejahteraan pertama kali muncul pada tahun 1874 selama Periode Meiji, ketika Mercy & Relief Regulation memperkenalkan tunjangan uang tunai khusus untuk anak yatim di bawah 13 tahun, bagi mereka yang tidak dapat bekerja karena sakit, cacat atau usia tua dan mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau lebih dari 70 dan hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Pada tahun

1897, Asosiasi Kebijakan Sosial Jepang didirikan dengan mengacu pada asosiasi serupa di Jerman. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja meningkat ketika pada 1920-an, perusahaan besar, seperti Kanegafuchi Spinning Company dan Tokyo Spinning Company, mengadopsi sistem kesejahteraan perusahaan untuk menyediakan kesejahteraan kerja, sementara tidak ada sinyal sistem kesejahteraan berbasis serikat pekerja. Pada tahun 1929, UU Bantuan Miskin disahkan untuk meredakan ketegangan antara tenaga kerja dan pemilik modal. The Poor Relief Act mengakui kewajiban negara untuk mendukung orang miskin dengan anggaran negara. Pada tahun 1938, setelah Perang dengan Tiongkok, pemerintah secara resmi mendirikan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Jepang mengadopsi familiasme sebagai bagian dari sistem kesejahteraan untuk meningkatkan persatuan nasional.

Setelah kalah perang melawan Sekutu pada tahun 1947, Konstitusi baru mulai berlaku. Amerika Serikat berpengaruh besar dalam menentukan kebijaksanaan kesejahteraan, dengan mendorong birokrat mengutamakan kebijaksanaan ekonomi dibandingkan dengan murni kebijakan sosial. Pasal 25 mengakui hak semua orang untuk mempertahankan standar minimum kehidupan berbudaya dan itu menekankan kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan sosial, jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Jepang menerapkan kewajiban ini. Selama 1947 hingga 1970, pemerintah mengesahkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (1947), Undang-undang Kesejahteraan Penyandang Cacat Fisik (1949), Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (1951), Undang-Undang untuk Kesejahteraan Orang-Orang yang Terbelakang mental (1960), Undang-Undang untuk Kesejahteraan Orang Lanjut Usia (1963) dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dengan Dependensi dan Janda (1964). Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Jepang mengadopsi masyarakat kesejahteraan gaya Jepang. Juga Pada tahun 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei memperkenalkan "Tahun Kesejahteraan Pertama." Akan tetapi, karena guncangan harga minyak dan

pengeluaran besar pemerintah dalam kebijakan sosial, Jepang menderita dari defisit dan resesi. Pemerintah berusaha mengendalikan pengeluaran sosial dengan mereformasi Asuransi Kesehatan Nasional dan sistem pensiun publik pada pertengahan 80an. Pada tahun 1990-an, karena masalah masyarakat lanjut usia yang parah, fokus beralih ke dukungan sosial untuk mengembangkan layanan sosial untuk membesarkan anak dan merawat para tetua dan wanita yang bekerja. Pada 2012, pemerintah kembali mempromosikan kebijakan produksi seperti konsep pertama “Rezim Kesejahteraan Produktif”, yang disebut “Abenomics” (mengacu kebijakan perdana menteri Shintaro Abe) yang mengalihkan perhatian dari kesejahteraan dan perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi.

Skema Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Sistem pendidikan Jepang memainkan peran sentral dalam pemulihan Jepang dan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Hukum Dasar Pendidikan dan UU Pendidikan Sekolah diberlakukan. Undang-undang tersebut mendefinisikan sistem sekolah yang berlaku selama beberapa dekade: enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, tiga tahun sekolah menengah, dan dua atau empat tahun universitas. Sembilan tahun pendidikan dibuat wajib dan bebas biaya (kecuali sekolah swasta), dengan enam tahun di pendidikan dasar dan tiga di SMP sebagai emulasi sistem pendidikan Amerika. Sejumlah reformasi dilakukan dalam periode pasca-perang yang bertujuan mengurangi beban ujian masuk, mempromosikan teknologi informasi, internasionalisasi, mendiversifikasi pendidikan dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Sistem pendidikan Jepang terhubung dengan industri secara komprehensif, dalam arti perencanaan dan pengelolaan pendidikan sangat terintegrasi dengan kebutuhan industri. Sehingga secara

konseptual tidak ada orang Jepang (yang terdidik) menganggur. Karena itu pula, pendidikan diselenggarakan dengan metode dan kurikulum yang memastikan setiap orang dapat diterima dan mengembangkan diri di dunia kerja. Sistem pendidikan tersebut juga memastikan anak-anak dari Jepang memimpin dunia dalam keterampilan berhitung dan melek huruf. Siswa Jepang secara konsisten peringkat tinggi di antara siswa OECD dalam hal kualitas dan kinerja dalam membaca keaksaraan, matematika, dan ilmu eksakta.

Keunikan pendidikan Jepang terletak pada pengutamaan perilaku (*manner*) terlebih dahulu dibandingkan dengan penguasaan pengetahuan. Di sekolah Jepang, siswa tidak mengikuti ujian sampai mereka mencapai kelas empat (usia 10 tahun). Mereka hanya mengambil tes kecil untuk memantau bakat dan penguasaan materi dasar. Dipercaya bahwa tujuan untuk 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak, tetapi untuk membangun perilaku yang baik dan untuk mengembangkan karakter mereka. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang lain dan bersikap lembut terhadap hewan dan alam. Mereka juga belajar bagaimana menjadi dermawan, welas asih, dan empati.

Selain itu, anak-anak diajarkan kualitas perilaku yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kedisiplinan, kebersihan, kontrol diri, dan keadilan. Sekolah-sekolah Jepang mengajarkan agar siswa harus membersihkan ruang kelas, kafetaria, dan bahkan toilet sendiri. Saat membersihkan, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan tugas yang bergantian sepanjang tahun. Sistem pendidikan Jepang percaya bahwa mengharuskan siswa untuk membersihkan setelah mereka sendiri akan mengajarkan mereka untuk bekerja dalam tim dan saling membantu. Selain itu, menghabiskan waktu dan usaha mereka menyapu, mengepel, dan menyeka membuat anak-anak menghormati pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan orang lain kelak. Selain itu, semua sekolah juga mengharuskan siswanya mengenakan seragam. Kebijakan seragam dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan sosial di kalangan siswa dan membuat mereka menjadi memiliki mood

dan kesiapan mental untuk bekerja. Selain itu, mengenakan seragam sekolah membantu mempromosikan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Perubahan kondisi ekonomi pada tahun 1990-an juga mempertajam sistem pendidikan Jepang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan perusahaan modern, seperti orisinalitas dan kreativitas, dan keterampilan yang akan menjadi nilai spesifik dalam menghasilkan dorongan usaha (Debroux, 2003, Sakaiya, 1991, 2000). Sekolah mengundang guru tamu dari pelaku industri, mengirim siswa untuk mengikuti praktek kerja lapangan di perusahaan, serta mengajak pelaku industri untuk menyusun kerangka kerja magang (Debroux, 2003).

Interkoneksi langsung sistem pendidikan dengan dunia kerja terletak pada proses pendidikan tinggi (*tersier*) yang terdiri dari: universitas (*daigaku*), perguruan tinggi junior (*tanki daigaku*), perguruan tinggi teknologi (*koto senmon gakkō*) dan sekolah pelatihan khusus dan perguruan tinggi masyarakat (*senshu gakkō*). Hubungan antara dunia industri, pengusaha dengan universitas dan perguruan tinggi sangat dekat (Robinson, 2003). Karyawan biasanya berkarir seumur hidup berarti bahwa perekrutan harus dilaksanakan dengan ketat pada lembaga pendidikan terpercaya, sehingga banyak hal yang dipertaruhkan dalam kompetisi pendidikan. Jarang ada karyawan yang bekerja untuk coba-coba lalu pindah ke perusahaan lain. Hal ini memotivasi siswa untuk bekerja sangat keras dan melengkapi pendidikan sekolah mereka dengan keterampilan, agar dapat mengikuti ujian dan diizinkan masuk ke universitas terkenal, karena siswa yang baik akan terpilih selama studinya di puncak. Perguruan tinggi biasanya dibantu oleh perusahaan besar yang menjadi mitra memiliki banyak fasilitas pelatihan dan menawarkan peluang karir yang baik. Perusahaan-perusahaan terkenal masing-masing biasanya memiliki koneksi universitas dan perguruan tinggi tertentu di mana mereka merekrut karyawan baru (Van Wolferen, 1989).

Budaya Jepang memiliki sifat kolektivistik di mana hubungan (sering seumur hidup) antara majikan dan karyawan dirasakan dalam

suasana moral-spiritual. Hubungan ini menyerupai hubungan keluarga dengan kewajiban imbal balik antara 'perlindungan dan kesejahteraan' dengan 'kesetiaan terhadap nasib bersama' (Debroux, 2003). Sepanjang masa kerja karyawan, semua kegiatan perusahaan sengaja dilakukan untuk membangun, merekonstruksi dan memperkuat landasan etika dan sosial afektif dan karakteristik perusahaan. Seorang karyawan baru tidak hanya harus belajar tetapi juga untuk menginternalisasikan aturan tidak tertulis dari perusahaan untuk memenuhi perannya sebagai anggota hirarki yang terintegrasi sepenuhnya. Pelatihan adalah manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan dan memperkuat ketergantungan dan loyaltas karyawan pada perusahaan. Penyelesaian pelatihan (dengan memperoleh sertifikat) adalah suatu kehormatan bagi peserta dan perusahaannya, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi (promosi). Karena pelatihan seperti itu memainkan peran penting dalam mobilitas sosial dan penerimaan. Perusahaan-perusahaan Jepang sangat mementingkan konsep kerja seumur hidup dan perusahaan-perusahaan besar memiliki komitmen menggunakan pasar tenaga kerja internal yang tinggi. Ini menciptakan konteks yang unik dalam pengembangan keterampilan dan kesempatan belajar bagi karyawan Jepang (Drost et al. 2002).

Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan diatas, hubungan industrial dan ketenagakerjaan di Jepang lebih mengarah kepada pola hubungan kekerabatan. Dalam konteks ini, kesejahteraan karyawan secara tradisional menjadi tanggung jawab perusahaan. Walaupun demikian, pemerintah mengatur batas-batas umum. Pemerintah membuat tiga peraturan dasar ketenagakerjaan: 1) Undang-undang Standar Ketenagakerjaan yang mengatur kondisi kerja dan keselamatan-kebersihan tempat kerja; 2) Undang-undang Serikat Pekerja yang menjamin hak pekerja untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif; dan 3) Undang-undang Penyesuaian Hubungan Kerja yang mengatur penyesuaian manajemen tenaga kerja dan sarana penyelesaian sengketa. Sebagai tambahan, pemerintah juga membuat undang-undang upah minimum, yang diperkenalkan pada tahun 1947

dan mulai diberlakukan tahun 1959, yang dirancang untuk melindungi pekerja berpenghasilan rendah. Tingkat upah minimum ditentukan, menurut wilayah dan industri, oleh dewan khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tenaga kerja, dan pekerjaan.

Untuk menjamin stabilitas pendapatan dan kesejahteraan, perusahaan di Jepang biasanya mempekerjakan pegawai seumur hidup sampai masa pensiun. Hanya dalam beberapa kasus, (seperti perusahaan kecil menengah, atau proyek jangka pendek) pegawai dikontrak untuk masa tertentu. Rekrutmen berdasarkan kontrak jangka pendek (maksimal satu tahun--bila lebih dari satu tahun menjadi staf permanen) juga diberlakukan untuk pegawai yang sudah memasuki masa pensiun tetapi ingin masih tetap melanjutkan bekerja, baik di perusahaan asal maupun tempat lain. Ketentuan ini juga berlaku bagi pekerjaan yang menggunakan jasa outsourcing (yang dikecualikan pada sektor transportasi, konstruksi dan jasa keamanan). Perusahaan outsourcing harus memberlakukan karyawan sebagai pegawai tetap bila dipekerjakan lebih dari satu tahun. Untuk memastikan loyalitas dan kemampuan kerja pegawai terpenuhi dengan baik, perusahaan diperkenankan menerapkan masa percobaan di awal kontrak kerja. Masa periode waktu percobaan tidak dibatasi secara hukum. Perpanjangan masa percobaan juga tidak dilarang oleh hukum.

Waktu kerja rata-rata adalah 40 jam per minggu dan 8 jam per hari. Batasan-batasan ini dapat dilonggarkan untuk jangka waktu tertentu, yang didefinisikan oleh kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja perusahaan atau, jika serikat pekerja tidak ada, seorang pekerja yang mewakili mayoritas pekerja. Majikan juga harus menyediakan setidaknya satu hari istirahat per minggu serta waktu istirahat selama jam kerja, setidaknya 45 menit setelah 6 jam kerja dan satu jam setelah 8 jam kerja. Kerja lembur dengan pemberian upah tambahan diizinkan secara hukum, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada para pekerja yang sedang membesarkan anak dan mereka yang meminta untuk dikecualikan. Upah tambahan kerja lembur harus dibayar dalam kisaran tidak kurang dari 25% dan tidak lebih dari 50% dari upah

normal per jam. Tidak ada batasan tentang jumlah jam kerja lembur, kecuali pekerja perempuan yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak dan pekerja senior yang harus menerima perlindungan khusus. Namun demikian, Departemen Tenaga Kerja berhak menetapkan batas standar, di mana pengusaha dan serikat pekerja akan harus mematuhi.

Cuti tahunan dengan gaji pokok diberikan ketika pegawai telah bekerja setidaknya 80% dari total hari kerja. Bila telah bekerja lebih dari 6 bulan terus menerus, pekerja dapat mengklaim 10 hari cuti tahunan. Dalam dua tahun berikutnya, satu hari per tahun ditambahkan. Dipekerjakan selama paling tidak dua setengah tahun, pekerja dijamin dua hari tambahan untuk setiap tahun tambahan layanan berkelanjutan. Namun, jumlah total hari cuti tahunan tidak boleh menjadi lebih dari 20 hari. Asalkan liburan tidak mengganggu operasional bisnis, pegawai dapat diambil kapan pun karyawan memutuskan untuk melakukannya. Di Jepang, akan tetapi, ada juga tambahan 14 hari libur nasional setahun, yang tidak mengikat secara hukum untuk sektor swasta.

Perlindungan kehamilan diatur oleh pemerintah. Selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan, pegawai tidak diperkenankan melakukan pekerjaan fisik yang berat dan bekerja dengan bahan berbahaya. Atas permintaan, ibu hamil atau menyusui memiliki hak untuk menolak kerja lembur atau malam hari dan dapat juga dapat meminta pekerjaan ringan. Cuti melahirkan dijamin tapi tidak termasuk pembayaran selama periode ini. Atas permintaan, seorang wanita dibebaskan dari pekerjaan dalam waktu 6 minggu hingga melahirkan dan dalam kasus kelahiran kembar, dalam waktu 14 minggu hingga melahirkan. Dalam 8 minggu setelah persalinan, pada prinsipnya ada larangan bekerja, tetapi ibu dapat kembali bekerja setelah 6 minggu, jika atas permintaannya sendiri dan persetujuan dokter.

Undang-undang Cuti Perawatan Anak mengatur cuti perawatan anak, yang harus diambil oleh seorang perempuan dan

pekerja laki-laki untuk merawat anak mereka yang berusia kurang dari satu tahun. Namun hak ini tidak berlaku untuk pekerja jangka waktu tetap. Tunjangan cuti perawatan anak dibayarkan sesuai dengan Undang-undang Asuransi Ketenagakerjaan (Pasal 61-4 dan 61-5). Karyawan menerima tunjangan dasar biaya penitipan anak dari asuransi kepegawaian, manakala mereka bekerja kembali. Karyawan juga berhak cuti untuk merawat anggota keluarga seperti pasangan, anak, orang tua atau bahkan kakek-nenek, harus berada dalam kondisi yang membutuhkan perawatan berkelanjutan (misal karena sakit). Cuti tersebut tidak boleh lebih dari tiga bulan dan dapat, kecuali untuk keadaan tertentu, dilakukan hanya sekali per orang (Pasal 15 dan 11). Karyawan tidak mendapatkan pembayaran apa pun dari perusahaan selama periode ini, tetapi dapat meminta bantuan tunjangan perawatan dari pemerintah.

Kerangka Perpajakan

Sistem perpajakan di Jepang disusun untuk memenuhi tujuan ketercukupan pendapatan negara dan pendistribusian kekayaan nasional secara adil dan berkelanjutan. Pajak juga menjadi sumber pembiayaan jaminan kesejahteraan sosial di tingkat nasional, prefektur, maupun kota. Oleh karena itu, skema pajak disusun secara progresif (berjenjang), dimana semakin besar pendapatan (dan atau aset) seseorang, semakin tinggi prosentase pajak yang harus dibayar. Jepang memiliki sistem pajak paling progresif di dunia. Pajak pendapatan bisa mencapai 45 persen. Pajak warisan dapat mencapai 75 persen dari nilai properti dan bisa mengambil hingga 70 persen dari kekayaan yang diwariskan. Pajak perusahaan di Jepang mencapai 40 persen, tertinggi di negara maju.

Secara umum, pajak meliputi pajak nasional (所得税) dan pajak penduduk (住民税) berdasarkan area tempat tinggal seseorang.

Ada pajak pendapatan, pajak konsumsi dan pajak cukai di tingkat nasional, pajak perusahaan dan pajak kendaraan di tingkat prefektur dan pajak properti di tingkat kota. Berikut adalah ringkasan dari beberapa jenis pajak yang paling relevan yang dibayarkan oleh penduduk Jepang:

- **Pajak penghasilan:** Dibayar setiap tahun oleh individu di tingkat nasional, prefektur dan kota. Juga dikenal sebagai 'pajak penduduk' di tingkat prefektur dan kota. Jumlahnya dihitung berdasarkan pendapatan bersih orang perseorangan. Prosentase pajak di tingkat nasional bersifat progresif, sedangkan di tingkat prefektur adalah 4% flat untuk seluruh pendapatan dan kota adalah 6% flat untuk seluruh pendapatan. Seorang karyawan – membayar pajak dengan dikurangkan gaji oleh majikannya, tidak ada kewajiban untuk mengajukan pengembalian pajak tahunan untuk penghasilan kurang dari 20 juta yen per tahun. Ketika seorang karyawan mendapat penghasilan dari dua sumber, atau penghasilan tambahan sebagai orang yang bekerja sendiri lebih dari 200.000 yen, ia wajib mengajukan pengembalian tahunan. Seorang wiraswasta - wajib melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan untuk tahun berjalan tidak lebih dari 15 Maret.
- **Pajak Perusahaan:** Pajak ditarik pada tingkat prefektur yang dibayarkan setiap tahun oleh individu yang bekerja sendiri yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Jumlahnya 3% hingga 5% dihitung berdasarkan pendapatan bersih seseorang dan jenis bisnisnya.
- **Pajak properti:** Pajak pada tingkat kota dibayarkan setiap tahun oleh perorangan yang memiliki tanah, perumahan dan jenis aset yang dapat didepresiasi lainnya.
- **Pajak konsumsi:** Dibayar oleh konsumen ketika mereka membeli barang dan jasa. Angka itu saat ini delapan persen,

tetapi diperkirakan akan dinaikkan menjadi sepuluh persen pada Oktober 2019.

- **Pajak terkait kendaraan:** Pajak mobil di tingkat prefektur dibayarkan setiap tahun oleh individu yang memiliki mobil, truk, atau bus. Sedangkan pajak kendaraan ringan kota dibayarkan setiap tahun oleh individu yang memiliki sepeda motor atau kendaraan ringan bermotor lainnya. Pajak akuisisi mobil prefektur dibayar oleh orang ketika mereka membeli mobil.
- **Liquor, Tembakau, dan Pajak Bensin:** Pajak minuman keras nasional dibayarkan oleh konsumen ketika mereka membeli minuman beralkohol. Pajak tembakau nasional, prefektur, dan kota dibayar oleh konsumen ketika mereka membeli produk tembakau. Pajak bensin nasional dibayarkan oleh konsumen ketika mereka membeli bensin. Pajak minuman keras, tembakau dan bensin termasuk dalam harga yang ditunjukkan oleh toko

Tabel 8.1. Jumlah % pajak penghasilan di Jepang

< 1.95 juta yen	5% of taxable income
1.95 - 3.3 juta yen	10% of taxable income minus 97,500 yen
3.3 - 6.95 juta yen	20% of taxable income minus 427,500 yen
6.95 - 9 juta yen	23% of taxable income minus 636,000 yen
9 - 18 juta yen	33% of taxable income minus 1,536,000 yen
18 - 40 juta yen	40% of taxable income minus 2,796,000 yen
> 40 juta yen	45% of taxable income minus 4,796,000 yen

Sumber: MoF Japan (2018)

Pensiunan Jepang menghabiskan lebih banyak uang pajak sepanjang waktu. Artinya orang yang bekerja harus menanggung biaya pensiunan. Tingkat pajak gaji yang diperlukan untuk menutup pensiunan pada tahun 1995 adalah 24,3 persen. Tarif pajak pembayaran yang diproyeksikan yang diperlukan untuk menutup

pensiunan pada tahun 2030 adalah 53,2 persen. Padahal, pendapatan pajak telah menurun sejak tahun 1990-an karena perlambatan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah terus meningkat karena meningkatnya biaya jaminan sosial yang diberikan kepada pensiunan yang tidak lagi bekerja (membayar pajak). Kesenjangan antara pendapatan pajak dan pengeluaran pemerintah telah semakin lebar.

Struktur Kerangka Kesejahteraan

Sebagaimana dikemukakan di atas, jaminan kesejahteraan di Jepang pada umumnya terletak pada tanggung jawab perusahaan. Walau demikian, pemerintah juga menyediakan skema program kesejahteraan yang meliputi berbagai jenis layanan yang komprehensif. Layanan ini dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan, tenaga kerja dan Kesejahteraan atau Ministry of Health, Labour and Welfare (厚生労働省 *Kōsei-rōdō-shō*). Beberapa layanan tersebut diantaranya adalah:

Sistem Pensiun

Semua warga negara dilindungi oleh skema pensiun. Sampai tahun 1986, terdapat tiga jenis skema pensiun yang dikelola oleh pemerintah dan organisasi perusahaan swasta, yakni:

- 1) *The basic pension* (Category I). Skema ini menyediakan manfaat minimal, dengan jumlah pensiun yang tetap tanpa memperhatikan jumlah kontribusi pendapatan sebelumnya.
- 2) *A secondary part* (Category II). Skema ini menyediakan pensiun berdasarkan kontribusi dari pendapatan sebelumnya.
- 3) *A third part* (Category III). Skema ini menyediakan pensiun berdasarkan pada perjanjian antara perusahaan dan pekerja, yang biasanya lebih baik dari skema category I dan II.

Walau demikian, peserta skema pensiun II dan III tetap memiliki hak untuk mendapatkan pensiun basic pensiun (Category I).

Pada tahun 1986, dilakukan revisi besar skema pensiun dengan menyatukan semua kategori kepada satu skema baru Rencana Asuransi Pensiun Karyawan. Selain menggabungkan skema-sekma sebelumnya, reformasi tahun 1986 berusaha mengurangi manfaat untuk menekan kenaikan dalam tingkat kontribusi pekerja. Perubahan juga mencakup hak perempuan yang tidak bekerja di luar rumah untuk menerima pensiun mereka sendiri, tidak hanya sebagai istri dari suami yang bekerja. Setiap orang berusia antara dua puluh sampai enam puluh tahun adalah anggota wajib dari Program Asuransi Pensiun Karyawan ini.

Meskipun terdapat keluhan bahwa skema pensiun baru ini hanya berjumlah lebih sedikit dari kebutuhan belanja pensiunan, semakin banyak orang yang merencanakan untuk pensiun sebagai sumber pendapatan penting. Jumlah pensiun bulanan dasar adalah sekitar US \$ 420 pada tahun 1987, dengan pembayaran masa depan dapat disesuaikan dengan indeks harga konsumen. Empat puluh persen rumah tangga lansia pada tahun 1985 bergantung pada berbagai jenis anuitas dan pensiun sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka.

Bantuan Kesejahteraan Rakyat

Jepang memiliki program bantuan publik untuk menutup biaya hidup dasar, biaya perumahan, pendidikan wajib dan biaya pelatihan keterampilan, asuransi kesehatan, dan pemakaman. Untuk mendaftar, rakyat harus mengunjungi kantor kesejahteraan kotamadya mereka, yang akan memeriksa klaim mereka dan biasanya memberikan jawaban dalam waktu dua minggu. Jika total pendapatan suatu rumah tangga berada di bawah biaya hidup minimum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan (厚生労働省), rumah tangga tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Akan tetapi, pemberian bantuan ini dilakukan dengan sangat ketat. Sebelum

klaim mereka dipertimbangkan, pelamar harus terlebih dahulu menjual barang apa pun di rumah mereka yang dianggap “barang mewah” yang tidak perlu oleh pekerja sosial, meskipun definisi barang “mewah” bervariasi di antara pemerintah kota, dan pejabat kesejahteraan individu memiliki keleluasaan dalam menentukan apa yang harus dijual. Umumnya, barang-barang seperti televisi layar lebar, mobil dan sepeda motor (kecuali bila diperlukan dalam mencari pekerjaan), dan alat musik harus dijual. Dalam beberapa kasus, pelamar bahkan diminta untuk menjual rumah mereka sendiri dan hidup dari pendapatan sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan. Setelah disetujui untuk bantuan publik, penerima harus mengikuti panduan dari pekerja sosial yang ditugaskan kepada mereka dalam cara membelanjakan uang mereka. Program bantuan publik ini dimanfaatkan oleh sekitar 1,65 juta penduduk (1,7% dari populasi). Sekitar 50,8% dari rumah tangga kelompok ini adalah orang tua, 26,6% adalah rumah tangga dengan anggota yang sakit atau cacat, dan 6,2% adalah keluarga orang tua tunggal.

Social Insurance

Perusahaan di Jepang bertanggung jawab untuk mendaftarkan karyawan mereka dalam berbagai sistem Asuransi Sosial, termasuk asuransi kesehatan, pensiun karyawan, asuransi pengangguran, dan asuransi kompensasi kecelakaan pekerja. Majikan wajib membayar semua biaya untuk asuransi kompensasi kecelakaan pekerja, tetapi jenis asuransi lain ditanggung bersama oleh majikan dan karyawan.

Terdapat dua jenis asuransi kesehatan di Jepang: Asuransi Kesehatan Nasional (AKN--国民健康保険 Kokumin-Kenkō-Hoken) dan Asuransi Kesehatan Pegawai (健康保険 Kenkō-Hoken). Asuransi Kesehatan Nasional dirancang untuk orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari program asuransi kesehatan berbasis kerja. Semua warga negara Jepang, penduduk tetap, dan setiap non-Jepang yang tinggal di Jepang dengan visa yang berlaku tiga bulan atau lebih lama harus terdaftar di Asuransi Kesehatan

Nasional dan atau Asuransi Kesehatan Pegawai. Ketika orang yang diasuransikan menggunakan fasilitas medis atau membeli obat, mereka hanya perlu membayar sebagian kecil dari biaya. Sisa biaya akan dibayar oleh Asuransi setelah rumah sakit/klinik/apotik mengirim faktur untuk jumlah yang tersisa ke Federasi Asuransi Kesehatan Nasional, yang meninjau dan membayar biaya kesehatan.

Tunjangan persalinan

Tunjangan ini diberikan kepada peserta asuransi kesehatan AKN. Bantuan melahirkan sebesar ¥ 420.000 (index tahun 2018) akan disediakan untuk setiap anak. Tunjangan ini juga dibayarkan dalam kasus keguguran atau kelahiran mati jika ini terjadi setelah 85 hari (4 bulan) kehamilan. Ketika sang ibu memberikan kartu asuransi kesehatan-nya di rumah sakit, asuransi akan membayar rumah sakit secara langsung. Jika biaya persalinan lebih dari ¥ 420.000, anggota harus membayar sisanya. Jika biayanya kurang dari ¥ 420.000, anggota akan menerima saldo. Formulir akan dikirim sekitar 2 bulan setelah kelahiran, untuk mengklaim saldo tersebut. Dalam kondisi khusus, anggota juga dapat mengajukan permohonan tunjangan persalinan ini jika ingin melahirkan di luar Jepang.

Tunjangan Pemakaman

Ketika seorang anggota asuransi kesehatan meninggal, uang sejumlah ¥ 70.000 (index tahun 2018) akan dibayarkan untuk layanan pemakaman. Namun, jika kematian itu karena disebabkan oleh tindakan pihak ketiga (seperti kecelakaan lalu lintas), maka kompensasi mereka ditanggung oleh pihak ketiga, dan AKN tidak akan memberikan tunjangan pemakaman.

9. Model 'Kiwi Welfare' Selandia Baru

Sejak tahun 1860 Kesejahteraan sosial telah menjadi bagian penting dari masyarakat Selandia Baru dan selalu menjadi isu politik yang signifikan. Ini berkaitan dengan peran dan ketentuan oleh negara terhadap penentuan manfaat dan layanan yang diberikan. Skema kesejahteraan meliputi kesejahteraan fiskal (sumbangan finansial negara terhadap penduduk yang membutuhkan) dan kesejahteraan kerja (perlindungan dan jaminan standar kerja). Kesejahteraan sosial sebagian besar didanai melalui perpajakan umum. Sejak tahun 1980 kesejahteraan tidak bersifat universal, melainkan disediakan atas dasar kebutuhan; pengecualiannya adalah superannuation (pensiun) yang bersifat universal. Sistem ini beroperasi dalam kerangka sistem yang terkait dengan pendapatan, sedangkan tunjangan yang diberikan tidak melihat besarnya kontribusi, dan pensiun yang didanai dari perpajakan umum. Dengan kata lain manfaat jaminan sosial tidak ada hubungan dengan jumlah yang dibayarkan seseorang dalam pajak atau lamanya waktu seseorang dalam pekerjaan.

Selama menerapkan kerangka kesejahteraan, terutama di masa puncak tahun 1950 sampai 1990-an, sistem ini telah memberikan kemakmuran yang luar biasa bagi warga Selandia Baru. Sehingga misalnya, walaupun pemerintah memiliki skema tunjangan pengangguran, hampir tidak ada warga negara yang mengajukan tunjangan ini, sehingga bisa diasumsikan semua warga hidup dalam kondisi ekonomi yang baik. Sistem menjamin seluruh warga negara dan permanent resident, untuk menikmati kepastian sistem

kesejahteraan publik yang memberikan dukungan menyeluruh dalam berbagai situasi. Sangat sulit melihat adanya kemiskinan atau kelaparan disana. Pemerintah Selandia Baru benar-benar peduli pada rakyat dan selalu memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan sosial. Saat ini, manfaat sistem kesejahteraan yang ada meliputi cakupan yang luas, seperti: bantuan terhadap kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja karena sakit atau kecelakaan, subsidi menabung untuk pensiun, dukungan untuk orang yang lebih tua termasuk dana pensiun Selandia Baru dan bantuan keuangan untuk keadaan darurat dan praktis lainnya, dukungan untuk keluarga termasuk cuti hamil ketika seseorang memiliki bayi, paket tunjangan memperoleh pekerjaan, dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan akomodasi. Sementara itu, pekerja berhak mendapatkan hingga 18 minggu cuti berbayar (bahkan menjadi 22 minggu sejak 1 Juli 2018) dan cuti yang tidak dibayar lebih dari 52 minggu, selama mereka telah bekerja 10 jam atau lebih per minggu selama enam bulan sebelumnya.

Selandia Baru memiliki standar sekma welfare yang sama dengan kebanyakan negara Eropa sehingga membuat sejumlah kesepakatan timbal balik dengan negara lain seperti Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, dan beberapa negara Eropa, yang menyatakan bahwa mereka yang tiba di Selandia Baru dari negara-negara tersebut dapat mengajukan permohonan untuk manfaat sebagai segera setelah mereka membutuhkannya tanpa perlu menunggu jangka waktu minimum. Ini bukan jaminan bahwa manfaat akan dibayarkan, dan pelamar harus dinilai dengan cara yang sama seperti warga atau warga Selandia Baru yang dinilai. Mereka yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian timbal balik dengan Selandia Baru disarankan untuk memiliki beberapa jenis asuransi untuk menutupi kebutuhan mereka sampai mereka memenuhi kriteria kualifikasi untuk manfaat. Jika suatu manfaat dianggap perlu, dibayarkan dengan tarif tetap standar yang dibayarkan kepada semua yang menerima manfaat yang sama. Tidak ada sistem pro rata berdasarkan pendapatan sebelumnya. Semua manfaat dapat dikenakan pajak, jika Anda menerima

penghasilan yang memenuhi untuk membayar pajak. Departement of Work and Income akan memotong pajak sebelum tunjangan dibayarkan kepada penerima, dan jika mereka yang tidak (belum) memiliki nomor pajak, diharuskan mendapatkannya sebelum pembayaran dapat dimulai.

Sejarah dan Perkembangan

Harus diakui bahwa skema kesejahteraan Selandia Baru pada awalnya dibuat utamanya untuk melindungi dan menarik imigran yang datang dan pergi di awal tahun 1860 ketika emas ditemukan. Sejarawan Jane Silloway Smith (2010) menggambarkan bahwa sistem itu pada awalnya dibuat sebagai iming-iming agar orang Eropa (secara khusus Inggris) mau bermigrasi ke Selandia Baru daripada pergi ke Amerika Utara. Karena jarak yang lebih jauh dari Eropa, maka Selandia Baru perlu membuat iming-iming kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi warga Eropa untuk datang kesana. Jadi Selandia Baru (dan juga Australia) membuat sistem kesejahteraan sosial sebagai cara seperti membayar agar orang Eropa mau untuk datang ke negara tersebut. Secara praktis saat para pemukim Eropa tiba, negara memainkan peran aktif dalam menyediakan kesejahteraan dimana pendatang awal dijanjikan tanah gratis yang luas, pekerjaan, pendidikan bebas biaya, dan lingkungan yang lebih bersih dan luas daripada yang dapat ditemukan di Eropa (khususnya Inggris). Ketika banyak terjadi masalah berkaitan dengan perusahaan bangkrut, dan atau, karena beberapa pemerintah tidak dapat memenuhi janji-janji itu, banyak pendatang baru kecewa, sehingga pemerintah kolonial melangkah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran agar mereka tetap mendukung kolonisasi di wilayah Pasifik Selatan ini (lihat Porter, 1975; Thomson, 1998).

Upaya lebih luas dan terstruktur dilakukan mulai tahun 1898 ketika Pemerintah Liberal memperkenalkan skema pensiun hari tua

yang didanai pajak. Bahkan, Selandia Baru adalah negara pertama di dunia yang berbahasa Inggris untuk memberikan pensiun hari tua yang didanai negara, pada saat pemerintahan Perdana Menteri saat itu Richard Seddon. Pemberian pensiun, akan tetapi dikaitkan dengan karakter moral yang baik sehingga penerima pembayaran tidak bersifat universal. Misalnya, siapa saja yang telah dihukum karena pelanggaran kriminal atau mabuk lebih dari dua kali dalam tujuh tahun sebelum mengajukan permohonan untuk pensiun tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima. Jumlahnya pensiun saat itu hanya 18 poundsterling per tahun dan itu dikenakan tes seleksi yang kaku dan dipersyaratkan 20 tahun tinggal di Selandia Baru. Skema yang ada juga masih bersifat rasial karena penduduk keturunan Asia tidak boleh menerima pensiun, sedangkan penduduk asli suku Maouri hanya boleh menerima 12 poundsterling (2/3 dari yang diterima keturunan Eropa).

Satu dekade kemudian, Partai Liberal juga meloloskan Undang-undang Tempat Tinggal untuk Pekerja pada tahun 1905 yang memungkinkan pemerintah untuk membeli tanah, membangun rumah, dan menyewakannya kepada para pekerja dan keluarga mereka. Skema skala kecil yang dihasilkan dari undang-undang ini dapat dilihat sebagai landasan untuk pengadaan perumahan negara yang jauh lebih besar yang diperkenalkan oleh pemerintah Partai Buruh pertama pada 1930-an. Selanjutnya tunjangan untuk janda yang kehilangan suami diperkenalkan pada tahun 1911, dan bantuan keluarga pada tahun 1926. Bentuk pembayaran terbatas bagi para penganggur diberikan pada saat masa Depresi Besar pada awal tahun 1930-an. Saat itu, terjadi pengangguran massal, sehingga kemiskinan secara luas dialami dan memperoleh pengakuan publik. Antrean panjang yang terbentuk di luar organisasi bantuan amal dan balai misi kota merupakan pengingat yang terlihat dari kegagalan negara untuk mendukung kaum miskin secara memadai. Pemerintah bertindak dengan membuat skema tunjangan pengangguran, dimana penerima harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan. Pada tahun 1924, pensiun dilakukan secara otomatis untuk orang buta. Pada cakupan pertama dibatasi

untuk mereka yang menjadi buta di Selandia Baru, tetapi ini segera diperluas ke mereka yang kehilangan penglihatan di negara lain, tunduk pada cara dan tes kependudukan.

Sistem kesejahteraan Selandia Baru yang komprehensif '*cradle to grave*' dibangun secara formal mulai tahun 1938, ketika Parlemen menyetujui perpanjangan besar manfaat bantuan sosial yang didanai pajak. Pada tahun berikutnya (1939) Undang-undang Jaminan Sosial Selandia Baru dibuat oleh pemerintahan perdana menteri Michael Joseph Savage, sebagai upaya pertama pengesahan sistem nasional yang komprehensif. Dia menyatakan janji yang terkenal "*I can promise the people of this country that before very long they will have reached a condition of social security unsurpassed in any other country of the world* (Saya menjanjikan bahwa orang-orang di negara ini tidak lama lagi mereka akan mencapai kondisi jaminan sosial yang tak tertandingi di negara lain di dunia)" (Hanson 1998: 6). Pada saat itu, dalam suasana ketidakpastian ekonomi pasca Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia II, pemerintah Selandia Baru menguasai ekonomi nasional, mengelola industri sekunder untuk menghasilkan produksi yang prima, dan menjamin pekerjaan penuh untuk warga laki-laki usia kerja. Untuk mengelola sepenuhnya ekonomi terkontrol ini dan menuai manfaat dari pola ini, pemerintah menawarkan langkah-langkah keamanan: dana pensiun untuk seluruh orang berusia 65 tahun, tunjangan untuk orang cacat dan sakit; dan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat darurat untuk semua orang. Selain itu, meskipun ada keberatan kuat dari British Medical Association, pemerintah menasionalisasi perawatan kesehatan, secara bertahap menambahkan layanan tambahan ke rencana kesehatan universal dari tahun 1938 hingga 1940-an.

Selanjutnya skema kesejahteraan telah berevolusi banyak sejak tindakan pemerintah pertama tahun 1938, tetapi fondasinya tetap jelas dalam sistem yang sudah mentradisi sejak saat itu. Dalam undang-undang Jaminan Sosial 1939 dikemukakan bahwa pembuatan sistem itu dirancang "untuk melindungi orang-orang Selandia Baru dari cacat

yang timbul dari usia, penyakit, menjanda, yatim piatu, pengangguran, atau kondisi luar biasa lainnya". Visi asli dari jaminan sosial adalah untuk memberikan, tidak hanya kebebasan dari kemiskinan, tetapi juga martabat dan rasa kewarganegaraan. Hal ini sangat terkait dengan ide-ide komunitas dan praktik masyarakat Selandia Baru untuk memperkuat kesalingtergantungan rakyatnya. Undang-undang jaminan sosial dianggap penting untuk memastikan rasa timbal balik di masyarakat dipraktikkan, dan juga menguji cita-cita masyarakat dengan memeriksa sejauh mana kewajiban negara dalam memberikan bantuan.

Undang-undang ini memperkenalkan berbagai manfaat baru, termasuk ketentuan tunjangan untuk mereka yang sakit, pengangguran, anak yatim dan mereka yang berada cakupan keadaan darurat. Ketentuan lima hari kerja, 40 jam seminggu diperkenalkan untuk melindungi pekerja, upah minimum ditetapkan untuk buruh pertanian/peternakan, dan pemotongan upah sebelumnya ditiadakan. Pensiun ditingkatkan, dan pembatasan sebelumnya yang rasialis dihapus. Sistem ini menempatkan jaminan sosial pada pijakan yang lebih sistematis dan membangun kerangka kerja yang bertahan hingga hari ini. Ketentuan baru pasca perang seperti manfaat keluarga universal untuk mendukung pendidikan dan pemeliharaan anak-anak di tahun 1945 disambut secara luas tetapi berimplikasi pada ditambahkan secara signifikan biaya dukungan sosial dalam skema pajak.

Pada periode 1940 sampai 2006 skema kesejahteraan di Selandia Baru memiliki platform yang relatif sama dan stabil. Hanya terjadi perubahan minor pada beberapa kebijakan partai/perdana menteri terpilih. Perubahan itu menyangkut ketentuan tentang jenis dan jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima. Kriteria penerima juga kadang dirubah, akan tetapi tidak mengganti keseluruhan platform yang ada.

Sejak September 2007, tetapi, terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan. Fokus utama perubahan adalah pada kaum muda dengan tujuan menjadikan semua

anak berusia 15 tahun hingga 19 tahun terlibat dalam pekerjaan, pelatihan atau pendidikan. Orang yang mengajukan permohonan Tunjangan Pengangguran akan diminta untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan pelatihan dalam periode antara kontak pertama mereka dengan pekerjaan (dan penghasilan) dan pembayaran manfaat mereka dimulai. Mereka juga diminta untuk mencari dan menerima tawaran pekerjaan yang sesuai selama waktu itu. Langkah-langkah baru yang serupa juga akan berlaku untuk orang-orang yang sakit dan cacat, dan bantuan rumah tangga. Penerima manfaat dapat dikurangi bantuannya hingga 50% jika mereka gagal mematuhi ketentuan. Kebijakan ini, akan tetapi, diikuti oleh penyediaan layanan pencarian kerja (*job search*) yang bisa digunakan oleh masyarakat dari seluruh pelosok negara.

Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Pendidikan di Selandia Baru adalah jalur yang berpusat pada siswa yang menyediakan pengembangan dan pilihan pembelajaran yang berkelanjutan sehingga kemajuan siswa setiap tahun dan pembelajaran mereka pada satu tingkat menentukan landasan untuk langkah selanjutnya di sepanjang jalur yang dipilih. Sistem pendidikan Selandia Baru memiliki 3 level:

- pendidikan anak usia dini - sejak lahir hingga usia masuk sekolah;
- pendidikan dasar dan menengah - dari 5 hingga 19 tahun;
- pendidikan lanjutan - pendidikan tinggi (universitas) dan kejuruan (politeknik).

Sistem pendidikan Selandia Baru mencerminkan masyarakat mereka yang unik dan beragam. Sistem tersebut menyadari adanya kemampuan yang berbeda, keyakinan agama, kelompok etnis, tingkat

pendapatan, dan gagasan murid tentang mengajar dan belajar. Dengan demikian, pendidikan ditujukan untuk memaksimalkan potensi siswa, bukan menyeragamkan kemampuan mereka dalam satu tujuan yang monolitik. Walaupun demikian, sistem pendidikan juga tetap diatur sedemikian rupa agar memastikan setiap warga negara akan dapat memperoleh pekerjaan (dan nantinya pendapatan) yang layak dalam hidup mereka.

Pemerintah mewajibkan sekolah bagi seluruh penduduk sampai usia 18 tahun (setara lulusan SMA) dan membayar biaya sekolah mereka, sehingga semua warga negara dapat bersekolah dengan gratis (di sekolah negeri). Sekolah-sekolah negeri didanai dan dioperasikan oleh pemerintah, dengan alokasi yang rata dan tambahan bantuan yang disesuaikan dengan jumlah murid, tetapi orang tua diharapkan membayar alat tulis, seragam, buku teks dan perjalanan sekolah. Sekolah dapat meminta sumbangan untuk menambah dana operasional mereka. Setiap sekolah negeri diatur oleh Dewan Pengawas terpilih, terdiri dari kepala sekolah, sejumlah wali murid (biasanya 5) dipilih oleh orang tua siswa, satu staf wali yang dipilih oleh staf sekolah. Murid bisa juga menempuh sekolah swasta, tetapi hampir semua biayanya harus dibayar sendiri karena sekolah swasta hanya menerima sedikit dana dari pemerintah. Sekolah pada level primer dan sekunder, difokuskan untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa, sehingga orientasi ujian sekolah bukan untuk menentukan kelulusan siswa, melainkan sekedar mengetahui perkembangan minat-bakat siswa pada keilmuan dasar. Lulusan sekolah SD-SMA tidak dipersiapkan memasuki dunia kerja. Setelah lulus sekolah, seseorang baru mencari tambahan pelatihan atau menempuh pendidikan tersier untuk mendapatkan pekerjaan.

Sehingga, pendidikan tersier di Selandia Baru digunakan untuk menggambarkan semua aspek pendidikan dan pelatihan pasca sekolah. Cakupan pendidikan tersier meliputi kursus komunitas informal, training sertifikasi, politeknik, hingga gelar sarjana dan pascasarjana berbasis penelitian. Pendanaan untuk pendidikan tersier di Selandia

Baru adalah melalui kombinasi subsidi pemerintah dan biaya dari mahasiswa. Pemerintah mendanai kursus yang disetujui dengan hibah uang sekolah berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di setiap kursus dan jumlah waktu belajar yang diperlukan setiap kursus. Kursus dinilai dengan dasar waktu penuh (*Equivalent Full-time Student--EFTS*) setara jam belajar siswa penuh waktu. Mahasiswa yang terdaftar dalam kursus dapat mengakses Pinjaman Mahasiswa dan Tunjangan untuk membantu biaya kuliah dan biaya hidup.

- Pinjaman Mahasiswa tanpa bunga tersedia untuk semua warga negara Selandia Baru dan penduduk tetap. Ini mencakup biaya kuliah, biaya terkait kursus, dan juga dapat memberikan tunjangan hidup mingguan untuk siswa penuh waktu. Pinjaman harus dibayar pada tingkat yang tergantung pada pendapatan dan pembayaran biasanya dikembalikan melalui sistem pajak pendapatan dengan pemotongan upah.
- 'Tunjangan mahasiswa, adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kualifikasi perumahan dan kewarganegaraan, usia, lokasi, status perkawinan, jumlah anak-anak yang bertanggung, serta penghasilan pribadi, pasangan suami-istri atau orang tua. Tunjangan ini dimaksudkan untuk biaya hidup, sehingga sebagian besar siswa yang menerima tunjangan akan tetap membutuhkan pinjaman untuk membayar biaya kuliah mereka.

Pendidikan tersier diatur dalam Kerangka Kualifikasi Selandia Baru, sistem kualifikasi nasional yang terpadu di sekolah, pendidikan kejuruan dan pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan market industri. Siapapun yang ingin bekerja secara legal di Selandia Baru diharuskan memiliki salah satu bukti lulusan dari lembaga pendidikan tersier yang diakui pemerintah. Ketentuan tersebut bermanfaat untuk menentukan upah dan perlindungan sosial yang layak bagi karyawan.

Pemerintah sendiri mengatur dunia kerja secara ketat dengan keterkaitan yang jelas antara: standar kompetensi, upah, pajak, dan perlindungan sosial. Di bawah undang-undang ketenagakerjaan Selandia Baru, majikan dan karyawan memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam kerangka hubungan kerja. Misalnya, majikan berkewajiban untuk membayar upah yang disepakati, dan memastikan di mana pun karyawan harus bekerja dengan aman. Pada sisi lain, karyawan harus melakukan pekerjaan dengan perhatian dan kompetensi yang sesuai. Meskipun menerima tawaran lisan untuk suatu pekerjaan, karyawan dan majikan harus menandatangani perjanjian tertulis sebelum karyawan mulai bekerja. Sebagian besar perusahaan besar menawarkan perjanjian kerja bersama yang telah dinegosiasikan oleh serikat pekerja. Bahkan jika bukan anggota serikat, pekerja masih dapat memanfaatkan perjanjian bersama, dan menggunakannya sebagai dasar untuk merundingkan kondisi kerja. Bergabung dengan serikat pekerja adalah salah satu hak sebagai pekerja di Selandia Baru, dan majikan tidak dapat memengaruhi keputusan tersebut.

Pemerintah menetapkan upah minimum dan index kewajaran gaji untuk semua pekerja (yang dianggap dewasa) di atas usia 18 tahun, dan para pegawai baru boleh bekerja/menerima upah ketika berusia 16 tahun. Tingkat upah minimum ditinjau setiap tahun dan merupakan jumlah bruto sebelum dipotong pajak. Mulai 1 April 2018, tingkat upah minimum dewasa yang berlaku untuk karyawan berusia 18 atau lebih adalah \$ 16,50 per jam (sekitar Rp. 160.000). Tingkat minimum pegawai baru (masa training) adalah \$ 13,20 per jam, dan ini berlaku untuk usia 16 untuk tiga bulan pertama kerja, setelah itu mereka memenuhi syarat untuk tingkat upah minimum dewasa. Siapa pun karyawan yang merasa bahwa mereka dibayar kurang dari upah minimum harus menghubungi Departemen Tenaga Kerja.

Undang-undang membolehkan karyawan diminta untuk melakukan percobaan 90 hari dalam pekerjaan baru. Faktanya, sekitar separuh dari semua majikan di Selandia Baru menggunakan masa

percobaan ini untuk memastikan kinerja dan profesionalitas karyawan. Karyawan, akan tetapi, boleh menolak masa percobaan, walaupun harus dinegosiasikan dan disetujui secara tertulis sebelum mulai bekerja.

Pemerintah menjamin setiap karyawan bisa mendapatkan cuti dalam jumlah yang cukup, setidaknya menurut standar internasional. Karyawan diperbolehkan mendapatkan cuti tahunan minimum empat minggu. Jika mau, karyawan juga dapat meminta untuk menukarkan cuti satu minggu dengan uang tunai. Karyawan dapat meminta majikan mereka untuk membayar tunai, hingga satu minggu dari hak minimum empat minggu mereka untuk liburan tahunan per tahun untuk setiap tahun hak. Mereka dapat melakukan ini sekaligus, atau dapat membuat beberapa permintaan cicilan kepada kasir sampai seluruh satu minggu diuangkan. Selain itu, di luar cuti tahunan, karyawan juga memperoleh 11 hari libur publik (tanggal merah). Jika karyawan tetap bekerja pada hari libur umum, maka majikan harus membayar ekstra, dan karyawan juga boleh mengambil ganti liburan pada hari lain - yang disebut "mengambil satu hari pengganti" (*taking a day in lieu*). Ketentuan pemerintah juga menjamin hak karyawan atas sejumlah cuti berbayar jika mereka sakit. Orang tua yang memiliki anak baru berhak atas cuti orangtua yang dibayar hingga 22 minggu per Juli 2018. Jika karyawan adalah seorang ibu menyusui, majikan diwajibkan oleh hukum untuk membiarkan mereka menyusui di tempat kerja, dan jika anak sakit, karyawan dapat menggunakan hak cuti sakit untuk merawat mereka. Jenis cuti ini disebut cuti domestik dan dapat digunakan untuk merawat anggota keluarga karyawan.

Pemerintah juga menjamin tidak ada diskriminasi terhadap seseorang karena jenis kelamin, orientasi seksual, status keluarga, status perkawinan, warna kulit, kebangsaan atau negara asal, ras, kepercayaan etis / agama, opini politik, status pekerjaan, usia atau cacat, yang dinyatakan tindakan ilegal di Selandia Baru. Pelecehan seksual, termasuk permintaan untuk kontak seksual dan segala jenis perilaku seksual yang menyinggung atau tidak diinginkan, juga ilegal di sana.

Majikan berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak penghasilan akan diambil dari upah karyawan sebelum membayarkan gaji. Potongan ini dikenal sebagai pajak PAYE (*Pay As You Earn*). Pemotongan lain, yang jauh lebih kecil, adalah untuk pungutan ACC (Accident Compensation Corporation) yang menjalankan sistem asuransi Selandia Baru untuk menutupi biaya yang bila karyawan menadapatkan kecelakaan kerja. Bersama dengan manfaat lain, jika karyawan tidak bekerja untuk waktu yang lama karena cedera, ACC akan mengganti dengan sebagian besar upah yang hilang. Karyawan harus memiliki nomor pajak - jika tidak memilikinya, karyawan dikenakan pajak dengan jumlah yang lebih tinggi daripada yang diperlukan. Selain pajak PAYE dan retribusi ACC, perusahaan tidak diizinkan untuk membuat potongan dari gaji apapun tanpa izin karyawan. Bagi penduduk Selandia Baru, karyawan juga akan memiliki opsi untuk bergabung dengan KiwiSaver, sebuah inisiatif tabungan pensiun berbasis kerja yang disubsidi pemerintah.

Pajak sebagai Sumber Pendanaan

Sistem kesejahteraan Selandia Baru didanai sepenuhnya dari pendapatan pajak yang dikumpulkan pada tingkat nasional oleh Departemen Pendapatan Negara (Inland Revenue Department--IRD). Pajak dikenakan pada pendapatan pribadi dan bisnis, dan pada pasokan barang dan jasa. Tidak ada pajak keuntungan modal, meskipun "keuntungan" tertentu seperti laba atas penjualan hak paten dianggap sebagai pajak penghasilan pendapatan berlaku untuk transaksi properti dalam keadaan tertentu, khususnya spekulasi. Saat ini tidak ada pajak tanah, tetapi pajak properti lokal dikelola dan dikumpulkan oleh otoritas lokal. Beberapa barang dan jasa dikenakan pajak tertentu, yang disebut sebagai cukai atau kewajiban, seperti bea cukai alkohol atau kasino. Jenis ini dikumpulkan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Layanan Bea Cukai Selandia Baru.

Total pendapatan inti Selandia Baru adalah \$ 81,8 miliar (tahun 2017). Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan inti, berjumlah \$ 75,6 miliar pada tahun keuangan 2017. Dari jumlah tersebut, sekitar \$ 35 miliar (46%) berasal dari pajak penghasilan (income tax). Dari jumlah total penerimaan tersebut, sebagian besar dipergunakan untuk belanja kesejahteraan: Jaminan sosial sebanyak \$ 30,6 miliar (37,4 %), bidang Kesehatan \$ 15,6 miliar (19,1 %), dan Pendidikan \$ 14,1 miliar (17,2 %). Jenis pajak penghasilan meliputi gaji dan upah, penghasilan bisnis dan wiraswasta, penghasilan dari investasi (bunga, dividen, transaksi properti tertentu, dll.), pendapatan sewa, dan penghasilan luar negeri (termasuk penghasilan dari pensiun di luar negeri). Pajak penghasilan dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan, semakin tinggi, tarif prosentasenya juga semakin besar.

Tabel. 9.1. Tarif Pajak Penghasilan di Selandia Baru

Pendapatan	Prosentase Pajak
< \$14,000	10.5%
\$14,001 – \$48,000	17.5%
\$48,001 – \$70,000	30%
Over \$70,000	33%
No-notification rate	48%

Sumber: IRD (2018)

Secara umum, adalah majikan yang memotong jumlah pajak penghasilan yang relevan dari gaji dan upah sebelum dibayarkan kepada individu. Sistem ini, yang dikenal sebagai Pay-As-You-Earn, atau PAYE, diperkenalkan pada tahun 1958, sebelum karyawan membayar pajak setiap tahun. Selain itu, bank dan lembaga keuangan lainnya memotong jumlah pajak penghasilan yang relevan atas bunga dan dividen karena ini diperoleh. Pemotongan pajak ini dikenal sebagai pajak pemotongan penduduk (resident withholding tax--RWT) atau pemotongan pajak non-penduduk (non resident withholding tax--

NRWT), tergantung pada status pemberi pinjaman; NRWT berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada akhir setiap tahun pajak, setiap orang diminta untuk menyerahkan ringkasan pajak pribadi, untuk memungkinkan IRD menghitung keseluruhan pajak yang dibayar agar diketahui kekurangan atau kelebihan pembayaran yang dilakukan selama tahun tersebut. Bagi mereka yang kurang bayar akan diminta pembayaran pajak terhutang, sebaliknya bagi mereka yang kelebihan bayar akan diberikan restitusi pengembalian pajak.

Selain pajak, semua karyawan juga harus membayar retribusi pencari nafkah untuk menutupi biaya cedera yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Ini dikumpulkan oleh IRD dengan nama Accident Compensation Corporation (ACC). Tunjangan penerima dibayarkan atas gaji dan upah ditambah penghasilan lain yang dikenakan PAYE, misalnya lembur, bonus atau pembayaran cuti/liburan. ACC dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan kompensasi lain, misalnya menjamin penerimaan gaji ketika karyawan tidak bisa bekerja karena cacat akibat kecelakaan kerja. Selain dua jenis itu, pajak dibayar oleh pengusaha manakala memberikan tunjangan kepada karyawan selain gaji atau upah mereka (misalnya kendaraan bermotor atau pinjaman berbunga rendah). Pajak ini disebut sebagai *'fringe benefit tax'* (FBT).

Kerangka Kesejahteraan

Bruce Jesson (1980), salah seorang intelektual terkemuka Selandia Baru, mengkritik model kesejahteraan ala kolonial sebagai alat untuk merayu pendatang untuk tetap tinggal di sana. Dia menggambarkan negara yang memiliki sistem kesejahteraan sosial tanpa imbal balik kewajiban dari rakyat sebagai *'hollow society'* (masyarakat hampa). Ketika dihadapkan oleh masalah sosial, mereka hampir selalu bergantung kepada pemerintah untuk menghadapinya, sehingga menempatkan institusi sosial di bawah pemerintah, memperkuat

kekuasaan pemerintah pada mereka, membatasi pertumbuhan organik mereka dan lebih memperkuat kekosongan (kemampuan) masyarakat sendiri. Pemikiran Jesson ini mengilhami pembentukan desain kesejahteraan Selandia Baru dikemudian hari, dimana sebagian besar skema bantuan selalu dikaitkan dengan kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh penerima.

Saat ini skema tunjangan kesejahteraan sendiri meliputi banyak sekali aspek kebutuhan kehidupan masyarakat, sehingga memudahkan rakyat Selandia Baru untuk menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Diantara tunjangan tersebut, secara garis besar adalah:

Unemployment/Job Seeker Support (Tunjangan Pengangguran)

Pada tahun 1930, Perdana Menteri George Forbes membuat Undang-undang Pengangguran (Unemployment Act), menjanjikan pemberian tunjangan bagi mereka yang terdaftar sebagai pengangguran. Akan tetapi, Forbes kemudian mengumumkan bahwa pembayaran hanya dilakukan bagi mereka yang mau bekerja pada pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah seperti membangun jalan, jembatan, membuka ladang pertanian, atau hutan. Pada tahap pertama sebanyak 23,000 orang mendaftar untuk memanfaatkan tunjangan ini, kemudian meningkat menjadi 51,000 pada saat puncak masa Great Depression. Pada tahun 1933 jumlah yang mendaftar mencapai 80,000, dan pada saat yang sama pemerintah merubah cakupan menjadikan pengangguran sebagai petani kecil (melalui pembuatan Small Farms Relief of Unemployment Bill).

Pada July 2013, tunjangan pengangguran dirubah menjadi "Jobseeker Support". Dukungan ini diberikan kepada mereka yang berumur diatas 18 tahun, belum punya pekerjaan, diberhentikan, kehilangan kerja, atau tidak dapat bekerja karena sakit. Ada berbagai persyaratan untuk kualifikasi untuk mendapatkan dukungan ini, diantaranya: harus tinggal di Selandia Baru setidaknya selama dua tahun pada satu waktu sejak menjadi warga negara atau penduduk. Jika memenuhi syarat, penerima akan diberikan Kartu Layanan Masyarakat

(Community Services Card—CSC) untuk membantu biaya resep dan pengobatan dokter. Mereka yang tidak dapat bekerja karena sakit atau penyebab lain dan memiliki anak-anak yang bergantung berusia 18 tahun ke bawah, juga akan mendapatkan tambahan kredit pajak keluarga “Inland Revenue”. Pekerja yang mengalami cedera akibat kecelakaan kerja, tersedia ACC (Accident Compensation Corporation) yang dapat membayar hingga 80% dari penghasilan kena pajak yang diperoleh sebelum cedera, baik secara temporer maupun permanen. Jumlah tunjangan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kondisi penerima, akan tetapi berkisar antara \$150.01 sampai \$375.04 per minggu di tahun 2018.

Pensiun dan Tunjangan Tabungan Pensiun

Skema pensiun lansia Selandia Baru - NZ Superannuation - mendukung standar dasar hidup tertentu bagi warga negara di masa pensiun. Pensiun negara dikenal sebagai Superannuation dan dibayarkan kepada mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Manfaat khusus ini dibayarkan kepada semua warga, meskipun jika seseorang menerima pensiun dari negara lain. Pensiun khusus Veteran dibayarkan kepada mereka yang telah bertugas di angkatan bersenjata Selandia Baru, berusia 65 atau lebih dan yang sudah menerima pensiun cacat perang. Jika mereka tidak dapat bekerja karena cacat maka mereka dapat mengklaim pensiun ini di usia yang lebih muda.

Sumber dana pensiun pada dasarnya sekitar 55 persen berasal dari Dana Konsolidasi Negara. Sisanya berasal dari pajak penghasilan 5 persen baru ditambah biaya tahunan sekitar \$ 100 untuk pria di atas 20, sekitar \$ 25 untuk wanita dan remaja berusia 16-20. Pembayaran pensiun saat ini (2018) adalah sebesar \$7.778 (sekitar Rp. 71 juta) per tahun. Ada manfaat kecacatan yang dibayarkan kepada mereka yang dianggap memiliki cedera atau penyakit yang permanen dan yang akan menghentikan mereka dari bekerja. Dengan penggugat manfaat ini dapat mengklaim uang tambahan kepada majikan. Manfaat sakit dibayarkan kepada mereka yang sementara tidak dapat bekerja karena

cedera atau sakit, orangtua tunggal dan wanita yang lajang dapat merawat manfaat untuk keperluan rumah tangga. Tunjangan juga dapat dibayarkan kepada mereka yang merawat keluarga atau orang yang dicintai.

Disamping pensiunan berstandar pemerintah, terdapat juga skema untuk memastikan jenis gaya hidup yang diinginkan di masa tua, sehingga banyak penduduk Selandia Baru juga melakukan tabungan pensiun dengan skema mereka sendiri. Untuk mendorong itu, pemerintah menawarkan program '*Kiwisaver*' yang pada dasarnya, peserta dapat membayar dalam jumlah tertentu dari gaji atau gaji, yang dicocokkan oleh majikan dan diakhiri dengan tambahan bonus tahunan dari pemerintah. Uang tersebut diinvestasikan oleh 'penyedia *KiwiSaver*' yang disetujui hingga peserta memenuhi syarat untuk Super NZ pada usia 65 tahun. Peserta dapat mengakses uang lebih awal dalam keadaan tertentu - misalnya, jika sakit atau mengalami kesulitan keuangan atau jika mereka membeli rumah pertama Anda.

State Housing (Bantuan Perumahan)

Pemerintah menyediakan perumahan negara untuk mereka yang membutuhkan. Jumlah perumahan yang dibangun oleh negara bervariasi dari tahun ke tahun bergantung pada kebijakan partai pemenang pemilu. Pada umumnya perumahan tersebut disediakan untuk orang miskin dengan sewa yang sangat murah, jauh dibawah harga pasar. Manakala rumah tangga penyewa memiliki pendapatan yang memadai (dibuktikan dengan pajak yang dibayar), maka mereka harus menyewa dengan harga pasar.

Selain menyediakan perumahan sewa, pemerintah juga menyediakan skema bantuan sewa (*Accommodation Supplement*) untuk mereka yang tidak tinggal di perumahan negara. Bantuan ini diberikan untuk menyewa, membayar cicilan, atau membayar uang muka rumah bagi mereka yang memenuhi kualifikasi. Dalam beberapa kasus yang spesifik, seseorang bisa juga mendapat bantuan bantuan ini untuk membayar tagihan sewa di perumahan negara.

Child Disability Allowance (Tunjangan Anak Cacat)

Tunjangan dalam bentuk uang sebesar \$47.64 per minggu (index tahun 2018) yang diberikan kepada mereka yang memiliki atau mengasuh anak cacat serius berusia dibawah 18 tahun. Jumlah bantuan tersebut diberikan sama kepada siapapun, tidak mempertimbangkan penghasilan maupun kekayaan pengasuh. Tunjangan diberikan tiap dua minggu sebagai pengakuan pemerintah atas perhatian ekstra yang diberikan dan perhatian yang dibutuhkan untuk anak itu. Manakala sang anak telah berumur lebih dari 18 tahun, mereka dapat mengajukan tunjangan sendiri kepada pemerintah untuk mendapatkan manfaat bantuan hidup 'Supported Living Payment' secara langsung tanpa melalui orang tua/pengasuh mereka.

Orphan's / Unsupported Child's Benefit (Santunan Anak Yatim / Terlantar)

Diberikan tiap minggu (bebas pajak) kepada orang yang mengasuh anak yatim dibawah 18 tahun karena orang tuanya meninggal, tidak mampu, sakit permanen, bercerai, atau hilang. Besarnya bantuan yang diberikan per minggu bergantung pada umur anak. Pada tahun 2018, jumlah mulai dari \$149.66 (anak dibawah 5 tahun), \$173.68 (5-9 tahun), \$191.64 (10-13 tahun), dan \$209.52 (14-18 tahun). Pada minggu pertama asuhan diberikan pula establishment grant sebesar \$350. Selain mendapatkan bantuan tunai, pengasuh anak yatim juga bisa pemotongan pajak.

Sole Parent Support (Bantuan Orang Tua Tunggal)

Diberikan mingguan sebesar \$100 (kena pajak, 2018) kepada orang tua tunggal (*single parent*) yang memiliki/mengasuh anak dibawah 14 tahun. Tambahan \$20 per minggu diberikan kepada mereka yang harus membayar penitipan anak (*child care*).

Supported Living Payment (Bantuan Hidup)

Pembayaran ini diberikan mingguan untuk membantu mereka yang memiliki kondisi kesehatan buruk, sisa harapan hidup kurang dari dua tahun, buta total, cedera atau cacat, atau juga untuk mereka yang merawat orang tersebut. Perawat bisa merupakan anak, saudara, atau orang di luar keluarga, tapi tunjangan perawat tidak berlaku bagi pasangan (suami/istri). Jumlah bantuan diberikan per minggu disesuaikan dengan kriteria tertentu, berkisar antara \$217,80-\$379,19 (index tahun 2018).

Young Parent Payment dan Youth Payment

Bantuan Orang Tua Muda dan Pemuda diberikan kepada anak muda berumur 16–18 tahun yang menikah/berumahtangga dan mengasuh anak sampai umur 14 tahun. Jumlah bantuan per minggu bervariasi tergantung situasi yang ada, tapi berkisar antara \$169.17 sampai dengan \$334.05 (tahun 2018). Bantuan serupa bisa diberikan kepada anak muda yang hidup terpisah dari orang tua, atau tidak diurus/ditелantarkan oleh orang tua mereka.

10. Model Kesejahteraan Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan berbentuk kerajaan. Malaysia mulai membentuk sistem kesejahteraan sosial secara serius dan modern setelah Insiden bentrokan antar etnis pada 13 Mei pada 1969. Kebijakan Ekonomi Baru yang kontroversial disusun sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi kepada kaum pribumi / bumiputra. Kebijakan baru tersebut meliputi pelatihan kerja, perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, penambahan jumlah klinik umum, dan penyediaan skema bantuan untuk pribumi mendirikan usaha dan bisnis. Kebijakan ini dikembangkan lebih luas pada masa era tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, pada saat mana Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat akseleratif pada masa kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada masa itu terjadi lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Malaysia sejak saat itu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk secara terintegrasi.

Pemerintah memberikan akses bagi seluruh warga untuk mendapat pendidikan dari TK – SMA. Dengan kata lain, orang tua wajib untuk menyekolahkan anaknya yang umurnya berada pada masa kisaran usia tersebut. Bagi mereka yang tidak taat terhadap ketentuan

tersebut, maka dikenakan denda maksimal RM 5000 atau dihukum maksimal 6 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memberi bantuan mulai RM 100 untuk tiap pelajar SD/SMP (setara dengan Rp. 300.000) dan RM 200 untuk tiap pelajar SMA (Rp 600.000) setiap bulannya untuk membeli buku, alat tulis, tas, seragam, dan sebagainya.

Selain daripada itu, pemerintah memberikan subsidi bagi kepala rumah tangga miskin yang memiliki penghasilan di bawah RM 3000 (dibawah Rp 9 juta) sebesar RM 500 (RM 1,5 juta/bulan). Pemerintah juga terlibat langsung dalam membuat perencanaan ketenagakerjaan sehingga dapat memastikan bahwa jumlah pekerjaan selalu lebih banyak daripada jumlah pencari kerja, dengan upah minimum yang memadai. Pemerintah juga menjamin setiap orang dapat memiliki rumah sehingga tidak ada gelandangan yang tidur di jalanan.

Walaupun demikian, sistem saat ini belum dapat memberikan layanan kesejahteraan dengan cara yang stabil, setidaknya tidak setara dengan layanan yang ditawarkan di negara-negara maju. Pada saat yang sama, pengaturan negara federal di bidang kesejahteraan sosial masih cukup terbatas. Selain itu sangat penting diketahui bahwa Malaysia sangat dipengaruhi oleh kehadiran Islam yang kuat dalam sistem administrasi federal dan sistem pengumpulan dan distribusi zakat yang diformalkan, sehingga sistem kesejahteraan sosial juga terkait erat dengan tata kelola zakat, infaq dan sedekah oleh badan zakat nasional.

Sejarah Social Welfare Malaysia

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Malaysia telah ada sejak orang pertama telah menghuni negara itu. Kegiatan tersebut dilakukan murni dari sifat altruistik manusia tanpa ada sistem dan mekanisme yang terstandarisasi. Ketika masyarakat tumbuh dan menjadi lebih rumit, lebih banyak masalah sosial terjadi. Sampai beberapa dekade yang lalu, mayoritas masyarakat Malaysia tidak

pernah benar-benar mendengar istilah 'kesejahteraan sosial'. Istilah yang paling akrab adalah pekerjaan sukarela (gotong royong), yang erat dirajut dan sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan mekanisme tolong-menolong antar warga. Berdasarkan fakta historis, upaya terorganisir kesejahteraan di Semenanjung Malaya (sekarang dikenal sebagai Malaysia) telah dimulai pada akhir abad kesembilan belas. Meskipun sebagian besar program tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mendorong industri dan ekonomi Inggris, mereka tetap menguntungkan penduduk Melayu. Program-program tersebut, meskipun melayani agenda penjajah, telah meletakkan dasar program kesejahteraan modern bagi rakyat Malaysia.

Perlu diingat, sejarah Malaysia meliputi rangkaian kekuasaan kerajaan-kesultanan tradisional dan pendudukan oleh beberapa kekuatan kolonial - yaitu, Portugis dimulai pada 1511, Belanda pada 1641, Inggris 1824, dan Jepang 1941-1945. Selama periode tersebut, tidak ada dokumentasi yang benar disimpan (terutama setelah pendudukan Jepang) mengenai organisasi yang menawarkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat setempat kecuali selama pemerintahan Inggris. Seperti di banyak negara lain, bidang kerja sosial dimulai dengan pembentukan lembaga kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Jauh sebelum masa penjajahan, tradisi Melayu yang tumbuh di Malaysia telah memiliki praktek kerja publik--gotong royong yang telah menjadi bagian dari kebiasaan dan praktik masyarakat. Selama Kesultanan Negara-negara Melayu, negara memberikan kepada rakyat perlindungan, tanah untuk pertanian, dan kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal sebagai kompensasi kerja publik, termasuk pembangunan jalan, pembangunan istana, dan wajib militer selama perang; akan tetapi, situasi ini berubah selama pemerintahan Inggris (Shaffie, 2003). Inggris, melalui East India Company, mendirikan basis perdagangan Asia Tenggara pertama mereka di Pulau Penang pada tahun 1786 dan mulai memperluas pengaruh mereka di seluruh Negara-negara Melayu, dimulai dengan Perak pada tahun 1874. Tujuan

utama mereka semata-mata berdasarkan ekonomi dan keuntungan perdagangan . Negara-negara di Semenanjung Malaya dibagi menjadi tiga kelompok: Straits Settlements (Permukiman Selat Malaka, yakni Singapura), Negara-negara Melayu Terfederasi (FMS–Federated Malay States), dan Negara-negara Melayu yang tidak federasi (Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor) (Kratoska, 1997; Rudner, 1976; Shaffie, 2003).

Ketika ekonomi berkembang di Permukiman Selat Malaka, Inggris mengundang pekerja imigran, terutama dari Cina, dalam jumlah besar, yang membawa masalah sosial baru yang kompleks ke Malaysia. Kantor Kolonial kemudian menunjuk William A. Pickering pada tahun 1877 untuk memimpin Protektorat Cina di Singapura, untuk menyediakan semata-mata kesejahteraan para imigran Cina ini dan mengesampingkan penduduk pribumi. Kantor Protektorat Cina juga dibuka di Penang dan Malaka. Fungsi utama mereka termasuk mengelola pekerja pendatang baru ‘*coolie*’ (dikenal sebagai *sinkeh*), memantau perkumpulan rahasia, menyelamatkan imigran perempuan dari prostitusi, dan menangani penyakit kelamin (Lim, 2008).

Sementara itu, pada negara FMS–Federated Malay States, yang terdiri dari negara-negara Melayu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, juga mulai dibuatkan program kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Upaya kesehatan oleh pemerintah secara signifikan mengurangi tingkat kematian di negara-negara ini dan vaksinasi cacar dibuat wajib pada tahun 1891. Lembaga Patologi dibuka di Kuala Lumpur dan dinamakan Institut Penelitian Medis pada tahun 1902. Kasus malaria berkurang sangat dari 522 pada tahun 1901 menjadi 32 pada tahun 1903. Inggris membentuk tim kesehatan dipimpin Dr Malcom Watson yang lebih lanjut memperkenalkan pencegahan pembiakan nyamuk dengan menempatkan pipa di aliran dan menyemprotkan aliran tersebut dengan minyak pada tahun 1914 (Beck, 2008).

Sementara itu, pendidikan untuk rakyat Melayu juga diperluas. Pada tahun 1903, R.J. Wilkinson memperkenalkan studi sastra Melayu

menggunakan alfabet Romawi dan R.O. Winsted, direktur pendidikan antara 1924 dan 1931 menghidupkan kembali studi bahasa Melayu. Akademi Pelatihan Sultan Idris (SITC) didirikan pada tahun 1922 di Tanjong Malim di Perak untuk melatih guru-guru Melayu dalam teknik pertanian tingkat lanjutan. Pada tahun 1923 dibuat peraturan "*Labor Code*" yang mengatur bahwa perusahaan manajemen perkebunan harus memberikan pendidikan untuk anak-anak dari buruh mereka yang berumur 10 tahun atau lebih (Beck, 2008).

Namun, sebagian besar program kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan yang diterapkan di Malaya pada masa kolonial sebelum pendudukan Jepang bukanlah hasil dari penguasa kolonial yang memahami kebutuhan kaum terjajah. Sebaliknya, penerapan ide-ide dan praktik-praktik baru dalam kesehatan masyarakat berasal dari Inggris, secara implisit untuk agenda mereka sendiri. Dalam kasus British Malaya, program kesejahteraan bayi diprakarsai untuk memastikan adanya pasokan yang stabil para pekerja untuk terus mengoperasikan perkebunan dan pertambangan kolonial, seperti di Inggris program yang sama dibentuk untuk memastikan reproduksi kelas pekerja untuk memenuhi strategis dan kebutuhan militer dan tentu saja industri manufaktur yang dipasok oleh bahan baku kekaisaran dari daerah koloni (Manderson, 2002).

Pada tanggal 8 Desember 1941, sehari setelah serangan terhadap Pearl Harbor, Kekaisaran Jepang menyerbu wilayah Malaya Inggris. Banyak penduduk setempat percaya bahwa Jepang, yang mengakhiri penjajahan Inggris di Semenanjung Melayu, akan membebaskan dan memberi mereka kemerdekaan karena Jepang memproklamasikan moto "Asia untuk Asia". Akan tetapi kenyataannya, kesejahteraan penduduk setempat tidak dipertimbangkan secara serius kecuali mereka yang bermanfaat bagi ekspansi militer Kekaisaran Jepang di Asia. Kehidupan di bawah pemerintahan militer Jepang terbukti jauh lebih sulit daripada masa Inggris dan kebutuhan dasar penduduk hampir tidak terpenuhi (Kratoska, 1997).

Setelah Perang Dunia II, ketika Inggris kembali ke Malaya dan melanjutkan kontrol di bawah Pemerintahan Militer Inggris (BMA-- British Military Administration), negara itu dalam keadaan yang kacau: pengangguran tinggi, banyak penduduk kekurangan gizi, perdagangan anak, banyak korban perang, wanita penghibur, dan wabah penyakit cacar termasuk di antara masalah yang menjangkiti populasi orang Melayu, khususnya di daerah perkotaan. BMA mendirikan sebuah departemen bantuan untuk menangani masalah yang ada, tetapi kantornya tidak lebih dari kantor sedekah. Pekerjaan remedial juga terhalang oleh kurangnya sumber daya dan dengan demikian, BMA tidak dapat mengembangkan metode pelatihan yang lebih efisien dan inovatif. Program pelatihan diberikan untuk para wanita lokal oleh mantan anggota Palang Merah dan misionaris yang mengajarkan mereka pada pendidikan Barat dan cara melakukan sesuatu, lumayan efektif membantu menangani isu-isu wanita lokal, prostitusi, dan kesejahteraan anak (Harper, 2001). Pada 10 Juni 1946, Gubernur Jenderal Malaya menunjuk J.A. Harvey untuk memimpin Departemen Kesejahteraan pertama dengan bantuan Kapten Mohamed Salleh (orang lokal pertama yang ditunjuk). Peran departemen secara khusus untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan serta membantu korban perang. Mayoritas staf kesejahteraan dilatih di London School of Economics dengan keterampilan dasar di pemuda, industri, dan kesejahteraan pedesaan (Shaffie, 2003).

Ketika BMA bergeser ke administrasi sipil, banyak organisasi kesejahteraan dipimpin oleh perempuan. Dewan Kesejahteraan Malaya, sebuah organisasi untuk mendorong kegiatan sukarela, berada di bawah perlindungan Lady Mountbatten; Liga Layanan Wanita Malayan berada di bawah perlindungan Lady Gent - anggota mereka terutama orang Melayu yang mensponsori skema nutrisi dan kerja sukarela. Perempuan dari ras lain juga memainkan peran penting dalam asosiasi yang memupuk kesejahteraan perempuan di Malaya. Misalnya, Asosiasi Perempuan Ipoh dan Liga Pemuda Demokratis Penang yang membujuk ibu rumah tangga Cina untuk berhenti

membeli barang dari pasar gelap dan menjaga kesejahteraan para pelacur (Harper, 2001).

Dalam tahun-tahun awal Federasi Malaya, banyak asosiasi kerja amal dan sukarela dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di antara yang pertama adalah Malaysian Association for the Blind (MAB), didirikan pada tahun 1951 untuk menjaga kesejahteraan orang buta di negara tersebut. Pendirinya, Mayor D.R. Bridges berhasil mendirikan Layanan Penempatan Kerja di Kuala Lumpur pada tahun 1956 dan memindahkan Unit Penerbitan Braille dan Penjualan Peralatan Braille dari Kementerian Pendidikan ke MAB pada tahun 1959 (MAB, 2010).

Sistem kesejahteraan sosial Malaysia yang integratif pasca kemerdekaan dibentuk pada tahun 1969 dengan dasar Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan (Am) Sosial Pekerja 1971. Undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya badan layanan jaminan sosial (Social Security Organization—SOCSO). Badan tersebut bertugas mengumpulkan iuran dari pekerja dan memberikan bantuan kepada mereka manakala mengalami masa sulit. Sistem SOCSO ini akan tetapi, relatif berbeda dengan negara maju, karena belum sepenuhnya bersifat universal, dan tidak terkoneksi sepenuhnya dengan sistem perpajakan.

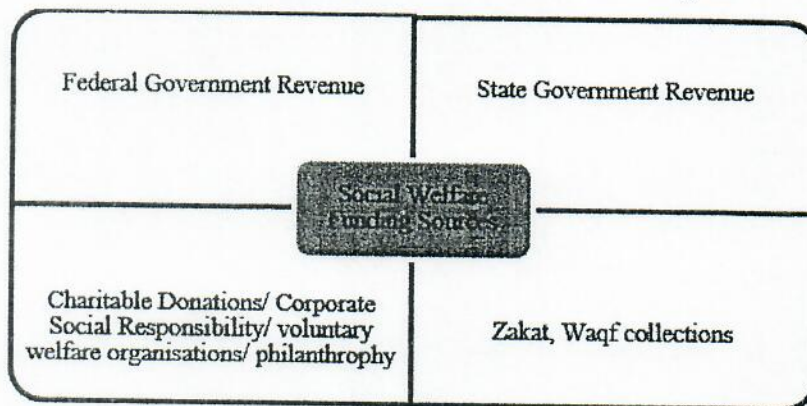
Kerangka Sistem

Sebagaimana disinggung diatas, sistem jaminan sosial Malaysia secara umum dikelola oleh SOCSO (Social Security Organization) atau dalam bahasa Melayu disebut PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial) yang berada di bawah Ministry of Human Resources (sebelumnya bernama Ministry of Labour). Berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan (Am) Sosial Pekerja 1971, PERKESO memberi jaminan perawatan perobatan gratis, kemudahan pemulihan jasmani atau vokasional serta faedah keuangan kepada

pekerja ketika mereka mengalami kehilangan penghasilan akibat kecelakaan ataupun mengidap penyakit yang menyebabkan mereka kekurangan kemampuan untuk bekerja ataupun tidak bisa bekerja lagi. Ketika pekerja meninggal dunia, ahli waris mereka diberi jaminan pendapatan dengan menerima pembayaran bulanan untuk meneruskan kehidupan. Pendek kata, sama seperti di negara lain, sistem ini adalah asuransi pekerja yang memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran rutin jika karyawan mengalami pengangguran, sakit atau kematian. Hanya saja, sistem PERKESO ini hanya dapat diakses dengan pendaftaran dan pembayaran iuran. Artinya sistem ini tidak berlaku universal bagi seluruh penduduk secara otomatis, dan tidak terkait langsung dengan sistem pajak.

Di Malaysia, Departemen Tenaga Kerja mewajibkan pemberi kerja untuk memastikan karyawan mereka terdaftar pada sistem PERKESO dan kontribusi dilakukan baik dari majikan maupun karyawan. Kontribusi dari keduanya didasarkan pada pendapatan karyawan. Namun, ada beberapa profesi tertentu dari angkatan kerja yang dibebaskan dari membayar kontribusi PERKESO karena disubsidi oleh pemerintah (federal maupun negara bagian), atau sumber lain seperti lembaga zakat, CSR, atau lembaga amal lain (lihat gambar 11.1), yakni: (1) Self-employed (Wiraswasta); (2) Business Owners (Pemilik Bisnis); (3) Foreign Workers (Pekerja asing); dan (4) Government Workers (Pekerja pemerintah).

Gambar 10.1. Komponen Social Welfare Malaysia



Sumber: Ashray (2016)

Manfaat dari perlindungan PERKESO meliputi sejumlah pembayaran bagi pekerja dalam skema tertentu, yakni:

Bantuan Medis

Peserta asuransi PERKESO dapat menerima bantuan pembayaran medis ketika sakit. Manfaat ini termasuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan/cek laboratorium, perawatan medis yang diperlukan, rawat inap, obat-obatan, kaki palsu dan peralatan prostetik lainnya, dan rehabilitasi fisik dan kemampuan kerja. Perawatan diberikan di rumah sakit pemerintah dan oleh dokter atau klinik yang di bawah kontrak dengan PERKESO.

Bantuan Cacat Sementara

Pembayaran berkala diberikan dalam kasus cacat yang diderita sebagai akibat dari cedera kerja. Jumlahnya adalah 80% dari upah harian rata-rata pekerja yang diasuransikan dalam 6 bulan sebelum kecacatan dimulai. Tertanggung harus disertifikasi oleh dokter untuk dinyatakan tidak layak untuk bekerja selama minimal 4 hari. Manfaat dibayarkan untuk periode tersebut ketika karyawan sedang cuti medis. Manfaat

harian minimum adalah 10 ringgit sedangkan maksimum adalah 78,70 ringgit.

Bantuan Cacat Tetap

Bagi pekerja yang pensiun karena mengalami kecacatan, diberikan pembayaran 90% dari upah harian rata-rata dalam 6 bulan sebelum kecacatan dimulai. Manfaat harian minimum adalah 10 ringgit, sedangkan maksimum adalah 88,50 ringgit. Sedangkan bagi yang mengalami cacat parsial, persentase pensiun dibayarkan sesuai dengan tingkat kecacatan yang dinilai. Dewan medis yang ditunjuk oleh PERKESO, berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, akan ditugaskan untuk menilai tingkat kecacatan.

Tunjangan Kehadiran Konstan

Pembayaran berkala diberikan kepada orang yang diasuransikan yang menerima manfaat cacat tetap dan tidak mampu atau dinonaktifkan karena membutuhkan kehadiran pribadi orang lain. Suplemen kehadiran konstan (cacat permanen total) diberikan: 40% dari nilai pensiun tertanggung (hingga 500 ringgit per bulan) yang dibayarkan jika tertanggung membutuhkan kehadiran orang lain secara tetap untuk melakukan fungsi sehari-hari, seperti yang dinilai oleh dewan medis Badan Keamanan Sosial.

Tunjangan Tanggungan

Pembayaran berkala diberikan kepada tanggungan (keluarga, anak, istri) orang yang diasuransikan yang meninggal sebagai akibat dari cedera kerja.

Tunjangan Pemakaman

Bantuan diberikan untuk pemakaman atau biaya atas kematian orang yang diasuransikan sebagai akibat dari cedera kerja. Bantuan hingga sebesar 1.500 ringgit (tahun 2018) dibayarkan kepada orang yang membayar untuk pemakaman atau keluarga terdekat.

Bantuan Rehabilitasi

Bantuan diberikan kepada orang yang diasuransikan ketika menderita cacat permanen untuk mendapatkan alat bantu buatan sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Medis.

Manfaat Pendidikan

Bantuan disediakan dalam bentuk pinjaman atau beasiswa untuk keluarga/tanggungan orang-orang yang diasuransikan yang menerima pembayaran berkala dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh PERKESO untuk melanjutkan studi mereka ketika mendapat persetujuan lembaga pendidikan tinggi di Malaysia.

Tunjangan penyakit akibat pekerjaan

Bantuan perawatan diberikan kepada peserta manakala menderita suatu penyakit terkait dengan pekerjaan saat bekerja atau dalam 60 bulan setelah berhenti.

11. Liberal Welfare Amerika

Program kesejahteraan sosial di Amerika Serikat adalah skema subsidi kesejahteraan yang dibiayai negara dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduk Amerika yang membutuhkan. Program kesejahteraan federal dan negara meliputi bantuan tunai, perawatan kesehatan dan medis, bantuan makanan, subsidi perumahan, subsidi energi dan utilitas, bantuan pendidikan dasar dan menengah, subsidi pendidikan perguruan tinggi, bantuan pengasuhan anak, bantuan pengangguran, pensiunan, subsidi untuk pekerja dengan upah rendah yang memenuhi syarat, serta subsidi dan bantuan untuk layanan dasar lainnya. Setiap program memiliki variasi dalam persyaratan kelayakan dan disediakan oleh berbagai organisasi di tingkat federal, negara bagian, lokal dan swasta.

Selain itu, terdapat pula pilihan skema yang bersifat pribadi dari perusahaan pemberi kerja atau inisiatif individual, baik yang diamanatkan oleh kebijakan atau secara sukarela, yang juga memberikan manfaat kesejahteraan sosial yang hampir sama. Sistem ini merupakan jaminan sosial yang dirancang sebagai proteksi keamanan sosial yang dibiayai sendiri, bukan dari negara — sehingga peserta membayar di muka (selama masa kerja) untuk penerimaan manfaat yang akan mereka terima kembali dari sistem ketika mereka tidak lagi bekerja.

Program kesejahteraan sosial didanai dari dua sumber, yakni US Treasury (APBN), dan dana perwalian Jaminan Sosial (*Social Security trust fund*). Setiap tahun, kongres federal dan negara bagian

mengalokasikan dana (hampir \$ 1 triliun di tahun 2018, sekitar 37-40% dari APBN dan anggaran negara bagian) untuk sarana program-program kesejahteraan di Amerika Serikat: separuhnya untuk perawatan medis, sisanya untuk pemberian uang tunai, persediaan makanan, bantuan perumahan, pembiayaan sekolah umum, pelatihan kerja, dan medicaid.

Sejarah dan Proses Pengembangan

Konsep kesejahteraan sosial tidak terlalu berdengung di Amerika Serikat sampai akhir abad 19. Badan legislatif kolonial (dan disusul pemerintahan negara bagian) baru mengadopsi undang-undang yang dipola sesuai dengan 'hukum miskin' (*poor laws*) Inggris pada awal abad 20. Bantuan pada masa permulaan diberikan (khususnya) untuk para veteran, seringkali dalam bentuk hibah gratis tanah, dan pemberian pensiun bagi para janda dan veteran yang cacat, dalam semua perang di AS. Setelah Perang Dunia I, ketentuan dibuat untuk sistem skala pembiayaan penuh rumah sakit dan perawatan medis bagi para veteran. Pada 1929, undang-undang kompensasi pekerja berlaku di hampir semua negara bagian. Undang-undang ini membuat pelaku industri dan bisnis bertanggung jawab atas biaya kompensasi pekerja atau karyawan mereka ketika terluka atau terbunuh dikarenakan pekerjaannya. Ada juga inisiatif program pensiun di sebagian besar pemerintah negara bagian dan lokal untuk guru, petugas polisi, dan pemadam kebakaran, akan tetapi semua program sosial ini jauh dari universal dan bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain.

Sebelum terjadi *Great Depression* (Depresi Besar) tahun 1929-1939, Amerika Serikat telah memiliki program-program sosial yang sebagian besar berpusat di sekitar upaya individu, keluarga, amal gereja, kompensasi pekerja bisnis, asuransi jiwa dan program cuti sakit bersama, dengan dana individu dan publik yang bersumber dari pajak negara yang dialokasikan untuk mendukung program sosial.

Kesengsaraan dan kemiskinan akibat dari Depresi Besar kemudian menghantui pelaksanaan semua program ini. Depresi parah pada pertengahan 1930-an mengharuskan tindakan intervensi dari pemerintah Federal, karena baik negara bagian maupun komunitas lokal, bisnis dan industri, maupun badan amal swasta tidak memiliki sumber keuangan untuk mengatasi kebutuhan yang semakin meningkat di kalangan orang Amerika.

Mulai tahun 1932, Pemerintah Federal untuk pertama kalinya memberikan pinjaman, kemudian memberikan hibah, kepada negara-negara bagian untuk membayar bantuan langsung kepada rakyat miskin dan bantuan pekerjaan dalam bentuk proyek padat karya. Setelah itu, bantuan darurat khusus dari pemerintah Federal seperti Korps Konservasi Sipil dan program pekerjaan umum padat karya lainnya dimulai. Jutaan orang terlibat dalam proyek ini sehingga mereka memiliki penghasilan. Pada tahun 1935, pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt mengusulkan kepada Kongres untuk membiayai program bantuan sosial federal yang lebih komprehensif dan program pensiun yang disponsori pemerintah federal. Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Sosial, menjadi undang-undang pada 14 Agustus 1935 dan mulai efektif diberlakukan pada tahun 1939 — tepat ketika Perang Dunia II dimulai. Selanjutnya program ini diperluas beberapa kali selama bertahun-tahun.

Pada tanggal 8 Januari 1964 Presiden Amerika Serikat saat itu, Lyndon B. Johnson, mencanangkan secara resmi "*War on Poverty*" atau "Perang terhadap Kemiskinan" ketika mengumumkan Undang-undang anti Kemiskinan yang pertama kali diperkenalkan pada saat pidato dalam rapat gabungan Kongres (State of the Union). Undang-undang ini diusulkan oleh Johnson sebagai tanggapan terhadap tingkat kemiskinan nasional yang mencapai sekitar 19% (sembilan belas persen) dari total populasi AS. Pidato tersebut selanjutnya mendorong Kongres untuk meloloskan UU Peluang Ekonomi, dan mendirikan Kantor Peluang Ekonomi (Office of Economic Opportunity—OEO) untuk mengelola aplikasi permohonan dana federal yang ditargetkan

untuk melawan kemiskinan (Weisbrod 1965). Johnson mengkonsep negara AS sebagai apa yang disebut “Great Society” untuk memperluas peran pemerintah federal dalam pendidikan dan perawatan kesehatan sebagai salah satu strategi pengurangan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan Franklin D. Roosevelt, yang berlangsung dari 1933 hingga 1941. Johnson menyatakan, *“Our aim is not only to relieve the symptom of poverty, but to cure it and, above all, to prevent it”* (Tujuan kami bukan hanya untuk meringankan gejala kemiskinan, tetapi untuk menyembuhkan dan, di atas segalanya, untuk mencegahnya) (Sheffield and Rector 2014).

Pada dekade awal setelah program Perang terhadap Kemiskinan dimulai pada tahun 1964, tingkat kemiskinan absolut⁵ di AS turun ke tingkat terendah sejak catatan komprehensif dimulai 17,3% pada tahun 1958 ketika UU Peluang Ekonomi diimplementasikan menjadi 11,1% pada tahun 1973. Sejak saat itu, prosentase kemiskinan tersebut memiliki angka stabil antara 11 sampai 15,2% (US Census Bureau 1992). Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa penurunan tajam tingkat kemiskinan sudah dimulai pada tahun 1959, 5 tahun sebelum pengenalan perang terhadap kemiskinan. Kemiskinan di antara orang Amerika antara usia 18-64 telah menurun hanya sedikit sejak 1966, dari 10,5% kemudian menjadi 10,1% hari ini. Kemiskinan telah menurun secara signifikan di kalangan orang Amerika di bawah 18 tahun dari 23% pada tahun 1964 menjadi kurang dari 17%, meskipun telah meningkat lagi menjadi 20% pada tahun 2009. Penurunan paling dramatis dalam kemiskinan adalah di kalangan orang Amerika yang berusia di atas 65 tahun, yang turun dari 28,5% pada 1966 menjadi 10,1% hari ini.

⁵ ‘Garis kemiskinan absolut’ adalah ambang bawah di mana keluarga atau individu dianggap kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat; memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.

Keberlanjutan inisiatif program “Perang terhadap Kemiskinan” tetap ada dalam keberlangsungan program-program federal sampai saat ini seperti *Head Start* (sebuah program dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang menyediakan layanan pendidikan anak usia dini di bidang kesehatan dan pemberian nutrisi yang komprehensif bagi anak-anak berpenghasilan rendah dan keluarga mereka), *Volunteers in Service to America--VISTA* (program anti-kemiskinan berbasis gerakan sukarelaan yang dibuat oleh Lyndon Johnson), *TriO* (program layanan penjangkauan mahasiswa yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menyediakan layanan bagi individu dari latar belakang yang kurang beruntung), and *Job Corps* (program yang menawarkan pendidikan gratis dan pelatihan kejuruan bagi pria dan wanita muda usia 16 hingga 24 tahun). Walaupun popularitas kebijakan “Perang terhadap Kemiskinan” berkurang setelah 1960-70an, terutama pada masa pemerintahan Ronald Reagan, akan tetapi diperkuat kembali melalui Undang-Undang Peluang Kerja tahun 1996, oleh Presiden Bill Clinton.

Pada masa Clinton, tepatnya tahun 1996, pemerintah Amerika melakukan Reformasi Sistem Kesejahteraan, dengan merubah filosofi bantuan kesejahteraan yang sebelumnya dianggap sebagai “hak terbuka”, menjadi “program terbatas yang dibangun untuk memberikan bantuan tunai jangka pendek dan mengarahkan orang dengan cepat mendapatkan pekerjaan”. Sebelum reformasi, negara-negara bagian diberi bantuan dengan “plafon tanpa batas” oleh pemerintah federal, untuk meningkatkan kesejahteraan per keluarga pada kesejahteraan, di bawah program Bantuan kepada Keluarga dibawah usia 60 tahun dengan Tanggungan Anak-anak (AFDC--Aid to Families with Dependent Children). Hal ini memberi negara bagian tidak bisa mengarahkan dana kesejahteraan kepada kelompok yang paling membutuhkan, bahkan tidak bisa mendorong individu yang mampu untuk keluar dari skema tunjangan kesejahteraan (karena negara akan kehilangan bantuan uang dari pemerintah federal ketika seseorang meninggalkan sistem). Pada masa pemerintahan Bill Clinton,

Kongres meloloskan Undang-Undang Rekonsiliasi Peluang Kerja, yang memberi lebih banyak kewenangan dan kendali kepada negara bagian atas sistem kesejahteraan, dengan persyaratan dasar yang perlu dipenuhi oleh negara-negara bagian sehubungan dengan layanan kesejahteraan. Presiden Clinton menyatakan akan “mengakhiri pola sistem kesejahteraan seperti yang pasif menjadi aktif”, artinya pemberian bantuan kepada individu akan dikaitkan dengan aktifitas tertentu agar individu tersebut dapat aktif bekerja tidak hanya menerima bantuan begitu saja. Jumlah bantuan dari pemerintah federal diberikan dalam tarif tetap per negara berdasarkan populasi, sedangkan penggunaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara bagian.

Setiap negara harus memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan penerima didorong untuk bekerja sendiri keluar dari skema kesejahteraan. Program baru ini disebut *Temporary Assistance for Needy Families* (TANF). Program ini mendorong negara-negara bagian untuk membuat semacam pencarian pekerjaan dengan imbalan menyediakan dana bagi individu, dan membebaskan batas lima tahun pada bantuan tunai. RUU tersebut membatasi kesejahteraan dari sebagian besar imigran legal dan peningkatan bantuan keuangan untuk pengasuhan anak.

Pemerintah federal juga mempertahankan dana kontingensi \$ 2 miliar untuk membantu negara-negara bagian yang mungkin mengalami peningkatan pengangguran. Setelah perubahan kebijakan ini, jutaan orang meninggalkan skema kesejahteraan (penurunan 60% secara keseluruhan), pekerjaan meningkat, dan tingkat kemiskinan anak berkurang Deparle (2009). Sebuah studi Kantor Anggaran Kongres 2007 menemukan bahwa pendapatan dalam keluarga yang terkena dampak meningkat sebesar 35% (Goodman 2008).

Sejarah singkat perkembangan program kesejahteraan di Amerika Serikat dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1880-an - 1890: Program dibuat untuk memindahkan orang miskin dari lapangan kerja ke rumah-rumah miskin jika mereka mencari dana bantuan.
- 1893–1894: Upaya dilakukan pada pembayaran pengangguran untuk pertama kali, tetapi tidak berhasil karena resesi 1893–1894.
- 1932: Terjadi *Great Depression* (Depresi Besar) yang membuat ekonomi memburuk dan upaya pertama untuk membiayai bantuan sosial gagal. Walau demikian, dibuat undang-undang “The Emergency Relief Act”, yang memberi pemerintah lokal \$ 300 juta.
- 1933: Pada Maret 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt mendorong Kongres untuk mendirikan *Civilian Conservation Corps* (CCC--Korps Konservasi Sipil) yang bertugas untuk menyediakan pekerjaan bagi pengangguran dan pemuda yang tidak/belum berkeluarga sampai umur 28 tahun dalam rangka mengatasi resesi seama masa *Great Depression*.
- 1935: Undang-undang Jaminan Sosial disahkan pada 17 Juni 1935. UU ini mengatur pemberian bantuan langsung (uang tunai, kupon makanan, dll.) dan penyediaan skema baru untuk asuransi pengangguran.
- 1940: Program Bantuan untuk Keluarga Anak-Anak dalam Tanggungan (AFDC) didirikan.
- 1964: Presiden Johnson mengumumkan perang terhadap kemiskinan, dan UU Peluang Ekonomi disahkan. Kebijakannya dikenal dengan skema “the Great Society”
- 1996: UU Tanggung Jawab Pribadi dan Undang-Undang Rekonsiliasi Peluang Kerja (*Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act*) dibuat menjadi undang-undang pada masa Presiden Clinton untuk

menolong pengangguran mendapatkan subsidi sembari mencari pekerjaan.

- 2013: Undang-Undang Keterjangkauan Perawatan (*Affordable Care Act*) dibuat dengan peningkatan besar dalam keanggotaan Medicaid dan premi asuransi kesehatan bersubsidi mulai diberlakukan.
- Presiden Donald Trump membuat kebijakan untuk lebih mengintegrasikan sistem kesejahteraan dan memberikan negara bagian agar memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan program kesejahteraan.

Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Sebagaimana negara OECD lain, Amerika menerapkan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pasar tenaga kerja dan industri untuk memastikan seluruh penduduknya dapat memperoleh pekerjaan dan pekerjaan dengan baik. Skema jenjang pendidikan dibagi tiga: elementary, secondary, dan tertiary. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan sampai umur 17-18 tahun (tergantung kebijakan negara bagian). Wajib belajar tersebut dapat ditempuh di sekolah negeri, swasta, dan *home schooling*⁶ yang disetujui. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, seluruh pemerintah negara bagian menetapkan kurikulum dan standar pendidikan universal di wilayahnya, dan sering kali mengamanatkan tes standar untuk sistem sekolah umum SD-SMA (12 tahun), dan mensupervisi biasanya melalui cewan pemerintah lokal, perguruan tinggi negeri, dan universitas.

Pada tingkat elementary, kurikulum dalam sekolah publik ditentukan oleh masing-masing distrik atau pemerintah lokal (*county*).

⁶ Setiap tahun rata-rata sebanyak 3% anak-anak usia sekolah menempuh pendidikan dengan sistem home schooling. Pada 2016, ada sekitar 1,7 juta siswa homeschool di Amerika Serikat (Anderson 2018)

Tiap distrik mempelajari dan memilih panduan kurikulum dan buku pelajaran yang disediakan oleh negara bagian, untuk mencerminkan standar pembelajaran negara dan tolok ukur untuk tingkat kelas tertentu. Standar Pembelajaran adalah tujuan di mana negara bagian dan sekolah distrik harus memenuhi kemajuan tahunan yang memadai (AYP--*Adequate Yearly Progress*) sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional *No Child Left Behind* (NCLB). Penjelasan tentang tata kelola sekolah ini sangat sederhana, yang intinya siswa tidak boleh ada yang tertinggal kelas atau tidak lulus, sehingga delivery pembelajaran juga harus bermutu baik. Semua negara bagian Amerika harus menguji siswa di sekolah umum di seluruh negara bagian untuk memastikan bahwa mereka mencapai tingkat pendidikan minimum yang diinginkan. Hal ini berarti mereka harus menunjukkan peningkatan kemampuan materi pembelajaran setiap tahun. Ketika seorang siswa gagal untuk membuat kemajuan tahunan yang memadai, NCLB mengamanatkan adanya remedi melalui sekolah musim panas atau bimbingan khusus yang disediakan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Sekolah dibebaskan dalam menyusun kurikulum dan dalam cara pengajaran / pembelajaran diselenggarakan. Guru memainkan peran penting dalam desain kurikulum dan memilih cara yang dipandang tepat dalam mengajar murid. Khusus sekolah-sekolah swasta, kurikulum tidak harus mengikuti petunjuk pemerintah, akan tetapi tetap mempertimbangkan NCLB. Pada umumnya, seorang siswa pada level elementary belajar aritmatika dasar dan aljabar dasar dalam matematika, kemampuan berbahasa Inggris (seperti tata bahasa dasar, ejaan, dan kosakata), dan dasar-dasar mata pelajaran lain seperti studi sosial, sains, perkembangan fisik, seni rupa, dan membaca.

Pendidikan menengah sering dibagi menjadi dua fase, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Siswa biasanya diberikan lebih banyak kebebasan, pindah ke ruang kelas yang berbeda untuk mata pelajaran yang berbeda, dan diizinkan untuk mengambil beberapa mata pelajaran khusus untuk kelas mereka (pilihan). Pendidikan pada tingkat menengah diarahkan untuk mengenalkan

siswa pada disiplin-disiplin ilmu yang menjadi dasar bagi profesi yang ingin mereka raih di masa depan. Banyak sekolah menengah menyediakan program Honours, Advanced Placement (AP) atau International Baccalaureate (IB). Program ini adalah bentuk-bentuk khusus kelas kehormatan di mana kurikulum lebih menantang dan pelajaran lebih agresif dibandingkan kelas standar. Pelajaran Honours, AP atau IB biasanya diambil ketika kelas 11 atau 12 dari sekolah menengah, tetapi beberapa sekolah ada yang memulai pada awal kelas 9. Kelas honour adalah program akselerasi yang bisa mempercepat kelulusan siswa, sedangkan AP dan IB adalah kelas persiapan masuk perguruan tinggi untuk memastikan siswa memperoleh kursi kuliah sebelum lulus SMA. Banyak sekolah menengah di Amerika Serikat juga menawarkan pilihan kurikulum program kejuruan yang termasuk tingkat spesialisasi teknis yang sangat tinggi, misalnya, mekanika otomatis atau pertukangan, dengan program kerja setengah hari atau beberapa hari penuh yang disetujui di setiap tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan siswa untuk mendapatkan pekerjaan tanpa gelar dan kuliah. Tingkat spesialisasi yang diberikan bervariasi tergantung pada negara bagian dan distrik tempat sekolah tersebut berada.

Untuk melengkapi pembelajaran kurikulum, setiap sekolah Amerika memberikan pelajaran ekstra kurikuler dengan prioritas utama diberikan untuk klub olahraga dan keminatan khusus yang diorganisir oleh masyarakat, orang tua, sekolah dan siswa itu sendiri tetapi di bawah pengawasan penuh pihak sekolah. Ekstrakurikuler dapat dikategorikan di bawah klub seni, budaya dan bahasa, komunitas, kepemimpinan, media, pramuka, militer, musik, seni pertunjukan, agama, permainan peran / fantasi, pidato, olahraga, teknologi, dan sukarelawan. Semua dilakukan di luar jam sekolah. Kegiatan semacam ini diberlakukan untuk memupuk kerja tim, manajemen waktu, penetapan tujuan, penemuan diri, membangun harga diri, membangun hubungan, mencari minat, dan akademisi. Kegiatan ekstrakurikuler dan klub biasanya disponsori oleh

penggalangan dana, atau dengan donasi orang tua yang memberi terhadap program agar terus berjalan. Sebagian besar negara bagian memiliki organisasi yang mengembangkan aturan untuk perlombaan antar sekolah atau klub.

Untuk menjamin semua penduduk dapat menempuh program wajib belajar, pendanaan sekolah negeri diberikan oleh anggaran pemerintah negara bagian, lokal, dan federal. Sepanjang lima tahun terakhir 2013-2018, rata-rata 42-49 % anggaran pendidikan berasal dari dana negara bagian, 30-37 % dari pemerintah daerah, dan 8-10 % dari pemerintah federal (NCES 2018). Menurut konstitusi, tanggung jawab untuk pendidikan wajib (K-12) secara umum terletak pada negara bagian. Walau demikian, karena ada kepentingan nasional dalam hal menjaga kualitas sekolah negeri Amerika, maka pemerintah federal, melalui proses legislatif, memberikan bantuan kepada negara bagian dan sekolah dalam upaya untuk melengkapi, bukan menggantikan, dukungan negara. Sumber utama dukungan K-12 dari pemerintah federal dimulai pada 1965 dengan diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (*Elementary and Secondary Education Act-ESEA*). ESEA memberikan wewenang untuk program bantuan sekolah dasar dan sekolah menengah dalam bentuk beasiswa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah; pembiayaan sumber daya perpustakaan sekolah, buku pelajaran dan bahan ajar lainnya, pusat dan layanan pendidikan tambahan; memperkuat lembaga pendidikan negara, penelitian pendidikan; dan pengembangan profesional bagi para guru. Sekolah juga diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa penyandang cacat seperti dengan memberikan fasilitas penginapan, peralatan, dan metode pembelajaran yang spesifik agar mereka kelak dapat menjadi warga negara yang mandiri. Sekolah swasta umumnya bebas untuk menentukan kurikulum dan kebijakan kepegawaian mereka sendiri, dengan akreditasi sukarela yang tersedia melalui otoritas akreditasi regional independen, meskipun beberapa peraturan negara dapat berlaku.

Setelah murid menyelesaikan pendidikan wajib (SMA), mereka bisa melanjutkan pendidikan di level tersier (perguruan tinggi). Salah satu fitur paling menarik dari sistem pendidikan tinggi AS adalah fleksibilitas yang diberikan melalui jumlah dan keragaman jenis lembaga yang diliputnya. Keragaman ini menawarkan siswa pilihan untuk mengkhususkan diri dalam berbagai disiplin ilmu akademik dan bahkan mendapatkan pelatihan kerja. Terdapat lebih dari 4.500 lembaga terakreditasi pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Tidak seperti banyak negara lain, institusi pendidikan tinggi AS tidak dikelola atau dikelola secara terpusat, tetapi diakreditasi pada tingkat nasional atau regional oleh badan akreditasi independen. Jenis perguruan tinggi meliputi akademi komunitas, college (politeknik), dan universitas. Akademi komunitas menyediakan berbagai program pelatihan cepat kerja non gelar associate dua tahun untuk mempersiapkan siswa mendapatkan keterampilan kerja untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk melanjutkan studi untuk gelar sarjana. Di banyak negara bagian, akademi komunitas dioperasikan oleh divisi suatu universitas atau oleh distrik khusus lokal yang tunduk pada bimbingan dari lembaga negara. Perguruan tinggi komunitas dapat memberikan gelar Associate of Arts (AA) atau Associate of Science (AS) setelah dua tahun. Hampir semua akademi komunitas memiliki perjanjian pendaftaran otomatis dengan college atau universitas, di mana perkuliahan selama dua tahun diakui universitas untuk melanjutkan sisa tahun belajar dua tahun berikutnya. Sehingga, college dan universitas menyelenggarakan pendidikan undergraduate total selama empat tahun. Setelah diterima dalam studi sarjana, mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan menempuh pelajaran "major" di bidang konsentrasi tertentu. Mereka juga boleh mendaftar di jurusan ganda atau "minor" di bidang studi lain.

Pembiayaan perguruan tinggi negeri disubsidi oleh pemerintah agar dapat menyediakan pendidikan berbiaya rendah bagi penduduk negara bagian tersebut. Sampai tahun 1970an, sebagian besar universitas menggratiskan biaya kuliah. Tetapi sejak 1980an, universitas mulai menarik biaya (*tuition fee*) kepada mahasiswa.

Sementara itu, sumbangan pemerintah negara bagian rata-rata mencapai 32 % dari pendapatan perguruan tinggi negeri, walaupun prosentase tersebut menurun dalam dua puluh tahun terakhir (GAO 2017). Biaya kuliah belum pernah ditetapkan secara nasional, melainkan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tunduk pada persetujuan oleh legislatif atau dewan pengawas. Walaupun tidak ada kuliah gratis di Amerika, akan tetapi pemerintah menyediakan pinjaman kuliah berbasis pajak yang bernama "American Opportunity Tax Credit" (AOTC) dan "Lifetime Learning Credit" (LLC), yakni kredit untuk pembiayaan pendidikan bagi yang memenuhi syarat untuk empat tahun pertama pendidikan tinggi. Mahasiswa bisa mendapatkan kredit tahunan maksimum \$2,500 (AOTC) dan \$2,000 (LLC) per mahasiswa yang wajib dikembalikan melalui skema pajak penghasilan kelak pada saat mereka telah bekerja.

Skema Pajak

Pajak di Amerika Serikat berkontribusi sekitar 26% terhadap GDP (tahun 2017) dan dipungut pada tingkat pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara terpisah pada masing-masing tingkat. Pajak dikenakan pada pendapatan, gaji, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perumahan dan hadiah, serta berbagai biaya lain. Pajak dikenakan pada pendapatan bersih individu dan perusahaan. Pendapatan yang dikenakan pajak ditentukan berdasarkan peraturan akuntansi pajak, bukan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua pendapatan dari sumber apa pun. Individu diizinkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan pengeluaran pribadi dan biaya non-bisnis tertentu, termasuk bunga kredit rumah, pajak negara bagian dan lokal, sumbangan amal, dan biaya medis dan pengeluaran pasti lainnya yang terjadi di atas persentase tertentu dari pendapatan. Tarif pajak penghasilan pada tingkat federal bervariasi

dari 10% hingga 39,6% dari penghasilan kena pajak. Sedangkan tarif pajak negara bagian dan lokal sangat bervariasi menurut yurisdiksi, dari 0% hingga 52,9 % pendapatan (seperti di California sejak 2013). Pajak yang dikenakan oleh negara bagian, pada umumnya diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak federal.

Pajak penggajian (*payroll tax*) dikenakan oleh pemerintah federal dan semua negara bagian. Hal ini termasuk pajak Jaminan Sosial dan Medicare yang dikenakan pada majikan dan karyawan, pada tingkat gabungan sebesar 15,3% (Tahun 2017). Pajak Jaminan Sosial hanya diberlakukan untuk pendapatan minimal \$ 106.800. Pengusaha harus menahan pajak penghasilan atas upah. Pajak pengangguran dan beberapa pungutan lainnya berlaku untuk majikan.

Pajak asuransi sosial federal dikenakan sama pada majikan dan karyawan, yang terdiri dari pajak sebesar 6,2% upah hingga maksimum upah tahunan (\$ 118.500 pada tahun 2015 untuk Jaminan Sosial ditambah pajak sebesar 1,45% dari total upah untuk Medicare. Untuk 2011, kontribusi karyawan dikurangi menjadi 4,2%, sementara porsi majikan tetap pada 6,2%. Sejauh porsi karyawan dari pajak 6,2% melebihi maksimum dengan alasan beberapa majikan (masing-masing akan mengumpulkan hingga upah tahunan maksimum), karyawan berhak atas kredit pajak yang dapat dikembalikan setelah mengajukan pengembalian pajak penghasilan untuk tahun.

Pajak properti dikenakan oleh sebagian besar pemerintah daerah dan banyak otoritas khusus berdasarkan nilai pasar properti yang adil. Pajak properti umumnya dikenakan hanya pada realty, meskipun beberapa yurisdiksi pajak dikenakan juga pada beberapa bentuk properti bisnis. Aturan dan tarif pajak properti sangat bervariasi dengan tarif rata-rata tahunan mulai dari 0,2% hingga 1,9% dari nilai properti tergantung pada ketentuan di tiap negara bagian.

Pajak penjualan (*sales tax*) dikenakan oleh sebagian besar negara bagian pada harga jual dengan penjualan eceran kebanyakan komoditas barang dan beberapa jenis jasa layanan. Tarif pajak penjualan sangat bervariasi di antara yurisdiksi, antara 0% hingga 16%,

dan dapat bervariasi dalam yurisdiksi berdasarkan barang atau jasa tertentu yang dikenakan pajak. Pajak penjualan dikumpulkan oleh penjual pada saat penjualan, atau dikirim sebagai pajak penggunaan oleh pembeli barang kena pajak yang tidak membayar pajak penjualan.

Pajak lainnya termasuk tarif atau bea masuk atas impor berbagai jenis barang dari banyak yurisdiksi. Tarif atau bea ini harus dibayar sebelum barang dapat diimpor secara legal. Tarifnya bervariasi dari 0% hingga lebih dari 20%, berdasarkan barang dan negara asal tertentu. Selain itu ada juga pajak properti dan hadiah yang diberlakukan oleh pemerintah federal dan beberapa pemerintah negara bagian atas transfer warisan berupa properti atau uang.

Kerangka Kesejahteraan

Program kesejahteraan Amerika dilaksanakan dengan dana dari pemerintah federal, sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh negara bagian yang juga menyediakan dana tambahan. Dengan sedikit pengecualian, semua penduduk legal yang bekerja di Amerika Serikat sejak 1935 memiliki nomor Jaminan Sosial perorangan (*social security number*) untuk mendapatkan manfaat jaminan kesejahteraan sosial. Kerangka utama sistem kesejahteraan Amerika bertumpu pada enam program, yang diberikan secara universal tanpa dikaitkan dengan pembayaran kontribusi, yakni:

- a) *Supplemental Security Income* (SSI--Program Keamanan Tambahan Penghasilan) yang memberikan tunjangan kepada orang-orang berpenghasilan rendah yang berusia (65 tahun atau lebih), buta, atau cacat; dan
- b) *Temporary Assistance for Needy Families* (TANF) Bantuan Sementara untuk Keluarga yang Membutuhkan yang memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak.
- c) *Health Insurance* (Jaminan atau Asuransi Kesehatan)

- d) Food Stamps (bantuan makanan),
- e) Earned Income Tax Credit (bantuan pendapatan pajak), dan
- f) Housing Assistance (Bantuan Perumahan).

Selain itu, terdapat juga program kesejahteraan yang tidak bersifat entitlement; melainkan didasarkan pada kontribusi pembayaran dari tambahan pemotongan pajak penghasilan, yakni:

- a) Retirement Insurance Benefits,
- b) Medicare,
- c) Unemployment insurance, dan
- d) Worker's compensation.

Supplemental Security Income (SSI)

Program ini adalah jaminan tambahan pendapatan yang memberikan bantuan uang tunai dan cakupan layanan kesehatan (yaitu Medicaid) kepada orang-orang dengan pendapatan rendah dan aset terbatas yang berusia 65 atau lebih tua, buta, atau cacat. (termasuk anak-anak). Program ini dikelola oleh lembaga non pemerintah yakni Social Security Administration (Administrasi Jaminan Sosial), dan didanai dari dana pemerintah US Treasury (APBN), bukan dana perwalian Jaminan Sosial (*Social Security trust fund*). SSI dibentuk pada 1974 untuk menggantikan program bantuan orang dewasa federal yang melayani tujuan yang sama, tetapi dikelola oleh lembaga negara dan menerima kritik karena tidak memenuhi kriteria kelayakan yang konsisten di seluruh Amerika Serikat. Restrukturisasi program-program ini dimaksudkan untuk menstandarisasi persyaratan kelayakan dan tingkat manfaat. Pada tahun 2018 program tersebut memberikan manfaat bagi sekitar delapan juta orang Amerika.

Pada tahun 2017, rata-rata, sekitar 8,4 juta orang menerima bantuan sekitar \$ 536 per bulan. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan SSI diantaranya adalah: 1) Berusia 65+ tahun atau buta atau cacat; 2) Menjadi penduduk di salah satu dari lima puluh negara

bagian atau anak dari orangtua militer yang ditugaskan untuk tugas tetap di luar AS, atau seorang siswa (pembatasan tertentu berlaku) sementara yang belajar di luar negeri; 3) Memiliki pendapatan dan sumber daya dalam dibawah batas-batas tertentu; dan 4) Mendaftarkan diri.

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

TANF adalah program bantuan (keuangan) sementara untuk keluarga yang membutuhkan. Kebanyakan orang menyebut program ini sebagai kesejahteraan. Tiap tahun, rata-rata, TANF memberikan penghasilan kepada 2,5 juta penerima (pada tahun 2017). Dari jumlah ini, 1,9 juta diantaranya adalah anak-anak. Rata-rata, keluarga dengan anggota tiga orang menerima \$ 429 per bulan (pada tahun 2017). Meskipun dengan bantuan ini, mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sebanyak \$ 1.702 per bulan.

Bantuan ini pernah dihapus pada masa Presiden Reagan tahun 1976, dan dihidupkan kembali oleh Presiden Clinton dengan program reformasi kesejahteraan. Dahulu, bantuan diberikan begitu saja kepada keluarga miskin, akan saat ini dipersyaratkan bahwa keluarga yang menerima TANF harus bisa mendapatkan pekerjaan dalam dua tahun. Jumlah bantuan juga dikurangi jika mereka memiliki anak lagi. Penerima bantuan juga dibatasi bagi mereka yang memiliki tidak lebih dari \$ 2.000 dalam total aset. Mereka hanya dapat menerima TANF selama maksimal lima tahun (atau kurang di beberapa negara bagian).

Jaminan Kesehatan

Atas perintah undang-undang, setiap orang yang tinggal di Amerika diwajibkan pemerintah memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Asuransi kesehatan di Amerika Serikat saat ini terutama disediakan oleh pemerintah, dengan komposisi antara 60-65% dari penyediaan layanan kesehatan dan pengeluaran untuk program seperti:

- *Medicare* (asuransi kesehatan umum bagi penduduk berusia 65 tahun ke atas, dimana peserta sebelumnya harus

membayar iuran bulanan, biasanya dipotong dari gaji minimal selama 10 tahun),

- *Medicaid* (asuransi kesehatan gratis bagi kaum miskin, yang preminya dibayar negara),
- *TRICARE* (asuransi kesehatan bagi personil militer),
- *CHIP* (*Children's Health Insurance Program*--Program Asuransi Kesehatan Anak-Anak), Program ini mencakup bantuan perawatan di rumah sakit, persediaan medis, dan tes kesehatan. Program ini juga menyediakan perawatan pencegahan, seperti pemeriksaan mata, perawatan gigi, dan pemeriksaan kesehatan rutin.
- *VHA* (*Veterans Health Administration*--Administrasi Kesehatan Veteran) yang disediakan untuk kelompok veteran sejak 1930.

Hanya sekitar 35-40% asuransi yang dioperasikan pihak swasta. Adapun perawatan kesehatan di Amerika Serikat disediakan oleh banyak badan hukum yang terpisah. Fasilitas perawatan kesehatan sebagian besar justru dimiliki dan dioperasikan oleh sektor swasta. Kecuali Medicare, peserta asuransi biasanya dapat memperoleh fasilitas layanan kesehatan secara gratis.

Food Stamps

Food Stamps adalah Program Bantuan Nutrisi Tambahan bagi penduduk dengan kriteria tertentu. Program ini memberikan voucher makanan kepada 47,6 juta orang atau 23 juta rumah tangga. Mereka menerima bantuan senilai \$ 133 per bulan rata-rata. Total biaya federal adalah \$ 79.9 milyar (2017), dimana \$ 3.8 milyar adalah administrasi. Termasuk dalam cakupan food stamps adalah program makanan tambahan untuk ibu menyusui dan anak kecil. Ada pula Program Makanan Tambahan Khusus untuk Wanita, Bayi, dan Anak-anak yang menyediakan makanan atau voucher, bantuan biaya pendidikan, dan rujukan untuk membantu memberi makan ibu hamil dan anak-anak

hingga usia enam tahun. Selain itu, ada Program Nutrisi Anak yang menyediakan makan siang gratis atau biaya rendah untuk 30 juta anak yang membutuhkan.

Earned Income Tax Credit (EITC)

Dimulai pada tahun 1974, Kredit Pendapatan Pajak Penghasilan (EITC) adalah subsidi pajak (pengembalian/restitusi pajak) untuk keluarga yang memiliki setidaknya satu anak. Untuk memenuhi syarat, mereka harus termasuk keluarga miskin hingga sedang yang berpenghasilan kurang dari \$ 51.567 setahun (di tahun 2017). Jumlah bantuan EITC tergantung pada pendapatan penerima dan jumlah anak-anak mereka (semakin sedikit anak, bantuan restitusi pajak semakin kecil). Pada tahun 2017, rata-rata bantuan lebih kurang \$ 2,450 per pembayar pajak yang dibayarkan sekali. EITC mengangkat 6,5 juta orang keluar dari kemiskinan pada 2017, dimana setengah dari mereka adalah anak-anak. EITC telah menjadi bagian dari perdebatan politik yang panjang di Amerika Serikat mengenai apakah batas upah minimum perlu dinaikkan atau meningkatkan jumlah bantuan EITC.

Housing Assistance

Program ini terdiri dari dua pilar: penyediaan perumahan bersubsidi dan subsidi pembayaran sewa atau pembelian rumah (RAD--Rental Assistance Demonstration). Pemerintah melalui Department of Housing and Urban Development, membangun atau menyediakan perumahan publik dengan harga jauh di bawah tingkat pasar, sehingga memungkinkan orang untuk tinggal di lokasi yang lebih nyaman daripada pindah jauh dari kota untuk mencari sewa yang lebih rendah. Sekarang semakin tersedia dalam berbagai pengaturan dan format kompleks perumahan, awalnya perumahan publik di AS sebagian besar terdiri dari satu atau lebih blok paket bangunan apartemen bertingkat rendah dan / atau bertingkat tinggi. Kompleks ini dioperasikan oleh otoritas perumahan negara bagian dan lokal yang diberi wewenang dan didanai oleh Department of Housing and Urban Development.

Program ini akan tetapi dikritik menyebabkan terjadinya penumpukan warga miskin dalam satu blok perumahan, sehingga menimbulkan berbagai eksese negatif seperti kriminalitas, kekerasan rumah tangga, dan peredaran narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah juga mengembangkan program RAD yang memberikan subsidi yang memungkinkan warga Amerika untuk membeli rumah atau membayar sewa pada properti yang disetujui pemerintah. Program ini juga meliputi bantuan energi (*weatherization*) untuk pembayaran listrik dan gas bagi keluarga berpendapatan rendah. Dengan demikian, warga miskin tidak harus tinggal di apartemen publik, melainkan dapat memilih sendiri properti yang disukai, sementara mereka mendapatkan subsidi untuk membeli atau menyewa tempat tinggal tersebut.

Retirement Insurance Benefits (RIB)

Tunjangan asuransi hari tua adalah bentuk pembayaran asuransi sosial yang dibuat oleh U.S. Social Security Administration yang dibayarkan kepada setiap orang (yang membayar pajak) berdasarkan pencapaian usia lanjut (62 tahun atau lebih). Pembayaran tunjangan dilakukan pada tanggal 3 setiap bulan, atau hari Rabu kedua, ketiga, atau keempat setiap bulan, berdasarkan tanggal lahir dan hak atas tunjangan lain. Ada persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum seseorang berhak atas RIB. Persyaratan ini didasarkan pada usia dan pembayaran yang dilakukan ke dalam Sistem Jaminan Sosial melalui pajak gaji, yakni:

- Sepenuhnya diasuransikan di bawah sistem Jaminan Sosial
- Telah mencapai usia 62 pada bulan pertama.
- Telah mendaftarkan diri atau telah dikonversi secara otomatis dari Manfaat Asuransi Cacat pada Usia Pensiun Penuh

Jumlah pembayaran RIB didasarkan pada beberapa faktor, termasuk: pajak penggalan jaminan sosial yang dibayarkan ke Dana Perwalian Jaminan Sosial, usia di mana manfaat diklaim, dan jumlah pendapatan yang diperoleh individu (termasuk dalam dinas militer).

Unemployment insurance

Di Amerika Serikat, terdapat 50 program asuransi pengangguran negara bagian ditambah masing-masing satu di Distrik Columbia, Puerto Riko dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Meskipun kebijakan bervariasi menurut negara bagian, tunjangan pengangguran umumnya membayar pekerja yang memenuhi syarat senilai \$ 783,00 per minggu di Massachusetts hingga terendah \$ 235 per minggu maksimum di Mississippi. Manfaat umumnya dibayar oleh pemerintah negara bagian, didanai sebagian besar oleh pajak gaji negara bagian dan federal yang dipungut terhadap majikan, kepada pekerja yang telah menjadi pengangguran bukan karena kesalahan mereka sendiri. Persyaratan kelayakan untuk asuransi pengangguran bervariasi menurut negara bagian, tetapi secara umum, karyawan yang tidak dipecat karena pelanggaran (“diakhiri karena sebab pelanggaran”) memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan pengangguran, sementara mereka yang dipecat karena pelanggaran (ini kadang-kadang dapat mencakup kesalahan yang dilakukan di luar tempat kerja, seperti posting media sosial yang bermasalah atau melakukan kejahatan) tidak berhak mendapat tunjangan pengangguran.

Di setiap negara bagian, karyawan yang berhenti dari pekerjaannya tanpa “alasan baik” tidak memenuhi syarat untuk tunjangan pengangguran, tetapi definisi dari “alasan yang baik” berbeda-beda menurut negara bagian. Di beberapa negara bagian, karyawan yang dipecat karena kesalahan secara permanen tidak menerima tunjangan pengangguran, sementara di tempat lain hanya mendiskualifikasi karyawan untuk waktu yang singkat. Standar waktu-panjang kompensasi pengangguran adalah enam bulan, meskipun perpanjangan dimungkinkan selama ada kemerosotan ekonomi. Selama masa Great Recession, tunjangan pengangguran bahkan pernah diperpanjang hingga 73 minggu.

Worker's compensation

Kompensasi pekerja adalah suatu bentuk asuransi yang menyediakan penggantian upah dan tunjangan kesehatan bagi karyawan yang terluka dalam pekerjaan sebagai imbalan atas pelepasan wajib hak karyawan untuk menuntut majikan mereka atas kesalahan pengabaian. Salah satu masalah yang diselesaikan oleh penyelesaian kompensasi adalah masalah pengusaha yang bisa menjadi pailit sebagai akibat dari kompensasi kecelakaan kerja yang tinggi. Sistem tanggung jawab bersama diciptakan untuk mencegah hal itu, dan dengan demikian menjamin keamanan kompensasi kepada para pekerja.

Di Amerika Serikat, sebagian besar karyawan yang terluka pada pekerjaan menerima perawatan medis yang responsif terhadap cedera di tempat kerja, dan, dalam beberapa kasus, pembayaran untuk mengimbangi kecacatan yang diakibatkan. Umumnya, cedera yang terjadi ketika seorang karyawan sedang bekerja, sedangkan kasus ketika berangkat atau pulang dari tempat kerja tidak memenuhi syarat untuk tunjangan kompensasi pekerja; namun, ada beberapa pengecualian jika pekerjaan tersebut harus dilakukan di beberapa lokasi.

Karena setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang kompensasi pekerja sendiri, maka persyaratan kompensasi, jumlah tunjangan yang mungkin diterima, dan durasi tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja yang terluka, bervariasi pada setiap negara bagian. Sistem kompensasi pekerja diberikan atas dasar state-by-state, dengan dewan pengatur negara mengawasi berbagai kombinasi publik / swasta dari sistem kompensasi pekerja. Nama-nama dewan yang mengatur, atau "lembaga kuasi-peradilan", bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain, dan banyak yang ditetapkan sebagai "komisi kompensasi pekerja". Di North Carolina, entitas negara yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem kompensasi pekerja disebut sebagai Komisi Industri Carolina Utara (California's State Compensation Insurance Fund). Akan tetapi, di sebagian besar negara bagian, kompensasi pekerja disediakan oleh perusahaan asuransi swasta. Sementara dua belas negara bagian yang

mengoperasikan dana negara (yang berfungsi seperti perusahaan asuransi swasta untuk menjamin karyawan negara bagian), dan segelintir negara bagian yang memiliki penyedia asuransi monopoli penuh milik negara.

12. Penutup: Prospek Indonesia

Pada saat ini terdapat beberapa program jaminan sosial di Indonesia, akan tetapi penyelenggaraan program tersebut masih sangat tidak terstruktur dan sistemik. Program masih dikelola secara segmentatif dan menjangkau sebagian kecil penduduk, khususnya pekerja pada sektor formal. Sedangkan kelompok miskin dan pekerja informal hanya menerima manfaat karitatif yang tidak permanen. Mengingat pola yang dikembangkan belum terintegrasi dalam satu sistem tata kelola yang utuh, maka pattern yang ada tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam salah satu model *welfare state* yang dikemukakan oleh Esping Andersen.

Tingginya pengangguran, rendahnya upah, banyaknya pekerja informal merupakan kendala besar dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang handal juga merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan jaminan sosial, apalagi jika dikaitkan dengan upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan secara menyeluruh (*universal coverage*). Pengelolaan cakupan jaminan sosial secara menyeluruh bagi seluruh penduduk dapat dimungkinkan jika didukung oleh data kepesertaan yang baik, terintegrasi, sehingga terhindar dari adanya duplikasi.

Padahal, sebagaimana sudah dikemukakan di muka bahwa secara demografis, kebutuhan akan pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial sudah sangat mendesak terutama jika dikaitkan dengan makin banyaknya penduduk lansia (baik secara absolut maupun relatif) di satu sisi, sementara di sisi lain dukungan kelembagaan yang ada masih masih lemah. Sistem jaminan sosial akan

dapat dikembangkan secara lebih sistemik dan permanen bila didukung oleh kemampuan ekonomis dari penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja. Karena penduduk usia kerja itulah yang berperan besar dalam memberikan kontribusi pada sistem perlindungan dan jaminan sosial. Dalam kaitan itulah maka penting dianalisis bagaimana kondisi penduduk usia ekonomis melalui dinamika ketenagakerjaan yang terjadi.

Jaminan Kesehatan Nasional

Sejak Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan dengan tujuan menjamin warga negara untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelaksanaan JKN merupakan salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT Askes (Persero). Seluruh penduduk, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat selama enam bulan di Indonesia diwajibkan untuk ikut serta di dalam program jaminan kesehatan ini. Pada tahun 2019, ditargetkan bahwa seluruh penduduk Indonesia telah masuk ke dalam sistem jaminan kesehatan (*universal coverage*).

Dalam Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019, disebutkan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2012, 63% penduduk Indonesia harus telah memiliki jaminan kesehatan dengan berbagai bentuk dan cakupannya. Peserta jaminan kesehatan di Indonesia sebelumnya dapat dikategorikan berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang mereka miliki, diantaranya mencakup peserta asuransi kesehatan PNS, peserta asuransi kesehatan TNI/POLRI, peserta

Jamkesmas (yang dijamin Kemenkes), peserta JPK Jamsostek, peserta Jamkesda (yang dijamin pemerintah daerah), peserta jaminan kesehatan perusahaan (*self insured*), dan peserta asuransi kesehatan komersial. Untuk mewujudkan *universal coverage* jaminan kesehatan pada tahun 2019, seluruh pihak yang terkait perlu melakukan usaha yang masif untuk menyertakan sisa penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk bergabung dalam JKN.

Dalam pelaksanaan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan, usaha yang strategis sudah mulai dilakukan. Mulai 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mengelola seluruh peserta jaminan kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta Askes PNS, Jaminan Kesehatan TNI/POLRI, Jamkesmas, JPK Jamsostek, dan sebagian dari peserta Jamkesda, yang berganti status menjadi peserta JKN. Peserta Jamkesmas yang terdiri dari penduduk yang tidak mampu mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, demikian pula peserta Jamkesda yang telah berintegrasi dengan JKN.

Sesuai dengan *road map* JKN, Jamkesda harus berintegrasi dengan JKN paling lambat akhir tahun 2016. Perusahaan swasta yang sebelumnya mendaftarkan pekerjanya kepada PT Jamsostek harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan sampai selambatnya akhir tahun 2015. Sedangkan pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri kapanpun hingga tahun 2019. Penegakkan hukum juga mulai dilakukan untuk peningkatan kepesertaan JKN melalui pemberlakuan sanksi administratif dan sanksi layanan publik. Melalui sanksi layanan publik, penduduk harus terdaftar sebagai peserta JKN aktif untuk dapat memperoleh layanan publik, seperti pembuatan SIM, dokumen kependudukan, dan layanan lainnya. Dengan begitu, *universal coverage* jaminan kesehatan di Indonesia diharapkan dapat tercapai pada tahun 2019.

Akan tetapi harus diingat, bahwa jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh berbagai badan penyelenggara sebelum era SJSN memiliki cakupan paket manfaat yang berbeda-beda. Terdapat sistem

jaminan kesehatan yang hanya mencakup pelayanan kuratif di fasilitas kesehatan primer, hingga jaminan kesehatan yang lebih komprehensif mencakup pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Kondisi tersebut tentunya belum memenuhi prinsip ekuitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Paket manfaat yang berbeda-beda tersebut perlu diperbaiki agar peserta jaminan kesehatan dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan sesuai kondisi medisnya.

Cakupan manfaat sistem jaminan kesehatan saat ini tergambarkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Layanan kesehatan yang harus dijamin adalah segala pelayanan yang menurut tenaga medis perlu untuk dilakukan terhadap peserta jaminan kesehatan. Manfaat yang bisa didapatkan semua peserta harus mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemeriksaan deteksi dini untuk penyakit tertentu dapat diberikan secara berkala kepada peserta yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan paket manfaat BPJS Kesehatan. Paket manfaat jaminan kesehatan tersebut haruslah memadai dan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga kepuasan peserta terjaga dan pembayaran iuran oleh peserta juga dapat rutin dipenuhi.

Senada dengan perbedaan paket manfaat, perbedaan besaran iuran juga terjadi dalam sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh berbagai badan penyelenggara sebelumnya. Hal tersebut dapat berakibat pada perbedaan cakupan dan kualitas layanan kesehatan yang dapat diperoleh peserta jaminan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, iuran jaminan kesehatan harus ditanggung secara bersama-sama oleh pemberi kerja dan penerima kerja. Bantuan iuran juga diberikan oleh pemerintah kepada penduduk yang tergolong miskin dan tidak mampu.

Iuran memang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sistem jaminan kesehatan. Besaran iuran harus cukup untuk membiayai layanan kesehatan dengan baik serta harus cukup untuk mendanai kegiatan operasional BPJS Kesehatan yang berkualitas dengan harga keekonomian yang layak. Besaran iuran harus mampu menyediakan dana cadangan untuk keperluan biaya klaim yang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, besaran iuran juga harus mampu menyediakan dana pengembangan program, riset operasional, atau pengobatan baru. Sistem iuran pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan dengan berbagai opsi kelas serta dilengkapi dengan bantuan pemerintah bagi rakyat miskin, sehingga diharapkan dapat menjadi sistem yang berkeadilan bagi tiap penduduk dengan berbagai tingkat penghasilan.

Aspek pendanaan menjadi salah satu faktor yang sangat krusial dalam sistem jaminan sosial, tak terkecuali pada bidang kesehatan. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak fiskal dari penyelenggaraan JKN justru dapat merugikan negara. Kedepan, kita tidak bisa berharap pada kesadaran penduduk untuk ikut serta dan membayar iuran secara sukarela. Pilihan semacam ini hanya menyebabkan penyelenggaraan JKN tidak dapat berkesinambungan dan membebani fiskal negara. Oleh karena itu, sebagaimana lazimnya praktek di negara maju seperti di negara-negara skandinavia dan Australia, keikutsertaan program JKN hendaknya melekat pada pembayaran pajak penghasilan. Sehingga setiap warga negara selama mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak penghasilan akan secara otomatis memiliki hak perlindungan sosial dari BPJS Kesehatan. Hal ini akan mendorong semua warga negara untuk memiliki NPWP dan membayar pajak dengan tertib.

Kemudian, dari segi pelayanan kesehatan juga perlu penertiban dan keseragaman. Penggunaan fasilitas kesehatan pada program jaminan kesehatan saat ini masih berbeda-beda antar jenis jaminan dan penyelenggara jaminan kesehatan. Terdapat program jaminan kesehatan yang hanya menggunakan fasilitas kesehatan publik, hanya

menggunakan fasilitas kesehatan swasta, atau kombinasi dari keduanya. Perbedaan juga terdapat dalam cakupan fasilitas kesehatan. Terdapat program jaminan kesehatan yang hanya mencakup fasilitas kesehatan primer, hanya mencakup fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, hingga mencakup fasilitas kesehatan rujukan nasional pada tingkat pusat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur penggunaan fasilitas kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dapat digunakan adalah fasilitas kesehatan publik atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tersebut diantaranya terdiri dari rumah sakit, dokter praktik, klinik, puskesmas, laboratorium, apotek, serta fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat kondisi keadaan darurat. Dalam hal pelayanan rawat inap di rumah sakit, kelas pelayanan yang berhak didapatkan peserta adalah sesuai dengan besaran iuran dan paket manfaat yang dipilih. Peserta jaminan kesehatan bisa saja meningkatkan kelas pelayanan yang ingin ia dapatkan melalui asuransi kesehatan tambahan atau dengan membayar selisih biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya kelas perawatan yang diinginkan.

Pembayaran biaya dan tarif dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan juga perlu diatur lebih ketat. Besaran pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan ditetapkan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs). BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu pelayanan, serta pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BPJS Kesehatan. Daftar serta harga tertinggi obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang dijamin oleh BPJS Kesehatan juga harus ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaminan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian menjadi bagian dari sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan tersebut akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan terbentuk mulai 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2015.

Sebelumnya, kepesertaan masyarakat pada program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan terbagi kedalam tiga perusahaan pengelola, yakni PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). PT Jamsostek (Persero) sebelumnya mengelola program JKK, JHT, dan JKm untuk tenaga kerja swasta, formal dan informal, secara umum. PT TASPEN mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi PNS Kemenhan Non-TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan pegawai beberapa BUMN/BUMD.

PT ASABRI mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi anggota TNI/POLRI serta PNS Kemenhan/POLRI. Dengan berlakunya sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang baru, pengalihan peserta aktif PT Jamsostek (Persero) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberi jaminan bagi tenaga kerja untuk menerima manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai, jika tenaga kerja yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit yang disebabkan karena kerja. Manfaat pelayanan yang diperoleh tenaga kerja meliputi pengobatan kuratif, promotif, serta preventif. Untuk pekerja penerima upah, iuran dari program JKK dibebankan sepenuhnya kepada pemberi kerja, dimana iuran tersebut ditetapkan sebagai persentase dari upah tenaga kerja. Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran program JKK dibayarkan

langsung oleh tenaga kerja. Program jaminan hari tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberi pembayaran dana langsung kepada pekerja pada saat memasuki usia pensiun. Pembayaran tersebut dilakukan sekaligus, dengan besaran dana yang sama dengan besaran saldo rekening yang bersangkutan. Salah satu perbedaan JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan JHT Jamsostek adalah bahwa dalam JHT BPJS Ketenagakerjaan, pada kasus pemutusan kerja atau pengangguran selama lebih dari satu bulan, saldo rekening tidak akan dibayarkan.

Sedangkan dalam hal iuran, jumlah yang dibebankan merupakan persentase dari gaji bagi pekerja penerima upah atau berupa besaran yang tetap bagi pekerja bukan penerima upah. Program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk menjamin pekerja agar dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika ia kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan penghasilan karena memasuki usia pensiun, atau mengalami kecacatan total. Manfaat dari program JP akan diterima oleh pekerja setiap bulannya dalam bentuk uang tunai setelah si pekerja memasuki usia pensiun. Iuran program JP ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, dan harus dibayarkan sepanjang periode keahliannya dari pekerja. Besaran iuran ditentukan berdasarkan persentase dari gaji atau besaran nominal tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Program JP hanya diperuntukkan bagi pekerja penerima upah, karena itu, pekerja bukan penerima upah tidak bisa mendapatkan manfaat bulanan dari program ini.

Program Jaminan Kematian (JKm) dari BPJS Ketenagakerjaan juga bertujuan untuk memberikan kompensasi bagi ahli waris dari pekerja yang meninggal baik dikarenakan pekerjaan maupun bukan dikarenakan pekerjaan. Manfaat yang diterima oleh ahli waris berupa dana tunai. Program ini diperuntukkan bagi pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Bagi pekerja penerima upah, iuran yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan persentase dari gaji,

sementara untuk pekerja bukan penerima upah, iuran yang harus dibayarkan ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu.

Dalam perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa strategi, diantaranya strategi kewilayahan dan strategi sektor usaha. Dalam strategi kewilayahan, perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan dilakukan dengan prioritas wilayah yang memiliki cakupan kepesertaan yang paling banyak. Dalam strategi sektor usaha, perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan dilakukan dengan prioritas sektor usaha yang memiliki cakupan kepesertaan paling banyak. Khusus untuk sektor usaha informal, perluasan kepesertaan akan dilakukan dengan prioritas sektor pertanian, lalu disusul sektor perdagangan, industri, dan seterusnya. Diharapkan pada tahun 2019, seluruh pekerja di Indonesia, dengan prioritas pekerja sektor formal, telah ikut serta dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Beberapa hal yang harus dicapai dari pelaksanaan sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ini diantaranya adanya penerimaan dan dukungan publik yang baik, tersedianya informasi yang seragam dan mudah diakses, tercapainya angka kepesertaan yang tinggi, serta kesinambungan finansial. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak hal harus dilakukan. Selain melalui sosialisasi regular, inovasi untuk perluasan kepesertaan harus digencarkan, misalnya dengan mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran premi, atau dengan mengaitkan kewajiban menjadi peserta jaminan sosial dengan layanan publik lainnya (listrik, air minum, atau layanan dokumen kependudukan). Kapasitas BPJS Ketenagakerjaan juga harus secara bertahap ditingkatkan agar mampu mengelola program dan dana amanah yang terkumpul dengan terpercaya, berkesinambungan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip SJSN.

Serupa dengan program JKN, program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan juga merupakan hal yang baru bagi sebagian penduduk di Indonesia. Namun Undang-Undang tidak memandatkan pemerintah untuk menyediakan bantuan iuran bagi penduduk miskin

dan rentan untuk mengakses jaminan ketenagakerjaan. Oleh karenanya usaha perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan akan lebih sulit dan bergantung pada kinerja BPJS Ketenagakerjaan serta institusi terkait jaminan sosial.

Sama halnya dengan iuran JKN, agar bersifat universal, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga harus dikaitkan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dengan contoh di Australia, kita dapat mengkategorikan kontribusi dana pensiun dalam dua jenis kontribusi: *concessional* dan *non-concessional contributions*. *Concessional contribution* (kadang-kadang disebut sebagai kontribusi "before tax--sebelum pajak") adalah kontribusi yang seseorang (seperti majikan) sebelum pengurangan pajak penghasilan dan kontribusi dapat diklaim sebagai pengurang pajak pribadi. Sementara kontribusi (juga disebut sebagai kontribusi "undeducted" atau "setelah pajak") adalah kontribusi yang dilakukan setelah pengurangan pajak.

Langkah Kedepan

Sistem perlindungan sosial seharusnya merupakan sistem yang berkelanjutan yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara melalui seperangkat instrumen publik, terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara baik disebabkan karena terhentinya, turunnya, atau tidak mencukupinya penghasilan, sakit, hamil, kecelakaan, cacat, hari tua, kematian, bencana alam maupun kerusakan sosial.

Kita tidak bisa mewujudkan suatu *welfare state* dan paham integralistik dalam pengelolaan negara apabila kita belum memiliki system keseimbangan kewajiban dan hak (*obligations and rights*) bagi warga negara yang terkelola dalam satu kesatuan yang konektif dan resiprokal. Negara harus menyediakan perangkat untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan kewajiban dengan baik, maka akan diberikan hak secara penuh. Bahkan negara juga harus

mendefinisikan secara pasti apa saja kewajiban warga negara dan apa saja hak yang akan mereka peroleh apabila melaksanakan kewajiban.

Untuk itu, sistem harus terpadu lintas sektor, dalam arti bahwa perlindungan sosial ini perlu dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar sektor baik sektor ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, keuangan, kependudukan, perindustrian, perdagangan, dan sektor terkait lainnya.

Tujuan sistem ini pada akhirnya adalah untuk mendorong sebanyak mungkin warga negara agar dapat dan mampu menjadi peserta jaminan sosial sehingga warga negara yang memperoleh bantuan sosial menjadi semakin kecil. Semakin banyak warga negara yang tercakup dalam skema jaminan sosial akan memperkecil kemungkinan warga negara tersebut dalam kategori yang memperoleh bantuan sosial. Selain itu, sistem juga dibangun untuk mempertajam berbagai bantuan sosial yang dilakukan oleh berbagai sektor agar bantuan sosial yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, terkoordinasi, efisien dan efektif.

Idealnya setiap warga negara terlindungi oleh skema perlindungan sosial sebagaimana disebutkan di atas. Setiap warga negara yang berpenghasilan diharapkan menjadi peserta jaminan sosial (apakah dalam bentuk asuransi sosial ataupun tabungan hari tua atau kedua-duanya). Penduduk yang memiliki berpenghasilan tinggi di samping menjadi peserta jaminan sosial dapat pula menjadi peserta dalam asuransi komersial yang memberikan *benefit* sesuai yang diinginkannya. Sementara penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya setelah memenuhi persyaratan tertentu (antara lain melalui *mean test*) dapat memperoleh bantuan sosial yang bersifat subsidi dari pemerintah. Dengan kerangka seperti itu diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara. Tantangan yang utama berkaitan dengan hal tersebut adalah memperluas kepesertaan di semua sektor. Selama ini pelaksanaan jaminan sosial lebih fokus pada tenaga kerja di sektor

formal baik pekerja pemerintah maupun pekerja swasta. Sementara itu, tenaga kerja di sektor informal cenderung tidak memiliki jenis kepesertaan apapun.

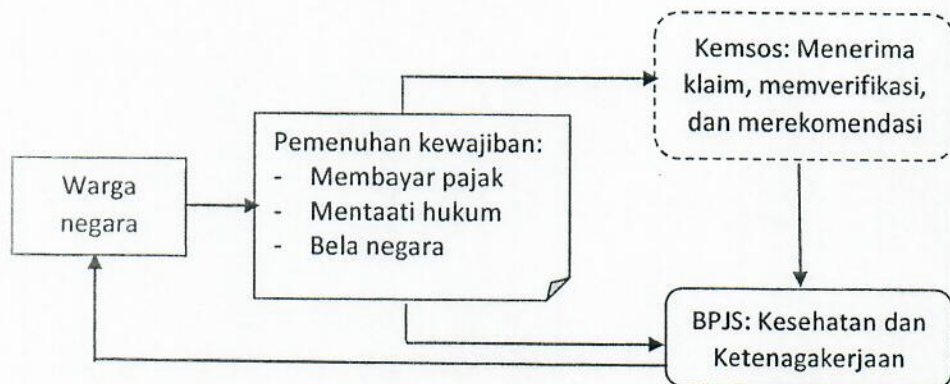
Langkah pertama yang perlu diambil untuk mengembangkan kebijakan dan strategi sistem perlindungan sosial ini adalah mereview kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan sosial selama ini. Hal-hal yang sudah dilaksanakan dengan baik terus dikembangkan, dan yang kurang perlu diperbaiki di masa mendatang. Perumusan strategi dan kebijakan yang didasarkan pada kondisi dan permasalahan sebagaimana pengalaman negara lain penting dilakukan agar kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan kedepan. Hal itu dilakukan karena pada dasarnya selama ini pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial hanya saja berbagai kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah untuk masing-masing sektor, sehingga yang perlu dilakukan adalah memetakan seluruh kegiatan yang selama ini telah dilakukan dan mengembangkannya secara lebih baik, efektif dan terkoordinasi di masa depan.

Kementerian Sosial, TN2PK, BKKBN, Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah harus memulai dan/atau merencanakan sejumlah intervensi untuk mencari cara-cara baru untuk mengintegrasikan dan meningkatkan perlindungan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi fragmentasi ekstrem program sosial, mengintegrasikan bantuan tunai dan layanan sosial dan menguji tempat rujukan satu pintu (*one-stop referral*) dan menyelaraskan model-model layanan. Perlu ada seruan yang meminta agar seluruh aktivitas bantuan sosial dipusatkan di dalam program bantuan yang harmonis.

Dalam pada itu, negara harus berfungsi sebagai "*great family/society*" bagaikan satu organisme tunggal, dimana tiap warganya harus hidup saling tolong-menolong, melaksanakan kewajiban, serta menerima hak yang ditetapkan negara secara adil. Konsep ini harus

diimplementasikan dalam rancang bangun sistem hukum dan kebijakan negara agar supaya termanifestasikan secara riil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang harus diingat, pelaksanaan kewajiban harus selalu beriringan dengan pemberian hak agar supaya warga negara tidak merasa sekedar dieksploitir oleh pemerintah. Undang-undang dan kebijakan negara harus mengatur bahwa setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban asasi dan, atas pelaksanaan kewajiban itu, negara memberikan hak yang bersifat timbal-balik (*reciprocal*) kepada warganya.

Gambar 12.1. Skema perwujudan welfare system



Sumber: diolah oleh peneliti

Sebagaimana telah diuraikan, kewajiban warga negara minimal terdiri dari tiga komponen, yakni: Pertama, membayar pajak. Prinsip ini pada intinya mengatur agar setiap warga negara yang telah berumur dewasa, tidak peduli apakah mereka itu kaya atau miskin, harus membayar pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya yang ditetapkan undang-undang. Kedua, taat hukum. Setiap warga negara harus secara sukarela mentaati segala macam peraturan hukum. Ketiga, melakukan

bela negara. Negara dapat mengatur apa saja bentuk-bentuk bela negara yang wajib dilakukan oleh rakyat.

Sebagai imbal balik dari pelaksanaan kewajiban tersebut diatas, maka negara wajib memberikan hak-hak tertentu secara eksplisit kepada warga negara. Diantara hak dasar yang wajib diberikan itu adalah mendapat perlindungan sosial (*social security*). Sebagai wujud gotong-royong, maka negara harus memfasilitasi terselenggaranya sistem “tolong-menolong” antar warga masyarakat yang sedang mengalami keadaan sulit, seperti sakit, terkena bencana, kehilangan pekerjaan, ataupun meninggal dunia.

Dalam hal pencapaian *universal coverage* dalam perlindungan sosial (baik kesehatan maupun ketenagakerjaa), kita bisa meniru pola Malaysia, dimana BPJS dapat bertindak seperti PERKESO yang memberikan berbagai skema manfaat perlindungan—termasuk penyediaan pensiun. Sedangkan iuran kepesertaan dapat berasal dari pemotongan gaji (bagi ASN, TNI, Polri dan karyawan swasta), sedangkan bagi kelompok lain (seperti kelompok tidak mampu), iuran dapat dibantu oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lembaga sosial (seperti yayasan sosial atau Badan/Lembaga Amil Zakat).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Penduduk Indonesia diamanatkan untuk memiliki suatu sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif. Sistem jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk peserta program jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan secara lebih lanjut sistem jaminan sosial yang terdiri dari program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua Undang-Undang tersebut mendasari pembentukan sistem jaminan sosial baru untuk mewujudkan cita-cita jaminan sosial yang diamanatkan oleh

konstitusi, yakni terjaminnya hak segenap bangsa Indonesia atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pemerintah perlu memanfaatkan single identity number (SIN) yang bersifat unik bagi masing-masing warga negara yang saat ini sedang dikembangkan. SIN tersebut dapat pula digunakan bagi keperluan pengelolaan jaminan sosial, sehingga lembaga pengelola dapat menggunakan SIN tersebut sebagai basis data kepesertaannya. Dengan demikian nomor kepesertaan jaminan sosial dapat paralel dengan data kependudukan secara keseluruhan sebagaimana telah dilakukan oleh berbagai negara maju yang telah menerapkan sistem serupa.

Pelaksanaan program kesejahteraan sosial pada akhirnya harus terintegrasi dengan penyelenggaraan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara luas. Termasuk diantaranya adalah:

- Pemanfaatan *single identity number* sebagai basis data kepesertaan;
- Pengkaitan jaminan sosial dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pembayaran pajak penghasilan; dan
- Perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi dalam *man power planning* (MPP). Manpower planning atau perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati profesi/pekerjaan tertentu dalam masyarakat suatu negara sesuai dengan standar kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, sistem jaminan sosial dapat menjadi mesin penggerak dan urat nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Disamping itu juga dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

ABS (2017). *Labour force, Australia*, Apr. 2017. ABS cat. no. 6202.0. Canberra: ABS.

AIHW (Australian Institute of Health and Welfare) (2017). *Australia's welfare 2017*. Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.

Allardt, Erik (1984) "Welfare production, welfare consumption, and state interventionism in the Nordic countries", *Working papers / Department of Sociology*, Helsinki: University of Helsinki.

Anderson, Karen, M. (2009) The Church as nation? Religious factors in the development of the Swedish welfare state. In, van Kersbergen, Kees and Manow, Philip (eds.) *Religion, Class Coalitions, and Welfare States*, Cambridge: Cambridge University Press.

Anderson, Melinda D. (2018-05-17). "The Radical Self-Reliance of Black Homeschooling". *The Atlantic*. [online, diambil 4/7/2018, alamat URL: <https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/05/black-homeschooling/560636/>]

Annenkov, Anatoli and Madaschi, Christophe, (2005) 'Labour Productivity in the Nordic EU Countries: A Comparative Overview and Explanatory Factors - 1998-2004 (October 2005)'. *ECB Occasional Paper No. 39*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=807412>

Ashray, F.S. (2016). Social Welfare Funding: The Unique Role of Zakat Fund in Malaysia, *Journal of Urban Management and Local Government Research*, Vol. 32(2), h. 45-53.

Barry, N. (1990) *Welfare. Milton Keynes*. Open University Press.

Beck, U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.

Block, F. and Somers, M.R. (1984) 'Beyond the Economistic Fallacy: The Holistic Social Science of Karl Polanyi', in T. Skocpol (ed.) *Vision and Method in Historical Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bock, G. and Thane, P. (eds) (1991) *Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare State, 1880s-1950s*. London: Routledge.

Bok, S. (1991) *Alva Myrdal: A Daughter's Memoir*. New York: Addison Wesley.

BPS. (Badan Pusat Statistik) (2015). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS, (2016). *Statistik Penunjang Pendidikan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2015). *Statistik Pendidikan 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS (2007) dan (2012) *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS (Badan Pusat Statistik) (2006-11) *Statistic Indonesia*, Jakarta: BPS [online, diakses 3 November 2016, alamat: <http://www.bps.go.id/>].

Bradley, D., Huber, E., Moller, S., Nielson, F. & Stephens, J. D. (2003) "Determinants of relative poverty in advanced capitalist democracies". *American Sociological Review*, Vol. 68 (3), h. 22-51.

Brenner, J. and Ramas, M. (1984) 'Rethinking Women's Oppression', *New Left Review* Vol. 144. Hal. 33-71.

Briggs, A. (1961) 'The Welfare State in historical perspective', *European Journal of Sociology*, 2: 221-58. Broberg, G. and Roll-Hansen, N. (eds) (1996) *Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland*. East Lansing: Michigan State University Press.

Broberg, G. and Tyden, M. (1996) 'Eugenics in Sweden: Efficient Care', in G. Broberg and N. Roll-Hansen (eds) (1996) *Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland*. East Lansing: Michigan State University Press.

Caldwell, J.C. (1976) 'A Restatement of Demographic Transition

- Theory', *Population and Development Review* 2(3): 321-366.
- Clarke, S. (1990) 'The Crisis of Fordism or the Crisis of Social Democracy?', *Telos* Vol. 83: 71-98.
- Danish Economic Council (1998), "Dansk Økonomi Efteråret 1998, kap. IV, Danmark som Velfærdsstat" (*Danish economy autumn 1998, chap. IV, Denmark as a Welfare state*), Det Økonomiske Råd: Copenhagen.
- Debroux, P. (2003). *Human resource management in Japan: changes and uncertainties*. Burlington, VT: Ashgate.
- DeParle, Jason (2009). "Welfare Aid Isn't Growing as Economy Drops Off". *The New York Times*. [online, diambil 23/4/2018 alamat: <https://www.nytimes.com/2009/02/02/us/02welfare.html?partner=rss&emc=rss&pagewanted=all>]
- Drost, E.A., Frayne, C.A., Lowe, K.B., & Geringer, J.M. (2002). 'Benchmarking training and development practices: a multi country comparative analysis'. *Human Resource Management*, Vol. 41(1), h. 67-86.
- Drum, Kevin (2013) "We Can Reduce Poverty If We Want To. We Just Have To Want To". *Mother Jones*. Retrieved 28 September 2013
- Durkheim, E. (1992) *Professional Ethics and Civic Morals*. London: Routledge.
- Esping-Andersen, G. (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, G. and Korpi, W. (1984) 'Social policy as class politics in post-war capitalism: Scandinavia, Austria, and Germany', in Goldthorpe, J. H. (ed.), *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*, Oxford: Clarendon Press, pp. 179-208.
- Finkel, Alvin (2006). *Social Policy and Practice in Canada: A History*. Waterloo: Wilfrid Laurier Press.
- Furniss, E. (1921) *The Position of the Laborer in a System of Nationalism: A Study in the Labor Theories of the Later English Mercantilists*. Boston and

New York: Houghton, Mifflin & Co

Garside, Juliette (2014). "Miele boss explains how his two-family business has lasted four generations". *The Guardian*. ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 2017-10-17.

Glowacki, Peggy and Julia Hendry (2004). *Images of America: Hull-House*, Charleston, SC: Arcadia Publishing.

Goodman, Peter S. (2008-04-11). "From Welfare Shift in '96, a Reminder for Clinton". *The New York Times*. [online. Diambil 28/4/2018, alamat: <https://www.nytimes.com/2008/04/11/us/politics/11welfare.html?fta=y>]

Guest, Dennis (1999). *The Emergence of Social Security in Canada*. Vancouver: UBC Press. Third edition.

Hanson, E (1980) *The Politics of Social Security: The 1938 Act and some later developments* (Auckland: Auckland University Press and Oxford University Press.

Hayek, F.A. (1944) *The Road to Serfdom*. London: George Routledge & Sons.

Hegel, G. (1952) *Philosophy of Right*. Oxford: Oxford University Press.

Heritage Foundation (2017). "2015 Macro-economic Data". [online, diakses 24 Mei 2018, alamat: <https://www.heritage.org/index/explore?view=by-variables>]

Heritage Foundation (2017), "Index of Economic Freedom", [online, diakses 24 Mei 2018, alamat: <https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/economic-freedom-by-country>]

Hernes, H.M. (1987) *Welfare State and Woman Power*. Oslo: Norwegian University Press. 2

Hirdman, Y. (1989) *Att Lägga Livet Till Rätta*. Stockholm: Carlsson.

Holliday, Ian (2016). "Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East

Asia". Political Studies. Vol. 48 (4): hal. 706–723.

Holmwood, J. (1991) 'W(h)ither welfare?', *Work, Employment and Society* 5(2): 283-304, SAGE Journals

Holmwood, J. (1996) 'Citizenship and Inequality in the "New Consumer Society"', in P. Sulkunen, J. Holmwood, G. Schulze and H. Radner (eds) *Constructing the New Consumer Society*. London: Macmillan.

Humphries, J. (1977) 'Class Struggle and the Persistence of the Working-Class Family', *Cambridge Journal of Economics* 1(3): 241-258.

Humphries, J. (1982) 'The Working-Class Family: a Marxist Perspective', in J.B. Elshtain (ed.) *The Family in Political Thought*. Brighton: Harvester Press.

Humphries, J. and Rubery, J. (1984) 'The Reconstitution of the Supply Side of the Labour Market: the Relative Autonomy of Social Reproduction', *Cambridge Journal of Economics* 8(4): 331-346.

IMF –International Monetary Foundation (2018) *GDP by Country*, online, retrived dari <http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php>

Jesson, Bruce (1980). *The Fletcher Challenge: Wealth and Power in New Zealand. Pokeno*, New Zealand: B. Jesson.

Jones, Ann (2016) "After I Lived in Norway, America Felt Backward. Here's Why". *The Nation*. January 28, 2016. [online, diakses 20 Maret 2018, URL: <https://www.thenation.com/article/after-i-lived-in-norway-america-felt-backward-heres-why/>]

Katzenstein, P. (1985) *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

King, D.S. and Hansen, R. (1998) 'Experts at Work: State Authority, Social Learning and the Sterilisation Campaign in 1930s Britain',

British Journal of Political Science 28(3).

Kloppenber, J. (1986) *Uncertain Victory: Social Democracy and Progressivism in European and American Thought*. New York: Cambridge University Press.

Korpi, W. (1983) *The Democratic Class Struggle*. London: Routledge & Kegan Paul.

Kumar, K. (1995) *From Post-Industrial to Post-Modern Society*. Oxford: Blackwell.

Land, H. (1980) 'The Family Wage', *Feminist Review* 7: 55-77.

Lee, Stephen (1996). *Weimar and Nazi Germany*. Oxford: Heinemann.

Leira, A. (1993) 'The "Woman Friendly" Welfare State?: the Case of Norway and Sweden', in J. Lewis (ed.) *Women and Social Policies in Europe: Work, Family and the State*. Aldershot: Edward Elgar.

Levine, D. (1987) *Reproducing Families: the Political Economy of English Population History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindholm, M (1992) *Elin Wägner och Alva Myrdal: En Dialog om Kvinnorna och Samhället*. Stockholm: Anamma.

Lister, R. (1990) 'Women, Economic Dependency and Citizenship', *Journal of Social Policy* 19(4): 445-467.

Miura, Mari (2012). *Welfare through Work: Conservative Ideas, Partisan Dynamics, and Social Protection in Japan (1st ed.)*. London: Cornell University Press.

Mann, M. (1987) 'Ruling-Class Strategies and Citizenship', *Sociology* 21(3): 339-355.

Marshall, T.H. (1950) 'Citizenship and Social Class', in *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University

Press. 2

McMylor, P. (1994) *Alasdair McIntyre: Critic of Modernity*. London: Routledge

Myrdal, A. (1945) *Nation and Family: the Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy*. London: Routledge & Kegan Paul.

Myrdal, A. and Klein, V. (1956) *Women's Two Roles: Home and Work*. London: Routledge & Kegan Paul.

Myrdal, G. and Myrdal, A. (1934) *Kris i Befolkningsfrågan [Crisis in the Population Question]*. Stockholm: Bonnrsers.

Nelson, Robert, H. (2017) *Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy A Different Protestant Ethic*, Aarhus: Aarhus University Press.

Notestein, F.W. (1945) 'Population: the Long View', in T.W. Schulz (ed.) *Food for Thought*. Chicago: University of Chicago Press. 2

Nussbaum, M. (1990) 'Aristotelian Social Democracy', in R.B. Douglass, G.M. Mara and H.S. Richardson (eds) *Liberalism and the Good*. London: Routledge. 2

Olsson, S.E. (1990) *Social Policy and Welfare State in Sweden*. Lund: Arkiv.

Ostner, I. (1993) 'Slow Motion: Women, Work and the Family in Germany', in J. Lewis (ed.) *Women and Social Policies in Europe: Work, Family and the State*. Aldershot: Edward Elgar.

Pakulski, J. and Waters, M. (1996) *The Death of Class*. London: Sage.

Piven, F.F. (1990) 'Ideology and the State: Women, Power and the Welfare State', in L. Gordon (ed.) *Women, the State and Welfare*. Madison: University of Wisconsin Press.

- Plant, R. (1990) 'Citizenship and Rights', in R. Plant and N. Barry, *Citizenship and Rights in Thatcher's Britain: Two Views*. London: Institute of Economic Affairs Health and Welfare Unit.
- Plant, R. (1991) *Modern Political Thought*. Oxford: Basil Blackwell.
- Polanyi, K. (1944) *The Great Transformation*. Boston, MA: Beacon Press.
- Polanyi, K. (1968) *Primitive, Archaic and Modern Economics*. Boston, MA: Beacon Press.
- Porter, B. (1975) *The Lion's Share: A short history of British imperialism, 1850-1970*, London: Longman.
- Przeworski, Adam and Michael Wallerstein (1982) 'The Structure of Class Conflict in Democratic Capitalist Societies', *The American Political Science Review*, Vol. 76, No. 2 (Jun., 1982), pp. 215-238.
- Rees, A.M. (1995) 'The Other T.H. Marshall', *Journal of Social Policy* 24(3): 341-362. ↗ [Crossref](#)
- Rein, M. and Rainwater, L. (1987) 'From Welfare State to Welfare Society', in M. Rein, G. Esping-Andersen and L. Rainwater (eds) *Stagnation and Renewal in Social Policy: The Rise and Fall of Policy Regimes*. New York: M.E. Sharpe.
- Roberts, E. (1913) *Monarchical Socialism in Germany*. London: Fisher Unwin.
- Robinson, P.A. (2003). 'The embeddedness of Japanese HRM practices: the case of recruiting'. *Human Resource Management Review*, Vol.13, h. 439-465.
- Rodrik, D. (1996) Why do More Open Economies have Bigger Governments?, *Working Paper No. 5537*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

- Sachs, Jeffrey (2015) "Prof Jeffrey Sachs' plea to the Nordic countries". Global Health Minders. November 18, 2015. [online, diakses 20 Maret 2018, URL: <http://www.globalhealthminders.dk/prof-jeffrey-sachs-plea-to-the-nordic-countries/>]
- Sakaiya, T. (2000). 'The knowledge value revolution and internet fair 2001 Japan'. Speech at OECD Forum 27 June 2000.
- Shameen F., (2018), 'Social Welfare Services in Malaysia: The Role of Government', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 191, pp. 427-436.
- Sheffield, Rachel and Rector, Robert (2014). "The War on Poverty After 50 Years". The Heritage Foundation. [online, diambil dari <https://www.heritage.org/poverty-and-inequality/report/the-war-poverty-after-50-years>]
- Smith, Jane Silloway (2010) 'Looking Back to Look Forward: How welfare in New Zealand has evolved', [online diambil 20 Juni 2018 alamat: <https://www.maxim.org.nz/looking-back-to-look-forward-how-welfare-in-new-zealand-has/>]
- Spencer, H. (1982) *Man Versus State*. Indianapolis: Liberty Classics.
- Stiglitz, Joseph E. (2001) *Prize Lecture: Information and the Change in the Paradigm in Economics*. Prize Lecture December 8, 2001, at Aula Magna, Stockholm University.
- Streeck, W. (1995) 'From Market Economy to State Building? Reflections on the Political Economy of European Social Policy', in S. Leibfried and P. Pierson (eds) *European Social Policy: Between Fragmentation and Integration*. Washington: Brookings Institute.
- Sumner, W.G. (1934) 'The Absurd Effort to Make the World Over', in A.G. Keller and M.R. Davie (eds) *Essays of William Graham Sumner*, 2 Vols. London: New Haven.

- Tilly, Richard (1967) "Germany: 1815–1870" in Rendo Cameron, ed. *Banking in the Early Stages of Industrialization: A Study in Comparative Economic History* (Oxford University Press, 1967), hal. 151-182.
- Tomlinson, J. (1990) *Hayek and the Market*. London: Macmillan.
- Thomson, D. (1998) *A World Without Welfare: New Zealand's colonial experiment*, Auckland: Auckland University Press.
- Townsend, P. (1979) *Poverty in the United Kingdom*, London, Allen Lane and Penguin Books.
- Tradingnomics (2016) *Global Competitiveness Index*, online, retrived from <http://www.tradingeconomics.com/indonesia/competitiveness-rank>
- Turner, B.S. (1990) 'Periodisation and Politics in the Postmodern', in B.S. Turner (ed.) *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: Sage.
- Walzer, M. (1988) 'Socializing the Welfare State', in A. Gutman (ed.) *Democracy and the Welfare State*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wennerberg, T. (1997) 'Sterilization and propaganda', *New Left Review* 226: 146-153.
- Weir, M., Orloff, A, Skocpol, T. (1988) 'Understanding American Social Politics', in R. Goodin and D. Mitchell (eds) *Foundations of the welfare state Vol II*, Cheltenham: An Elgar reference collection.
- Weisbrod, Burton, (ed.) (1965) *The Economics of Poverty: An American Paradox*, NY: Prentice-Hall.
- Whiteford P (2015). *The tax-transfer system, progressivity and redistribution: how progressive is the Australian transfer system? Austaxpolicy: tax and transfer policy blog*. Viewed 5 February 2018. <<http://www.austaxpolicy.com/the-tax-transfer-system-progressivity-and-redistribution-part-1-how-progressive-is-the-australian-transfer-system/>>.

WHO (World Health Organization) (1948). *Preamble to the Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO.

WHO (2001). *The world health report—mental health: New understanding, new hope*. Geneva: WHO.

Wolfe, A. (1988) *Whose Keeper? Social Science and Moral Obligation*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Van Wolferen, K (1989). *The enigma of Japanese power: People and politics in a stateless nation*. London: Macmillan.

Index

A

Aborigin, 139, 142, 159, 160, 162, 163, 275
Amerika, vi, 1, 23, 26, 29, 32, 37, 52, 58, 60, 68, 69, 72, 73, 74, 77, 137, 156, 161, 163, 167, 175, 177, 178, 193, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 275
angka partisipasi kasar, 275
APBN, 73, 221, 236, 275
arisan, 275
Asia, 4, 194, 212, 214, 263, 275
Askes, 250, 251, 275
Asuransi, v, 8, 52, 100, 101, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 156, 161, 169, 170, 171, 176, 178, 184, 188, 189, 235, 237, 238, 240, 275
Australia, v, 26, 31, 32, 37, 72, 73, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 192, 193, 253, 258, 259, 275

B

Badan Pusat Statistik, 260, 275
Bantuan, 4, 8, 90, 93, 101, 104, 106, 119, 120, 121, 144, 145, 148, 149, 151, 154, 156, 158, 160, 163, 167, 169, 171, 175, 177, 188, 190, 207, 208, 209, 218, 219, 220, 222, 225, 227, 235, 236, 237, 238, 252, 275
Beveridge Report, 275
Bismarck, 25, 30, 92, 97, 275
BPJS, 4, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 275
BPUPKI, 13, 275
Brunai Darussalam, 4, 275

Buruh, 8, 52, 105, 111, 113, 115, 127, 160, 194, 275
Buta, 275

C

Cacat, 104, 177, 208, 218, 219, 240, 275
Centerlink, 143, 146, 152, 275
child care, 78, 208, 275
China, 4, 51, 73, 275
Citizen, 275
Clinton, 225, 227, 237, 261, 275
CPI, 3, 4, 275

D

Demokrasi, 96, 275
Denmark, 21, 28, 31, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 260, 261, 275
Depresi Besar, 114, 160, 194, 222, 227, 275
Desa, 275
DPR, 275

E

Ekonomi, iv, 31, 32, 42, 43, 50, 67, 123, 210, 223, 224, 227, 275
Eropa, 23, 29, 32, 34, 52, 53, 54, 56, 58, 83, 97, 98, 118, 137, 138, 156, 157, 159, 174, 175, 192, 193, 194, 275
Esping-Andersen, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 261, 266, 275

F

Family Tax Benefit, 275
Finlandia, 21, 32, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 87, 89, 275
Full employment, 276

G

GCI, *Global Competitiveness Index*, 276
Great Society, 37, 224, 227, 276

H

HDI, 4, 276
HEC, 276
Hong Kong, 4, 276

I

Idiologi, 276
ILO, 26, 28, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 276
IMF, 2, 3, 263, 276
Inggris, v, 1, 21, 26, 27, 32, 33, 37, 38,
41, 51, 73, 77, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120, 161,
167, 175, 192, 193, 194, 212, 213,
214, 215, 222, 229, 276

J

Jamsostek, 251, 255, 256, 276
Janda, 177, 276
Jepang, v, 4, 31, 73, 137, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
212, 214, 276
Jerman, iv, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 43, 52,
56, 64, 70, 74, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
107, 108, 109, 111, 118, 174, 175,
177, 276
Johnson, 37, 223, 225, 227, 276

K

Kabupaten, 276
Kanada, v, 26, 31, 32, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 192, 276

Kemiskinan, iv, 36, 37, 38, 55, 74, 75,
223, 224, 225, 276

Kesejahteraan, i, ii, iv, v, vi, 18, 19, 36,
63, 79, 82, 100, 111, 113, 118, 128,
137, 158, 169, 176, 177, 187, 188,
191, 204, 210, 215, 225, 235, 276

Keynesian, 12, 35, 54, 114, 276

Klinik, 276

Korea Selatan, 4, 73, 276

Korupsi, iii, 60, 75, 276

L

Liberalisme, 276

LSM, 21, 126, 276

M

Mahasiswa, 116, 199, 276

Malaysia, vi, 2, 4, 16, 73, 210, 211, 212,
213, 216, 217, 218, 220, 259, 267,
276

Margaret Thatcher, 276

Medicaid, 228, 236, 238, 276

Medicare, 163, 164, 234, 236, 237, 238,
276

Modernity, 259, 265, 268, 276

N

Negara Integralistik, 276

NGO, 276

Nordik, iv, 21, 34, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 92, 276

Norwegia, 21, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 67,
68, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 89,
276

O

OECD, 31, 58, 67, 77, 123, 137, 138,
179, 228, 267, 276

P

Pajak, v, vi, 70, 71, 72, 74, 115, 116,
119, 129, 130, 131, 132, 133, 151,
152, 153, 154, 161, 164, 165, 166,
167, 170, 184, 185, 186, 202, 203,
204, 233, 234, 235, 239, 253, 276
Partai Politik, 277
PDB, 66, 69, 73, 74, 93, 97, 115, 138,
276
Pegawai, 8, 68, 103, 189, 277
Pelajar, 277
pelayanan publik, 6
Pemda, 277
Pengangguran, 40, 51, 52, 87, 100, 160,
161, 163, 197, 205, 277
Penjajahan, 277
Pensiun, 8, 36, 62, 64, 79, 80, 102, 104,
106, 127, 140, 142, 156, 163, 165,
169, 171, 187, 188, 196, 206, 240,
256, 277
Perang Dunia, 24, 26, 27, 42, 52, 61, 63,
65, 66, 97, 110, 111, 113, 114, 127,
130, 158, 159, 161, 174, 178, 195,
215, 222, 223, 277
PERKESO, 216, 217, 218, 219, 220,
277
Prosperity, 277
Provinsi, 162, 166, 173, 277

R

Revolusi Industri, 277
Ronald Reagan, 225, 277
Roosevelt, 27, 42, 223, 224, 227, 277
Rumah Sakit, 277

S

Sedekah, 277
Sekolah, 90, 107, 153, 178, 179, 198,
229, 231, 277
Selandia Baru, v, 32, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 277
Sertifikasi, 277
Singapura, 2, 4, 16, 73, 213, 277
Siswa, 118, 179, 229, 277
Skandinavia, 31, 34, 56, 60, 61, 80, 277
Skotland, 277
Social Insurance, 90, 114, 170, 189, 277
Social security, 277
SOCSO, 216, 277
Sosialisme, 277
State, i, ii, iv, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 39,
53, 56, 67, 72, 92, 112, 122, 207,
223, 242, 260, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 275, 277
Statistik, 125, 260, 277
Subsidi, 51, 87, 100, 106, 277
Superannuation, 206, 277
Swedia, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 56,
59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87,
89, 90, 175, 277

T

Taiwan, 4, 277
TASPEN, 8, 255, 277
Tax, 70, 72, 116, 119, 121, 130, 131,
132, 133, 139, 141, 151, 166, 169,
170, 233, 236, 239, 275, 276, 277
Tunjangan, 52, 87, 88, 100, 101, 105,
107, 120, 121, 142, 143, 146, 148,
150, 151, 152, 154, 156, 163, 170,
171, 184, 190, 197, 199, 204, 205,
206, 207, 208, 219, 220, 240, 277